



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat 2025-2045





KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT
dan
BUPATI ASMAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat.
4. Bupati adalah Bupati Asmat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Asmat untuk periode 20 (dua puluh).
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Papua Selatan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Asmat .
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

PASAL 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada:
 - a. RPJPN;
 - b. RPJPD Provinsi; dan
 - c. RTRW.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. penutup.
- (2) Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD sebagai pedoman penyusunan:

- a. RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati;
- b. struktur Organisasi Perangkat Daerah; dan
- c. dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, dalam hal sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam dan non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats

pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI ASMAT,

Ttd

THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats

Pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT

ttd

ABSALOM AMIYARAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN
2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT, PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR : 4-18/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, SH
PEMBINA

NIP. 19781209 201104 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 Tahun (2025-2045).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Asmat yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Pelaksanaan RPJP Daerah 2025-2045 terbagi

dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan

RPJP Daerah Kabupaten Asmat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Asmat pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Asmat sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Undang tentang RPJP Daerah Tahun 2025–2045, untuk : (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencanaan pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.

Yang dimaksud dengan "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu

kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan “waktu” adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA
SELATAN NOMOR 4

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2024 – 2045 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJPD ini disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Papua Selatan serta hasil penelahaan terhadap RTRW Kabupaten Asmat, RTRW Provinsi Papua Selatan serta RTRW Nasional.

Secara umum materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2024 – 2045 ini berisi gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan kaidah pelaksanaan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Saya sangat berharap, dokumen RPJPD ini bukan hanya berguna bagi aparaturnya pemerintah Kabupaten Asmat saja, tetapi menjadi rujukan dan pegangan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Asmat untuk bersama-sama mewujudkan visi besar selama dua puluh tahun ke depan yaitu:

“Asmat Sebagai “Center Of Excellence (CoE) Peradaban Pelestarian Budaya *Indonesia Timur*”.

Visi ini tidak mungkin terwujud jika pemerintah kabupaten tidak mendapatkan dukungan luas dari seluruh *stakeholders* di Kabupaten Asmat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah.

Saya selaku Bupati Asmat mengajak kepada semua aparaturnya daerah untuk menjadikan RPJPD ini sebagai pedoman dan arah pembangunan Jangka Panjang selama 20 Tahun yang di gunakan dalam merumuskan Visi Misi Kepala daerah untuk 4 perodesasi yang dituangkan dalam penyusunan RPJMD secara sungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen RPJPD ini kita susun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi nyata di masyarakat.

Tantangan Asmat ke depan begitu besar, kita memerlukan terobosan kreatif dan inovatif dalam melakukan akselerasi pembangunan. Semoga RPJPD ini menjadi rujukan kita untuk bekerja dan berkarya demi kesejahteraan masyarakat di kabupaten yang kita cintai bersama ini.

Sekian dan terima kasih.

Syaloom, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Agats, 19 Desember 2024



BUPATI ASMAT
THOMAS EPPE SAFANPO, ST

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM.....	3
1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA.....	5
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4.1. Maksud	8
1.4.2. Tujuan	8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	11
2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS	11
2.1.1. Aspek Geografi	11
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	30
2.1.3. TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK.....	47
2.1.4. SOSIO CULTURE OAP ASMAT	61
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	66
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	66
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	80
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	95
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	115
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.....	115

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	157
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	157
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	160
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	162
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	163
2.5. PENELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)	173
2.5.1. Telaah Rencana Struktur Ruang.....	173
2.5.2. Telaah Rencana Pola Ruang	179
2.6. RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN DAN	
PEDESAAN AGATS KABUPATEN ASMAT	183
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	227
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	227
3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	236
3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	243
3.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	256
3.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan	260
3.2. ISU STRATEGIS	266
3.2.1. Isu Staegis Global	266
3.2.2. Megatrend Dunia 2045.....	268
3.4. Isu Strategis Rencana Induk Percepatan Pembangunan	
Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041.....	275
3.5. Isu Provinsi	283
3.6. Isu Strategis Kabupaten Asmat.....	283
BAB IV VISI DAN MISI.....	287
4.1. VISI INDONESIA EMAS 2045	287
1. Tahap pertama (2025-2029) penguatan fondasi	
transformasi.....	290
2. Tahap kedua (2030-2034).....	293
3. Tahap Ketiga (2035-2039)	295

4. Tahap Keempat (2040-2045)	296
4.2. Isu dan Potensi Wilayah	303
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	315
4.3.1. Arah Kebijakan Wilayah Papua.....	316
4.3.2. Arah Kebijakan Transformasi	318
4.3.3. Arah Kebijakan Landasan Transformasi	324
4.3.4. Kerangka Implementasi Transformasi	327
4.3.5. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.....	330
4.4. Visi dan Misi Provinsi Papua Selatan.....	332
4.4.1. VISI	332
4.4.2. MISI	335
4.5. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Asmat.....	336
4.5.1. Visi Kabupaten Asmat	336
4.5.2. Misi Kabupaten Asmat.....	339
4.6. SASARAN VISI	344
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH....	352
5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	356
5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat....	372
BAB VI PENUTUP	394
6.1. Prinsip Kaidah Pelaksanaan	394

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Asmat Berdasarkan Distrik (km ²), 2024.....	13
Tabel 2. 2. Nama dan Karakteristik Sungai di Kabupaten Asmat	19
Tabel 2. 3. Nama Sungai, Panjang, Lebar Muara, Kedalaman, dan Panjang Alur dari Muara ke Ibukota Kabupaten	20
Tabel 2. 4. Luasan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Asmat.....	21
Tabel 2. 5. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Asmat.....	23
Tabel 2. 6. Klasifikasi Bentang Lahan, Penutupan Lahan dan Tipe Vegetasi di Kabupaten Asmat.....	25
Tabel 2. 7. Kelas Tutupan Lahan di Kabupaten Asmat.....	25
Tabel 2. 8. Daya Dukung Air Kabupaten Asmat Tahun 2023	28
Tabel 2. 9. Luas Panen, Luas Tanam Produksi, dan Produktivitas Padi di Kabupaten Asmat, 2020-2023.....	33
Tabel 2. 10. Luas Panen, Luas Tanam, dan Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten Asmat, 2023	33
Tabel 2. 11. Luas Lahan Panen dan Produksi Pangan Sagu tahun 2021	33
Tabel 2. 12. Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Sayuran di Kabupaten Asmat Tahun 2024	35
Tabel 2. 13. Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Buah di Kabupaten Asmat.....	36
Tabel 2. 14. Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Asmat.....	37
Tabel 2. 15. Perkembangan Jumlah Ternak di Kabupaten Asmat, 2019-2023	37
Tabel 2. 16. Perkembangan Jumlah Ternak Unggas di Kabupaten Asmat, 2021-2023.....	38
Tabel 2. 17. Luas Kawasan Hutan Menurut Paduserasi di Kabupaten Asmat, 2021	39

Tabel 2. 18 Produksi dan Nilai Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Asmat Tahun 2022	40
Tabel 2. 19 Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan ikan (Unit) 2023	41
Tabel 2. 20 Perkembangan Alat Tangkap Ikan	41
Tabel 2. 21. Perkembangan Pemasaran Antar Pulau Komoditi Olahan dan Ikan Beku (Ton)	42
Tabel 2. 22. Perkembangan Petani Ikan/Nelayan Di Kabupaten Asmat (Orang)	42
Tabel 2. 23. Lokasi Objek Wisata dan Jenis Wisata	44
Tabel 2. 24. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Asmat	45
Tabel 2. 25. Korban Bencana Alam Kab. Asmat 2020 - 2022	45
Tabel 2. 26. Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Asmat 2020-2022	49
Tabel 2. 27. Proyeksi Kependudukan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 sd 2045.....	50
Tabel 2. 28. Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km2 Menurut Distrik, 2020-2022.....	51
Tabel 2. 29. Penduduk Kabupaten Asmat menurut kelompok umur, 2023	52
Tabel 2. 30. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Asmat Sampai dengan Tahun 2045 berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 2. 31. Proyeksi Kebutuhan rumah/tempat tinggal dan permukiman	53
Tabel 2. 32. Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik Tahun 2025-2045.....	53
Tabel 2. 33. Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasana Sekolah SD, SMP, SMA Dan SMK Sampai Dengan Tahun 2045	53
Tabel 2. 34. Proyeksi Kebutuhan Saprass Pemberdayaan Masyarakat.....	54
Tabel 2. 35. Proyeksi Kebutuhan Saprass Kesehatan	55
Tabel 2. 36. Proyeksi Kebutuhan Saprass Persampahan.....	56
Tabel 2. 37. Wilayah adat Rumpun dan Suku dalam Administrasi Distrik di Kabupaten Asmat	57
Tabel 2. 38. Jumlah Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tahun 2022	61

Tabel 2. 39. Perkembangan Persentase Penduduk yang telah Memiliki Dokumen Akte Kelahiran Tahun 2020-2022	61
Tabel 2. 40. Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Asmat Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023 (persen)	68
Tabel 2. 41. PDRB Kabupaten Asmat ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d. 2023 (dalam juta rupiah).....	69
Tabel 2. 42. Nilai Deflasi Sektoral di Kabupaten Asmat, Tahun 2019-2023	70
Tabel 2. 43. Nilai Inflasi Sektoral di Kabupaten Asmat, tahun 2019 – 2023 (Persen).....	71
Tabel 2. 44. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asmat, 2018-2022 (persen)	73
Tabel 2. 45. Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf	80
Tabel 2. 46. Angka RLS Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Sekitar serta Provinsi Papua Selatan, 2018-2022.....	83
Tabel 2. 47. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2018-2023	84
Tabel 2. 48. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2022	84
Tabel 2. 49. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Asmat, Tahun 2022	85
Tabel 2. 50. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Asmat, 2016-2023	86
Tabel 2. 51. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Asmat, 2019-2023	87
Tabel 2. 52. IPM Kabupaten Asmat, Tahun 2017 sd 2023	93
Tabel 2. 53. Persentase Pertumbuhan IPM dan Rangking Menurut Kab/kota, 2017-2023	93
Tabel 2. 54. Perkembangan Indikator Seni dan Budaya di Kabupaten Asmat, 2020-2023	97
Tabel 2. 55. Beberapa Bentuk Nilai Kearifan lokal Suku Asmat.....	107
Tabel 2. 56. Angka Partisipasi Sekolah (Aps).....	116
Tabel 2. 57. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Distrik, 2024	119

Tabel 2. 58. Jumlah Sekolah Berdasarkan Status Negeri / Swasta Menurut Tingkat Pendidikan Dan Distrik, 2024	119
Tabel 2. 59. Jumlah Murid Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2020	120
Tabel 2. 60. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Asmat, 2020 (persen)	121
Tabel 2. 61. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan Menurut Distrik, 2022	125
Tabel 2. 62. Perkembangan Indikator Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Asmat, 2016-2023	126
Tabel 2. 63. Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Distrik, 2020	128
Tabel 2. 64. Gambaran Umum Komunikasi dan Informatika	134
Tabel 2. 65. Gambaran Umum Pendataan Statistik dan Persandian	135
Tabel 2. 66. Jumlah Klinik KB di Kabupaten Asmat, 2024	138
Tabel 2. 67. Jumlah Akseptor Baru Menurut Distrik dan Alat Kontrasepsi, 2023	141
Tabel 2. 68. Jumlah PUS dan Akseptor Aktif Menurut Distrik, 2020	142
Tabel 2. 69. Jumlah PUS yang tidak ber-KB	143
Tabel 2. 70. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penderita Cacat 2023	144
Tabel 2. 71. Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Distrik	145
Tabel 2. 72. Data Komunitas Adat Terpencil (KAT) Berdasarkan Dari Dinas Sosial Kabupaten Asmat Tahun 2023	146
Tabel 2. 73. Banyaknya Panti Asuhan/Asrama, Kapasitas Asuh Menurut Distrik	146
Tabel 2. 74. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut Usia (LANSIA) Menurut Distrik	147
Tabel 2. 75. Jumlah Wanita Tuna Susila atau PSK	147
Tabel 2. 76. Korban Penyalahgunaan Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)	148
Tabel 2. 77. Bantuan Perumahan Untuk Masyarakat KAT yang Sudah Terlayani	149

Tabel 2. 78. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	149
Tabel 2. 79. Tenaga Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	150
Tabel 2. 80. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Tagana dan Kampung Siaga Bencana).....	151
Tabel 2. 81. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Distrik, 2023	152
Tabel 2. 82. Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Asmat, 2016-2020	155
Tabel 2. 83. Perkembangan Jumlah dan Anggota Koperasi, 2019-2020	156
Tabel 2. 84. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Asmat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2019- 2023	158
Tabel 2. 85. Sarana Transportasi, panjang jaringan jalan, jmlah penggunaan jasa transportasi laut Pengguna jasa transportasi udara Tahun 2018-2020.....	161
Tabel 2. 86. Angka Kriminalitas dan Jumlah Parkara Pidana di Kabupaten Asmat Tahun 2020	162
Tabel 2. 87. Jumlah Operasi Miras Diselesaikan Menurut Bulan, 2020	163
Tabel 2. 88. Jumlah Operasi Prostitusi Diselesaikan Menurut Bulan, 2020	163
Tabel 2. 89. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Asmat, 2023	164
Tabel 2. 90. Jumlah PNS Otonom di Kabupaten Asmat Menurut Golongan Kepangkatan	166
Tabel 2. 91. Jumlah PNS Otonom di Kabupaten Asmat Menurut Jenis Kelamin 2020	167
Tabel 2. 92. Jumlah PNS Otonom Tenaga Kesehatan di Kabupaten Asmat.....	167
Tabel 2. 93. Jumlah PNS di Kabupaten Asmat Berdasarkan Suku	167
Tabel 2. 94. Jumlah Pembangunan Kantor Kampung Wilayah Kabupaten Asmat.....	167
Tabel 2. 95. Jumlah Rumah Jabatan Kepala Kampung Wilayah Kabupaten Asmat	168
Tabel 2. 96. Jumlah Pasar Tradisional Mama-Mama Kampung Wilayah Kabupaten Asmat	169

Tabel 2. 97. Jumlah Pemelihan Kepala kampung Secara Demokrasi Wilayah Kabupaten Asmat	170
Tabel 2. 98. Jumlah Pemelihan Kepala kampung Secara Aklamasi Wilayah Kabupaten Asmat	171
Tabel 2. 99 Jumlah Perencanaan Partispasi Kampung Wilayah Kabupaten Asmat.....	172
Tabel 2. 100. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Asmat Tahun 2012- 2032	174
Tabel 2. 101. INDIKASI PROGRAM PEMANFATAN RUANG PRIORITAS	186
Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan.....	236
Tabel 3. 2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan	238
Tabel 3. 3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	239
Tabel 3. 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	240
Tabel 3. 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	241
Tabel 3. 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial	242
Tabel 3. 7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja	244
Tabel 3. 8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	244
Tabel 3. 9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan	246

Tabel 3. 10. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup.....	246
Tabel 3. 11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	247
Tabel 3. 12. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	248
Tabel 3. 13. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	249
Tabel 3. 14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan	249
Tabel 3. 15. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	250
Tabel 3. 16. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	251
Tabel 3. 17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal	252
Tabel 3. 18. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	252
Tabel 3. 19. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik	254
Tabel 3. 20. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan.....	254
Tabel 3. 21. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan	255
Tabel 3. 22. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan	256
Tabel 3. 23. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perikanan	257
Tabel 3. 24. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata	257

Tabel 3. 25. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian	258
Tabel 3. 26. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan.....	259
Tabel 3. 27. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian.....	260
Tabel 3. 28. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.....	261
Tabel 3. 29. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan	262
Tabel 3. 30. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian	263
Tabel 3. 31. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan.....	264
Tabel 3. 32. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesekretariatan	265
Tabel 4. 1. Pembangunan Wilayah Papua.....	305
Tabel 4. 2. Indikator Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana	315
Tabel 4. 3. Penyelarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	347
Tabel 4. 4. Penyelarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat dan RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025- 2045	348
Tabel 5. 1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Transformasi Sosial	356
Tabel 5. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Transformasi Ekonomi.....	360
Tabel 5. 3. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Transformasi Tata Kelola	363
Tabel 5. 4. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Kemanan daerah tangguh demokrasi.....	365

Tabel 5. 5. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	365
Tabel 5. 6. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	366
Tabel 5. 7. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Implementasi Transformasi.....	368
Tabel 5. 8. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Implementasi Transformasi.....	370
Tabel 5. 9. Pemetaan arah kebijakan dan sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045	373

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	6
Gambar 2. 1. Wilayah Administratif Kabupaten Asmat	12
Gambar 2. 2. Batas Administrasi Kabupaten Asmat Tahun 2022	15
Gambar 2. 3. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Asmat.....	16
Gambar 2. 4. Peta Bentang Lahan Kabupaten Asmat	17
Gambar 2. 5. Peta Aliran Sungai Kabupaten Asmat	20
Gambar 2. 6. Kawasan Hutan Kabupaten Asmat SK 6632	23
Gambar 2. 7. Penutupan Lahan Kabupaten Asmat.....	26
Gambar 2. 8. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Asmat, 2021	27
Gambar 2. 9. Peta Indeks Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten Asmat	28
Gambar 2. 10. Peta Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Asmat.....	32
Gambar 2. 11. Potensi Kebencanaan Multirisk Kabupaten Asmat Tahun 2021	46
Gambar 2. 12. Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Asmat 2020-2022 dengan Provinsi Papua Selatan 2021-2025.....	49
Gambar 2. 13. Perkembangan Cakupan Pendataan OAP dan non-OAP di Asmat Dalam SIO Papua (update: 18 April 2023)	60
Gambar 2. 14. Komposisi OAP di Kabupaten Asmat, Dukcapil 2021	60
Gambar 2. 15. Tradisi membangun rumah Jew	62
Gambar 2. 16. Model Rumah Tysem dan rumah Pohon Korowai	64
Gambar 2. 17. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Asmat.....	67
Gambar 2. 18. Struktur Perekonomian Kabupaten Asmat Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier, 2016-2020 (Persen).....	75
Gambar 2. 19. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Asmat Tahun 2018- 2023	76
Gambar 2. 20. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Asmat, 2016-2023 (persen)	78
Gambar 2. 21. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Asmat 2016-2023	78

Gambar 2. 22. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Asmat 2016-2023	78
Gambar 2. 23. Garis Kemiskinan Di Kabupaten Asmat 2016-2023	79
Gambar 2. 24. Persentase Penduduk Melek dan Buta Huruf di Kabupaten Asmat	81
Gambar 2. 25. Angka Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Asmat, Tahun 2018-2022	82
Gambar 2. 26. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2016-2020	84
Gambar 2. 27. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2022.....	86
Gambar 2. 28. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Asmat, 2018-2023	88
Gambar 2. 29 Perkembangan AHH Kabupaten Asmat (tahun), 2017-2023	89
Gambar 2. 30. Prevalensi Stunting pada Balita di Kabupaten Asmat	92
Gambar 2. 31. Persentase Penderita Cacat di Kabupaten Asmat, 2020	95
Gambar 2. 32. Peta Tempat penting suku Asmat	109
Gambar 2. 33. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Asmat, 2016-2021	117
Gambar 2. 34. Jumlah Sekolah dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan 2020.....	118
Gambar 2. 35. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Asmat, 2020 (persen)	121
Gambar 2. 36. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang	122
Gambar 2. 37. Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Asmat, 2016-2023	130
Gambar 2. 38 Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan, 2024	130
Gambar 2. 39. Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan, 2024	131
Gambar 2. 40. Persentase Penduduk berakses air minum di Kabupaten Asmat, 2020	132
Gambar 2. 41. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air minum yang Digunakan di Kabupaten Asmat, 2020	132
Gambar 2. 42. Persentase Penduduk dengan Perumahan yang Layak, 2018- 2020	133
Gambar 2. 43. Jumlah Penumpang Transportasi Sungai di Kabupaten Asmat, 2017-2020	134

Gambar 2. 44. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Asmat, 2019- 2023	137
Gambar 2. 45. Laju Pertumbuhan Penduduk, 2023.....	137
Gambar 2. 46. Perkembangan Persentase Penduduk yang telah Memiliki Dokumen Kependudukan Secara Lengkap, 2020-2024	138
Gambar 2. 47. Rasio Akseptor KB	139
Gambar 2. 48. Perkembangan Jumlah Akseptor Aktif di Kabupaten Asmat, 2023	139
Gambar 2. 49. Persentase Akseptor Aktif Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi, 2023	140
Gambar 2. 50. Persentase Cakupan KAT dan PMKS yang telah Terlayani, 2016-2021	144
Gambar 2. 51. Persentase Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut, 2020	152
Gambar 2. 52. Jumlah dan Anggota Koperasi Menurut Jenis, 2020	157
Gambar 2. 53. Grafik Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Asmat Tahun 2017-2023	160
Gambar 2. 54. Peta Wilayah Perencanaan dan Pembagian WF Kawasan Perkotaan/Pedesaan Agats kabupaten Asmat	184
Gambar 2. 55. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2018- 2022	225
Gambar 2. 56. Grafik PAD Kabupaten Asmat Tahun 2018-2022.....	226
Gambar 3. 1. Sarana Transportasi, panjang jaringan jalan, jmlah penggunaan jasa transportasi laut Pengguna jasa transpotrasi udara Tahun 2018-2020.....	233
Gambar 3. 2. Penduduk Miskin Asmat Tahun 2018-2023	235
Gambar 4. 1. Tahapan Transformasi Sosial	300
Gambar 4. 2. Tahapan Transformasi Ekonomi.....	300
Gambar 4. 3. Tahapan Transformasi Tata Kelola	301
Gambar 4. 4. Tahapan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia.....	301
Gambar 4. 5. Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	302
Gambar 4. 6. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas	302

Gambar 4. 7. Peta Potensi Wilayah Papua	303
Gambar 4. 8. Transformasi Sosial Menuju Papua Sehat dan Cerdas Wilayah Papua.....	320

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Asmat disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) kurun waktu 20 Tahun; rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kurun waktu 5 Tahun; dan rencana pembangunan tahunan (RKPD) kurun waktu 1 tahunan. Dimana sesuai pasal 5 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana yang dimaksud adalah RPJPD (20 Tahunan) dimana sesuai pasal 263 ayat 2 bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Undang-undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, merupakan acuan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB) khususnya di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Pemekaran wilayah di Provinsi Papua dilakukan atas aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli

Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Kondisi ini mengakibatkan adanya penyesuaian/perubahan Peta Wilayah, dimana kondisi ini sangat penting dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 mengingat dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dokumen yang wajib di pedomani dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Pemerintah Kabupaten Asmat merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan Tahapan dan sistematika sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu pendekatan proses dilakukan dengan 4 pendekatan yaitu; **pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top-Down Planning**. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 menggunakan pendekatan **holistik-tematik**, yaitu dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan **integratif**, dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan **spasial**, yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kondisi actual saat ini, Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat periode 2005-2025 akan berakhir masa berlakunya, dimana sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1 bahwa setiap daerah diamanatkan untuk menyusun RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun

sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Berdasarkan hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Asmat melalui amanat pasal 10 ayat 2 Undang-undang Tahun 2025, diamatkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asmat sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan menyiapkan RPJPD, dengan menyelenggarakan kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 17. Surat Edaran Bersama tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2013 Nomor 8);

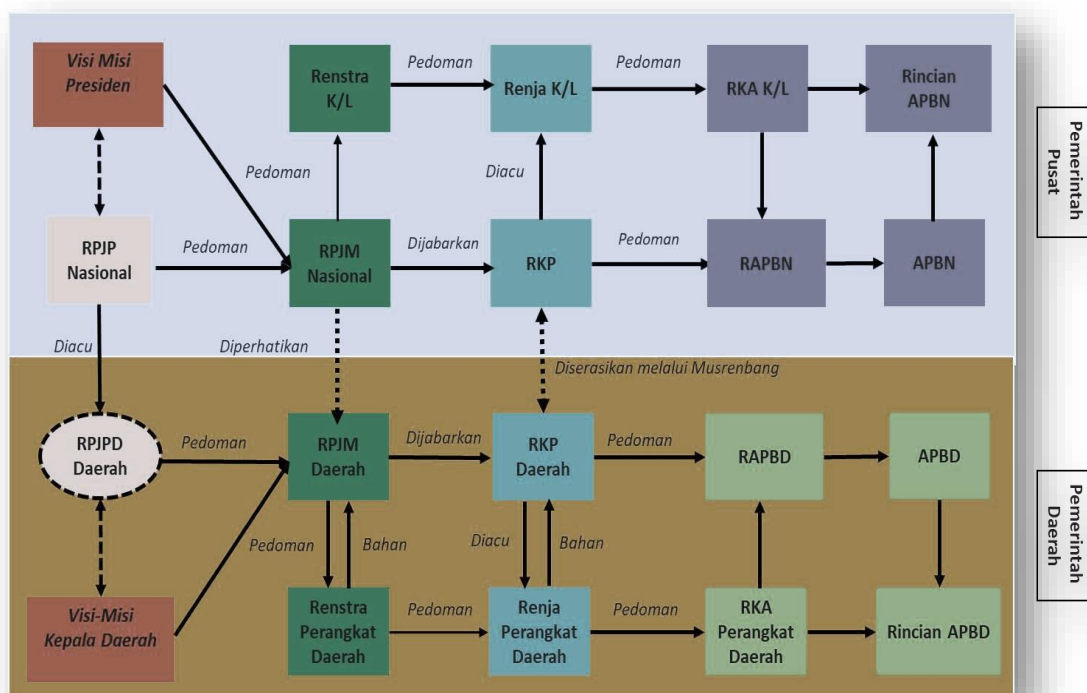
1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, mengacu dan mempedomani pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 disusun dengan menjalin hubungan antar pusat dan daerah dengan mempedomani dan memperhatikan dokumen yang menjadi acuan baik ditingkat pusat maupun daerah guna menjamin terciptanya integras, sinkronisasi dan sinergi baik antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah.

Adapun gambaran keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Gambar 1. 1. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Papua Selatan 2025-2045, serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Papua Selatan, maupun RTRW Kabupaten Asmat pasca tersusun dan di tetapkan.

1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RIPP 2022-2041

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, dimana Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041 merupakan dokumen

rencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2023, yang merupakan mandat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. RIPPP memuat uraian visi dan misi percepatan pembangunan Papua, indikator sasaran percepatan pembangunan Papua, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Papua, kondisi perlu, pengarusutamaan, arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan tiap wilayah adat, serta tahapan percepatan pembangunan Papua. Dokumen RIPPP juga memuat uraian prioritas dan fokus pembangunan selama tahun 2022-2041 dalam rangka mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dan lokasi prioritas pembangunan wilayah adat dengan tujuan mensinergikan perencanaan dan pendanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu tahun 2022-2041.

1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD

RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 digunakan sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dimana RPJMD memuat visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemerintah daerah dalam pembangunan lima tahunan. Dokumen ini merupakan perpaduan antara visi, misi dan program prioritas kepala daerah, dengan perangkat daerah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. RPJPD menetapkan empat tahap pembangunan yang akan dituangkan dalam RPJMD. Karena itu dalam penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan, RPJMD harus tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD dan sesuai dengan RPJPN, RPJMN dan RIPPP. Selain itu, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan sebagai acuan oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang kemudian dipedomani oleh semua pembahasan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA PD).

1.3.3 Keterkaitan RPJPD dengan KLHS RPJPD

KLHS RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, dimaksudkan agar tercipta

keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Rekomendasi hasil KLHS RPJPD dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Dimana KLHS berfungsi untuk Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan. RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 tahun yang disusun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya secara berkesinambungan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 yaitu untuk menyediakan Pembangunan Jangka Panjang daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 akan menjadi landasan penyusunan penyusunan RPJMD dan RKPD, maupun dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Asmat.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025– 2045 adalah:

1. Sebagai arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Asmat pada periode pembangunan tahun 2025-2045;

2. Sebagai dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam merumusan Visi, Misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 dalam 4 Tahapan periodisasi RPJMD Kabupaten Asmat; dan
3. Sebagai dokumen untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Asmat dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika Permendagri 86 Tahun 2017, Inmendagri Nomor 1 Tahun 2023 dan SEB tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045; serta sistematika penulisan.

Bab 2: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum tentang kondisi kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta Teend demografi dan kebutuhan Supras sampai dengan Tahun 2045.

Informasi gambaran umum kondisi daerah selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

Bab 3: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan daerah dan informasi lainnya untuk memahami permasalahan daerah yang menjadi akar masalah (paling utama) dan strategis hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang disertai isu- isu pembangunan terkini (DOB) beserta analisis terhadap amanat dokumen lainnya pasca hasil evaluasi RPJPD abupaten Asmat Tahun 2025-2045;

Bab 4: Visi dan Misi Daerah

Menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang secara terukur dan spesifik yang akan dicapai sampai dengan akhir periode serta selaras dengan visi dan misi Provinsi Papua Selatan serta Visi Misi Indonesia Emas Tahun 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

Bab 5: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan 4 tahapan pembangunan yang dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode.

Bab 6: Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1. Aspek Geografi

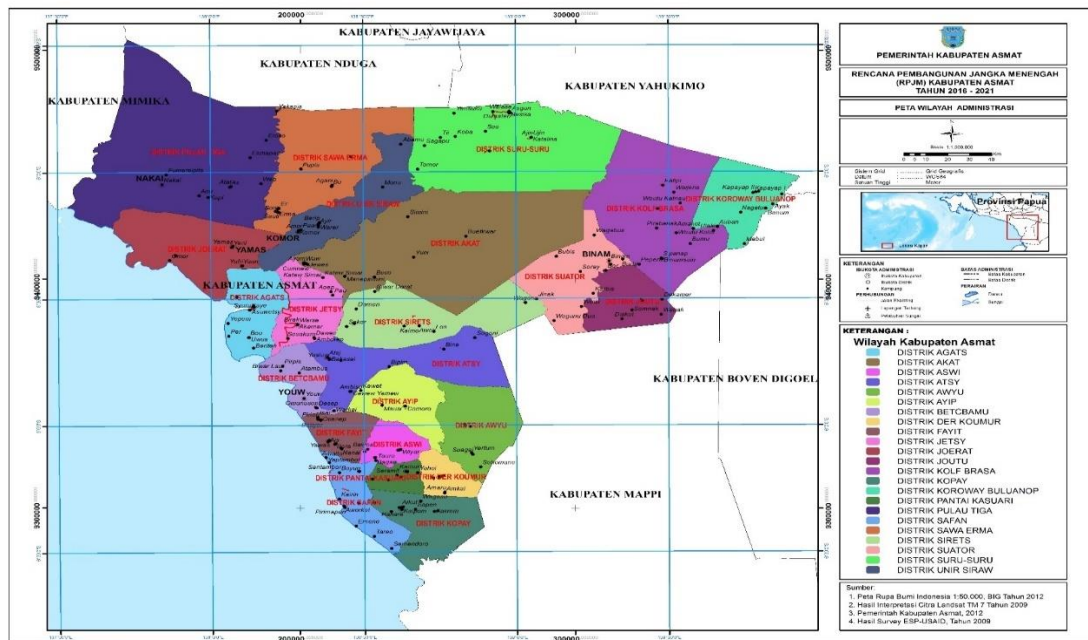
2.1.1.1. Letak Geografis, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Asmat merupakan kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Asmat beserta 13 kabupaten baru lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebelum dimekarkan, Kabupaten Asmat termasuk dalam wilayah Kabupaten Merauke. Kabupaten Asmat terletak di bagian selatan Provinsi Papua dengan ibukota kabupaten berada di Distrik Agats. Secara geografis, Kabupaten Asmat terletak pada posisi 4⁰- 7⁰ Lintang Selatan dan 137⁰ – 140⁰ Bujur Timur, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (137 Tahun 2017) Nomor 56 Tahun 2015 “Tentang kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan” Kabupaten Asmat dengan luas wilayah 31.983,43 km², kemudian pada Tahun 2022 (berdasarkan kepmendagri 100.1 1-6117) luas wilayah Asmat menjadi 25.015,306 km².

Undang-undang 14 tahun 2022 tentang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dimana cakupan wilayahnya merupakan sebagian berasal dari Provinsi Papua, yaitu a.Kabupaten Merauke; b.Kabupaten Boven Digoel; c.Kabupaten Mappi; dan d.Kabupaten Asmat. Dimana Sebagai akibat dari lahirnya Undang-undang 14 tahun 20212 tentang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, maka terdapat beberapa pengaturan terkait peta wilayah pada pulau dan titik koordinat, yaitu:

- ✦ Pulau Binar : 050 12'30.66 LS 1370 31'00.95'BT
- ✦ Ula Fumirpits : 050 12'43.07 LS 1370 31'18.41'BT
- ✦ Pulau Laag : 050 20'41.94 LS 1370 44'15.83'BT
- ✦ Pulau Somerwoo : 050 11'07.00 LS 1370 30'18.00'BT

Gambar 2. 1. Wilayah Administratif Kabupaten Asmat



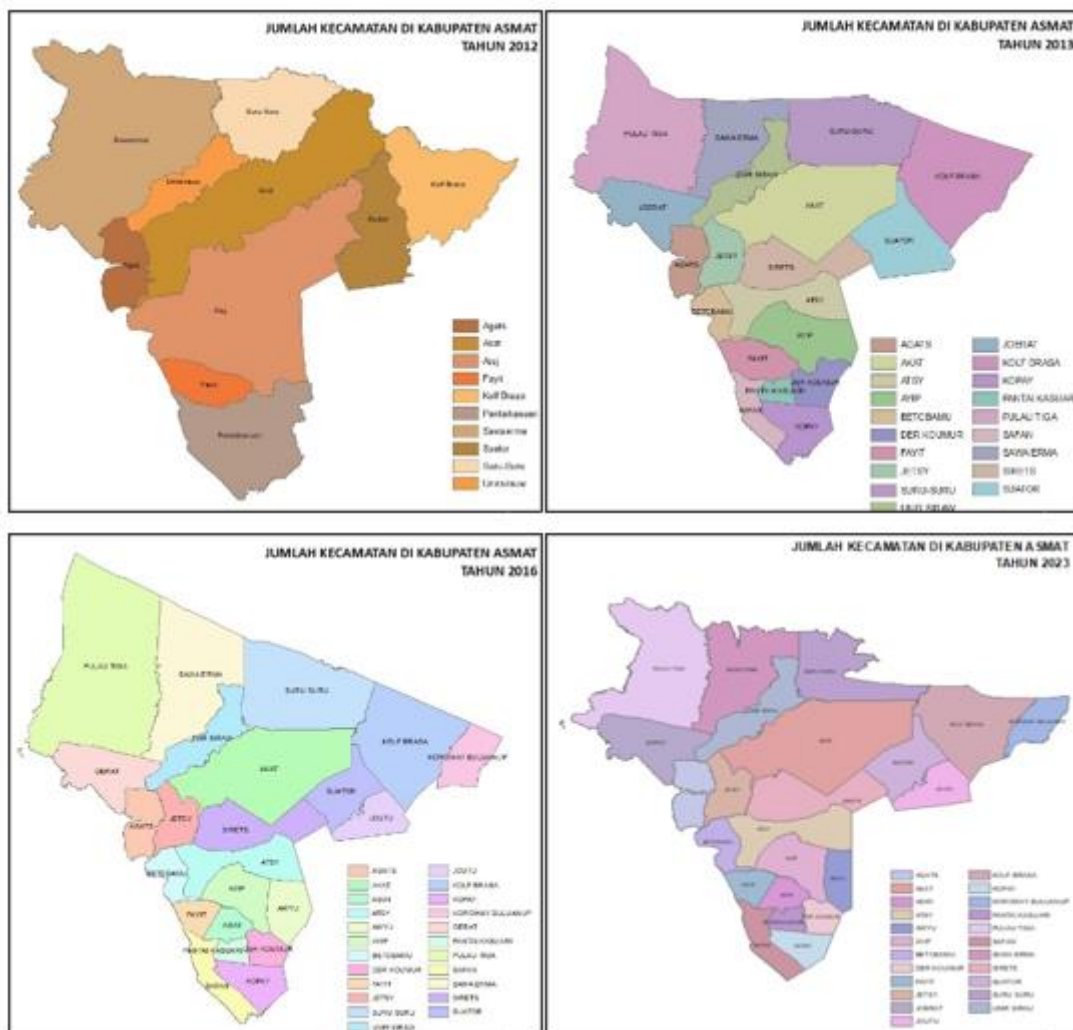
Perkembangan jumlah distrik dan kampung di Kabupaten Asmat mengalami beberapa kali pemekaran, dimana Pada tahun 2004, jumlah distrik di Kabupaten Asmat hanya sebanyak 7 (Tujuh) distrik dengan jumlah kampung sebanyak 139 kampung. Pada tahun 2008 jumlah distrik bertambah menjadi 8 distrik dan pada tahun 2012 jumlah distrik kembali bertambah menjadi 10 distrik disertai dengan pemekaran kampung menjadi 175 kampung. Kemudian pada tahun 2013, jumlah distrik dan kampung kembali mekar dengan jumlah distrik dan kampung yang ada di Kabupaten Asmat menjadi sebanyak 19 distrik dan 221 kampung. Pada tahun 2016, kembali terjadi pemekaran 4 distrik dan 3 kampung di Kabupaten Asmat, dengan demikian pada tahun 2016 jumlah distrik mencapai sebanyak 23 dan kampung sebanyak 224.

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Asmat Berdasarkan Distrik (km²), 2024

No.	Distrik	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Agats	718.27	2.87
2.	Akat	95.58	0.38
3.	Aswi	441.38	1.76
4.	Atsj	1360.8	5.44
5.	Awyu	684.91	2.74
6.	Ayip	392.2	1.57
7.	Betcbamu	700.48	2.80
8.	Der Koumur	297.04	1.19
9.	Fayit	450.3	1.80
10.	Jetsy	739.7	2.96
11.	Joerat	949.92	3.80
12.	Joutu	557.43	2.23
13.	Kolf Brasa	1172.42	4.69
14.	Kopay	737.23	2.95
15.	Koroway Buluanop	505.64	2.02
16.	Pantai Kasuari	301.94	1.21
17.	Pulau Tiga	3102.01	12.40
18.	Safan	663.93	2.65
19.	Sawa Erma	2456.44	9.82
20.	Siret	1355.89	5.42
21.	Sor Ep	3045.06	12.17
22.	Suator	2001.02	8.00
23.	Suru Suru	166.11	0.66
24.	Tomor Birip	1620.65	6.48
25.	Unir Sirau	498.96	1.99
Jumlah		25.015,31	100,00

Sumber : Tata Pemerintahan Setda Kab. Asmat 2024

Adapun perkembangan kondisi Distrik/kecamatan di Kabupaten Asmat, terlihat pada peta dibawah ini:

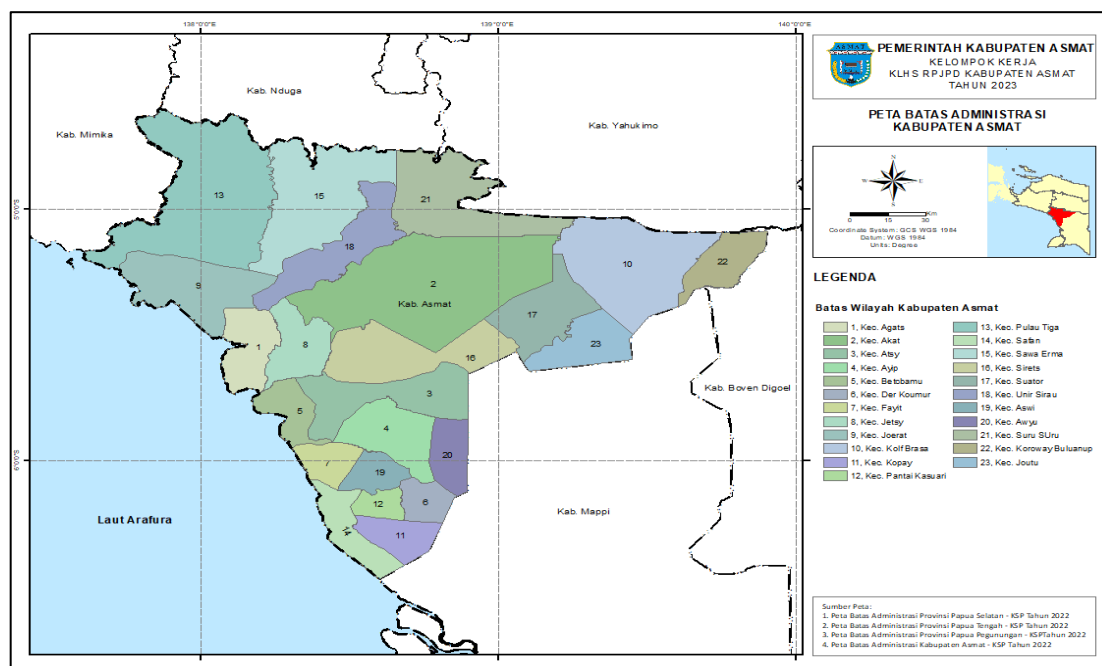


Secara keseluruhan Kabupaten Asmat memiliki luas wilayah daratan sebesar 31.983.43 km² atau 24 persen wilayah Provinsi Papua Selatan. Distrik yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Asmat adalah Distrik Pulau Tiga yaitu: seluas 6.067,63 km² (18,97 persen), sementara Distrik yang memiliki wilayah terkecil adalah Distrik Pantai Kasuari seluas 238,49 km² (0,75 persen). Distrik yang memiliki jumlah kampung terbanyak adalah Distrik Fayit dan Suru-suru dengan jumlah masing-masing sebanyak 23 kampung, sedangkan distrik yang memiliki jumlah kampung terkecil adalah Distrik Ayip dan Joerat yaitu: masing-masing sebanyak 6 kampung. Jika ditinjau dari jarak antara ibukota distrik dengan Ibukota Kabupaten, Distrik Kolf Braza memiliki jarak terjauh dari Distrik Agats (Ibukota Kabupaten) yaitu sejauh 263 km, diikuti Distrik Suator sejauh 203 km, dan Distrik Ayip Sejauh 192,1 km. Sementara itu, Distrik Akat memiliki jarak yang paling dekat dengan Ibukota

Kabupaten yaitu hanya sejauh 37,55 km. Batas wilayah administrasi Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo;
- Sebelah selatan : Kabupaten Mappi dan Laut Arafura;
- Sebelah barat : Kabupaten Mimika dan Laut Arafura; dan
- Sebelah timur : Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.

Gambar 2. 2. Batas Administrasi Kabupaten Asmat Tahun 2022

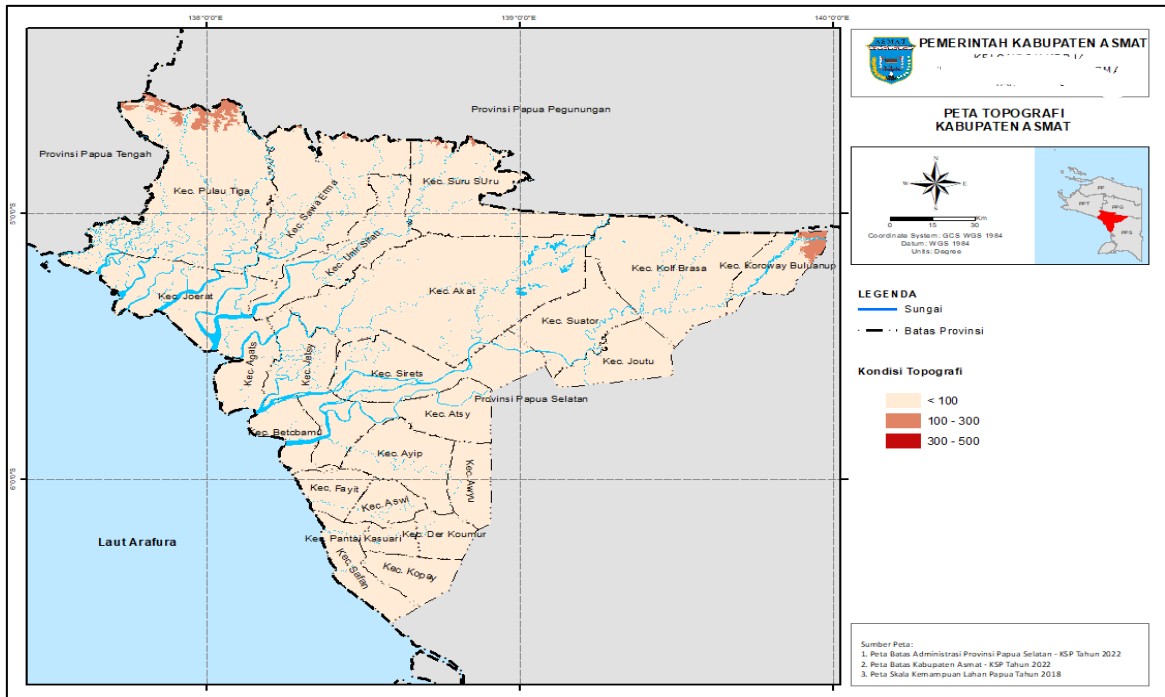


Sumber: SK Mendagri tentang Batas Wilayah Asmat Tahun 2020

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Sebagai wilayah yang terletak di pesisir selatan Provinsi Papua Selatan, wilayah Kabupaten Asmat sebagian besar termasuk dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0-8 persen. Wilayah pesisir pantai Kabupaten Asmat merupakan wilayah yang berawa-rawa tergenang air, sedangkan bagian utara dan timur kabupaten lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Gambar 2. 3. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Asmat

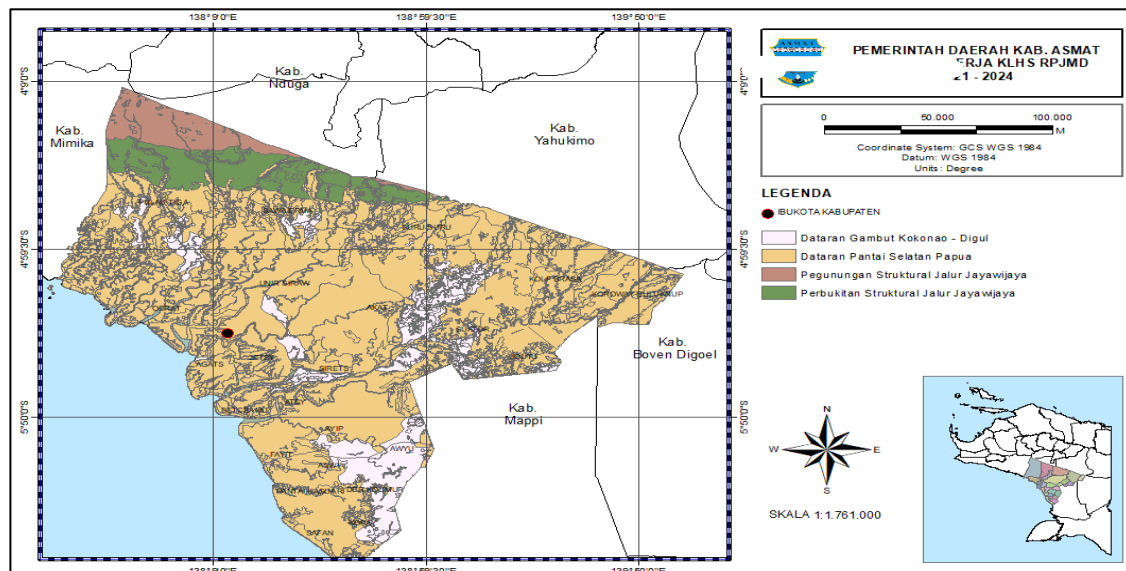


Wilayah Kabupaten Asmat berada di atas daratan yang lembek karena dilalui sungai besar. Karena letaknya di dataran rendah dan tepian sungai maka sepanjang tahun selalu ada genangan air. Setiap hari juga terjadi pasang surut karena letaknya dekat dengan muara sungai yang berhubungan dengan laut lepas. Seluruh wilayah Kabupaten Asmat berada pada ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian air pada saat keadaan pasang dan surut berkisar antara 5-7 meter dimana pada saat air pasang dari laut masuk hingga sejauh 50-60 kilometer wilayah daratan dan beberapa tempat di wilayah pesisir telah mengalami intrusi air asin/air laut. Daerah bergelombang dan berbukit di Kabupaten Asmat berada di Distrik Sawa Erma hingga Distrik Suator. Pada daerah dataran rendah yang berawa, banyak wilayah yang dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Wedelman, Siretz, Asuwetz, Lorenz, dan Betz. Sungai-sungai tersebut memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat sebagai sarana transportasi, sumber irigasi, tenaga listrik, air minum serta memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang besar.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Secara umum jenis tanah dapat digolongkan menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral adalah tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan diantaranya adalah tanah latosol (merah) dan tanah andosol (hitam kelam), sedangkan tanah dari hasil pematangan sisa-sisa tanaman akan membentuk tanah organik seperti tanah gambut. Keadaan fisiografi, bentuk wilayah dan sifat-sifat tanah menggambarkan karakteristik yang membedakan satuan lahan. Kualitas lahan sangat dipengaruhi oleh kualitas jenis tanahnya yang juga sangat tergantung pada kondisi geologis, iklim, maupun topografinya.

Gambar 2. 4. Peta Bentang Lahan Kabupaten Asmat



Sumber: Hasil olahan Kab. Asmat, 2021.

Kabupaten Asmat secara umum memiliki 5 (lima) kelompok satuan lahan fisiografi, yaitu: Marin (M) Fluvian Marin (B), Gambut (G), Aluvian (A) dan Tektonik/Struktural (T). Sebagian besar lahan di Kabupaten Asmat adalah lahan Aluvian (65,95 persen).

Kelompok Marin terletak di sepanjang pantai dengan lebar bervariasi. Kelompok ini merupakan hasil proses sedimentasi dan secara jelas terlihat dengan adanya pelebaran pantai yang terjadi karena penambahan bahan endapan dan proses pengangkatan. Satuan lahan pada kelompok tersebut dapat dibedakan

antara lain: beting pasir, dataran pasang surut, rawa belakang pantai, dan endapan delta.

Kelompok Fluvial Marin berkaitan erat dengan aktivitas sungai dan air permukaan yang berupa pengikisan, pengangkutan, dan jenis buangan pada daerah dataran rendah seperti lembah, ledok, dan dataran alluvial. Proses penimbunan bersifat meratakan pada daerah-daerah ledok, sehingga umumnya bentuk lahan asal fluvial mempunyai relief yang rata atau datar.

Kelompok Kubah Gambut terbentuk dari endapan organik yang berasal dari endapan permukaan muda dan tua. Secara umum ketebalan gambut akan meningkat semakin jauh dari sungai. Dengan pengendalian tata air yang baik, daerah ini sebenarnya memiliki potensi untuk perkebunan. Namun, miskinnya kandungan hara dapat menjadi penghambat utama.

Kelompok Alluvial terbentuk dari endapan alluvial sungai dan terletak di sepanjang jalur-jalur aliran sungai. Pada umumnya daerah tersebut cukup potensial untuk lahan persawahan, tentunya dengan memperhatikan jalur hijau yang harus dipertahankan.

Kelompok Tektonik/Struktural terjadi karena adanya proses pembentukan lahan yang disebabkan oleh adanya proses endogen seperti proses pengangkatan, penurunan dan pelipatan kerak bumi. Contoh dari bentuk lahan asal struktural adalah pegunungan lipatan, pegunungan patahan, dan pegunungan kubah.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Asmat ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Kabupaten Asmat memiliki banyak sungai baik yang termasuk sungai-sungai kecil maupun besar. Sungai-sungai tersebut memiliki peranan yang penting bagi penduduk di Kabupaten Asmat diantaranya sebagai prasarana transportasi dan sumber penyediaan air minum. Secara umum, ditinjau dari kondisi fisik, sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Asmat masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang baik. Kondisi tersebut sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan.

Beberapa sungai besar di Kabupaten Asmat diantaranya adalah Sungai Binar, Owap, Jats, Momats, Fai, Pomats, Unir, Asswet, Yiwe, Syiret, Bets, Assuwe, Fayit, Dere, dan Ayip. Panjang sungai di Kabupaten Asmat berkisar antara 9,3-517 km. Sungai terpanjang di Kabupaten Asmat adalah Sungai Syiret dengan panjang mencapai 517,5 km, diikuti Sungai Jats dengan panjang 200 km dan Sungai Pomats dengan panjang 152,2 km. Sungai Owap merupakan sungai terpendek di Kabupaten Asmat yaitu sepanjang 9,3 km.

Jika dilihat dari lebar muaranya, sungai di Kabupaten Asmat memiliki lebar muara berkisar antara 47810 m. Selain merupakan sungai terpanjang, Sungai Syiret juga merupakan sungai dengan lebar muara terbesar yaitu mencapai 810,5 meter, sedangkan sungai dengan lebar muara terkecil adalah Sungai Ayip yaitu sebesar 47 meter. Kedalaman muara sungai di Kabupaten Asmat berkisar antara 10-20 meter. Berikut tabel nama dan karakteristik sungai di kabupaten Asmat.

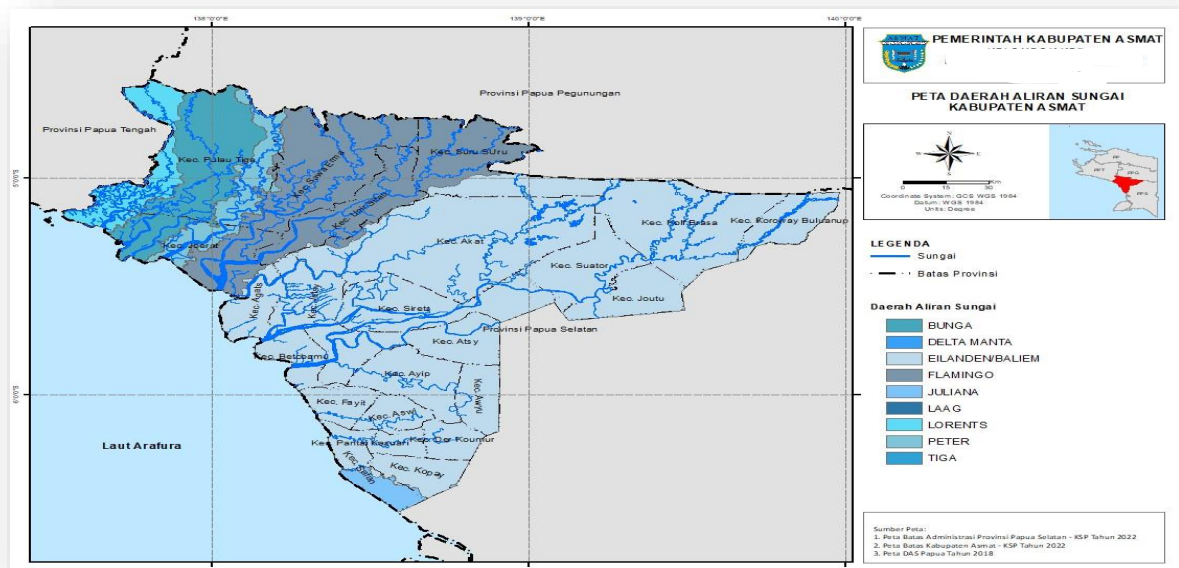
Tabel 2. 2. Nama dan Karakteristik Sungai di Kabupaten Asmat

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Muara (m)	Kedalaman Muara (m)	Panjang Alur dari Muara ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Sungai Binar	48,00	151,00	15	115
2.	Sungai Owap	9,30	512,50	20	105
3.	Sungai Jats	200,00	215,00	15	50
4.	Sungai Momats	52,50	95,00	15	45
5.	Sungai Fai	65,00	222,50	20	35
6.	Sungai Pomats	152,20	515,00	15	25
7.	Sungai Unir	127,50	510,00	15	20
8.	Sungai Asswet	122,00	450,00	16	-
9.	Sungai Yiwe	47,50	60,00	10	-
10.	Sungai Syiret	517,50	810,50	17	45
11.	Sungai Bets	63,00	512,50	15	65
12.	Sungai Assuwe	55,00	134,00	10	60
13.	Sungai Fayit	35,00	60,00	10	70

14.	Sungai Dere	36,00	65,50	12	105
15.	Sungai Ayip	52,00	47,00	10	125

Sumber : RTRW Kabupaten Asmat 2012-2032

Gambar 2. 5. Peta Aliran Sungai Kabupaten Asmat



Sumber: Hasil olahan Kab. Asmat, 2021.

Jika dilihat dari lebar muaranya, sungai di Kabupaten Asmat memiliki lebar muara berkisar antara 47-810 m. Selain merupakan sungai terpanjang, Sungai Syiret juga merupakan sungai dengan lebar muara terbesar yaitu mencapai 810,5 m, sedangkan sungai dengan lebar muara terkecil adalah Sungai Ayip yaitu: sebesar 47 m. Kedalaman muara sungai di Kabupaten Asmat berkisar antara 10-20 m.

Tabel 2. 3. Nama Sungai, Panjang, Lebar Muara, Kedalaman, dan Panjang Alur dari Muara ke Ibukota Kabupaten

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Muara (m)	Kedalaman Muara (m)	Panjang Alur dari Muara ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Sungai Binar	48	151	15	115
2.	Sungai Owap	9,3	512,5	20	105

3.	Sungai Jats	200	215	15	50
4.	Sungai Momats	52,5	95	15	45
5.	Sungai Fai	65	222,5	20	35
6.	Sungai Pomats	152,2	515	15	25
7.	Sungai Unir	127,5	510	15	20
8.	Sungai Asswet	122	450	16	0
9.	Sungai Yiwe	47,5	60	10	± 46,04
10.	Sungai Syiret	517,5	810,5	17	45
11.	Sungai Bets	63	512,5	15	65
12.	Sungai Assuwe	55	134	10	60
13.	Sungai Fayit	35	60	10	70
14.	Sungai Dere	36	65,5	12	105
15.	Sungai Ayip	52	47	10	125

Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2021

Aliran Sungai (DAS) yang melintasi Kabupaten Asmat sebanyak 9 Daerah, dan DAS Eilanden/Baliem merupakan DAS terbesar yang mendominasi wilayah kabupaten Asmat dengan luas sebesar 1,5 juta hektar atau sekitar 63,91%.

Tabel 2. 4. Luasan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Asmat

No	Nama DAS	Luas	Persen
1	BUNGA	197.896,10	7,91%
2	DELTA MANTA	14,31	0,00%
3	EILANDEN/BALIEM	1.598.608,73	63,91%
4	FLAMINGO	482.903,68	19,30%
5	JULIANA	29.029,94	1,16%
6	LAAG	161,41	0,01%
7	LORENTS	97.085,92	3,88%
8	PETER	95.537,49	3,82%
9	TIGA	233,30	0,01%
Jumlah		2.501.470,87	100,00%

Sumber. BPDAS

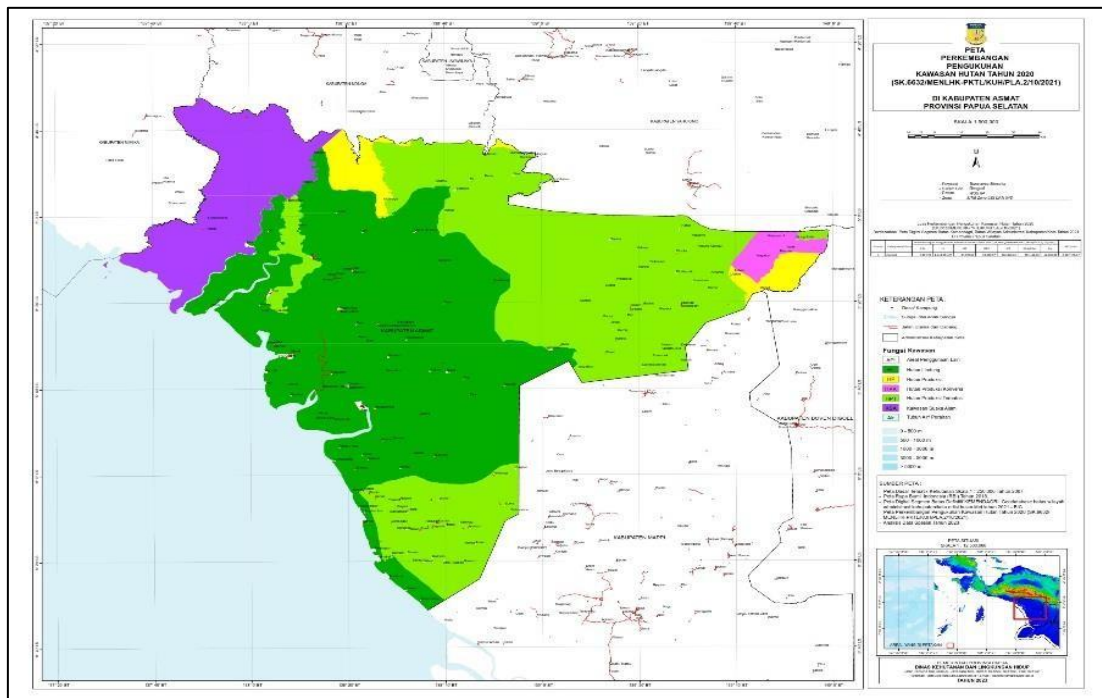
2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Asmat memiliki iklim tropis dengan perbedaan antara musim kemarau dan hujan yang tegas. Curah hujan di Kabupaten Asmat dalam satu tahun berkisar antara 3.000 milimeter hingga 5.000 milimeter dengan hari hujan dalam satu tahun sebanyak 200 hari. Suhu udara rata-rata pada siang hari adalah sebesar 26°C dan pada malam hari sebesar 17°C. Curah hujan tertinggi di Kabupaten Asmat berada di wilayah pedalaman, sedangkan curah hujan terendah berada di pesisir pantai selatan yaitu di Distrik Pantai Kasuari. Tingkat kelembaban udara di Kabupaten Asmat cukup tinggi karena dipengaruhi oleh iklim tropis basah dimana kelembaban udara berkisar antara 78 persen hingga 81 persen. Hutan di Kabupaten Asmat merupakan jenis hutan hujan yang mengakibatkan tingginya kelembaban udara. Hampir setiap tahun turun hujan (100-150 hari). Frekuensi curah hujan agak berkurang pada saat musim kemarau dan melimpah saat musim hujan (antara Mei-Juni mencapai 1.200 mm). Dengan tidak adanya sumber air tanah akibat lumpur dan naiknya air laut maka curah hujan yang demikian besar dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air untuk kebutuhan hidup harian dimana hampir setiap rumah dilengkapi tangki-tangki atau drum ember untuk menampung air hujan.

2.1.1.6. Kawasan Hutan

Kabupaten Asmat memiliki luas 2.5001.497,81 ha atau 20,76% dari total Wilayah Adat Anim-Ha. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan ini sebagian besar masih berupa Kawasan Hutan Lindung (44,37%), dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (38,47%). Jika dibandingkan dengan kondisi di Wilayah Adat Anim-Ha, maka Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Asmat mampu menyumbang 65,02% dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas mampu memberikan kontribusi sebesar 37,62%.

Gambar 2. 6. Kawasan Hutan Kabupaten Asmat SK 6632



Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura (2023)

Tabel 2. 5. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Asmat

No	Kawasan	Luas	Persen %
1	Areal Penggunaan Lain	7.251,48	0,29
2	Hutan Lindung	1.109.984,52	44,37
3	Hutan Produksi Terbatas	962.339,34	38,47
4	Hutan Produksi Tetap	84.734,94	3,39
5	Hutan Produksi yang dapat di Konversi	38.150,03	1,53
6	Taman Nasional	287.207,97	11,48
7	Taman Nasional (Perairan)	27,06	0,00
8	Tubuh Air	11.802,47	0,47
Jumlah		2.501.497,81	100,00%

Sumber: data analisis peneliti (2023)

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Asmat terletak di daerah dataran rendah yang mengalami genangan sepanjang tahun karena topografinya berada di bawah

permukaan air laut. Pada awalnya, sebagian besar lahan di Kabupaten Asmat merupakan daerah rawa, gambut, dan hutan payau. Akan tetapi, dalam jangka waktu kurang lebih 40 tahun terakhir telah terjadi perubahan yang cukup pesat dengan adanya lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian. Pada tahun 2020, total luas lahan yang tersedia di Kabupaten Asmat secara keseluruhan adalah sebesar 15.258,46 km². Dari keseluruhan lahan tersebut, sebagian besar lahan di Kabupaten Asmat termasuk dalam kawasan hutan baik hutan lindung, suaka alam, dan hutan produksi. Total luas kawasan hutan adalah seluas 15.207,09 km² yang terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 11.325,81 km², kawasan suaka alam seluas 2.817,76 km², dan kawasan hutan produksi seluas 1.063,52 km². Kegiatan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut diantaranya adalah pertanian padi dan palawija, hortikultura, dan perkebunan. Luas kawasan pertanian padi dan palawija adalah seluas 1,49 km², hortikultura seluas 1,56 km², dan perkebunan seluas 48,32 km².

Kebutuhan akan lahan di Kabupaten Asmat akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh secara cepat terhadap penggunaan lahan, antara lain: pertumbuhan penduduk dan pemekaran wilayah. Total area penggunaan lain selain kawasan hutan di Kabupaten Asmat adalah 7.251,48 ha atau 0,29 persen (lihat tabel 3.6). Area penggunaan lain digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya: bandara/pelabuhan, perkebunan, permukiman, dan pertanian lahan kering campur semak. Pemukiman dan pertanian lahan kering campur semak merupakan dua penggunaan lahan yang paling dominan yaitu 0,19% dari total area penggunaan lain. Adapun Kelas tutupan terluas adalah Hutan Rawa Primer sebesar 1.354.985,58 ha (54,17%) dan Hutan Rawa Sekunder seluas 263.433,72 ha (10,53%).

Tabel 2. 6. Klasifikasi Bentang Lahan, Penutupan Lahan dan Tipe Vegetasi di Kabupaten Asmat

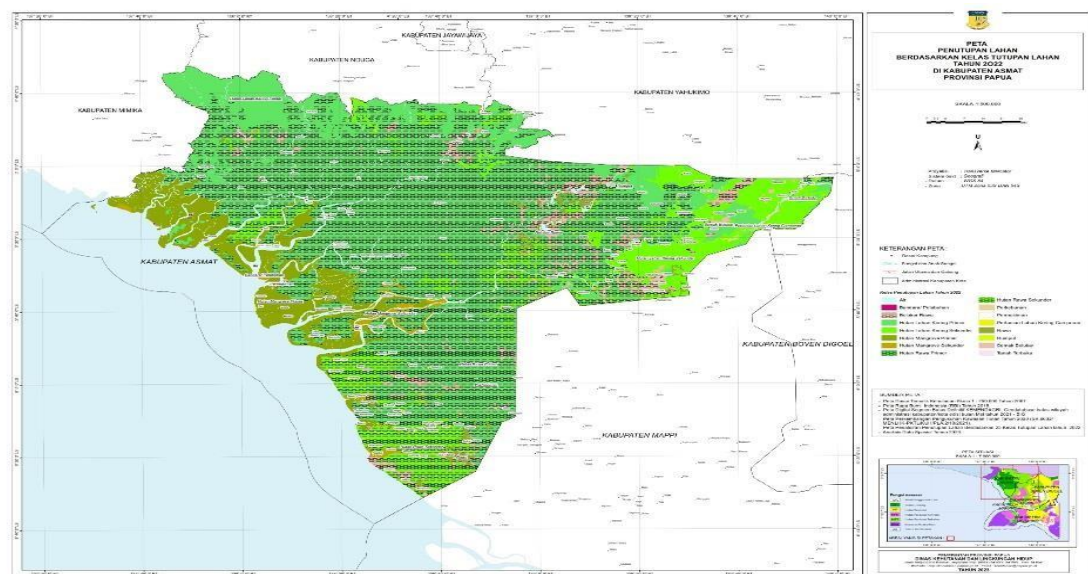
Bentang Alam	Penutupan Lahan	Tipe Vegetasi
<ul style="list-style-type: none"> Dataran Gambut Kokonao - Digul Dataran Pantai Selatan Papua Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya 	<ul style="list-style-type: none"> Bandara/Pelabuhan Hutan Lahan Kering Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer Hutan Mangrove Sekunder Hutan Rawa Primer Hutan Rawa Sekunder Lahan Terbuka Perkebunan Permukiman Pertanian Lahan Kering Campur Semak Rawa Savana/Padang Rumput Semak Belukar Semak Belukar Rawa Tubuh Air 	<ul style="list-style-type: none"> Vegetasi hutan batugamping pamah Vegetasi hutan danau gambut Vegetasi hutan gambut Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) Vegetasi hutan pantai Vegetasi hutan rawa air payau Vegetasi hutan tepian sungai Vegetasi hutan tepian sungai payau Vegetasi mangrove Vegetasi padang rumput rawa air payau Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah Vegetasi sagu Vegetasi savana rawa air payau Vegetasi savana rawa gambut pamah Vegetasi terna tepian sungai payau

Tabel 2. 7. Kelas Tutupan Lahan di Kabupaten Asmat

No	Kelas Tutupan	Luas (Ha)	Persen
1	Bandara/Pelabuhan	49,21	0,00
2	Hutan Lahan Kering	241.205,16	9,64
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	168.131,85	6,72
4	Hutan Mangrove Primer	192.899,36	7,71
5	Hutan Mangrove Sekunder	20.987,04	0,84

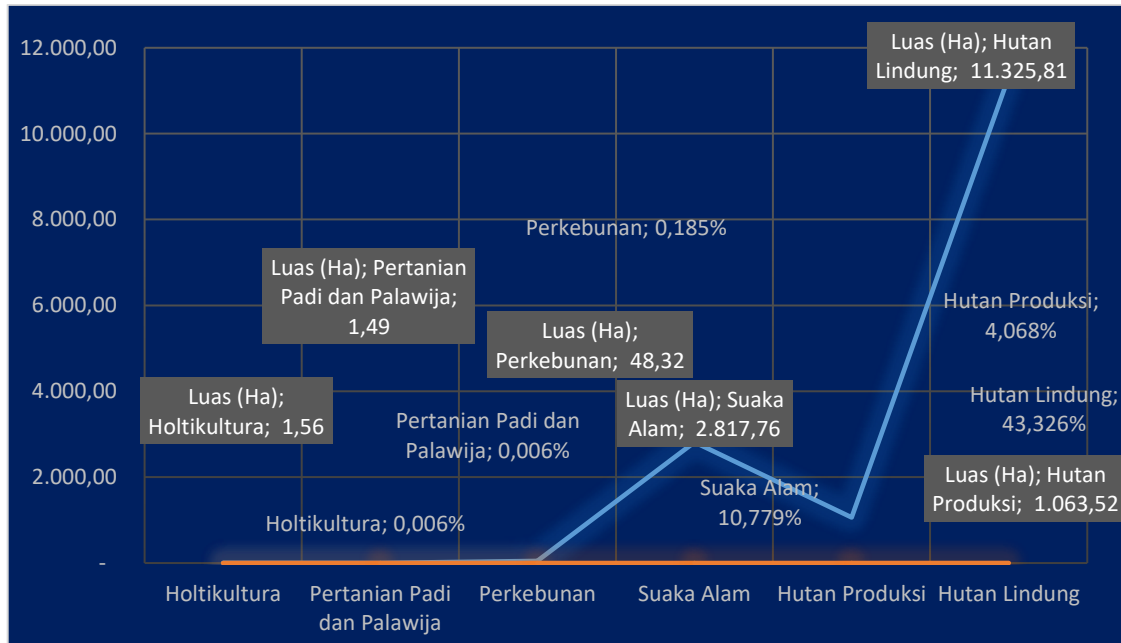
6	Hutan Rawa Primer	1.354.985,58	54,17
7	Hutan Rawa Sekunder	263.433,72	10,53
8	Lahan Terbuka	24,39	0,00
9	Perkebunan	45,75	0,00
10	Permukiman	2.562,15	0,10
11	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	2.160,24	0,09
12	Rawa	22.329,01	0,89
13	Savana/Padang Rumput	741,69	0,03
14	Semak Belukar	12.025,37	0,48
15	Semak Belukar Rawa	125.236,14	5,01
16	Tubuh Air	94.655,21	3,78
Jumlah		2.501.471,88	100,00

Gambar 2. 7. Penutupan Lahan Kabupaten Asmat



Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura (2023)

Gambar 2. 8. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Asmat, 2021

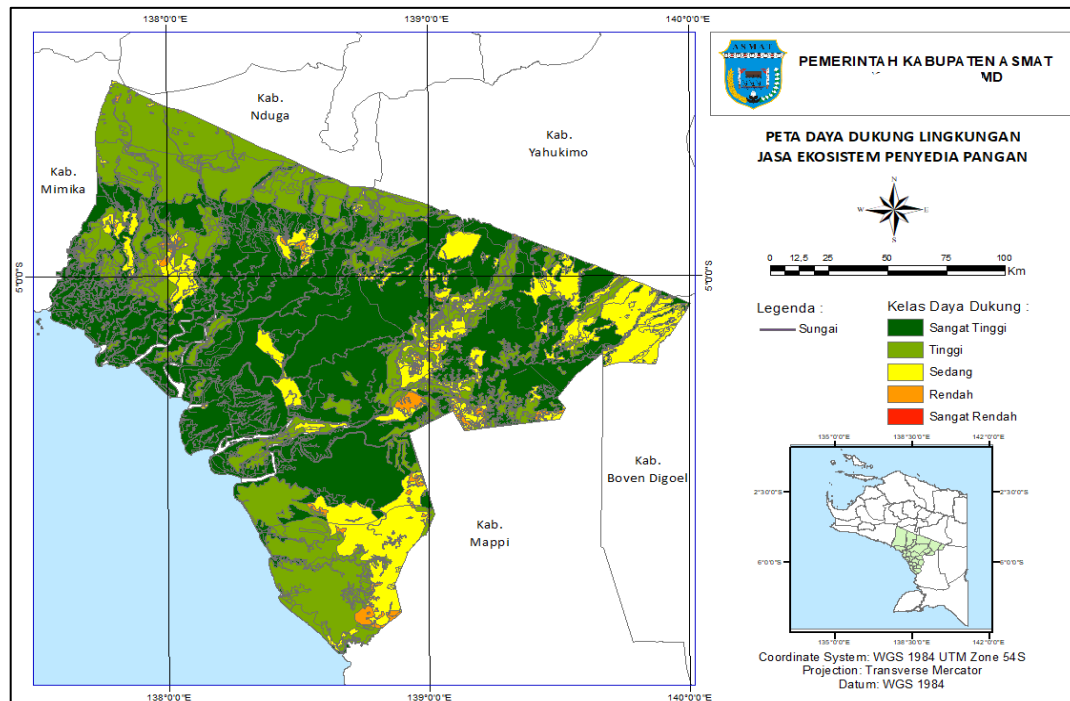


Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Asmat, 2020 (diolah)

Sektor pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan dari air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Gambar berikut tersebut menunjukkan bahwa daya dukung lahan untuk penyediaan pangan Kabupaten Asmat masih sangat tinggi dimana ditunjukkan dari 54% wilayah merupakan wilayah yang masih memiliki daya dukung sangat tinggi, 30% wilayah merupakan daerah dengan daya dukung yang tinggi dan 14% wilayah merupakan daerah dengan daya dukung yang sedang. Jadi, dapat dinyatakan secara umum Kabupaten Asmat tidak memiliki wilayah dengan daya dukung penyediaan pangan yang rendah karena hanya berada dibawah 2%.

Gambar 2. 9. Peta Indeks Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten Asmat

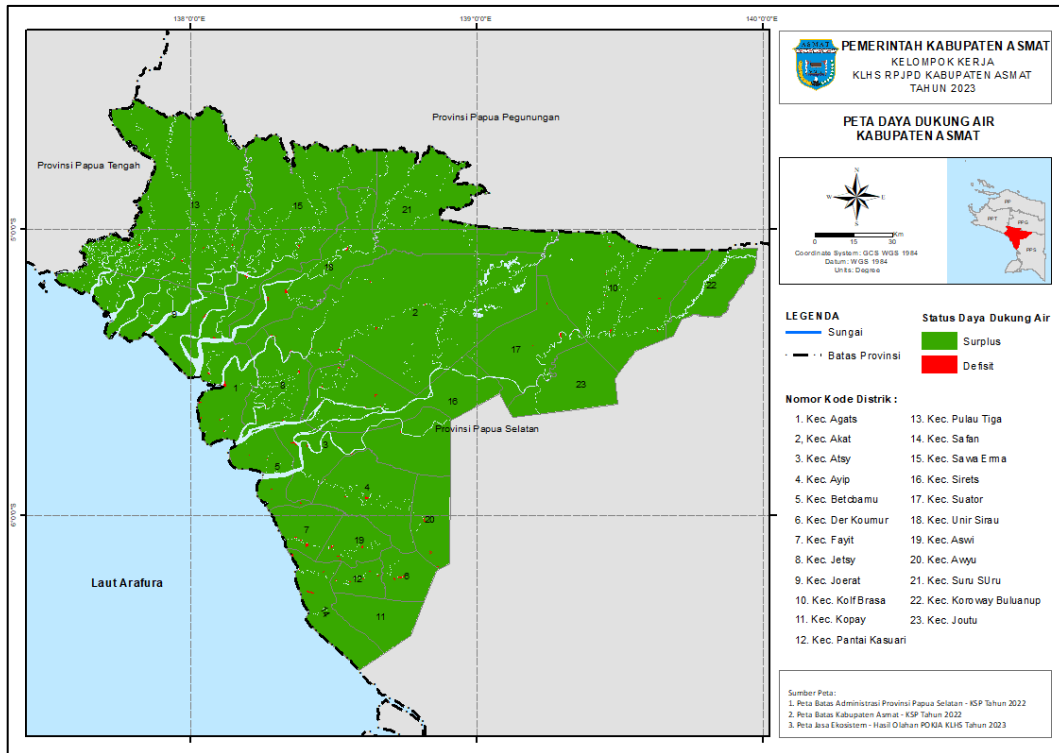


Sumber. Hasil olahan klls Kab. Asmat, 2021

Tabel 2. 8. Daya Dukung Air Kabupaten Asmat Tahun 2023

Distrik	Penduduk Tahun 2022 (Orang)	Kebutuhan (m ³ /Tahun)	Ketersediaan (m ³ /Tahun)	Selisih (m ³ /Tahun)	Status DD	Luasan Status Daya Dukung (Hektar)	
						Defisit	Surplus
Agats	24.861	39.777.600	106.896.701	67.119.101	Belum Terlampaui	435,35	71.605,93
Akat	5.885	9.416.000	101.244.574	91.828.574	Belum Terlampaui	368,00	355.472,00
Aswi	3.979	6.366.400	13.351.290	6.984.890	Belum Terlampaui	240,00	33.648,00
Atsy	7.190	11.504.000	91.655.385	80.151.385	Belum Terlampaui	352,00	123.592,88
Awyu	2.939	4.702.400	144.003.605	139.301.205	Belum Terlampaui	160,00	45.406,84
Ayip	2.131	3.409.600	14.174.210	10.764.610	Belum Terlampaui	160,00	87.632,00
Bectbamu	2.860	4.576.000	55.392.618	50.816.618	Belum Terlampaui	128,00	46.907,27
Der Koumur	4.136	6.617.600	10.547.441	3.929.841	Belum Terlampaui	192,00	35.367,74
Fayit	5.713	9.140.800	120.114.031	110.973.231	Belum Terlampaui	160,00	38.548,66

Distrik	Penduduk Tahun 2022 (Orang)	Kebutuhan (m ³ /Tahun)	Ketersediaan (m ³ /Tahun)	Selisih (m ³ /Tahun)	Status DD	Luasan Status Daya Dukung (Hektar)	
						Defisit	Surplus
Jetsy	2.688	4.300.800	42.750.624	38.449.824	Belum Terlampaui	96,00	66.576,00
Joerat	3.051	4.881.600	85.792.809	80.911.209	Belum Terlampaui	184,04	132.099,27
Joutu	2.199	3.518.400	495.378.440	491.860.040	Belum Terlampaui	-	68.472,40
Kolf Braza	2.868	4.588.800	265.203.015	260.614.215	Belum Terlampaui	224,00	206.020,43
Kopay	3.822	6.115.200	117.644.135	111.528.935	Belum Terlampaui	-	47.839,09
Koroway Buluanop	1.369	2.190.400	299.430.430	297.240.030	Belum Terlampaui	-	57.346,31
Pantai Kasuari	5.281	8.449.600	671.665.023	663.215.423	Belum Terlampaui	176,00	23.584,00
Pulau Tiga	3.655	5.848.000	125.454.759	119.606.759	Belum Terlampaui	240,00	313.508,76
Safan	7.042	11.267.200	1.271.486.064	1.260.218.864	Belum Terlampaui	345,00	57.386,22
Sawa Erma	6.167	9.867.200	78.662.272	68.795.072	Belum Terlampaui	208,00	198.825,76
Sirets	4.459	7.134.400	113.157.933	106.023.533	Belum Terlampaui	256,00	132.390,37
Suator	3.355	5.368.000	41.936.819	36.568.819	Belum Terlampaui	304,00	93.551,62
Suru-Suru	4.488	7.180.800	61.636.264	54.455.464	Belum Terlampaui	-	158.886,13
Unir Sirau	3.386	5.417.600	21.565.048	16.147.448	Belum Terlampaui	240,00	102.394,61
Jumlah	113.524	181.638.400	4.349.143.488	4.167.505.088		4.468,38	2.497.062,26



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pertumbuhan daya saing daerah merupakan hal penting dalam pembangunan daerah, dimana penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor perikanan, pertanian secara keseluruhan dan potensi pariwisata di Kabupaten Asmat memiliki posisi strategis yang dapat menjadi sumber pendapatan dan kehidupan bagi masyarakatnya. Pembangunan Kabupaten Asmat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia, dimana perencanaan pembangunan Kabupaten Asmat difokuskan lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan yakni: perikanan, pertanian dan pariwisata.

Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat ada beberapa kawasan di Kabupaten Asmat yang masih tertinggal. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur tersebut mutlak diutamakan. Hal ini didasarkan karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang akan

berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Adapun rincian potensi pengembangan wilayah Pemerintah Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan mempertimbangkan arahan pengembangan kawasan budidaya dalam RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk, sebagai berikut:

Kawasan peruntukkan hutan produksi

- a. Hutan produksi terbatas (HPT)
- b. Hutan produksi tetap (HP)
- c. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Kawasan hutan rakyat

Kawasan peruntukkan pertanian

- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Kawasan peruntukkan perikanan

- a. Perikanan tangkap
- b. Perikanan budidaya

Kawasan peruntukkan pariwisata

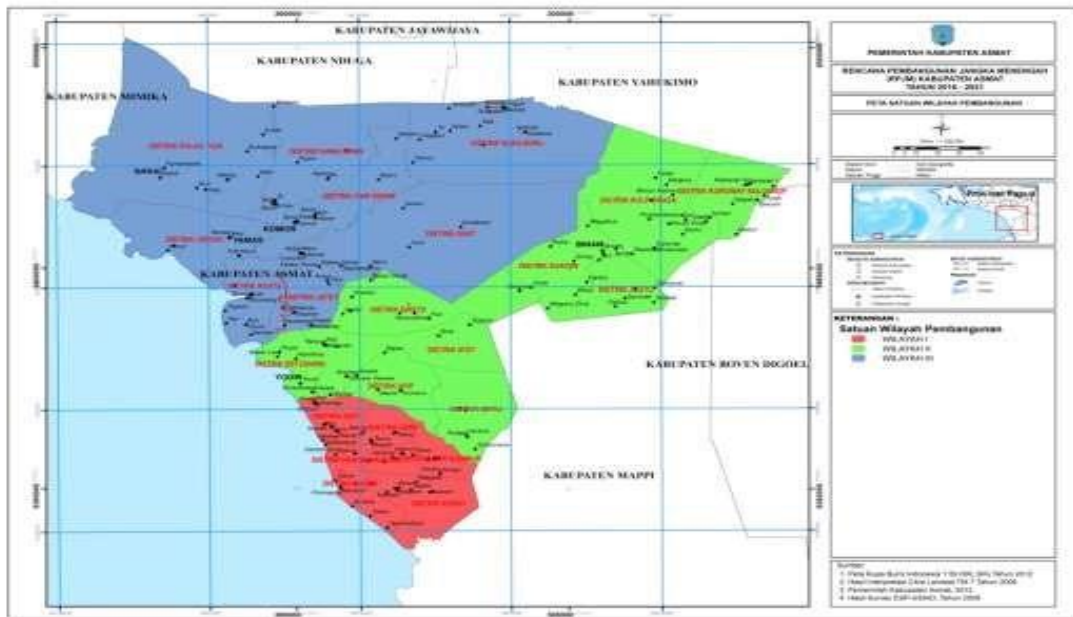
- a. Wisata budaya
- b. Wisata alam
- c. Wisata minat khusus

Kawasan peruntukkan permukiman

- a. Permukiman perkotaan
- b. Permukiman perkampungan

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2013-2033) sebagai provinsi induk, dan data hasil olahan mengacu UU Nomor 14 Tahun 2022

Gambar 2. 10. Peta Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Asmat



2.1.2.1. Sektor Pertanian

Kabupaten Asmat memiliki potensi pengembangan sektor pertanian yang tinggi mengingat adanya ketersediaan lahan yang besar. Namun masih terbatas pada sapsras dan teknologi pertanian yang digunakan oleh masyarakat masih tradisional dan dan belum bersifat komersial, sehingga sektor pertanian belum berkembang. Jika dilihat dari penggunaan lahan dimana sebesar seluas 2,3 juta hektar, sebagian besar lahan di Kabupaten Asmat merupakan hutan dimana lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan masih relatif kecil (kurang dari 1 persen).

A. Pertanian Tanaman Pangan

Kondisi lahan di Kabupaten Asmat secara umum belum mendukung untuk pertumbuhan optimal padi karena masih merupakan lahan baru berupa lahan gambut yang memiliki keasaman tanah cukup tinggi sehingga membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan tanaman padi. Luas tanam padi di Kabupaten Asmat mengalami peningkatan selama tahun 2020-2023 dari sebelumnya hanya 124 ha pada tahun 2020, menjadi seluas 135,45 ha pada tahun 2023. Luas panen padi di Kabupaten Asmat di tahun 2020 seluas 113,70

ha dan produksi sebesar 477,50 ton, dengan produktivitas tanaman padi di Kabupaten Asmat adalah sebesar 4,20 ton per ha.

Tabel 2. 9. Luas Panen, Luas Tanam Produksi, dan Produktivitas Padi di Kabupaten Asmat, 2020-2023

No.	Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1	2020	124,00	113,70	477,50
2	2021	553.25	147.93	524.62
3	2022	569.25	179.11	30.54
4	2023	135.45	131.30	617.11

Sumber: Kab. Asmat Dalam Angka, 2023

Tabel 2. 10. Luas Panen, Luas Tanam, dan Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten Asmat, 2023

No	Tanaman	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padi	135.45	131.30	617.11	4,2
2	Jagung	19	18.25	123.19	3,8
3	Ubi Kayu	82.75	80.25	1063.31	11,6
4	Ubi Jalar	84.50	82.35	737.03	7,6
5	Keladi	45.35	43.75	295.31	5,5
6	Kacang Tanah	5,20	3,80	9,5	2,5
7	Kedelai	9,00	7,30	13,14	1,8

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kab. Asmat, 2020.

Tabel 2. 11. Luas Lahan Panen dan Produksi Pangan Sagu tahun 2021

Distrik	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (kg)	Energi (kkal)
Agats	195	90	450.000	1.080.000.000
Akat	194	105	522.000	1.252.800.000
Aswi	199	101	502.500	1.206.000.000
Atsj	173	89	442.500	1.062.000.000
Awyu	137	70	350.000	840.000.000
Ayip	106	62	310.000	744.000.000

Distrik	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (kg)	Energi (kkal)
Betcbamu	134	65	322.500	774.000.000
Der Koumur	194	107	535.000	1.284.000.000
Fayit	246	141	705.000	1.692.000.000
Jetsy	119	68	340.000	816.000.000
Joerat	115	59	295.000	708.000.000
Joutu	138	66	330.000	792.000.000
Kolfbraza	211	99	495.000	1.188.000.000
Kopay	198	97	485.000	1.164.000.000
Koroway Buluanop	144	72	357.000	856.800.000
Pantai Kasuari	210	118	590.000	1.416.000.000
Pulau Tiga	211	108	538.750	1.293.000.000
Safan	289	122	607.500	1.458.000.000
Sawa Erma	193	98	490.000	1.176.000.000
Sirets	154	83	412.500	990.000.000
Suator	155	85	425.000	1.020.000.000
Suru-Suru	400	188	941.250	2.259.000.000
Unir Sirau	177	96	480.000	1.152.000.000
Jumlah	4.292	2.186	10.926.500	26.223.600.000

Menurut jenis tanaman pada tahun 2021 menunjukkan total jumlah produksi sagu dalam bentuk tepung sagu di 23 distrik sebesar 10.926,50 ton pada total luas area panen sebesar 2.186 hektar dari 4.292 hektar yang tersedia.

B. Pertanian Hortikultura

Pertanian hortikultura di Kabupaten Asmat berada di hamparan dataran rendah di hampir seluruh wilayah distrik. Berbagai macam sayuran dan buah-buahan dihasilkan di Kabupaten Asmat meskipun dalam skala yang belum begitu besar. Dengan demikian, pertanian hortikultura di Kabupaten Asmat dapat dikatakan belum berorientasi komersial dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten masyarakat.

Komoditas sayuran yang dihasilkan Kabupaten Asmat terdiri dari berbagai jenis diantaranya adalah sawi, cabai rawit, kubis, kangkung, bayam, kacang panjang, ketimun, labu siam, tomat, terong, pare, dan buncis. Luas tanam

komoditas sayuran menurun dari tahun sebelumnya. Produksi berbagai komoditas sayuran di Kabupaten Asmat pada tahun 2022 antara lain: tanaman bayam, cabe rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, dan lain-lain (lihat tabel 2.12).

Tabel 2. 12. Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Sayuran di Kabupaten Asmat Tahun 2024

No	Tanaman	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1	Bayam	17.55	36.50
2	Cabe Rawit	14.46	362.20
3	Kacang Panjnag	23.85	54.86
4	Kangkung	55.57	233.39
5	Ketimun	3.38	4.60
6	Petsai	18.39	40.52
7	Terung	2.07	7.76
8	Tomat	5.29	29.85

Sumber: BPS Kabupaten Asmat Kab. Asmat, 2024.

Komoditas buah-buahan yang dihasilkan Kabupaten Asmat terdiri dari berbagai jenis diantaranya pisang, salak, rambutan, durian, mangga, nangka, nanas, jeruk siam, jeruk besar, matoa, pepaya, sukun, jambu biji, dan semangka. Luas tanam berbagai komoditas buah-buahan di Kabupaten Asmat pada tahun 2023 diantaranya adalah pisang seluas 182,20 ha, nangka seluas 19,41 ha, sukun seluas 44,29 ha, jeruk siam seluas 11,04 ha, matoa seluas 13,41 ha, dan lain-lain. Produksi berbagai komoditas buah-buahan di Kabupaten Asmat pada tahun 2023 diantaranya adalah pisang sebesar 2.573,81 ton, nangka sebesar 102,68 ton, jeruk siam 8,82 ton, sukun sebesar 14,10 ton, matoa 81,28 ton, dan lain-lain (lihat tabel 2.13).

Tabel 2. 13. Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Buah di Kabupaten Asmat

No.	Tanaman	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Pisang	182,20	271.86	2.573,81
2.	Salak	4,18	0,54	1.62
3.	Rambutan	4,89	1,00	5,20
4.	Durian	1,52	3,00	7,50
5.	Mangga	8,42	1,65	14.80
6.	Nangka	19,41	8,32	107.93
7.	Nanas	2,51	1,72	22.80
8.	Jeruk Siam	11,04	5,32	33.36
9.	Jeruk Besar	5,00	5,00	5,00
10.	Matoa	13,41	10,16	81,28
11.	Pepaya	2,47	2,29	10.13
12.	Sukun	44,29	4,56	14,10
13.	Jambu Biji	1,01	1,00	7.78
14.	Semangka	1,00	1,00	16,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kab. Asmat, 2023.

C. Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Asmat diantaranya adalah kelapa, karet, kopi, dan sagu. Dari berbagai komoditas tanaman perkebunan yang dibudidayakan masyarakat, komoditas kelapa dan sagu merupakan komoditas utama tanaman perkebunan dilihat dari sisi luas area dan produksinya. Kedua komoditas tersebut tersebar merata di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Asmat. Luas area tanaman kelapa di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 adalah seluas 548,25 ha dengan produksi mencapai 175,75 ton, sedangkan luas tanaman sagu pada tahun 2023 adalah seluas 4.255,50 ha dengan produksi mencapai 10.612,50 ton. Tingginya produksi sagu di Kabupaten Asmat disebabkan karena wilayahnya yang cocok untuk perkembangan optimal tanaman sagu dan tanaman tersebut merupakan salah satu makanan pokok yang ada di Kabupaten Asmat.

Tabel 2. 14. Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Asmat

No.	Tanaman	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)
1.	Sagu	4.255,50	569.25
2.	Kelapa	573.25	159.62
3.	Kopi	9,00	-
4.	Karet	19,50	-

Sumber: Asmat Dalam Angka, 2024.

D. Peternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Asmat belum berkembang, hal ini disebabkan usaha yang dilakukan masyarakat masih dalam skala rumah tangga. Jenis ternak yang dibudidayakan masyarakat adalah sapi, kambing, dan babi. Jenis ternak utama yang dibudidayakan masyarakat adalah babi dimana jumlah populasinya tertinggi dibandingkan ternak lainnya dan tersebar di seluruh distrik yang ada. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa populasi ternak kambing selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan, begitupun dengan ternak sapi yang pada periode 2019-2023 mengalami peningkatan, begitupun dengan ternak sapi yang pada periode 2019-2023 mengalami peningkatan. Ternak sapi yang pernah didistribusikan kepada masyarakat hampir seluruhnya hidup liar, sehingga sulit dipantau populasinya setiap tahun. Berdasarkan pendataan di lapangan banyak terdapat sapi betina yang produktif, hal ini juga memacu lonjakan populasi ternak sapi. Sedangkan populasi ternak babi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 1.012 ekor dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 1.721 ekor.

Tabel 2. 15. Perkembangan Jumlah Ternak di Kabupaten Asmat, 2019-2023

Tahun	Jumlah (ekor)		
	Sapi	Kambing	Babi
2019	102	97	1.012
2020	247	44	1.142
2021	255	43	1.035

2022	239	134	1.688
2023	261	211	1.721

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kab. Asmat, 2023.

Selanjutnya untuk ternak unggas, jenis unggas yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Asmat adalah itik/entog, ayam buras dan ayam ras pedaging (Broiler). Populasi itik hampir tersebar merata di seluruh distrik, sedangkan populasi ayam buras tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Asmat. Selama periode 2021-2023, populasi itik di Kabupaten Asmat mengalami penurunan, sedangkan jumlah populasi ayam buras mengalami peningkatan. Jumlah populasi itik pada tahun 2021 hanya sebanyak 1.458 ekor dan mengalami peningkatan menjadi 1.250 ekor pada tahun 2022, populasi ayam buras sebanyak 7.429 ekor pada tahun 2021, berkurang menjadi 7.220 ekor pada tahun 2022, dan bertambah menjadi 7.565 ekor pada tahun 2023. Sedangkan untuk ayam ras pedaging (Broiler) pada tahun 2022 hanya sebanyak 300 ekor.

Tabel 2. 16. Perkembangan Jumlah Ternak Unggas di Kabupaten Asmat, 2021-2023

Tahun	Jumlah (ekor)		
	Itik	Ayam Ras Broiler	Ayam Buras
2018	1.458	-	7.429
2019	1.250	300	7.220
2020	1.381	-	7.565

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kab. Asmat, 2023

E. Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan mencakup semua upaya memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan ekologi, dan sosial masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat terutama masyarakat kawasan sekitar hutan. Oleh karena itu, potensi sektor kehutanan harus diolah sebaik mungkin sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Asmat. Pengembangan sektor

kehutanan harus melingkupi berbagai usaha pemanfaatan hutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup dalam arti luas, pada hakekatnya harus berprinsip dapat memberikan manfaat optimal jangka panjang, meliputi sistem dan manajemen pengelolaan kawasan hutan beserta isinya sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat agar sejahtera dan berkeadilan.

Tabel 2. 17. Luas Kawasan Hutan Menurut Paduserasi di Kabupaten Asmat, 2021

No.	Jenis Hutan	Luas (ha)
1.	Kawasan Hutan Lindung (HL)	1.111.365,28 Ha
2.	Kawasan Suaka Alam/Konservasi (KSA)	827.861,53 Ha
3.	Kawasan Hutan Produksi (HP)	84.880,79 Ha
4.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	962.795,50 Ha
6.	Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)	38.136,50 Ha
7.	Areal Penggunaan Lain (APL)	7.264,91 Ha

Sumber: DLH Kabupaten Asmat, 2021.

Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020, dimana Luas hutan lindung di Kabupaten Asmat Tahun 2020 sebesar 1.111.365,28 Ha, Hutan produksi tetap 84.880,79 Ha, Hutan produksi terbatas 962.795,50, sedangkan Kawasan suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam di Kab.Asmat sebesar 287.861,53 Ha.

Selain dua tipe hutan yang telah disebutkan di atas, jenis hutan lainnya di Kabupaten Asmat adalah hutan lindung, hutan produksi yang dikonservasi, dan jenis hutan lainnya. Produk kayu dari hutan di Kabupaten Asmat hingga saat ini adalah kayu gergaji. Di samping kayu, hutan di kabupaten Asmat juga menghasilkan kayu gaharu, sagu, dan kemendangan.

F. Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Asmat. Wilayah Kabupaten Asmat yang berada di pesisir Laut Arafura dan memiliki banyak sungai besar membuat wilayah ini memiliki potensi perikanan yang besar baik untuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2023, produksi ikan di Kabupaten Asmat adalah sebesar 14.930,13 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 218.068.500.00,-. Produksi ikan di Kabupaten Asmat masih dapat ditingkatkan mengingat usaha perikanan yang dilakukan masyarakat sebagian besar masih skala tradisional. Pada tahun 2018, produksi sektor perikanan hanya sebesar 12.206,79 ton atau senilai Rp 191.916.655.000,-. Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2023 dengan produksi mencapai 14.930,13 ton atau setara Rp 218.068.500.00,-.

Tabel 2. 18 Produksi dan Nilai Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Asmat Tahun 2022

No.	Perikanan	2022
1.	Perikanan Laut	
	Produksi (ton)	13.750.18
	Nilai (000) Rp	870.92.000
2.	Perikanan Darat	
A.	Perikanan Budidaya	
	Produksi (ton)	133.65
	Nilai (000) Rp	6.674.000
B.	Perairan Umum	
	Produksi (ton)	
	Nilai (000) Rp	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2023.

Tabel 2. 19 Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan ikan (Unit) 2023

NO	JENIS ARMADA	Tahun 2023
1	Perahu Tanpa Motor	4.879
	a. Laut	
	b. Perairan Umum	
2	Perahu Motor Tempel	
	a. Laut	1.014
	b. Perairan Umum	
3	Kapal Motor	
	3.1 < 5 GT	0
	3.2 5 – 10 GT	30
	3.3 10 -20 GT	3
	3.4 20 – 30 GT	14
	3.5 30 – 50 GT	-
	3.6 50 – 100 GT	10
	3.7 100 – 200 GT	-
	3.8 > 200 GT	-

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2023

Tabel 2. 20 Perkembangan Alat Tangkap Ikan

NO	ALAT PENANGKAP IKAN	Tahun 2023
	LAUT	
1	Pukat Ikan	
2	Pukat Udang	
3	Pukat Pantai	8
4	Jaring Insang Hanyut	1.702
5	Jaring Insang Tetap	13.904
6	Jaring Insan Kakap	2.377
7	Lempara Dasar	81
8	Rawai Dasar	
9	Serok	1.951
10	Pancing	2.464
11	Lain-lain	275
	UMUM/DARAT	
1	Perangkap Kepiting	1.835
2	Jaring Kakap	2.322
3	Jaring Bulanak	1.419
4	Jaring Udang	85
5	Rawai Dasar	1.466

6	Serok	1.128
7	Lempara Dasar	715
8	Lain-Lain	-
JUMLAH/TOTAL		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2023.

Tabel 2. 21. Perkembangan Pemasaran Antar Pulau Komoditi Olahan dan Ikan Beku (Ton)

NO	KOMODITI	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	KOMODITI OLAHAN					
1	Udang	-	-	-	-	7,83
2	Ikan Asin	1,43	2,44	2,44	3,04	3,07
3	Gelembung Ikan	10,16	4,21	4,21	5,08	7,83
4	Sirip Ikan Hiu	-	-	-	-	-
5	Tulang Ikan Hiu	-	-	-	-	-
6	Kulit Ikan	-	-	-	-	-
7	Teripang	-	-	-	-	-
	IKAN BEKU					
1	Ikan Beku Campuran	149,786	550,036	550,036	1180,10	913,75
JUMLAH/TOTAL		506,94	76,09	161,38	556,69	556,69

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2023

Tabel 2. 22. Perkembangan Petani Ikan/Nelayan Di Kabupaten Asmat (Orang)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembudidaya Ikan	2.136	2.136	2.136	2.136	2.974
2	Nelayan Penuh	10.213	10.305	10.416	10.423	10.656
3	Nelayan Sambilan Utama	18.962	19.057	19.411	19.439	19.958
4	Nelayan Sambilan Tambahan	3.635	3.642	3.824	3.852	3.936
JUMLAH/TOTAL		33.130	34.672	35.140	35.787	35.850

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2020.

Jika dirinci menurut jenisnya pada tahun 2023, produksi perikanan di Kabupaten Asmat didominasi oleh produksi perikanan laut yang mencapai sebanyak 13.750.18 ton dengan nilai dari produksi mencapai Rp 870.920.000. Produk unggulan perikanan laut Kabupaten Asmat adalah pari, cucut, dan bulanak, sedangkan produk unggulan perikanan darat adalah bandeng.

Lebih jauh lagi, terdapat banyak peluang peningkatan produksi sektor perikanan di Kabupaten Asmat. Berdasarkan data dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Asmat, sebagian besar armada perikanan tangkap di Kabupaten Asmat adalah perahu tanpa motor dengan jumlah sebanyak 3616 unit. Sedangkan untuk armada perikanan tangkap yang menggunakan perahu motor berkekuatan 21-30 GT hanya sebanyak 14 unit. Jika armada perikanan tangkap di Kabupaten Asmat ditingkatkan kapasitasnya dari perahu tanpa motor menjadi perahu motor, maka jumlah produksi perikanan akan mengalami peningkatan. Di samping itu, sebagian besar nelayan di Kabupaten Asmat adalah nelayan sambilan utama sebanyak 19.439 orang dan nelayan pembudidayaannya sebanyak 2.136 orang. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja sektor perikanan di Kabupaten Asmat masih bisa dioptimalkan dengan memberikan fasilitasi peningkatan kemampuan produksi perikanan kepada para pelaku usaha perikanan.

2.1.2.2. Sektor Pariwisata

Potensi wisata di Kabupaten Asmat meliputi wisata alam, budaya, dan sosial. Wisata alam didominasi oleh wisata pesisir seperti pantai dan pulau, selain wisata Taman Nasional Lorentz. Untuk wisata budaya dan sosial, yang ditonjolkan adalah keunikan budaya suku asmat seperti pesta budaya suku asmat, museum budaya dan kerajinan, dan rumah pohon. Objek wisata di Kabupaten Asmat yang fokus pada alam dan budaya merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi alam yang masih belum banyak terpengaruh budaya luar. Jika objek wisata ini dapat dipasarkan secara menarik, akan banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Asmat. Namun demikian, perlu diperhatikan sarana pendukung pariwisata seperti transportasi dan penginapan.

Tabel 2. 23. Lokasi Objek Wisata dan Jenis Wisata

No.	Lokasi Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1.	Distrik Agats	Kampung Syuru	Wisata Budaya Pesta dan Tarian Adat
2.	Distrik Agats	Kampung Uwus	Wisata Budaya Pesta Adat dan Ukiran
3.	Distrik Agats	Ibu Kota Kabupaten	Wisata Budaya Pesta Adat, Ukiran dan Anyaman Noken
4.	Distrik Pulau Tiga	Taman Loreus	Wisata Alam
5.	Distrik Atsy	Kampung Atsj	Wisata Budaya Pesta Patung Bis, Ukiran dan Anyaman Noken
6.	Distrik Bectbamu	Kampung Biwa Laut	Wisata Budaya Pesta Patung Bis, Ukiran dan Ukiran
7.	Distrik Bectbamu	Kampung Pirpis	Wisata Budaya, Pesta Perahu Baru / Cibi Tari
8.	Distrik Suator	Rawa Baki	Wisata Alam
9.	Distrik Mabul - Korowai Buluanop	Korowai	Wisata Alam, Rumah Pohon
10.	Distrik Fayit	Ocenep Piriye	Wisata Budaya, Ukiran Patung

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2020

2.1.2.3. Kondisi Kebencanaan

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2022, Kabupaten Asmat termasuk kabupaten yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang dengan skor secara keseluruhan sebesar 123,20. Jika dirinci menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kabupaten Asmat adalah untuk bencana banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan. Untuk risiko bencana banjir, Kabupaten Asmat termasuk ke dalam kelas risiko tinggi dengan nilai sebesar 36. Ancaman bencana banjir yang tinggi di Kabupaten Asmat disebabkan oleh wilayahnya yang berupa dataran rendah bahkan berada di bawah permukaan laut. Jenis bencana banjir yang ada di Kabupaten Asmat dapat berupa banjir yang berasal dari daratan karena banyaknya sungai besar dan banjir rob yang berasal dari aliran pasang air laut.

Tabel 2. 24. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Asmat

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas Resiko
1	Banjir	36	Tinggi
2	Gempa Bumi	14.40	Tinggi
3	Tsunami	8.00	Sedang
4	Tanah Longsor	8.40	Sedang
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi
6	Kebakaran Lahan dan Hutan	16.80	Tinggi
7	Cuaca Ekstrim	5.20	Rendah
8	Kekeringan	20.80	Tinggi

Sumber: BNPB, Tahun 2022

Berdasarkan data mengenai indeks risiko kebencanaan bagi penduduk di Kabupaten Asmat, bencana yang akan memberikan dampak terbesar bagi Kabupaten Asmat adalah Gempa Bumi. Hal tersebut merupakan dampak dari lokasi geografis Asmat yang berada di sekitar patahan di pantai selatan Pulau Papua.

Tabel 2. 25. Korban Bencana Alam Kab. Asmat 2020 - 2022

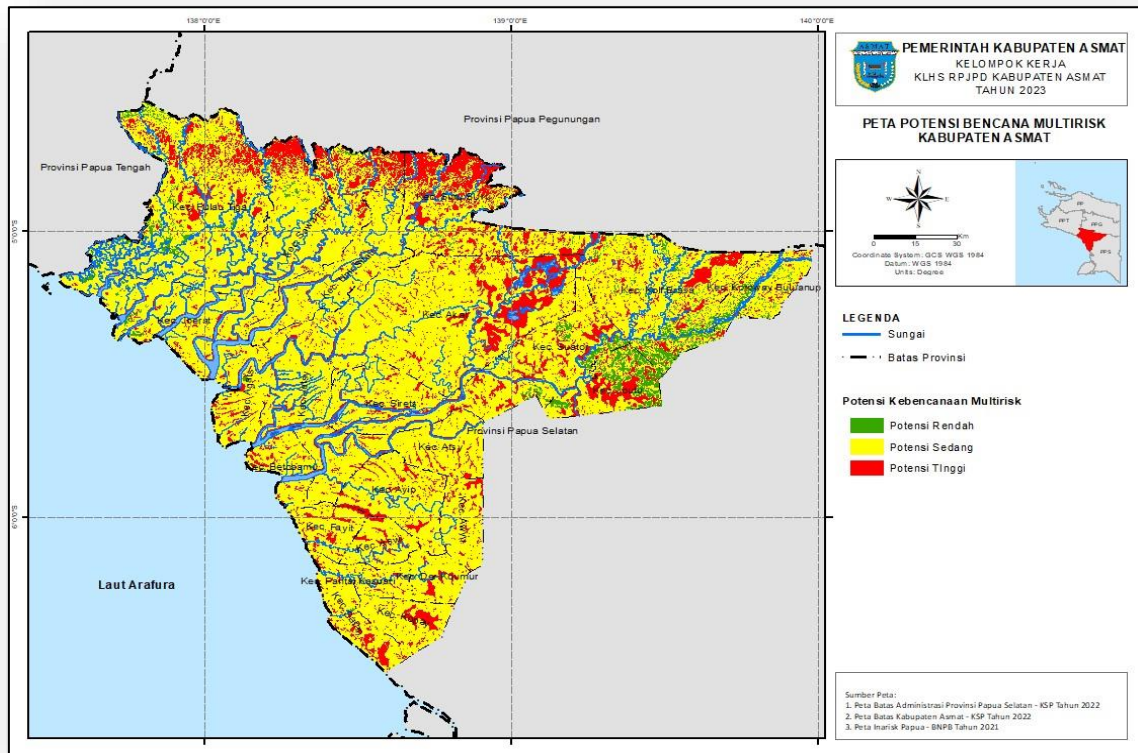
DISTRIK	BANJIR			GEMPA BUMI			TANAH LONGSOR		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PANTAI KASUARI	7	-	-	-	-	-	-	-	-
KOPAY	8	1	-	-	-	-	-	-	-
DER KOUMOR	6	1	-	-	-	-	-	-	-
SAFAN	5	-	-	1	-	-	-	-	-
AWYU	-	-	-	4	-	-	-	-	-
FAYIT	-	-	-	12	-	-	-	-	-
ASWI	-	-	-	9	-	-	-	-	-
ATSY	-	-	-	7	-	-	-	-	-
SIRETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYIP	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BETCBAMU	-	-	-	5	-	-	-	-	-
AKAT	-	-	-	4	-	-	-	-	-
JETSY	-	-	-	4	-	-	-	-	-
AGATS	-	-	-	1	6	5	-	-	-
SAWA ERMA	-	-	-	7	-	-	-	-	-
SURU-SURU	3	-	-	-	-	-	1	-	-
JOERAT	-	-	-	3	-	-	-	-	-
PULAU TIGA	-	1	-	6	6	-	-	-	-

Sumber: BPS Kab. Asmat 2023

Selain itu, Kabupaten Asmat juga memiliki potensi bencana berupa kebakaran hutan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi penggunaan lahan Kabupaten Asmat yang masih didominasi oleh hutan. Oleh karena itu, regulasi tentang rehabilitasi hutan harus

dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, mengingat ketergantungan yang masih tinggi dari masyarakat Asmat dengan sumberdaya hutan.

Gambar 2. 11. Potensi Kebencanaan Multirisk Kabupaten Asmat Tahun 2021



Sumber: Peta Inarisk Multibencana Papua – BNPB 2021

2.1.2.4. Kondisi Sosial dan Budaya

Wilayah Adat Animha di Kabupaten Asmat merupakan wilayah berdiamnya 12 (duabelas) rumpun dan sekitar 8 (delapan) suku yang mendiami wilayah pesisir selatan yang berbatasan dengan suku komoro di bagian barat sampai dengan pesisir yang bersebelahan dengan orang-orang dari suku Yaghai dan Tamariho di Mappi. Sedangkan wilayah pedalaman atau lebih kedaratan berbatasan dengan wilayah suku orang-orang yahukimo dan korowai bagian boven digoel. Kehidupan suku-suku di Asmat sangat dipengaruhi oleh zona ekologi sebagai habitat hidup mereka dimana wilayah Asmat masuk dalam zona rawa, pantai dan sepanjang aliran sungai, memiliki kesamaan dengan Mappi dan Merauke.

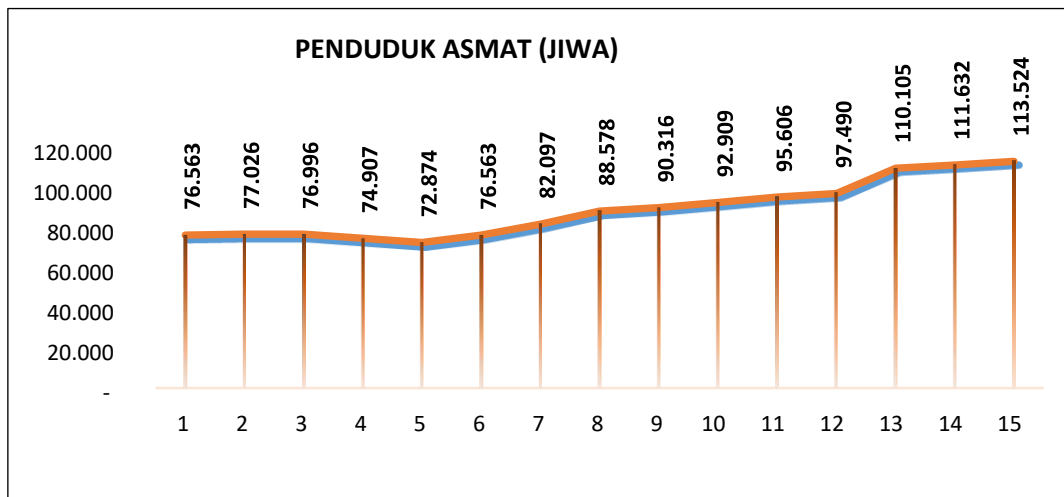
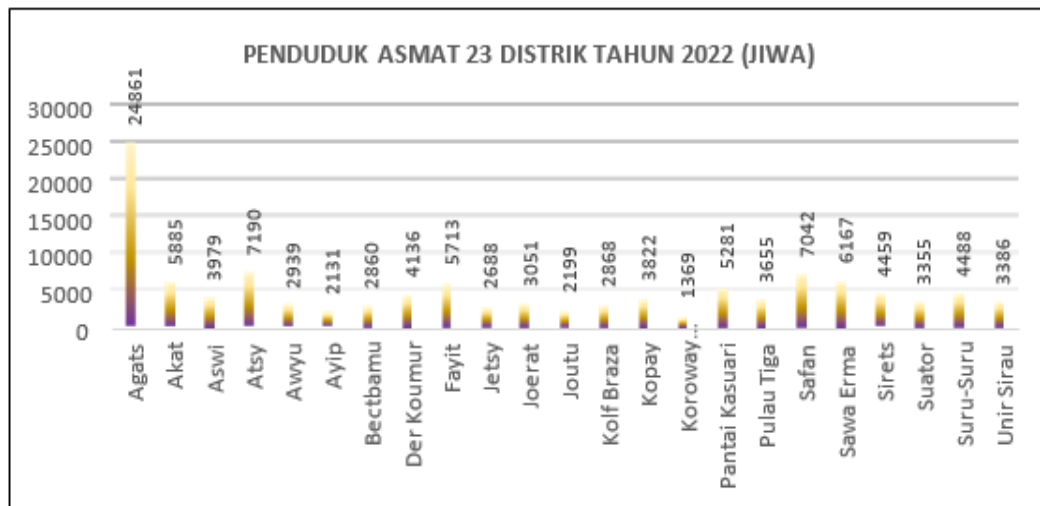
Sungai Aswet, Bets, Undir, Brazza, Lorentz, Sirets, dan Pomats adalah bagian daerah aliran sungai besar yang mengalir wilayah dataran bakau dan rawa dari bagian hulu sungainya berbatasan dengan wilayah adat suku suku di kabupaten yahukimo, Boven digoel dan Mappi. Sungai-sungai besar ini disamping sebagai wadah transportasi sungai, masyarakat adat juga percaya ini merupakan aliran yang menghantar mereka dalam upaya mencari makan pada rawa rawa air payau sampai tawar dibelakang hamparan bakau luas. Asmat memiliki sungai sungai besar yang bermuara langsung ke laut Arafura misalnya sungai Bets, Siret, Biwir, Aswet, Pomats, Unir, fai Momats Yets dan beberapa sungai lainnya. Dari beberapa sungai besar itu terdapat percabangan anak-anak sungai yang menghubungkan wilayah Asmat hingga ke pedalaman.

Kondisi lingkungan alam Asmat sendiri merupakan hutan heterogen berawa rendah diselingan dengan hutan sagu dan pohon nibung yang berada di tepian sungai, juga jenis-jenis pandanus dan tanaman berkayu keras.

2.1.3. TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

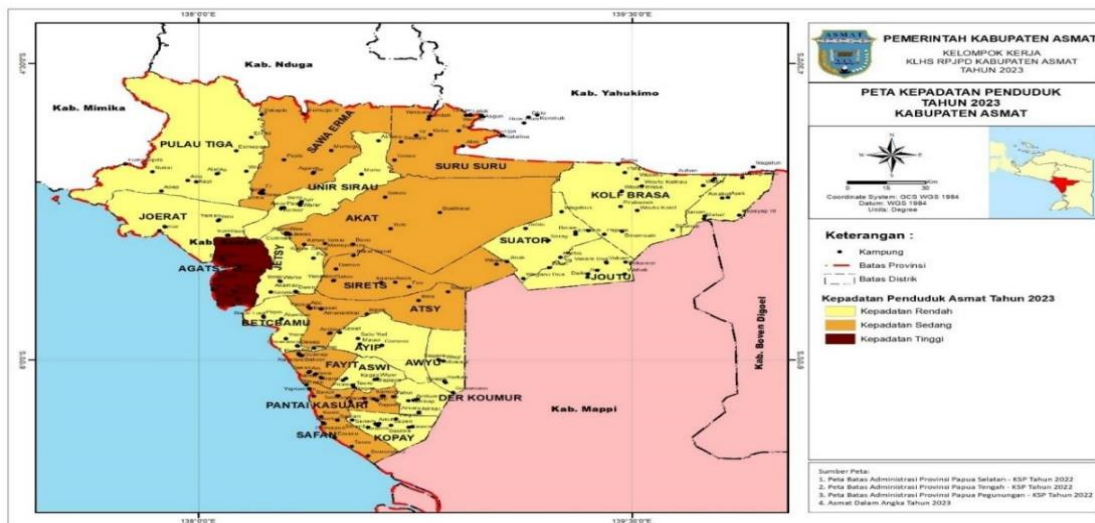
2.1.3.1. Kondisi Demografi

Pada tahun 2005 jumlah penduduk di kabupaten Asmat sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan trend fluktuasi cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 sensus penduduk sebesar 76.563 jiwa, kemudian tahun 2009 menurun menjadi 72.874 jiwa. Pada sensus penduduk 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai dengan jumlah penduduk 2022 mencapai 113.524 jiwa atau tertinggi kedua setelah merauke dengan laju pertumbuhan mencapai 3,7 % lebih tinggi dari tiga kabupaten lainnya di Provinsi Papua Selatan (Mappi, Boven dan Merauke) yang hanya berkisar 1,4 – 2,8 % saja. Angka pertumbuhan tinggi bisa saja terjadi karena migrasi orang masuk ke Asmat cukup tinggi disamping angka kelahiran yang meningkat dibanding angka kematian dan emigrasi. (BPS Papua Dalam Angka 2023). Dengan dimekarkannya distrik di kabupaten Asmat menjadi 23, maka distribusi penduduk di kabupaten Asmat seperti terlihat pada gambar berikut ini, lebih banyak terpusat di beberapa distrik antara lain: tertinggi di distrik Agats dengan jumlah penduduk 24.861 jiwa dan seterusnya distrik Atsy 7.190 jiwa dan distrik Safan 7.042 jiwa, kemudian distrik Sawaerma, dan distrik Fayit dengan penyebaran terendah terjadi di distrik Koroway Buluanop dengan 1396 jiwa.



Sumber: BPS Asmat 2023)

Gambar diatas menjelaskan tingkat kepadatan penduduk tinggi terjadi Agats sebagai ibukota Kabupaten Asmat dimana pusat pemerintahan berada dan pusat interaksi ekonomi. Selanjutnya untuk tingkat kepadatan sedang berada pada distrik pantai kasuari, Safan, Fayit, Atsy, Sirets, Akat, Suru suru dan Sawaerma atau wilayah pesisir pantai dan posisi distrik pada pinggiran sungai besar, sedangkan Kepadatan rendah terjadi di distrik lainnya yang sedikit lebih masuk ke pedalaman tengah dan beberapa berada jauh dari sungai besar. Lihat gambar dan tabel berikut ini:

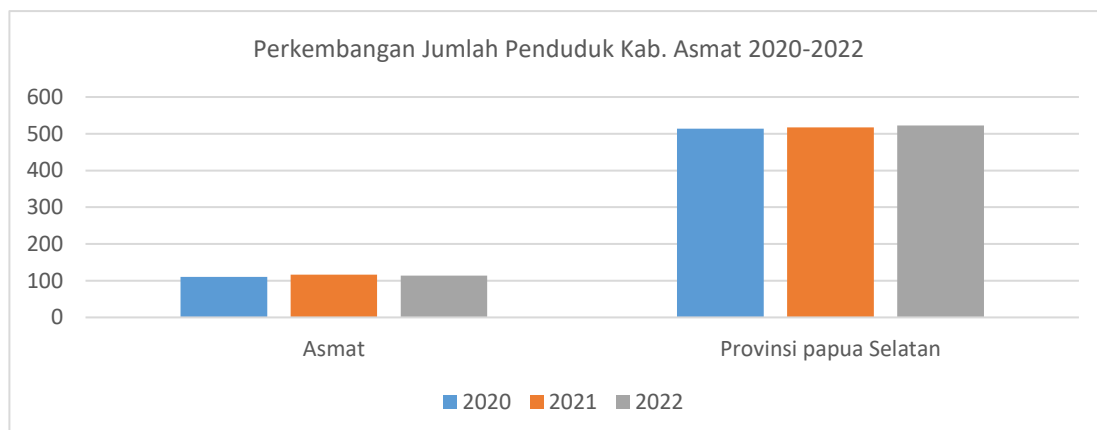


Jumlah penduduk Kabupaten Asmat pada tahun 2022 berjumlah 113.524 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 58.707 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 54.87 jiwa. Data perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Asmat selama 3 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

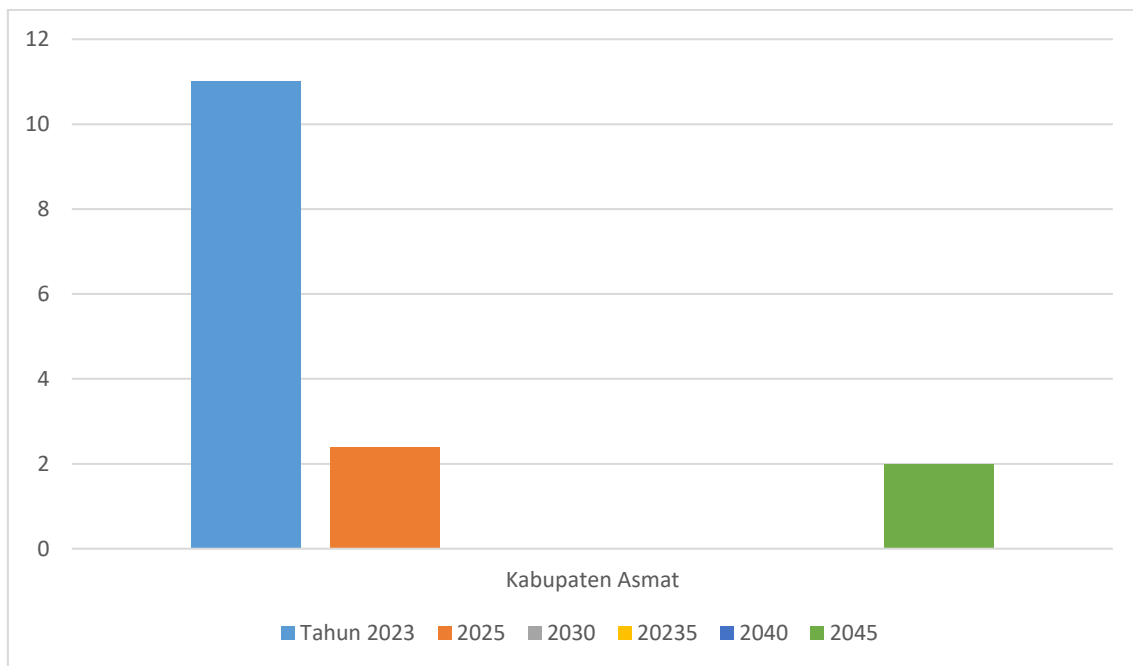
Tabel 2. 26. Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Asmat 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2020	110.105 Jiwa
2.	2021	111.632 Jiwa
3.	2022	113.524 Jiwa

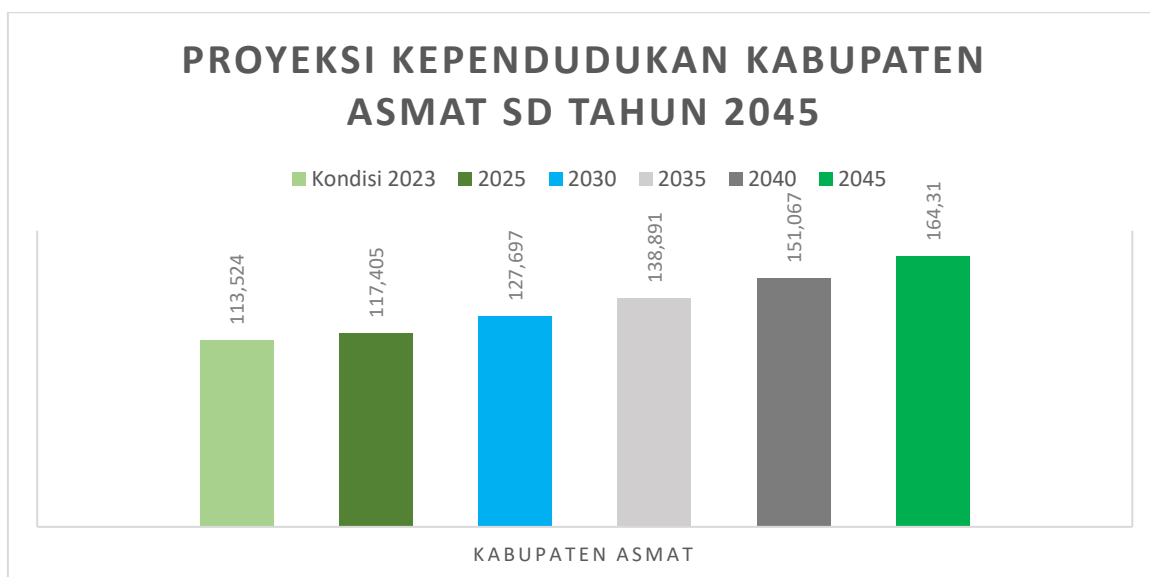
Gambar 2. 12. Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Asmat 2020-2022 dengan Provinsi Papua Selatan 2021-2025



Sumber: Kabupaten Asmat Dalam Angka, 2023



Tabel 2. 27. Proyeksi Kependudukan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 sd 2045



Sumber : Bappeda Asmat Tahun 2024

Kepadatan penduduk di Kabupaten Asmat dikatakan masih sangat rendah, karena rata-rata kepadatan penduduk hanya sebesar 4,4 jiwa/km² per tahun selama periode 2018-2020. Sementara untuk kepadatan rumah tangga sebesar 3,78 jiwa/kk, dengan kata lain untuk setiap kepala keluarga di Kabupaten Asmat terdapat 3 sampai 4 jiwa yang menetap bersama. Kepadatan penduduk Kabupaten Asmat perluas wilayah adalah 4,4 jiwa/km², yang berarti setiap 1 km² dihuni oleh 4 sampai 5 penduduk. Lihat tabel berikut ini.

Tabel 2. 28. Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km2 Menurut Distrik, 2020-2022

No.	Tahun	Luas Distrik (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1.	2020	31.964,89	110.105	7.02
2.	2021	31.964,89	111.632	7.12
3.	2022	31.964,89	113.524	4.54

Sumber: Kabupaten Asmat Dalam Angka, 2023 & RPD Provinsi Papua Selatan

Indikator kependudukan lainnya yang juga penting adalah sex ratio, dimana sex ratio ini dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Jika sex ratio dikalikan 100 maka dapat diartikan bahwa tiap 100 penduduk laki-laki terdapat sekian penduduk perempuan. Pada umumnya sex ratio nilainya dibawah 100, hal ini dikarenakan penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, tetapi hal ini tidak terjadi di Kabupaten Asmat, justru sebaliknya bahwa sex ratio rata-rata diseluruh distrik di atas 100 yaitu: jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Sex ratio dipakai untuk melihat perubahan penduduk menurut jenis kelaminnya. Dengan membandingkan besarnya sex ratio dari tahun sebelumnya akan membawa kita pada sebuah pertanyaan mengapa perubahan itu terjadi. Perubahan itu bisa terjadi karena kelahiran, kematian dan migrasi. Sebagai contoh di Kabupaten Asmat, angka sex ratio pada tahun 2018 adalah 110 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 109 dengan asumsi bahwa setiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 109 penduduk laki-laki.

Struktur penduduk Kabupaten Asmat berdasarkan ilustrasi piramida penduduk di atas menggambarkan struktur umur yang ada di Kabupaten Asmat. Model piramida penduduk di Kabupaten Asmat menunjukkan pola bentuk *ekspansive* (piramida penduduk muda). Dasar piramida yang merupakan penduduk kelompok usia 0-4 tahun masih sangat lebar dibandingkan kelompok usia lainnya, dimana hal ini mengindikasikan dampak kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (KB) di Asmat belum signifikan atau terlihat. Ujung piramida yang cukup curam menunjukkan masih rendahnya angka harapan hidup penduduk Asmat.

Tabel 2. 29. Penduduk Kabupaten Asmat menuet kelompok umur, 2023

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2		3		4	
0–4	14.223	10.978	13.701	10.654	27.924	21.632
5–9	7.356	10.324	7.333	9.966	14.689	20.290
10–14	6.029	6.118	5.620	5.855	11.649	11.973
15–19	4.620	5.255	3.897	4.540	8.517	9.795
20–24	3.908	4.408	3.266	3.674	7.174	8.082
25–29	3.684	3.765	3.842	3.482	7.526	7.247
30–34	4.030	3.732	3.823	3.865	7.853	7.597
35–39	3.432	3.691	3.271	3.507	6.703	7.198
40–44	3.316	3.147	3.012	2.995	6.328	6.142
45–49	2.501	2.770	2.042	2.434	4.543	5.204
50–54	2.060	2.054	1.924	1.748	3.984	3.802
55–59	1.447	1600	1.149	1.422	2.596	3.022
60–64	940	1.015	915	840	1.855	1.855
65–69	612	624	474	579	1.086	1.203
70–74	298	366	302	285	600	651
75+	251	252	246	255	497	507
Asmat	58.707	60.099	54.817	56.101	113.524	116.200

Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2024

Tabel 2. 30. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Asmat Sampai dengan Tahun 2045 berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)			Tahun Proyeksi														
			2025			2030			2035			2040			2045		
Laki- Laki	Perempuan	Rasio	Laki- Laki	Perempuan	Rasio	Laki- Laki	Perempuan	Rasio	Laki- Laki	Perempuan	Rasio	Laki- Laki	Perempuan	Rasio	Laki- Laki	Perempuan	Rasio
57.210	53.931	106	59.413	56.551	105	63.275	61.203	103	67.387	66.238	102	70.869	70.562	100	76.432	77.584	99

Sumber data: Data Olah, Bappeda Asmat, 2045

2.1.3.2. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045

Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi:

Tabel 2. 31. Proyeksi Kebutuhan rumah/tempat tinggal dan permukiman

No	Analisi Proyeksi Kebutuhan	2030	2035	2040	2045
1.	Perkotaan Agats;	✓	✓	✓	✓
2.	Perkotaan Atsy;	✓	✓	✓	✓
3.	Perkotaan Tomor Asmat;	✓	✓	✓	✓
4.	Perkotaan Sawa Erma	✓	✓	✓	✓

Tabel 2. 32. Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik Tahun 2025-2045

NO	JENIS SARANA/ PRASARANA	KONDISI 2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Pembangunan Talud		320 Meter	1.600 Meter			
2	Pembangunan sumur bor	9 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
3	Pembangunan Instalasi Pengolahan air sumur bor	4 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20Unit	25 Unit
4	Pembangunan Jalan Konstruksi Beton	2 Km	11,5 Km	35 Km	45 Km	85 Km	115 Km
5	Pembangunan PAH Lantai Beton	6 Unit	18 Unit	48 Unit	78 Unit	108 Unit	138 Un it
6	Septic Tank skala Individual	70 unit	140 Unit	210 Unit	280 Unit	350 Unit	420 Unit

Tabel 2. 33. Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasana Sekolah SD, SMP, SMA Dan SMK Sampai Dengan Tahun 2045

No.	JENIS SARANA / PRASANA	TAHUN 2023			2025	2030	2035	2040	2045
		RUSAK	BAIK	JUMLAH					
1.	RUANG KELAS	277	445	722	875	1220	1450	1820	2210
2.	RUMAH GURU	242	220	462	625	850	1120	1520	1850
3.	RUANG TU/RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH	62	24	86	105	160	174	187	192
4.	RUANG PERPUSTAKAAN	7	5	12	35	75	120	125	135
5.	UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	9	7	16	30	65	85	105	120
6.	RUANG BK	12	2	14	30	65	85	105	120
7.	GEDUNG SERBAGUNA	4	2	6	15	25	45	60	80
8.	TOILET / WC	247	26	273	295	315	340	360	400
9.	LAPANGAN UPACARAH	6	17	23	35	95	130	140	145

No.	JENIS SARANA / PRASANA	TAHUN 2023			2025	2030	2035	2040	2045
		RUSAK	BAIK	JUMLAH					
1.	RUANG KELAS	61	70	131	345	470	520	650	750
2.	RUMAH GURU	71	36	107	230	420	610	750	850
3.	RUANG TU/RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH	12	3	15	23	25	30	35	40
4.	RUANG PERPUSTAKAAN	8	4	12	19	25	30	35	40
5.	UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	9	2	11	15	18	25	30	35
6.	LABOTORIUM KOMPUTER	6	4	10	17	25	32	35	40
7.	GEDUNG SERBAGUNA	4	2	6	19	25	30	35	40
8.	TOILET / WC	46	18	64	75	90	120	135	150
9.	LAPANGAN UPACARAH	6	3	9	12	15	20	25	35

No.	JENIS SARANA / PRASANA	TAHUN 2023			2025	2030	2035	2040	2045
		RUSAK	BAIK	JUMLAH					
1.	RUANG KELAS	28	25	53	75	120	180	240	290
2.	RUMAH GURU	19	17	36	85	150	210	270	350
3.	RUANG TU/RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH	3	3	6	15	20	30	45	60
4.	RUANG PERPUSTAKAAN	2	0	2	7	20	30	40	50
5.	UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	1	0	1	7	10	15	25	35
6.	LABOTORIUM KOMPUTER	4	1	3	7	12	20	30	40
7.	LABOTORIUM BIOLOGI	1	1	1	7	12	20	30	40
8.	LABOTORIUM KIMIA	1	0	1	7	12	20	30	40
9.	LABOTORIUM BAHASA	0	0	0	7	12	20	30	40
10.	LABOTORIUM FISIK	1	0	1	7	12	20	30	40
11.	RUANG BK	0	0	0	3	10	20	26	35
12.	GEDUNG SERBAGUNA	1	1	2	5	10	20	30	40
13.	TOILET / WC	10	6	16	25	45	65	85	100
14.	LAPANGAN UPACARAH	0	3	3	7	15	25	35	45

No.	JENIS SARANA / PRASANA	TAHUN 2023			2025	2030	2035	2040	2045
		RUSAK	BAIK	JUMLAH					
1.	RUANG KELAS	3	6	9	12	18	25	30	35
2.	RUMAH GURU	2	3	5	10	15	23	29	33
3.	RUANG TU/RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH	0	1	1	2	3	3	4	5
4.	RUANG PERPUSTAKAAN	0	0	0	2	3	3	4	5
5.	UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	0	0	0	2	3	3	4	5
6.	LABOTORIUM KOMPUTER	0	1	1	2	3	3	4	5
7.	RUANG BK	0	0	0	2	3	3	4	5
8.	GEDUNG SERBAGUNA	0	0	0	2	3	3	4	5
9.	TOILET / WC	4	3	7	10	25	25	28	30
10.	LAPANGAN UPACARA	0	0	0	2	3	3	4	5
11.	ASRAMA	0	0	0	2	6	8	12	15
12.	RUANG PRAKTIK MESIN OTOMATIS	0	0	0	2	3	3	4	5
13.	RUANG DESAIN MULTIMEDIA	0	0	0	2	3	3	4	5
14.	RUANG PRAKTIK NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKA	0	0	0	2	3	3	4	5
15.	BANGUNAN LABORATORIUM AIR TAWAR	0	0	0	2	3	3	4	5
16.	KOLAM PERIKANAN AIR TAWAR	0	0	0	2	3	3	4	5

Tabel 2. 34. Proyeksi Kebutuhan Saprass Pemberdayaan Masyarakat

KENIS SARANA PRASARANA	Kondisi Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Rumah Layak Huni Type 45 m2 untuk OAP	188 unit	250 unit	1.250 unit	2.500 unit	3.750 unit	5.000 unit
Pembangunan Sarana air minum dan sanitasi dasar RT	17 unit	100 unit	500 unit	1000 unit	1.500 unit	2.000 unit

Penyediaan Tenaga Listrik untuk OAP	277 unit	350 unit	1.750 unit	3.500 unit	5.250 unit	7.000 unit
-------------------------------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

Tabel 2. 35. Proyeksi Kebutuhan Saprass Kesehatan

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	KONDISI 2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Gedung Puskesmas	23 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
2	Ruang Rawat Inap Puskesmas	4 Unit	20 Unit	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
3	IPAL	12 Unit	11 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
4	Air Bersih	10 Unit	13 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
5	Solar Sel 12 KVA (Puskesmas)	4 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
6	Solar Sel 10 KVA (Puskesmas)	6 Unit	7 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
7	Incenerator Puskesmas	Tidak Ada	23 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
8	Puskesmas Pembantu (ILP)	68 Unit	34 Unit	69 Unit			
9	Sarana transportasi Long boat Fiber 15 PK Puskesmas Pembantu	Tidak ada	68 Unit	34 Unit	69 Unit		
10	Solar Sel Puskesmas Pembantu	18 Unit	50 Unit	34 Unit	69 Unit		
11	Rumah Dinas dokter Puskesmas type 69 M2	9 Unit	25 Unit	12 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
12	Rumah Dinas Kopel Paramedis puskesmas type 72 M2	47 Unit	30 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit
13	Rumah Dinas Barak Paramedis puskesmas type 144 M2	38 Unit	14 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
14	Sarana Transportasi Speed boat 85 PK (Puskesmas)	28 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
15	Sarana Transportasi Speed boat 40 PK (Puskesmas)	14 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
16	Laboratorium Kesehatan Daerah	Tidak ada	1 Unit				
17	Gudang Farmasi Kabupaten	2 Unit		1 Unit			
18	Incenerator Kabupaten	1 Unit	1 Unit				

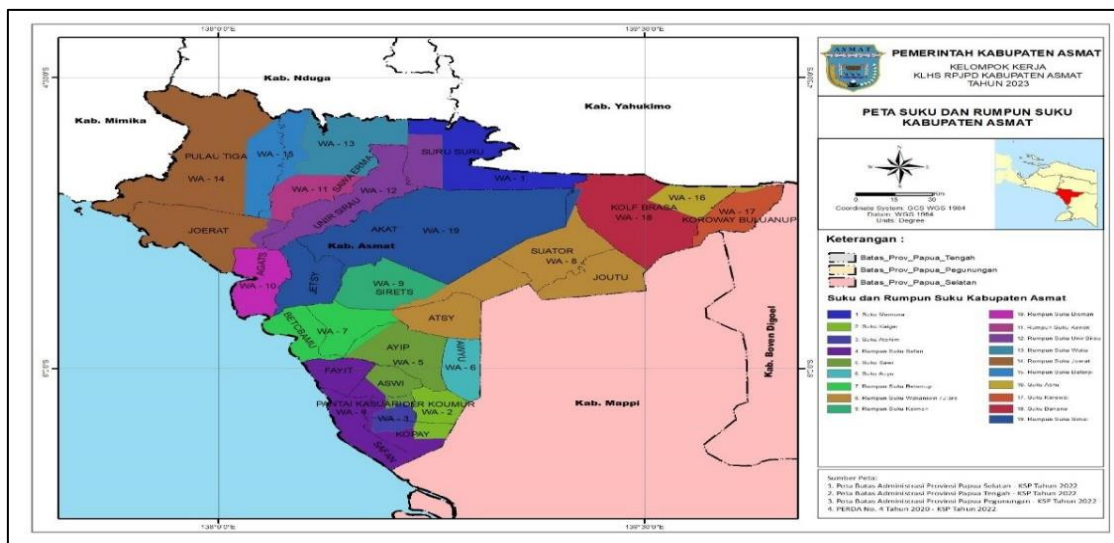
Tabel 2. 36. Proyeksi Kebutuhan Sapras Persampahan

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	KONDISI 2023	2025	2030	2035	2040	2045
1.	Tong Sampah	856 bh	500 bh	1000 bh	1000 bh	1000 bh	1000 bh
2.	Motor Viar	6 unit	5 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
3.	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
4.	Karung 100 kg	2000 bh	5000 bh	5000 bh	5000 bh	5000 bh	5000 bh
5.	Gerobak besi	4 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
6.	Mini Kontainer	-	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
7.	Mesin Press botol	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
8.	Mesin Cacah plastic	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9.	Mesin Diesel 10 KVA	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
10.	Mesin penyapu jalan	-	1 unit	-	1 unit	-	-
11.	Sepatu boot	-	500	500	500	500	500
12.	Ekscavator mini	-	buah	buah	buah	buah	buah
13.	Mesin Kompos	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
14.	Sapu Lidi	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Parang	-	1000 bh	1000 bh	1000 bh	1000 bh	1000 bh
16.	Penggaruk	-	500 buah	500 buah	500 buah	500 buah	500 buah
			100 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100 buah
			500 buah	500 buah	500 buah	500 buah	500 buah

Suber Data : Bappeda Asmat. 2024 (data olahan)

2.1.3.3. KONDISI MASYARAKAT ASLI PAPUA

Otonomi khusus melalui peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Hak Masyarakat Hukum Adat maka pemerintah kabupaten Asmat telah mengakui eksistensi dan keberadaan entitas orang Asli Papua terdiri dari 12 Forum Adat Rumpun dan 8 suku. Keberadaan posisi wilayah adat dan suku dalam administrasi kabupaten, dapat dilihat pada posisi wilayah adat setiap FAR yang ada di Asmat pada 23 distrik tersebar di 222 kampung di bawah ini:



Tabel 2. 37. Wilayah adat Rumpun dan Suku dalam Administrasi Distrik di Kabupaten Asmat

No	Distrik	Luasan (ha)	kampung	Wilayah Adat
1	AGATS	70.000,26	Asuwetsy, Bis Agats, Bisman, Bou, Briten, Kaye, Mbait, Per, Saw, Suwru, Uwus, Yomoth (12)	Bisman Simai
2	AKAT	348.594,09		Momuna Wakaniwin / Jiare
			Ayam, Bayiw, Pinam, Beco, Buetkwar, Cumnew, Fakan, Jewes, Menepsimni, Simini, Waw, Yuni (11)	Kaimon Unir Sirau
3	ATSY	119.075,21	Amanamkai, Ambisu, Atsy, Bakasei, Bine, Bipin, Cewewyamew, Sagoni, Yaisiu (9)	Betsmup Wakaniwin / Jiare Simai
4	AYIP	87.156,41	Mausi Kawet, Comoro (3)	Sawi Betsmup
5	BETCBAMU	47.380,32	Atambuts, Biwar Laut, Desepe, Omanesep, Pirpis, Warkai, Yauw (7)	Betsmup Simai
6	DER KOUUMUR	34.464,04	Amagais, Amaru, Amkai, Amkum, Ero Saman, Yamkap (6)	Kaigar
7	FAYIT	38.468,32	Ocenep, Ais, Bakyor, Basim, Kayarpis, Nanai, Pirien, Sayoa, Waras, Yawas, Isar, Bora, Biopis (13)	Safan
8	JETSY	68.953,72	Amborep, Birak, Dawer, Katew, Pau,	Kaimon

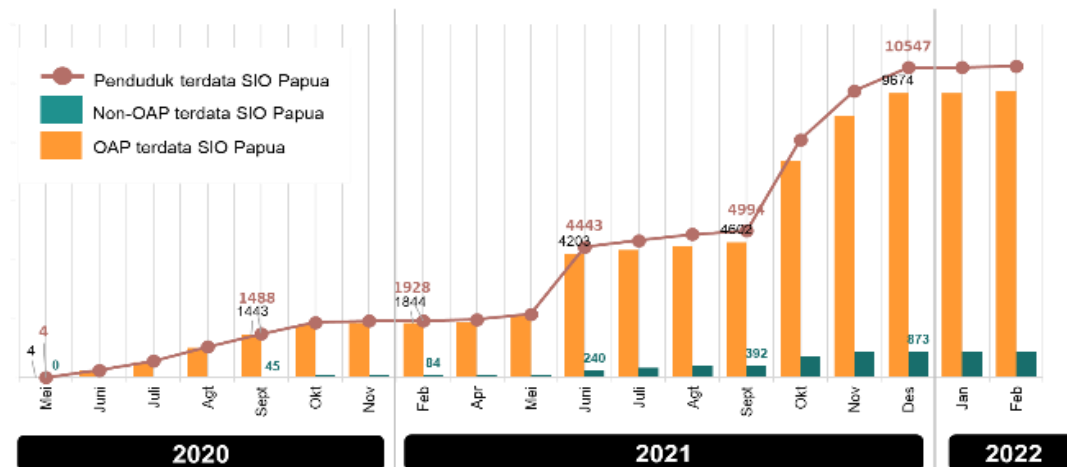
			Powetsy, Sisakam, Yetsy/Warsa (8)	Bisman
				Simai
9	JOERAT	130.375,87	Omor, Onavai, Yamas, Yaun, Yeni, Yufri/Smith (6)	Kenok
				Unir Sirau
				Joerat
				Dafarpi
10	KOLF BRASA	203.849,71	Binamzain, Pirabanak, Woutu Braza, Patipi, Woutu Kolof, Sipanap, Pepera, Ulakin, Waijens, Butukatnau, Auban, Bumu, Kapayap1, Kapayap2 (14)	Momuna
				Wakaniwin / Jiare
				Aanu
				Simai
				Korowai
				Banano
11	KOPAY	46.872,13	Aikut, Hahare, Heiyaram, Kaipom, Kawem, Sanem, Airo Sopen, Sasime, Senepit, Wagasu (10)	Kaigar
				Atohim
				Safan
12	PANTAI KASUARI	23.826,76	Bawor, Hainam, Kamur, Sanapai, Sanep, Saramit, Sarmafo, Yagamit, Yahoi (9)	Atohim
				Safan
				Sawi
13	PULAU TIGA	312.497,16	Aoep, Aou, As, Atat, Eroko, Esmapan, Fumeripit, Kapi, Nakai, Weo, Yakapis (11)	Joerat
				Dafarpi
14	SAFAN	58.996,20	Aworkey, Bayun, Emene, Jitorsok, Kagirim, Primapun, Saman, Samendoro, Santabor, Simsagar, Tereo, Yaptambor (12)	Safan
15	SAWA ERMA	198.560,80	Agani, Bu,Er, Erma, Mumugu, Mumugu Dua, Pupis, Sauti, Sawa, Sona (10)	Momuna
				Kenok
				Unir Sirau
				Wutiu
				Dafarpi
				Momuna
16	SIRETS	136.061,57	Awok, Biwar Darat, Damen, Fos, Kaimo, Sakor, Waganu, Yaosakor (8)	Wakaniwin / Jiare
				Kaimon
				Simai
17	SUATOR	94.908,56	jinak, Wowi, Karbis, Bubis, Binam, Burbis, Waganu Dua, Soray, Wagabus, Emnam (10)	Wakaniwin / Jiare
				Simai

18	UNIR SIRAU	109.251,61	Abamu, Amor, Ayir, Berip, Komor, Munu, Paar, Werer, Yipawer (9)	Unir Sirau
				Wutiu
				Simai
19	ASWI	36.019,92	Piramat, Bawos, Bagair, Tauro, Kagas, Wiyar, Amaita, Akan Tapak, Mapane, Ainamsato (10)	Safan
				Sawi
20	AWYU	46.757,38	Sohomane, Suagai, Sagare, Yefuwagi, Wagi (6)	Auyu
21	SURU SURU	160.707,05	Ajin, Asgun, Berimono, Besika, Dumaten, Hom-hom, Hulam, Jifak, Katalina, Kebikduk, Koba, Korobuk, Laluk, Linduk, Obio, Sagapu, Salbik, See, Suru-Suru, Tii, Tomor, Walase, Yensuku (23)	Momuna
				Unir Sirau
				Banano
				Simai
				Wutiu
22	KOROWAY BULUANUP	58.397,73	Mabul, Ayak, Banum, Ujung Batu, Nagatun, Amakot, Kapayap III (7)	Aanu
				Korowai
				Banano
				Korowai
23	JOUTU	70.354,48	Bor, Vakan Dua, Wabak, Vakam, Dekamer, Samnak, Daikot (8)	Wakaniwin / Jiare

Sumber: Hasil olahan POKJA KLHS RPJPD Tahun 2023

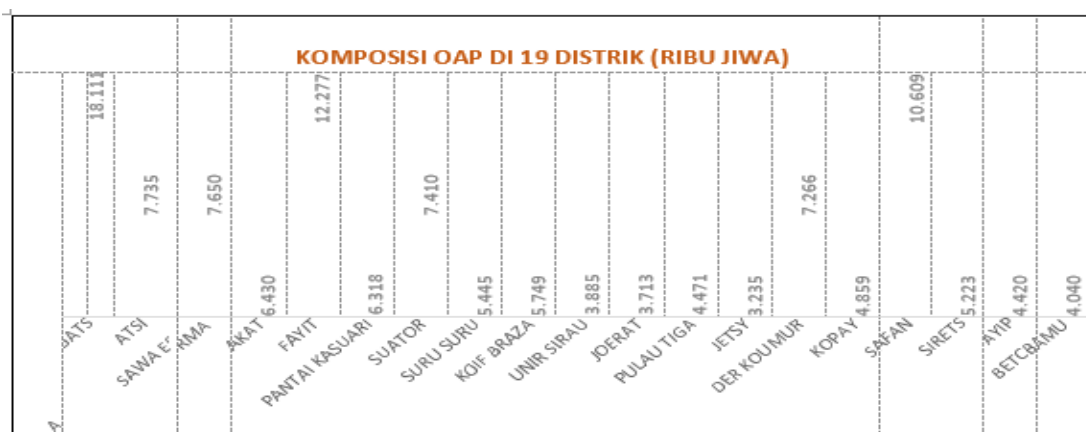
Adapun kondisi demografi OAP dan non-OAP di Provinsi Papua Selatan khususnya dikabupaten Asmat telah dilakukan pendataan berbasis kampung melalui Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di wilayah Papua Adapun cakupan pendataan yang dilakukan sampai dengan 21 Maret 2023 di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan sebesar 23.873 jiwa atau 4,69% dari total jumlah penduduk dalam sensus penduduk 2020 (jumlah penduduk dalam SP 2020: 513.617 jiwa). Sedangkan penduduk OAP yang terdata di Kabupaten Asmat, sebanyak 9.725 jiwa, sedangkan Non OAP sebesar 833 jiwa sehingga Total keseluruhan sebesar 10.98 jiwa penduduk Asli Papua atau sebesar 9,63 persen dari total penduduk.

Gambar 2. 13. Perkembangan Cakupan Pendataan OAP dan non-OAP di Asmat
Dalam SIO Papua (update: 18 April 2023)



Sumber: RPD Provinsi Papua Selatan (SIO Papua (Sistem Informasi Orang Papua)

Gambar 2. 14. Komposisi OAP di Kabupaten Asmat, Dukcapil 2021



Sumber: Hasil olahan POKJA KLHS RPJPD Tahun 2023

Jumlah dan Distribusi Orang Asli Papua/OAP etnik Asmat di kabupaten Asmat melalui data Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2021 menunjukkan tingkat penyebaran OAP terbesar terjadi di distrik Agats sebesar 18.000 (delapan belas ribu) jiwa atau sekitar 14.1 % dan kemudian distrik Fayit dengan 12.000 (dua belas ribuan) jiwa atau sekitar 9.5 % dan Distrik Safan sebesar sepuluh ribuan jiwa atau sekitar 8.2 %. Sedangkan Distribusi OAP terendah terjadi di Distrik Jetsy.

Adapun perkembangan Persentase penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan tahun 2020-2022:

Tabel 2. 38. Jumlah Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tahun 2022

Kelompok Umur	2020	2021	2022
Umur 0-4 Tahun	60.40	76.54	78.69
Umur 5 Tahun ke Atas	67.65	84.51	85.78
Umur 17 Tahun ke Atas	65.23	82.87	7.26

Sumber: Sumber: BPS Provinsi Papua 2019-2022

Tabel 2. 39. Perkembangan Persentase Penduduk yang telah Memiliki Dokumen Akte Kelahiran Tahun 2020-2022

Kategori	Tahun	Persen
Umur 0-4 Tahun	2020	35.01
	2021	45.73
Umur 0-17 Tahun	2022	16.61
	2020	46.34
	2021	44.24
	2022	20.78

Sumber: BPS Provinsi Papua 2019-2022

2.1.4. SOSIO CULTURE OAP ASMAT

Suku Asmat mendiami daerah dataran rendah yang berawa-rawa dan berlumpur serta dikelilingi hutan tropis. Daerahnya landai dan dikelilingi ratusan anak sungai. Curah hujan turun sebanyak 200 hari setiap tahun. Suhu minimal 21°C dan maksimal 32°C. Perbedaan pasang dan surut mencapai 4-5 m. Dengan pengetahuan akan situasi dan keadaan lingkungan disekitar yang terjadi dimanfaatkan oleh masyarakat suku Asmat untuk kapan harus melakukan kegiatan berlayar, apabila air surut, orang Asmat berperahu ke arah hilir dan kembali ke hulu ketika pasang naik. Ini upaya memanfaatkan arus naik dan turun untuk membantu mereka mendayung.

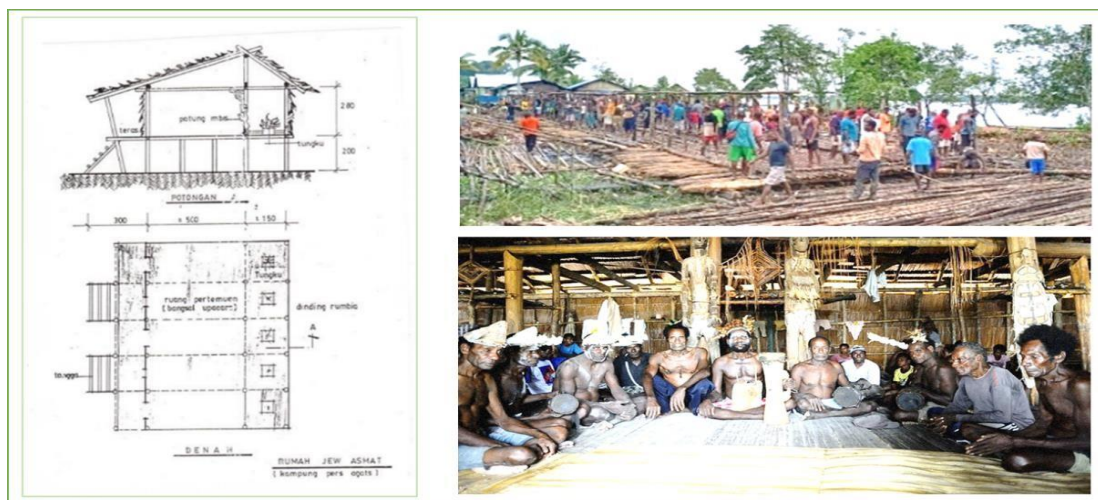
Sistem Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan Rumah telah dikenal sejak lama oleh orang Asmat terutama teknologi bahan bangunan. Jew selalu didirikan menghadap ke arah sungai. Sebagai tiang penyangga utama rumah adat, digunakan kayu besi bermotif ukiran Asmat. Jumlah pintu Jew sama dengan tungku api dan patung Mbis (patung gambaran leluhur Orang Asmat). Jumlah pintu ini juga dianggap mencerminkan rumpun Suku Asmat yang berdiam di sekitar rumah adat. Tangganya terbuat dari rangkaian kayu

bulat, panjangnya sama dengan ukuran rumah. Di depan Jew, terdapat dayung dan tombak berhiaskan bulu Burung Kaka Tua berwarna putih. Benda ini melambangkan kemenangan. Oleh karena itu, Suku Asmat sangat percaya, apapun yang akan dikerjakan, entah berperang ataupun lainnya, jika telah melalui ritual di dalam Jew, pasti berhasil.

Rumah Jew/Yew yang berukuran cukup besar dengan lebar 8 x panjang 12 meter yang tentu menggunakan jenis bahan jenis kayu yang kuat dan tahan pada wilayah pesisir bakau sampai dataran rendah, terutama untuk tiang-tiang penyangga dan pengikat, Keseluruhan proses pembuatan rumah hingga selesai dengan sempurna apabila memenuhi unsur indah dan kuat.

Salah satu hal yang membuat suku asmat cukup dikenal di dunia sampai saat ini adalah hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas dan bercerita biasanya. Beberapa ornamen / motif yang seringkali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung yang dilakukan oleh penduduk suku asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka, yang biasa disebut mbis. Namun tak berhenti sampai disitu, seringkali juga ditemui ornamen / motif lain yang menyerupai perahu atau wuramon, yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya. Berikut ini diuraikan rangkaian pengetahuan dan teknologi pembuatan rumah *Jew/Yew*:

Gambar 2. 15. Tradisi membangun rumah Jew



2.1.4.1. Karakteristik Rumah Adat Asmat:

1. Tiang Penyangga, dapat berupa pokok-pohon hidup yang dipangkas pada bagian atas sebagai tempat kedudukan badan rumah dan ditambah lagi dengan beberapa batang kayu untuk memperkuat tiang pokok. Tiang penyangga dipilih kayu yang sama kuat dan besarnya, Untuk memperkuat ikatan pada bagian atas tiang, penyangga, digunakan batang kayu bercabang sebagai kedudukan gelagar/ balok lantai pengikat antar tiang penyangga balok atas.
2. Badan Rumah, Biasanya terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian atas rumah, bagian dinding, dan alas/lantai rumah. Pada waktu membangun rumah, setelah tiang penyangga dibuat, pembuatan lantai. Sebagian orang yang terlibat dalam pendirian rumah tersebut, menaiki lantai rumah, menari dan melompat-lompat, rangkaian ini termasuk ritual upacara adat. Setelah pengetesan dilakukan, mulailah dibuat dinding dan bagian atas rumah.
3. Atap Rumah, proses pembuatan atap rumah, membutuhkan keterampilan khusus, karena atap bukan saja dilihat dari fungsinya sebagai penutup bagian atas rumah, akan tetapi kekuatan bahan dan cara pemasangan sangat diperhatikan. Setelah proses menganyam atap (dari daun sagu) selesai dikerjakan oleh juru anyaman, kemudian dipasang oleh orang yang ahli memasang atap. Beberapa jenis bahan yang disiapkan sebelum membangun rumah antara lain: Batang kayu bulat (tiang penyangga, rangka dinding dan atap rumah), Bilah batang dan kulit sagu (lantai rumah), Daun sagu (untuk atap rumah).
4. Tali rotan/ kulit kayu (sebagai pengikat).

Selain rumah adat Jew rumah adat lainnya adalah rumah Tysem, atau biasa diartikan rumah keluarga, karena dihuni oleh mereka yang telah berkeluarga, biasanya ada dua sampai tiga pasang keluarga yang mendiami tysem. Ukuran tysem lebih kecil dibandingkan jew, dan biasanya, rumah tysem dibuat mengelilingi rumah jew.

Gambar 2. 16. Model Rumah Tysem dan rumah Pohon Korowai



Karya seni suku asmat yang cukup dikenal di dunia sampai saat ini adalah hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas dan bercerita biasanya. Beberapa ornamen / motif yang seringkali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung yang dilakukan oleh penduduk suku asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka, yang biasa disebut mbis. Namun tak berhenti sampai disitu, seringkali juga ditemui ornamen / motif lain yang menyerupai perahu atau wuramon, yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya.

2.1.4.2. Pemanfaatan Flora dan Fauna sebagai sumber penghidupan masyarakat asli Suku Asmat.

Pemanfaatan flora dan fauna di lingkungan orang Asmat dapat ditemui seperti sagu. Sagu merupakan makanan pokok orang Asmat. Sagu diibaratkan wanita karena kehidupan keluar dari pohon sagu sebagaimana kehidupan yang keluar dari Rahim ibu. Kayu kuning sangat berharga bagi orang Asmat sebagai bahan utama ukiran, pahatan dan kapal. Rotan sebagai bahan utama pembuatan keranjang sedangkan labu yang dikeringkan dimanfaatkan sebagai botol air. Hasil pangan berupa cocok tanam meliputi umbi umbian dan peternakan meliputi ayam dan babi. Masyarakat suku Asmat juga mengkonsumsi ulat sagu, tikus hutan, kuskus, iguana, ikan dan kepiting rawa/mangrove. Asesoris hiasan pada seorang laki laki asmat dan perempuan memanfaatkan semua bahan alami baik dari tumbuhan seperti rumbia dari daun sagu kering, Cangkang kerang dan gigi anjing dimanfaatkan sebagai perhiasan kalung, bulu burung cenderawasih dan bangau, Kulit kuskus sebagai hiasan kepala dan manik manik dari biji bijian. esse atau tas dari anyaman

daun kelapa dan daun rumput rawa yang dipintal menjadi benang, biasanya disematkan di tubuh sebagai lambang bahwa orang tersebut memiliki kemampuan finansial. Biasanya dalam satu upacara adat orang asmat melukis wajah/tubuh atau disebut *wasse mbi* (rias tubuh) yaitu biasanya dengan tiga warna. Mereka mengambil warna merah dari tanah merah dicampur air, putih dari kulit siput yang dihaluskan dan diberi air, juga hitam dari arang yang dibakar dan dicampur air.

Suku Asmat sangat bergantung pada air hujan untuk konsumsi minum tetapi juga pemakaian lain, karena air di sekitar rawa-rawa dan sungai sangat payau. Orang Asmat juga memperoleh air minum ketika air sungai sangat surut sehingga tidak terlalu payau. Hasil sumber daya alam yang menjadi bahan mentah meliputi: Kayu gaharu, rotan, kemiri, damar, kemenyan, kulit masohi, kulit lawang, cucut, udang, teripang, cumi-cumi, ikan, nipah, kerang, keong laut, kayu kuning, sagu, labu, ilalang, dsb.

2.1.4.3. Sistem Teknologi dan Peralatan

Teknologi dan peralatan adalah suatu sistem pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang membantu manusia untuk melakukan aktivitas/kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang berlangsung turun temurun maupun akibat adaptasi dengan lingkungan dimana orang asmat berada, tentunya bentuk peralatan orang asmat akan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan suku suku lain yang berada di pedalaman sampai pegunungan terutama material dasar yang digunakan dan juga bentuk teknologinya. Peralatan dimaksud yang telah dimiliki oleh suku Asmat sejak jaman dahulu dan sampai sekarang mengalami inkulturasi antara lain:

- Alat-alat produktif; jaring yang terbuat dari anyaman sagu, ukiran yang terbuat dari gigi hewan, kapak batu namun seiring dengan berkembangnya zaman mereka beralih ke pisau dan model pahatan. Untuk memotong tubuh hewan buruan atau ikan yang ditangkap mereka biasa menggunakan kulit kerang yang ditajamkan tetapi seiring waktu mereka sudah menggantinya dengan pisau yang terbuat dari besi.
- Senjata; perisai, tombak dari kulit kayu sagu, dan panah yang ujungnya terbuat dari kuku burung kasuari dan busur dari bambu.
- Alat transportasi; perahu lesung yang digunakan untuk persiapan suatu penyerangan. Kayu yang digunakan untuk membuat perahu adalah kayu kuning ketapang, bintanggkur.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

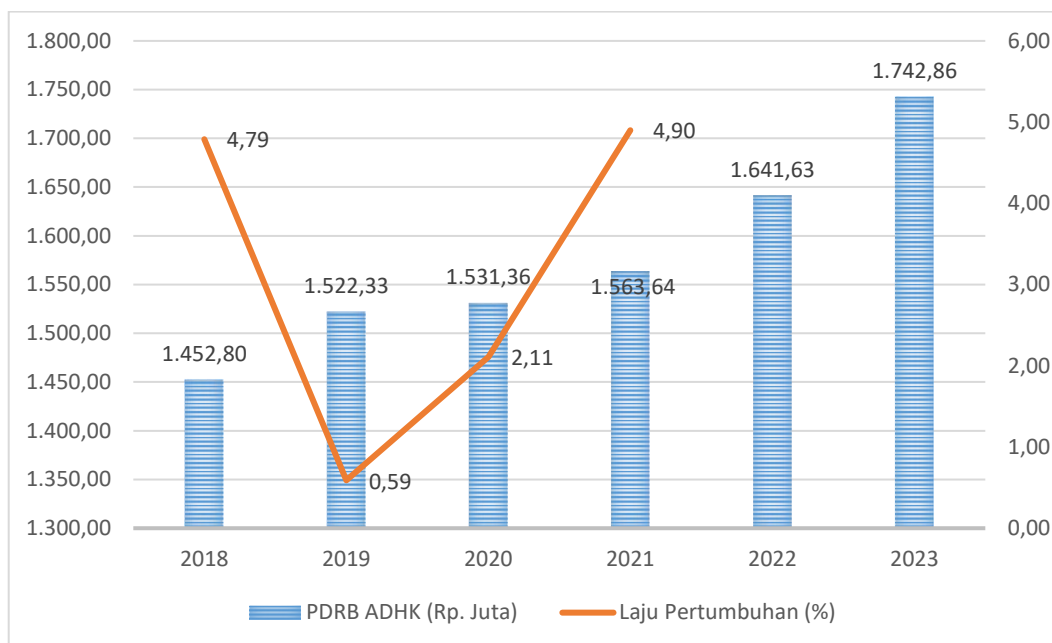
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Gambar 2. 17. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Asmat



Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2024 (diolah).

Selama tahun 2018-2023, PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Asmat fluktuatif setiap tahun dari Rp 1.452.80 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 1.641.63 juta pada tahun 2022, dimana pada Tahun 2021 sebesar 1.563.64. Hal yang sama juga terjadi pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Asmat adalah sebesar Rp 1.452.80 juta dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.531,36 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 1.643.23 juta, tahun 2023 sebesar 1.742.86*. Dengan adanya peningkatan PDRB AHK setiap tahun selama periode 2018-2023, maka perekonomian di Kabupaten Asmat juga mengalami pertumbuhan setiap tahun. Pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4.99 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 0,59 persen.

Tabel 2. 40. Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Asmat Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023 (persen)

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	17,76	16,45	16,04	15,72	16,18	16,44
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1,61	1,47	1,39	1,38	1,31	1,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi/Construction	30,94	32,17	32,51	33,34	34,00	33,74
G	Pengdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,65	6,95	6,67	6,63	6,82	7,11
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2,38	2,34	1,96	1,95	2,46	2,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,56	0,55	0,58	0,64	0,69	0,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,25	0,24	0,21	0,21	0,21	0,21
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,24	2,27	2,23	2,33	2,37	2,29
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	21,85	22,65	22,93	22,61	21,00	20,31
P	Jasa Pendidikan/Education	7,95	8,16	8,15	7,86	7,74	7,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	4,88	4,87	5,42	5,42	5,32	5,53
R,S,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	1,21	1,20	1,23	1,26	1,25	1,25
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2024.

Tabel 2. 41. PDRB Kabupaten Asmat ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d. 2023 (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021 ^a	2022 ^a	2023 ^a
(I)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	311,04	311,27	310,35	316,95	343,50	360,45
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	—	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	35,73	34,63	33,78	34,04	34,08	34,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	—	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	—	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
F	Konstruksi/Construction	427,07	462,85	461,76	479,91	516,30	556,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	91,78	89,14	87,71	90,92	95,70	101,02
H	Transportasi dan Pengangkutan/Transportation and Storage	33,81	36,10	30,72	32,04	38,01	44,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	4,01	3,97	3,98	4,09	4,24	4,47
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	8,73	9,23	10,11	11,07	12,00	13,20
(I)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,99	3,09	3,03	3,07	3,34	3,33
L	Real Estat/Real Estate Activities	27,44	27,55	27,68	27,79	29,05	29,70
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	7,86	8,12	8,40	8,52	8,63	8,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	115,44	137,72	146,43	144,76	143,35	159,00
P	Jasa Pendidikan/Education	115,11	122,26	123,78	123,92	127,78	132,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	55,45	59,36	65,82	67,98	67,99	72,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	15,32	16,03	16,78	17,56	18,39	19,23
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		1.452,80	1.522,31	1.531,36	1.563,64	1.643,23	1.742,86

Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2024

Persentase PDRB ADHK Tahun 2023 dari sektor konstruksi memberikan kontribusi utama terhadap PDRB Kabupaten Asmat yaitu sebesar 33.74%, diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu 20.31%, selanjutnya dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 16.44%, sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terkecil yaitu hanya sebesar 7.92%. Sedangkan untuk Persentase PDRB ADHB Tahun 2022 dari sector konstruksi memberikan kontribusi utama terhadap PDRB Kabupaten Asmat yaitu sebesar 33.93%, diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu 20.92%, selanjutnya dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 16.17%, sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terkecil yaitu hanya sebesar 0.01%.

2.2.1.2. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sesuai dengan deflator, maka dapat dihitung tingkat inflasi per sektor menunjukkan inflasi per sektoral di Kabupaten Asmat dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Inflasi menurut deflator PDRB tahun 2023 untuk seluruh sektor adalah 2,95 persen. inflasi tertinggi ada di sektor penyedia akomodasi dan makan minum (7,14 persen), diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi (6,86 persen) dan sektor transportasi dan pergudangan (6,63 persen).

Tabel 2. 42. Nilai Deflasi Sektoral di Kabupaten Asmat, Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	130,60	132,81	133,68	135,69	143,42
B	Pertambangan dan Penggalan	62,92	67,13	67,35	68,08	67,81
C	Industri Pengolahan	104,57	105,81	109,41	111,13	112,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	164,79	167,31	169,16	171,00	170,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	159,84	154,88	156,90	158,94	160,69

F	Konstruksi	171,76	180,87	187,19	189,68	190,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	194,81	195,31	196,45	205,20	217,15
H	Transportasi dan Pergudangan	160,33	163,97	163,73	186,07	198,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151,92	154,52	156,22	163,45	175,12
J	Informasi dan Komunikasi	146,32	146,69	154,76	165,83	177,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	189,12	181,92	182,65	191,41	196,68
L	Real Estate	203,31	207,28	225,75	234,62	242,25
M,N	Jasa Perusahaan	115,25	115,52	117,36	121,26	124,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	165,73	170,04	176,75	176,15	177,97
P	Jasa Pendidikan	164,87	169,14	170,99	174,51	183,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	202,90	211,61	214,80	225,61	238,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	184,84	187,73	192,94	195,96	204,96
	Deflator Seluruh Sektor PDRB	162,31	167,76	172,34	175,30	180,47

Sumber data: Keuangan Kabupaten asmat 2023, (diolah)

Tabel 2. 43. Nilai Inflasi Sektoral di Kabupaten Asmat, tahun 2019 – 2023 (Persen)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,25%	1,69%	0,66%	2,93%	5,70%	2,16%
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,89%	6,68%	0,33%	1,08%	-0,40%	0,76%
C	Industri Pengolahan	2,50%	1,19%	3,40%	1,88%	1,01%	1,93%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,96%	1,52%	1,11%	1,09%	-0,20%	1,50%

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08%	-3,10%	1,30%	1,30%	1,10%	0,14%
F	Konstruksi	4,97%	5,31%	3,49%	1,33%	0,57%	3,13%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,51%	0,26%	0,58%	4,45%	5,83%	2,93%
H	Transportasi dan Pergudangan	0,85%	2,27%	-0,14%	7,73%	6,63%	4,65%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,64%	1,72%	1,10%	6,16%	7,14%	3,04%
J	Informasi dan Komunikasi	0,74%	0,25%	5,50%	7,15%	6,86%	4,10%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,70%	-3,81%	0,40%	4,79%	2,75%	1,17%
L	Real Estate	10,42%	1,95%	8,91%	3,93%	3,25%	5,69%
M,N	Jasa Perusahaan	1,99%	0,24%	1,59%	3,33%	2,64%	1,96%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,91%	2,60%	3,95%	-0,34%	1,03%	2,63%
P	Jasa Pendidikan	5,68%	2,59%	1,09%	2,06%	4,92%	3,27%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,03%	4,30%	1,50%	6,66%	5,68%	3,71%
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,89%	1,56%	2,78%	1,56%	4,60%	2,88%
	Inflasi seluruh sektor PDRB	4,39%	3,36%	2,73%	2,00%	2,95%	3,03%

Sumber data: Keuangan Kabupaten asmat 2023, (diolah)

2.2.1.3. Struktur Ekonomi

Perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat telah memberikan dampak baik itu positif maupun negatif pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase kontribusi suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Tabel 2. 44. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Asmat, 2018-2022 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2023 (diolah)

Selama periode 2018-2022, sektor ekonomi yang mendominasi perekonomian Kabupaten Asmat adalah sektor konstruksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan,

dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Selama periode tersebut rata-rata kontribusi ketiga sektor tersebut dalam perekonomian Kabupaten Asmat adalah sebesar 72,64 persen per tahun.

Sektor ekonomi yang mendominasi perekonomian Kabupaten Asmat adalah sektor konstruksi dengan kontribusi yang selalu meningkat setiap tahun dari 30.94 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 32.17 persen pada tahun 2019, pada tahun 2020 naik menjadi sebesar 32.51 persen dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 33.93 persen. Tingginya kontribusi sektor konstruksi diakibatkan oleh gencarnya pembangunan jalan-jalan dan jembatan untuk menunjang perekonomian dan meningkatkan pembangunan. Di posisi ke dua kontribusi terbesar yaitu Administrasi Pemerintahan, pertanian dan jaminan social wajib, dengan nilai kontribusi sebesar 21.85 persen pada tahun 2018 naik sebesar 22.93 pada tahun 2020, namun di Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 20.96 persen. Walaupun posisinya sebagai sektor yang paling dominan digeser oleh sektor konstruksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap merupakan sektor yang dominan di Kabupaten Asmat. Dengan kekayaan alam terutama sumberdaya perikanan dan kelautan, maka sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga ikut mendominasi perekonomian Kabupaten Asmat. Pada tahun 2018, sumbangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sebesar 17.76 persen, kemudian mengalami penurunan setiap tahun hingga hanya menjadi 16.17 persen pada tahun 2022.

Dalam rangka melihat dominasi ada tidaknya transformasi/perubahan struktur ekonomi, tujuh belas lapangan usaha dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Lapangan Usaha Primer

Lapangan usaha primer yaitu lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalan.

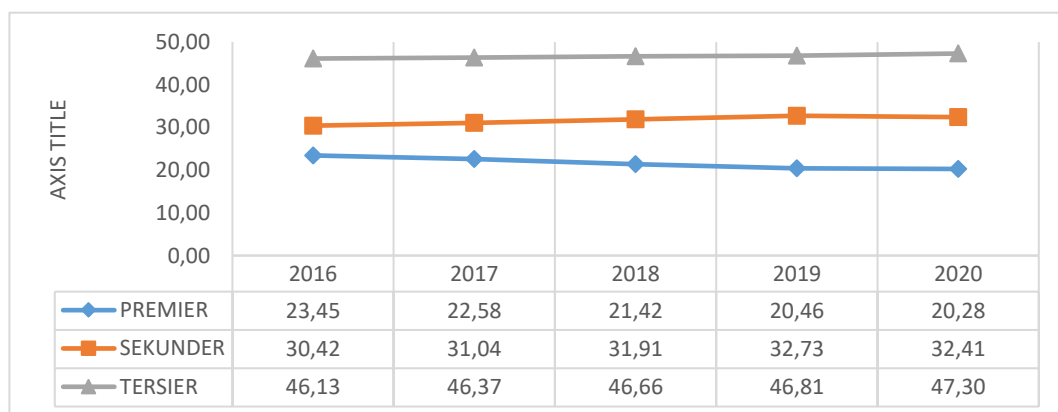
2. Lapangan Usaha Sekunder

Lapangan usaha sekunder yaitu lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta lapangan usaha konstruksi.

3. Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha tersier yaitu lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usaha tersier terbagi menjadi sebelas lapangan usaha. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta lapangan usaha jasa lainnya.

Gambar 2. 18. Struktur Perekonomian Kabupaten Asmat Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier, 2016-2020 (Persen)



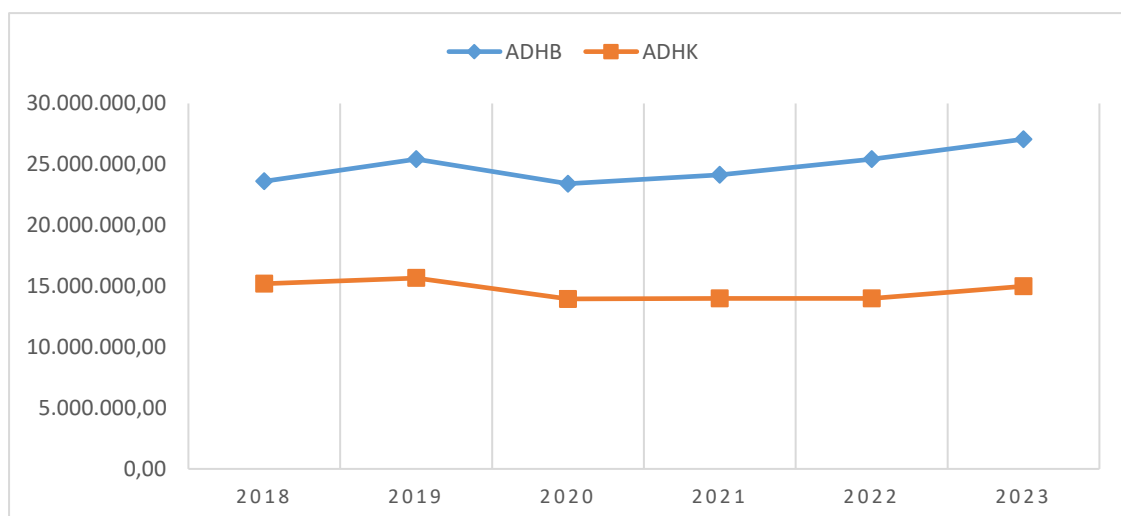
Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2020 (diolah)

Gambar 2.18 menunjukkan bahwa sektor tersier merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Asmat selama periode 2016-2020. Pada tahun 2019, kontribusi sektor tersier adalah sebesar 46,81 persen dan pada tahun 2020 besaran kontribusinya meningkat yaitu sebesar 47,30 persen. Pada tahun 2016, kontribusi sektor primer lebih rendah dibandingkan sektor sekunder dimana kontribusi sektor primer sebesar 23,45 persen dan sektor sekunder sebesar 30,42 persen. Sampai dengan tahun 2020, kontribusi sektor sekunder tetap lebih tinggi dibandingkan sektor primer, sektor primer sebesar 20,28 persen dan sektor sekunder sebesar 32,41 persen.

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

Suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. PDRB per kapita di Kabupaten Asmat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2016, PDRB per kapita di Kabupaten Asmat adalah sebesar Rp 20.29 juta kemudian mengalami peningkatan sebesar 5,85% pada tahun 2017 menjadi Rp 21.94 juta. Pada tahun 2018, nilai PDRB per kapita meningkat menjadi Rp 23.63 juta atau tumbuh 5,77% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Asmat meningkat sebesar 4.79% menjadi Rp 25.34 juta. Pada pada Tahun 2020 meningkat sebesar 0.59 % menjadi Rp 26.01 juta dan pada Tahun 2022 sebesar 25.42 juta.

Gambar 2. 19. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Asmat Tahun 2018-2023



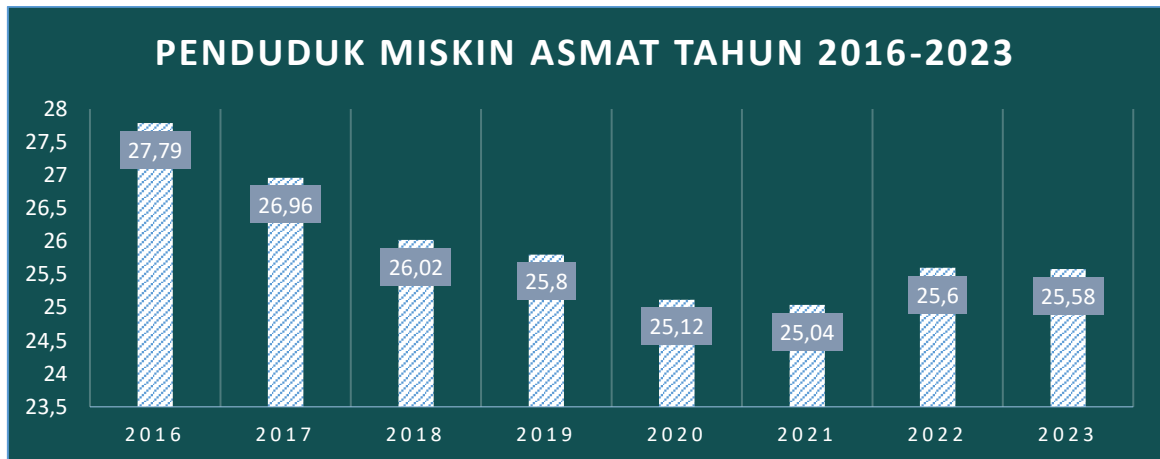
Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2023 (diolah)

2.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan, masih ada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak bisa menikmati hasil pembangunan tersebut karena berbagai hal, mereka adalah kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

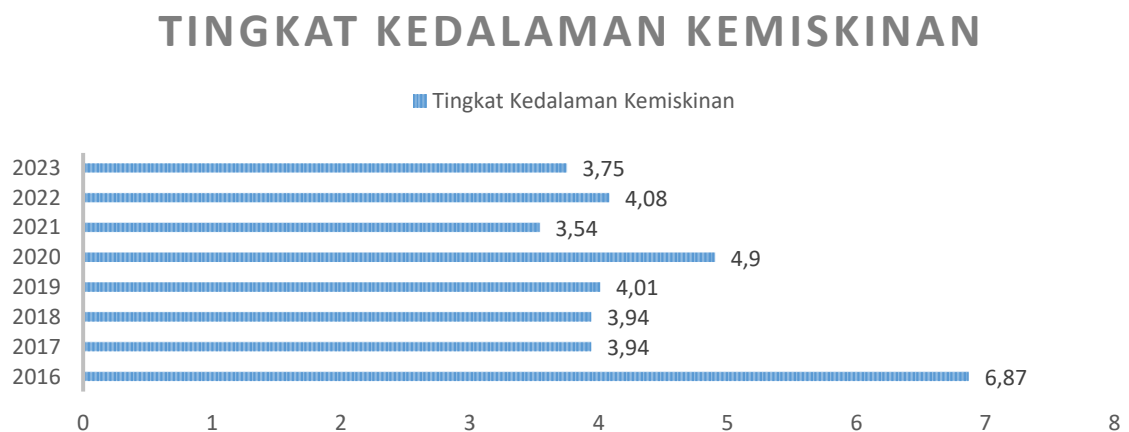
Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Asmat, namun telah menjadi permasalahan dunia. Pada tahun 2016-2023, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Asmat termasuk tinggi. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Asmat adalah sebesar 27,79 persen dan pada tahun 2023 persentasenya mengalami penurunan menjadi sebesar 25.58 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Asmat selama periode tersebut terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 39,77 persen, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 25,12 persen. Penurunan persentase dalam pengukuran terakhir yang dilakukan oleh BPS mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat cukup berhasil mengentaskan penduduknya dari kemiskinan, bahkan pada pengukuran terakhir telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Selatan yang sebesar 26,64 persen. Di tingkat Provinsi Papua pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Asmat berada pada posisi 11 dari 29 kabupaten/kota dimana kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Deiyai yang mencapai 41,76 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Merauke yaitu hanya 10,10 persen pada Tahun 2022.

Gambar 2. 20. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Asmat, 2016-2023
(persen)

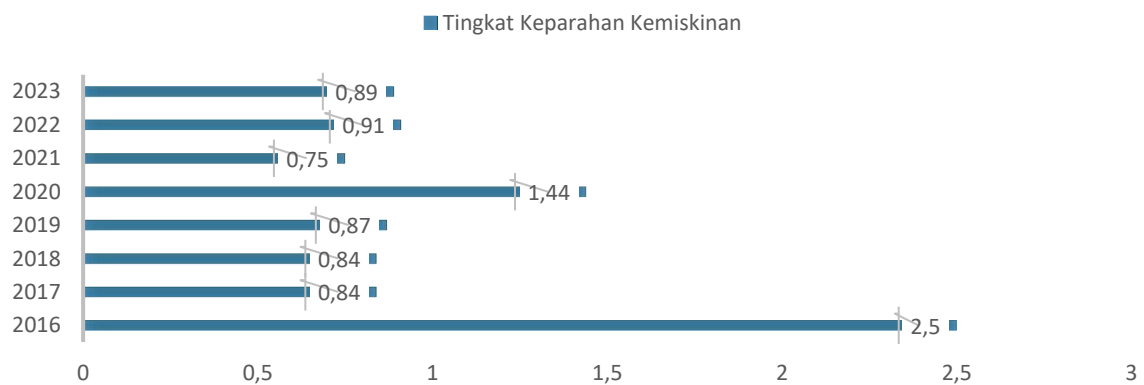


Sumber: BPS Asmat, 2024 (diolah)

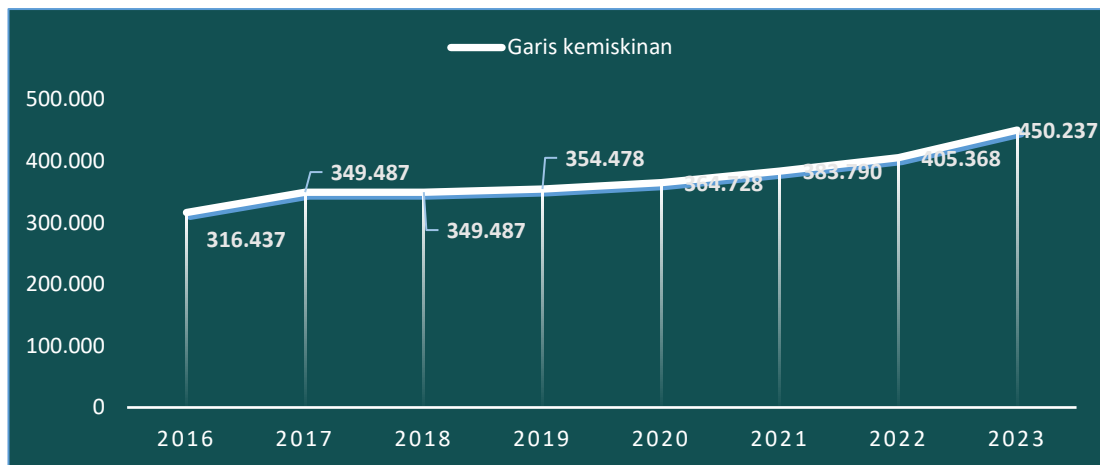
Gambar 2. 21. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Asmat 2016-2023



Gambar 2. 22. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Asmat 2016-2023



Gambar 2. 23. Garis Kemiskinan Di Kabupaten Asmat 2016-2023



Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua adalah sebanyak 911.370 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 26,64 persen. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asmat pada tahun 2019 adalah sebanyak 25.800 jiwa dan pada tahun 2020 menurun menjadi 25.120 jiwa. Namun perlu diingat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asmat akan mengalami peningkatan lagi jika banyak penduduk Kabupaten Asmat masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena adanya guncangan misalnya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok naik dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk antara lain adalah rasio gini dan kriteria Bank Dunia. Gini rasio merupakan ukuran distribusi pendapatan yang mempunyai nilai nol sampai dengan satu. Apabila nilai gini rasio mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila gini rasio mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Gini rasio dibagi dalam tiga kategori: (a) $GR > 0,5$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) $GR 0,4 - 0,5$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan (c) $GR < 0,4$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah.

Kriteria Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria (a) Bila menerima kurang dari 12 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi, (b) Bila menerima 12 – 17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang, dan (c) Bila menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah.

Secara umum jika dilihat perkembangannya dari tahun 2018, baik itu persentase orang miskin, tingkat kedalaman kemiskinan (P1), dan tingkat keparahan kemiskinan (P2), menunjukkan bahwa jurang kemiskinan semakin mengecil yang ditandai dengan pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan (kecuali bila ditarik data dari tahun 2018 sampai tahun 2020, menunjukkan semakin melebar) dan jurang antar pengeluaran antar penduduk miskin semakin berkurang.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

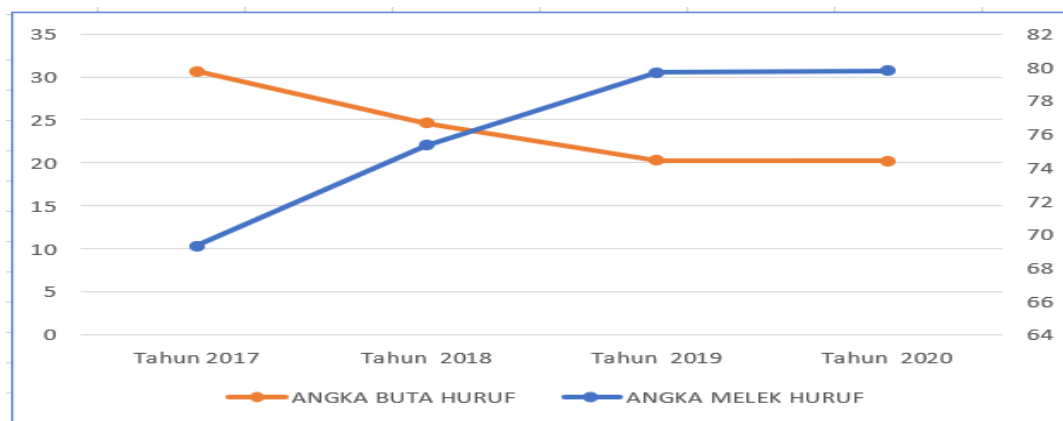
Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Selama periode 2020-2023, Pemerintah Kabupaten Asmat dalam pelaksanaan program pemberantasan buta huruf terjadi kenaikan angka melek huruf. Pada tahun 2022, persentase penduduk yang melek huruf sebesar 77,75 persen. Angka melek huruf kemudian mengalami peningkatan menjadi 84,37 persen pada tahun 2023.

Tabel 2. 45. Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf

TAHUN	ANGKA MELEK HURUF
2020	79,8
2021	79,8
2022	77,75
2023	84.37

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2023

Gambar 2. 24. Persentase Penduduk Melek dan Buta Huruf di Kabupaten Asmat



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2020 (diolah)

Data tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk di Kabupaten Asmat yang buta huruf. Lambatnya laju kenaikan angka melek huruf diduga karena didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

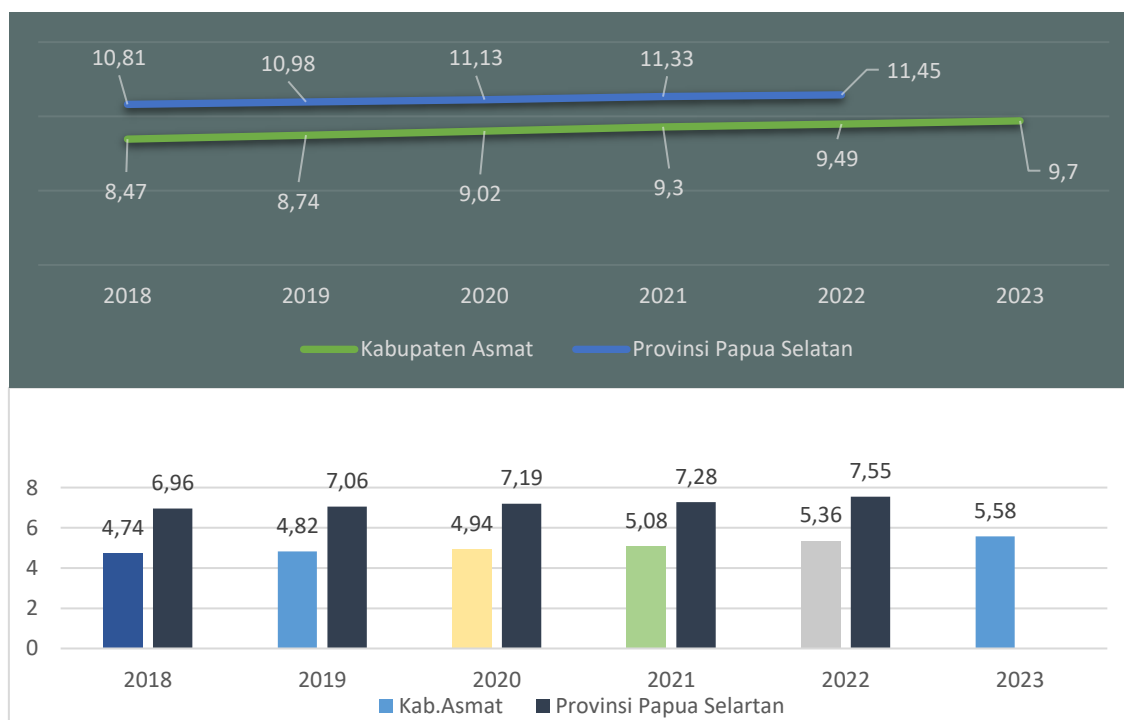
B. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2016-2020, RLS Kabupaten Asmat mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan.

RLS Kabupaten Asmat pada tahun 2016 adalah sebesar 4,48, kemudian meningkat menjadi 4,71 pada tahun 2017, dan meningkat kembali menjadi 4,74 pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 RLS Kabupaten Asmat adalah sebesar 4,82, dan pada tahun 2020 RLS Kabupaten Asmat sebesar 4,94 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Asmat baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 4 SD atau putus sekolah pada kelas 5 SD. Keadaan ini diharapkan bisa menjadi *early warning* bagi pemerintah dalam mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Asmat.

Gambar 2. 25. Angka Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Asmat, Tahun 2018-2022

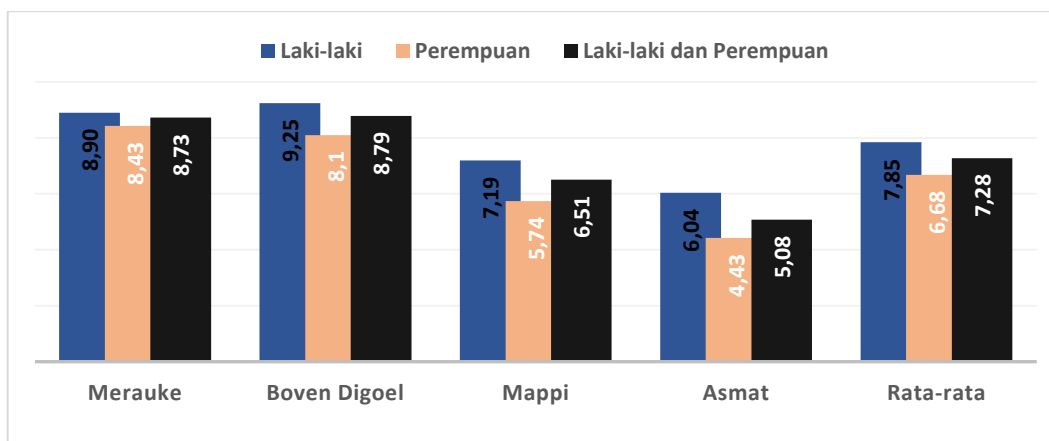


Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2023

Angka RLS Kabupaten Asmat pada tahun 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Papua yang mencapai 6,96. Seperti pada indikator HLS, terjadi perbedaan yang signifikan ketika kabupaten pemekaran dibandingkan dengan induknya, termasuk dalam rata-rata lama sekolah. Kabupaten Asmat memang memiliki perbedaan yang nyata ketika dipisahkan dengan kabupaten asalnya yaitu Kabupaten Merauke. Inilah salah satu hal yang menyebabkan jauhnya jarak antara IPM Kabupaten Asmat dan kabupaten induknya. Bahkan jika dibandingkan dengan pemekaran Kabupaten Merauke lainnya, Kabupaten Asmat memiliki angka rata-rata lama sekolah yang paling rendah. Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Merauke adalah sebesar 8,73, Kabupaten Boven Digoel sebesar 8,78, dan Kabupaten Mappi sebesar 6,31. Dengan rendahnya angka RLS, Pemerintah Kabupaten

Asmat harus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2. 46. Angka RLS Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Sekitar serta Provinsi Papua Selatan, 2018-2022



Sumber: *Catatan: Angka Provinsi menggunakan angka rata-rata Kabupaten BPS Indikator Pendidikan Provinsi Papua, 2023

C. Angka Partisipasi Kasar

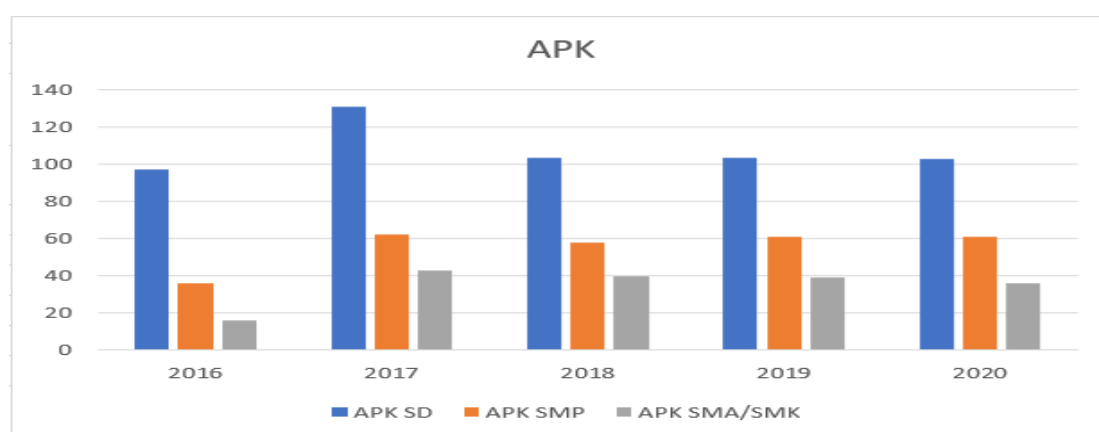
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Asmat telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Tabel 2. 47. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2018-2023

TAHUN	APK SD	APK SMP	APK SMA/SMK
2018	103,41	57,71	39,32
2019	103,44	61,03	38,55
2020	102,52	60,60	35,82
2021	91.63	40.27	38.55
2022	97.17	41.54	35.82

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat 2023

Gambar 2. 26. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat 2020 (diolah)

Tabel 2. 48. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2022

Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
Asmat	97.63	98.66	98.1	49.04	72.68	62.33	79.51	55.43	66.18

Selama tahun 2016-2020, APK untuk jenjang pendidikan SD di Kabupaten Asmat tahun 2016-2020 cenderung Fluktuatif dari sebesar 97,25 persen pada tahun 2016, menjadi 130,73 persen pada tahun 2017. APK untuk jenjang pendidikan SD sebesar 130,73 persen

tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang sedang bersekolah di SD berapapun usianya di antara penduduk berumur 7-12 tahun hanya sebesar 130,73 persen. APK untuk jenjang pendidikan SMP juga mengalami naik turun selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, APK SMP di Kabupaten Asmat adalah sebesar 35,42 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 62,16 persen pada tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 57,71 pada tahun 2018, mengalami kenaikan menjadi 61,03 pada tahun 2019, dan pada tahun terakhir menjadi 60,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP berapapun usianya di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 60,60 persen. APK untuk jenjang pendidikan SMA pada tahun 2016 adalah sebesar 15,92 persen yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA berapapun usianya di antara penduduk berumur 16-18 tahun hanya sebesar 15,92 persen, mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi 42,55, penurunan pada tahun 2018 menjadi 39,32, mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 38,55, dan menurun pada tahun terakhir tahun 2020 menjadi 35,82.

D. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misal APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 2. 49. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Asmat, Tahun 2022

Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
Asmat	77.57	76.20	76.95	19.04	48.02	35.33	30.27	26.93	28.42

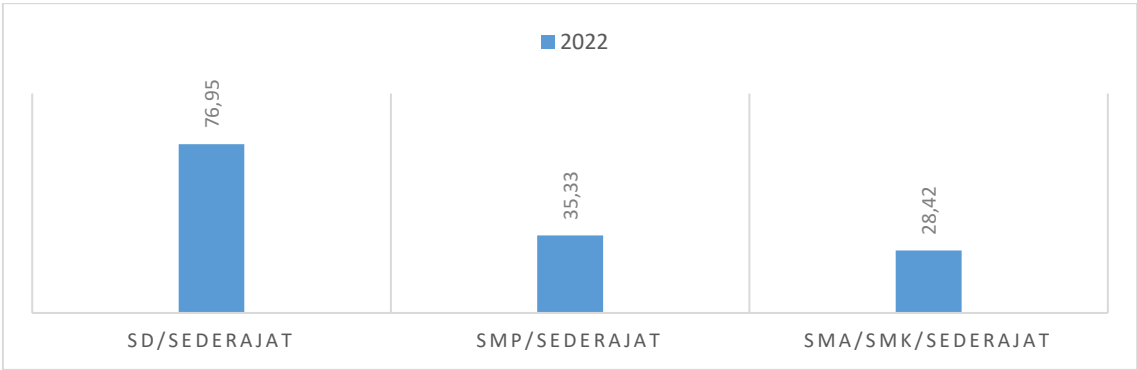
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2023

Tabel 2. 50. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Asmat, 2016-2023

TAHUN	APM SD	APM SMP	APM SMA/SMK
2016	79,91	38,50	21,34
2017	81,34	36,45	18,11
2018	82,65	35,87	20,59
2019	82,07	37,36	23,59
2020	82,09	37,81	21,49
2021	58,59	37,81	37,81
2022	16,74	97,69	50,6
2023	82.76	67,44	92,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2024

Gambar 2. 27. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2022



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat 2024 (Diolah)

Pada Tahun 2022 APM Kabupaten Asmat Jenjang SD sebesar 76.95 persen dan jenjang SMP sebesar 35.33 persen sedangkan untuk Jenjang SMA sebesar 28.42 persen. Selama periode 2016-2020, APM untuk jenjang pendidikan SD di Kabupaten Asmat selama periode 2016-2020 cenderung stabil. Pada tahun 2016, APM jenjang pendidikan SD adalah sebesar 79,91 persen, kemudian naik menjadi sebesar 81,34 persen pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 APM SD mengalami peningkatan menjadi sebesar 82,65 persen, dan pada tahun 2019 menjadi 82,07, dan 2020 sebesar 82,09 persen. APM pada tahun 2016 sebesar 79,91 persen tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang

berusia 7-12 tahun. APM jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Asmat juga cenderung fluktuatif selama periode 2016-2020.

Pada tahun 2016, APM SMP adalah sebesar 38,50 persen, kemudian menurun menjadi sebesar 36,45 persen, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga hanya menjadi sebesar 35,87 persen. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang yang berusia 13-15 tahun. APM SMA juga memiliki pola yang sama dengan APM SMP. Pada tahun 2016, APM SMA adalah sebesar 21,34 persen, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 18,11 persen, dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 23,59 persen. APM pada tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia 16-18 tahun.

E. Harapan Lama Sekolah

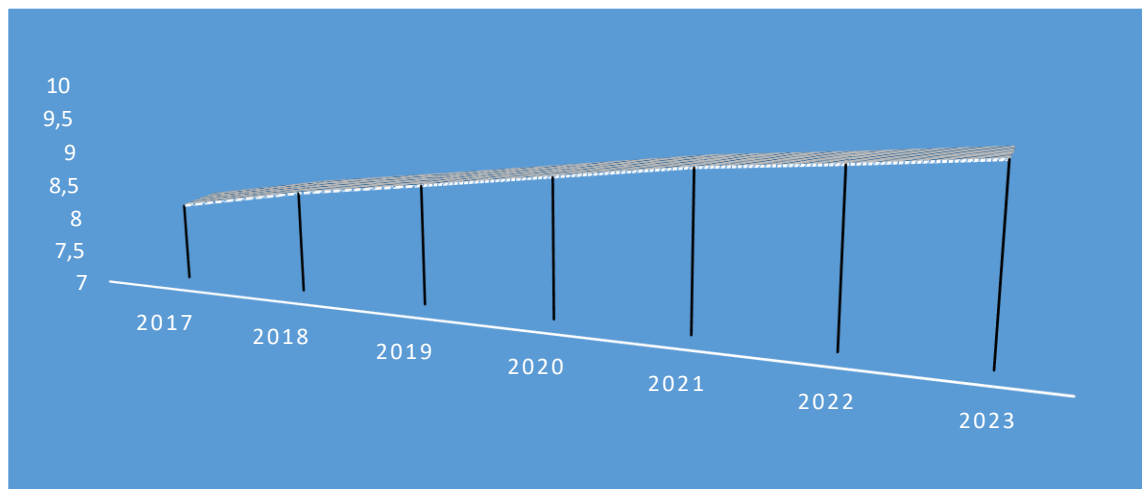
Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2. 51. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Asmat, 2019-2023

TAHUN	Harapan Lama Sekolah (HLS)
2019	9,02
2020	9,3
2021	9,49
2022	9,70
2023	8,47

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2020

Gambar 2. 28. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Asmat, 2018-2023



Sumber: Catatan: Angka Provinsi menggunakan angka rata-rata Kabupaten

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Angka HLS Kabupaten Asmat tahun 2016-2022 2 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016, angka HLS Kabupaten Asmat hanya sebesar 7,79, kemudian meningkat menjadi 10,98 pada tahun 2017. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 8,47 pada tahun 2018. HLS sebesar 8,75 pada tahun 2019, dan kenaikan menjadi 9,02 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 7,29 tahun atau telah mencapai pendidikan di kelas 1 SMP. Angka HLS Kabupaten Asmat tahun 2020 lebih rendah dibandingkan HLS Provinsi Papua yang mencapai 11,08 persen dan pada tahun 2022 sebesar 9,49 persen. HLS di Kabupaten Asmat masih berada jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga Pemerintah Kabupaten Asmat harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus-menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Asmat. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Merauke dan lainnya, HLS Kabupaten Asmat tergolong masih rendah. HLS Kabupaten Merauke pada tahun 2020 sudah menyentuh angka 13,88 tahun, sementara Kabupaten Boven Digoel dan Mappi sudah menyentuh angka 11,07 tahun dan 10,55 tahun.

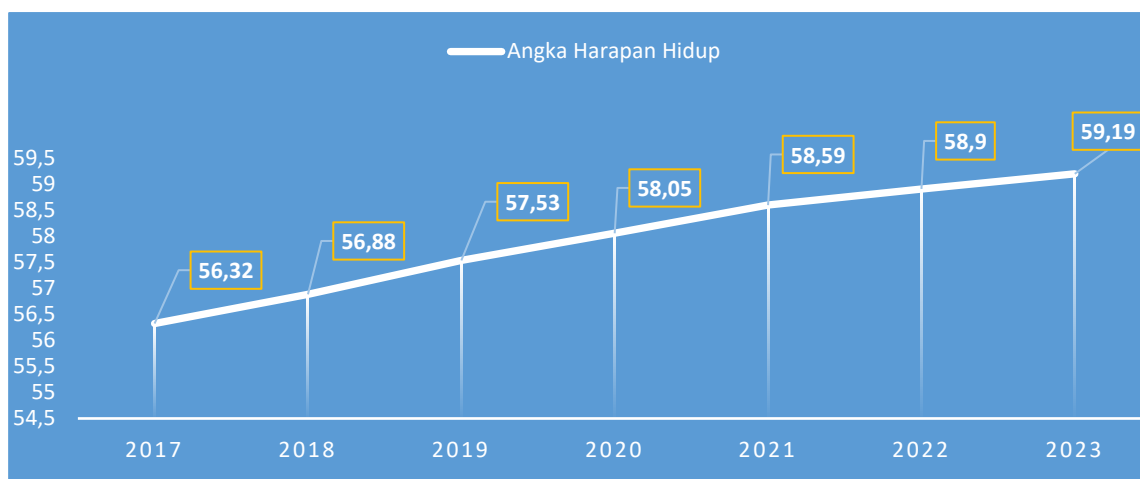
2.2.2.2. Kesehatan

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Seperti di daerah lainnya, angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Asmat juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, AHH di Kabupaten Asmat adalah sebesar 56,88, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 57,53. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kabupaten Asmat termasuk dalam kategori *hardrock* yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional dimana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.

Gambar 2. 29 Perkembangan AHH Kabupaten Asmat (tahun), 2017-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024 (diolah)

Pada Tahun 2022 AHH Kabupaten Asmat meningkat sebesar 58,59 persen, dimana selama tahun 2017-2023 setiap tahun mengalami peningkatan. Jika dilihat dari perkembangan indikator HLS dan ALS, AHH Kabupaten Asmat mengalami perkembangan namun masih berada dibawah kabupaten lainnya y diantaranya wilayah pemekaran Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke AHH nya, seperti pada tahun 2020 nilai AHHnya mencapai 67,00 tahun. Di Kabupaten eks pemekaran lainnya seperti Kabupaten Mappi, AHHnya pada tahun 2020 sebesar 65,11 tahun, sedangkan Kabupaten Boven Digoel memiliki AHH sebesar 59,97 tahun. Angka indikator HLS, ALS, dan AHH menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Asmat di bidang pendidikan dan kesehatan masih rendah di antara eks pemekaran Kabupaten Merauke. Pada tahun 2020, posisi AHH Kabupaten Asmat berada

pada peringkat ke 27 di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, atau hanya lebih baik dari Kabupaten Nduga yang memiliki AHH sebesar 55,27 tahun dan Kabupaten Mamberamo Raya 57,77 tahun. Posisi AHH tertinggi pada tahun 2020 berturut-turut ditempati oleh Kabupaten Mimika yaitu sebesar 72,32 tahun, Kota Jayapura sebesar 70,45 tahun, dan Kabupaten Yapen Waropen sebesar 69,12 tahun.

B. Tingkat Morbiditas

Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, misal pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal dibanding pekerja yang menderita sakit. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka morbiditas (angka kesakitan) dan rata-rata lama sakit. Angka morbiditas menunjukkan angka kesakitan yang dialami penduduk, sedangkan rata-rata lama sakit mencerminkan kerugian materiil yang dialami masyarakat selama sakit. Seseorang dikatakan mengalami sakit apabila mendapatkan keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Selama tiga tahun terakhir persentase penduduk Kabupaten Asmat yang sakit cenderung meningkat, yaitu dari 16 persen pada tahun 2018, mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 83 persen pada tahun 2019, dan 82 persen pada tahun 2020.

C. Kesehatan Balita

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa. Artinya bahwa, suatu bangsa akan dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila tingkat kesehatan balita memiliki angka yang baik pula. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, keluarga atau lainnya. Penolong kelahiran tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi saja, namun juga angka kematian ibu sebagai risiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara kemungkinan keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam risiko besar sebuah kelahiran.

D. Penderita Penyakit

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat pada tahun 2023, jenis penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Asmat diantaranya adalah saluran pernafasan, malaria, Gastritis, Polimialgia Reumatik, Diare tanpa dehidrasi, Vulnus, Tension Headache, Arthritis/Osteoarthritis, Karies Gigi, Tinea Corporis. Jenis penyakit yang paling banyak diderita penduduk di Kabupaten Asmat adalah penyakit saluran pernafasan dengan jumlah mencapai 29.3171 kasus.

Jika dirinci menurut distrik, jumlah kasus terbanyak berdasarkan jenis penyakit kasus gangguan saluran pernafasan paling banyak terjadi di Distrik Agats dengan jumlah kasus sebanyak 5.896, malaria paling banyak terjadi di Distrik Atsj. dengan jumlah kasus sebanyak 2.930, Gastritis paling banyak terjadi di Distrik Sawa Erma. dengan jumlah kasus sebanyak 1.566, Polimialgia Reumatik paling banyak terjadi di Distrik Sawa Erma. dengan jumlah kasus sebanyak 2.359, Diare tanpa dehidrasi paling banyak terjadi di Distrik Kolf Brasa. dengan jumlah kasus sebanyak 1.359, Vulnus paling banyak terjadi di Distrik Sawa Erma. dengan jumlah kasus sebanyak 1.314, Tension Headache paling banyak terjadi di Distrik Suator. dengan jumlah kasus sebanyak 2.110, Arthritis/Osteoarthritis dengan jumlah kasus terbanyak pada Distrik Unir Sirau dengan jumlah kasus sebanyak 1.139, Karies Gigi paling banyak terjadi di Distrik Sawa Erma. dengan jumlah kasus sebanyak 1.721, Tinea Corporis paling banyak terjadi di Distrik Pulau Tiga dengan jumlah kasus sebanyak 1.660.

Selain penyakit tersebut permasalahan yang menjadi tantangan pada Kabupaten Asmat adalah kasus Malnutrisi dengan angka stunting pada tahun 2024 Tiwulan Pertama sebanyak 26,04%, Wasting sebanyak 1,04%.

E. Stunting

Kabupaten Asmat memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi (54,5%) pada tahun 2022, yang meningkat dibandingkan angka tahun 2018 dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 32,6% dan 38,1%. Tiga kabupaten lainnya pun masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi, kecuali Kabupaten Merauke yang mendekati angka nasional pada tahun 2022 sebesar 23,7% (angka nasional 21,6%). Gambar berikut menunjukkan

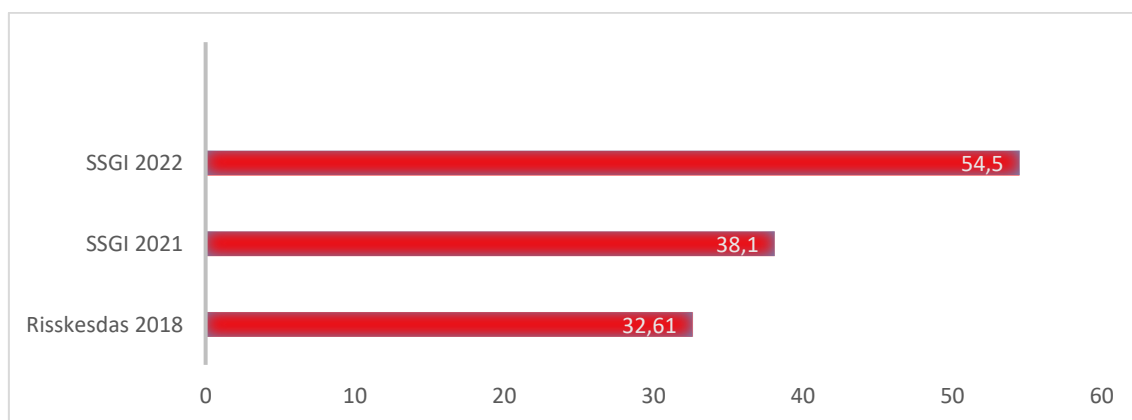
prevalensi stunting pada balita di 4 kabupaten wilayah Provinsi Papua Selatan berdasarkan hasil 3 survey yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI.

Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar sering kita kenal dengan Stunting. Tingginya angka stunting merupakan hambatan dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Program Percepatan penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan semua pemangku kepentingan;

Upaya penurunan angka stunting dijalankan melalui Intervensi Spesifik yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting dan. Intervensi Sensitif yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. Kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting bukan saja anak balita, namun juga meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui. Pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 tahun, yakni berupa target antara yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran TB/U yang dapat menilai anak stunted (pendek), pada tahun 2022 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) didapatkan angka rata-rata kabupaten untuk balita stunting sebesar 36,3%. Angka rata-rata kabupaten ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, yakni 32,0% (Hasil Riskesdas 2018) dan 34,4% (SSGI 2021).

Gambar 2. 30. Prevalensi Stunting pada Balita di Kabupaten Asmat



Sumber: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, SSGI 2022

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Asmat pada tahun 2022 sebesar 52,22 persen dimana pada Tahun 2020 berada pada posisi ke- 19 dari 29 kabupaten/kota yang ada sejak masih bergabung pada Provinsi Papua induak. posisi pertama ditempati Kota Jayapura yaitu sebesar 79,94, diikuti Kabupaten Mimika sebesar 74,19, Kabupaten Biak Numfor sebesar 72,19, Kabupaten Jayapura 71,69, dan Kabupaten Merauke 70,09. Hanya 5 kabupaten/kota tersebut di Provinsi Papua yang memiliki IPM di atas angka 70 sehingga termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 2. 52. IPM Kabupaten Asmat,Tahun 2017 sd 2023

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ASMAT	48,49	49,37	50,37	50,55	51,29	52,22	53,19

Pada tahun 2017-2022, perkembangan IPM Kabupaten Asmat menunjukkan perkembangan yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kabupaten Asmat berhasil meningkatkan capaian IPM menjadi 53,19 pada tahun 2023.

Tabel 2. 53. Persentase Pertumbuhan IPM dan Ranging Menurut Kab/kota, 2017-2023

Indikator	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Merauke	68,64	69,38	69,98	70,09	70,49	71,24	72,19
	Boven Digoel	60,14	60,83	61,51	61,53	61,62	62,52	63,46
	Mappi	57,10	57,72	58,30	58,15	58,70	59,61	60,57
	Asmat	48,49	49,37	50,37	50,55	51,29	52,22	53,19

2.2.2.4. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Namun, hal tersebut juga dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah

benar-benar digerakkan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk akan sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 yang dikumpulkan BPS setiap triwulan, persentase terbesar penduduk usia kerja di Kabupaten Asmat adalah penduduk bekerja, yaitu sekitar 83,54 persen. Persentase yang sangat tinggi ini dari sisi produktivitas tenaga kerja sangat bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Asmat. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan *skill* atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

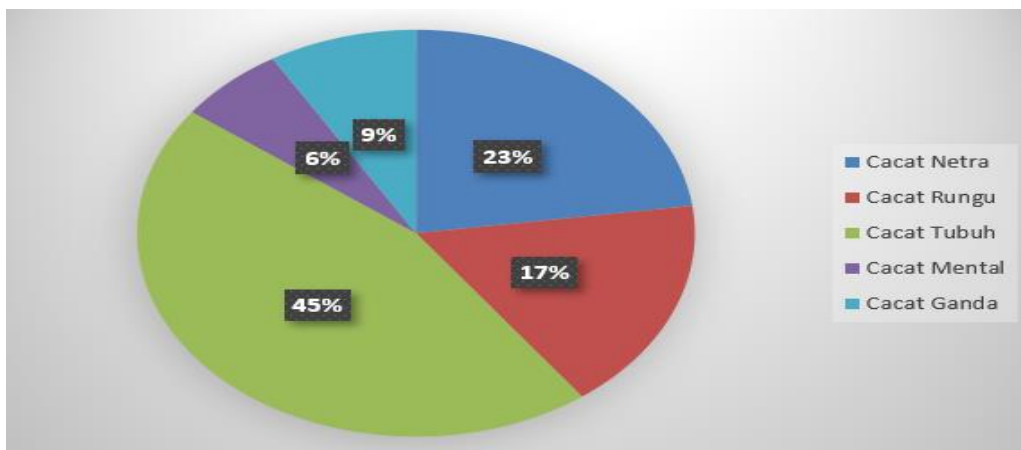
Sekitar 85 persen dari penduduk usia kerja di Kabupaten Asmat merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi (penduduk yang termasuk angkatan kerja), hal ini ditunjukkan dari tingginya angka TPAK yaitu sebesar 83,54 persen. Sisanya (14,88 persen) tidak aktif secara ekonomi, yaitu penduduk dengan kegiatan utama sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Dilihat dari sisi gender, TPAK laki-laki tidak terlalu signifikan berbeda (selisih kurang dari 1 persen) dengan perempuan yaitu masing-masing sebesar 85,68 dan 86,72 persen. Angka yang sama-sama tinggi tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi sama besar dengan penduduk laki-laki. Secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga tidak lagi hanya kaum laki-laki.

B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penderita cacat di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 secara keseluruhan adalah sebanyak 512 orang. Penderita tuna netra di Kabupaten Asmat adalah sebanyak 117 orang dimana distrik dengan penderita tuna netra terbanyak adalah Distrik Atsy (24 penderita), Fayit (15 penderita), dan Ayip (11 penderita). Untuk tuna rungu/wicara, jumlahnya pada tahun 2020 adalah sebanyak 87 penderita. Distrik dengan penderita tuna rungu/wicara

terbanyak adalah Distrik Safan (18 penderita), Unir Sirau (10 penderita), Betchamu, dan Der kourmur yang memiliki masing-masing 7 penderita.

Gambar 2. 31. Persentase Penderita Cacat di Kabupaten Asmat, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2016 (diolah)

Penderita cacat tubuh pada tahun 2020 adalah sebanyak 232 penderita, cacat mental sebanyak 32 penderita, dan cacat ganda sebanyak 44 penderita. Distrik dengan penderita cacat tubuh terbanyak adalah Distrik Agats yaitu sebanyak 40 penderita, kolf braza 21 penderita, dan Atsy sebanyak 20 penderita.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Asmat memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan selama ini diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Kabupaten Asmat memiliki keindahan destinasi wisata alam yang luar biasa dengan multikulturalisme penduduk merupakan potensi utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Daya tarik wisata budaya akan menjadi salah satu keunggulan lokal yang mampu membuat Kabupaten Asmat sebagai destinasi wisata tujuan utama turis asing dan domestik. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya dan olah raga. Sarana pendukung seni budaya dan olah raga masih membutuhkan perhatian yang serius. Adanya pesona wisata yang menarik

belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai baik untuk sektor seni budaya maupun olah raga. Nama Asmat sudah dikenal dunia karena kekayaan budayanya. Suku Asmat adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Papua bagian Selatan, diapit oleh Kabupaten Merauke, Mappi, Mimika, Yahukimo, dan Nduga. Populasinya terbagi dua yaitu mereka yang hidup di pesisir pantai dan pedalaman serta memiliki perbedaan satu sama lainnya dalam hal cara hidup, struktur sosial dan ritual, hal ini dapat dilihat dari hasil karya-karyanya dalam mengukir patung. Seni ukir asmat tergolong dalam *primitif art*. Seni ukir Asmat menunjukkan keahlian istimewa pembuatnya yang disertai perasaan yang tinggi akan garis-garis indah dan komposisinya. Maha karya yang terdiri atas beragam ukiran itu muncul di tengah masyarakat yang melangsungkan hidupnya di atas lumpur rawa. Pelestarian tradisi ukiran Asmat merupakan sebuah unsur penting untuk memelihara identitas, jati diri, dan rasa bangga orang Asmat terhadap budayanya sendiri. Keunikan lain yang dijumpai adalah rumah adat Asmat (*Jeu*) yang dikhususkan untuk para pemuda asmat yang belum menikah. Rumah ini terdiri satu ruangan dengan beberapa pintu, dibangun dengan berbahan kayu, atap dari daun sagu, dan tidak menggunakan paku besi, ukurannya antara 30-60 meter. *Jeu* biasa digunakan untuk pesta-pesta sakral, perang/perdamaian, tempat menceritakan dongeng para leluhur.

Penghargaan dunia terhadap Suku Asmat adalah sebagai Situs Warisan Budaya (*Site of the World Cultural Heritage*). Setiap tahun pada bulan Oktober selalu diadakan even yaitu Festival Budaya yang diprakarsai oleh Kurator Museum Asmat, Keuskupan dan Pemda Asmat. Kegiatan festival ini yakni lelang patung, demonstrasi ukir dari para pematung Asmat, pagelaran masakan khas Asmat, pementasan tarian adat Asmat, manuver perahu/lomba perahu Asmat dan lain-lain. Objek-objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah adalah objek wisata budaya, objek wisata alam dan objek wisata Taman Nasional Lorentz. Objek wisata budaya diantaranya adalah Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat yang di dalamnya tersimpan benda-benda bersejarah Suku Asmat seperti ukiran patung (Mbis, Panel, Salawaku, Perisai Woramon/perahu adat, panah, busur, Cakupan pelaku seni dan budaya yang meningkat kemampuannya dalam pengembangan kekayaan seni, budaya dan adat Asmat sampai dengan tahun 2023 telah mencapai target yaitu 100 persen, maka presentase capaian indikator ini adalah sebesar 100 persen. Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini ialah kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, pengembangan kreativitas seni ukir Asmat dan fasilitas penyelenggaraan festival kebudayaan Asmat pada 25 distrik serta pengembangan SDM di bidang kepariwisataan bekerjasama dengan lembaga lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut

diatas telah menjadi kegiatan rutin/tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asmat sejak tahun 2020-2023 sehinga cakupan pelaku seni dan budaya terus meningkat di Kabupaten Asmat.

Tabel 2. 54. Perkembangan Indikator Seni dan Budaya di Kabupaten Asmat, 2020-2023

No.	Capaian Pembangunan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan pelaku seni dan budaya yang meningkat kemampuannya dalam pengembangan kekayaan seni, budaya dan adat Asmat	Persen	100	100	94,4	100
2.	Jumlah obyek wisata budaya yang telah dikembangkan	Obyek	1	1	13	15
3.	Jumlah pelaku seni dan budaya yang eksis di tingkat nasional maupun internasional.	Kelompok	1	1	14	15
4.	Jumlah materi publikasi budaya Asmat	Materi	1	1	12	15
5.	Cakupan jumlah obyek budaya yang telah disahkan HAKI nya	Unit	1	1	12	14
6.	Cakupan kekayaan budaya yang dilindungi dalam Perda	Persen	1	1	80	80

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Asmat 2023

Orang Asmat secara turun-temurun memiliki kemampuan untuk menghasilkan patung patung dalam ritual dan cerita mitos pada setiap pahatan dan ukiran dari kayu yang dibentuk menyerupai tiang, perisai dan tombak, pada perahu dan dayung, tiang penyangga utama rumah adat/Jew dan seterusnya. Menurut unsur jenis, kewilayahan, motif, arti umum dan khusus dalam ukiran asmat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Unsur	Macam Jenis	Keterangan
Jenis ukiran 	Patung Besar	Patung yang di buat dengan ukuran besar dan digunakan secara umum untuk menghormati orang-orang yang berpengaruh seperti kepala perang. Patung-patung besar ini biasa ditempatkan diluar rumah, di tempat-tempat umum, dusundusun sagu, kebun dan tepi sungai. Patung atau ukiran besar ini dalam kehidupan orang Asmat di kenal dengan sebutan Patung "Mbisi". Berikut ini adalah penjelasan tentang pengertian, fungsi, dan arti simbolik dari patung Mbisi ;
	Patung Kecil	Patung yang ukurannya kecil dan biasanya disebut patung ke luarga karena patung ini digunakan untuk kepentingan keluarga. Patung-patung kecil ini ditempatkan di dalam rumah atau tempattempat khusus milik keluarga dari nenek moyang yang diukir.
	Ukiran di papan, dayung, perahu, perisai dan lain lain	Ukiran-ukiran ini biasa dipakai sebagai pencari nafkah atau lambang kebesaran. Para pengukir Asmat sangat genius dalam mengukir suatu patung, perisai dan benda-benda seni lainnya. Perisai dalam bahasa daerah disebut "Jamasi". Perisai dibuat dari akar pohon besar.
Sesuai 4 wilayah	Teluk flaminggo sampai pantai kasuari,	Perisai di daerah ini berbentuk empat persegi panjang dengan ukiran nenek moyang dibagian atas, yang berbentuk lonjong yang mereka kenal dengan sebutan Cemen "Kemaluan lakilaki".
	Sebelah Timur laut,)	bentuknya lebih besar dan lonjong dengan bagian kepala yang jelas, yang pada umumnya menggambarkan fisik "ikan Pari", Mbu "kura-kura" atau PI "Kasuari". Disamping itu ada juga yang berbentuk kemaluan laki-laki yang menggambarkan keperkasaan dan kejantanan laki-laki.
	Sebelah Timur,	bentuk perisainya yang terbesar, bagian atas runcing dan bagian bawah datar, pada bagian atas menunjukkan abstraksi dari kepala manusia.
	Sungai Braza	penduduk kaki bukit sebelah timur laut, hampir sama dengan perisai di daerah sebelah timur yang terkesan sulit di bedakan.
Motif	1) Motif manusia;	Motif manusia yang diukir tidak langsung, artinya motif manusia dengan memakai lambang seperti mengukir burung taun-taun, burung kakak tua dan lain-lain. Jadi motif binatang digunakan untuk menggambarkan tata kelakuan manusia.

		Motif manusia yang diukir langsung, misalnya motif manusia yang diukir pada perisai dimaksudkan untuk manusia yang
		dibuat patungnya pada perisai agar berkenan kepada mereka yang menggunakan perisai itu.
	2) Motif binatang;	Patung ukir berbentuk hewan dari jenis burung, buaya, ikan, kus kus, kelelawar dst
	3) Motif benda-benda;	Kaitannya dengan benda atau alat yang digunakan
	4) Motif Alam sekitar	Semua yang disimbolkan di alam baik hayati maupun non organik.
Arti umum	Manusia :	
	a. Alat kelamin manusia	yang mengandung makna kesuburan,
	b. Telapak tangan	yang menggambarkan kehidupan roh nenek moyang,
	c. Mata dan mulut	menyatakan perhatian roh nenek moyang
	d. Perut	menyatakan kemewahan dan kemakmuran, dan
	e. Bagian manusia secara keseluruhan	memanggil arwah nenek moyang
	Binatang	
	a. Sirip Buaya	berarti kebesaran seseorang panglima (kekuatan, keberanian),
	b. Ekor Kus-kus,	menyatakan harapan kepada leluhur
	c. Kelelawar	lambang kebaikan dan keburukan manusia
	d. Burung kasuari	Dipandang sebagai penyelamat.
	Alam Sekitar	
	1. Akar pohon beringin	Artinya percaya pada roh leluhur,.
	2. Daun pakis	Artinya darah manusia,
	3. Buih air	Artinya adanya kehadiran roh-roh.
Fungsi pokok ukiran	Sebagai lambang dan simbol kehadiran nenek moyang atau arwah leluhur sehingga nenek moyang yang telah meninggal di percaya masih hidup dan mempengaruhi seluruh hidup masyarakat.	
	Keyakinan akan roh-roh leluhur mereka tuangkan pada unsur unsur kebudayaan yang lain dan biasanya digunakan pada dayung, tombak, perahu, perisai, dan lain-lain.	
	Penghormatan terhadap arwah leluhur. Mereka berkewajiban membalas dendam atas kematian nenek moyang sehingga disusun suatu rencana pembalasan. Menurut orang Asmat, mereka harus bertanggung jawab atas kematian anggota masyarakat / keluarga, agar arwah orang yang meninggal dapat kembali dan membawa hidup baru dari dunia nenek moyang dan dapat pula memberi kekuatan bagi yang masih hidup dari musuh yang dibunuhnya.	

	Berfungsi sebagai pernyataan sedih atau gembira, karena kesedihan atau kegembiraan dapat diekspresikannya lewat ukiran-ukiran yang dibuatnya.
	Berfungsi sebagai alat pembina mental untuk bersikap tabah, maka diukir simbol-simbol pahlawan yang bermotif manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ataupun benda.
	Berfungsi sebagai lambang keindahan yang dapat mempengaruhi sikap anggota masyarakat. Makin indah sebuah ukiran makin nyata dan besar pula pengaruh arwah nenek moyang arwah leluhur terhadap masyarakat.
	Sebagai potret leluhur untuk dikenang masyarakat.
	Sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran.

2.2.3.1. Sistem Mata Pencaharian dan Ekonomi

Orang Asmat sebagai kelompok suku yang mendiami zona ekologis rawa bakau dan aliran sungai di tanah Papua mata pencaharian pokok mereka adalah Meramu sagu. Selain meramu sagu merupakan mata pencaharian pokok penduduk, mereka juga melakukan aktivitas berburu, dan mencari ikan di laut dan sungai di sekitar kampung. Jenis-jenis hasil alam yang biasanya dimanfaatkan oleh suku asmat di kampung-kampung adalah meliputi Kayu gaharu, rotan, kemiri, damar, kemenyan, kulit masohi, kulit lawang, cucut, udang, teripang, cumi-cumi, ikan, nipah, kerang, keong laut, kayu kuning, sagu, labu, ilalang, dsb. Setelah ada pemerintah pada jaman Belanda sampai RI sebagian warga menggantungkan hidup dari gaji yang didapatkan sebagai pegawai negeri sipil walaupun memiliki dusun area meramu, pekerjaan lainnya seperti pemahat patung dan penarik ojek speedboat dan longboat sewaan. Memahat patung untuk kemudian dijual kepada pengunjung kota Agats adalah salah satu aktivitas mata pencaharian yang giat dilakukan cukup lama semenjak karya pahatan patung kayu berupa manusia, hewan, dan lain-lain telah beralih fungsi dan tidak lagi menjadi bagian dalam perlengkapan upacara-upacara religius di kalangan orang Asmat.

Orang Asmat menganggap Pohon sagu sebagai ibu, dimana sebagai ibu, sagu selalu memberikan kecukupan makan bagi mereka, sebagai makanan pokok penduduk biasanya diambil dan dikelola di dusun milik klen/marga yang terletak di sepanjang aliran sungai. Aktivitas meramu sagu biasanya dilakukan bersama-sama oleh satu atau lebih keluarga inti dan anak-anak selama beberapa hari di dusun. Dalam perjalanan menuju dusun kelompok peramu menggunakan sarana transportasi dari perahu panjang dan dayung. Pada saat sekarang ini ada saja penduduk yang menggunakan motor tempel untuk bepergian ke dusun untuk meramu sagu. Di dusun kelompok peramu sagu biasanya menginap selama beberapa

hari (sekitara 3-5 hari) pada pondok-pondok yang dibangun sambil mengumpulkan pati tepung sagu dan hasil buruan untuk dibawa pulang.

Dalam aktivitas meramu sagu baik laki-laki ataupun perempuan bekerja sesuai beban kerja yang telah ditentukan. Kelompok laki-laki biasanya bekerja menebang pohon, membelah batang sagu, sementara pekerjaan menokok/pangkur untuk mengeluarkan serat-serat (empulur) di dalam pokok pohon sagu dan meremas sagu dilakukan oleh perempuan. Proses untuk mendapatkan pati sagu dilakukan dengan cara serat sagu diremas dengan bantuan air pada sarana tersendiri. Sarana proses pengambilan pati sagu terbuat dari pelepah pohon sagu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air dan pati sagu kedalam wadah yang tersedia. Mereka juga menggunakan lembaran kasa dari pohon sagu ataupun kelapa sebagai penapis untuk memisahkan pati/tepung sagu dari serat/empulur. Pada saat sekarang ini mereka banyak menggunakan kain kasa yang halus dan kuat sebagai penyaring. Pati sagu yang terpisahkan dari proses peramasan dibiarkan mengendap di dalam wadah penampung dari pelepahsagu. Pati yang telah mengeras karena mengendap diambil, diisi dalam wadah yang terbuat dari daun sagu dan selanjutnya dibawa pulang untuk dikonsumsi.

Dalam pekerjaan meramu sagu peralatan yang digunakan adalah kapak, parang, dan alat penokok/pangkur, noken dan karung. Selain meramu sagu kelompok peramu juga biasanya mengambil ulat sagu yang tertinggal dalam pokok pohon sagu yang ditebang dan dibiarkan membusuk. Demikian juga mereka akan mengambil hasil hutan lainnya seperti jenis-jenis sayuran, bumbu serta hasil kebun berupa ubi untuk dibawa pulang. Setelah beberapa hari di dusun mereka akan kembali pulang ke kampung dengan persediaan sagu untuk beberapa bulan kedepan. Rutinitas meramu sagu dilakukan terus-menerus mengikuti kebutuhan pokok penduduk. Hasil meramu sagu dan tumbuhan hutan yang didapatkan didusun keluarga biasanya dikonsumsi sendiri, dibagikan kepada kerabat atau tetangga dan sebagian dijual. Aktivitas berburu penduduk biasanya dilakukan sendiri dan juga bersama-sama dengan anak ataupun anggota kerabat lain. Aktivitas berburu dilakukan oleh kelompok laki-laki di sekitar wilayah dusun sagu dan hutan di sekitarnya. Di dalam melakukan perburuan terhadap binatang buruan mereka menggunakan panah dan tombak serta menangkap hewan buruan dengan menggunakan jerat. Aktivitas berburu biasanya dilakukan dapat lebih dari satu hari. Jenis-jenis hewan yang diburu adalah tikus hutan, kuskus, babi hutan, dan burung. Hasil buruan yang didapat dibawa pulang untuk dikonsumsi dan dijual.

Aktivitas mencari ikan dilakukan setiap hari dengan cara memancing dan menggunakan jaring. Beragam jenis ikan didapat dalam aktivitas ini, seperti ikan bobara, sejenis ikan lele, ikan pari, dan udang. Penduduk juga menangkap kepiting di rawa-rawa bakau sebagai sumber protein bagi keluarga. Dalam pekerjaan mencari ikan dan udang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Peralatan yang digunakan dalam aktivitas menangkap ikan adalah jala, kail, nilon, dan lain-lain. Hasil kegiatan penangkapan ikan dikonsumsi sendiri dan dijual. Berkebun sangat minim dilakukan oleh penduduk asmat secara umum karena wilayah yang berawa sehingga tidak memungkinkan. Walaupun demikian sebagian penduduk memanfaatkan luas areal tanah yang dimiliki untuk menanam sejumlah tanaman seperti ubi kayu, pisang, rica, dan daun gatal. Kreativitas sejumlah warga kampung dalam memahat patung kayu dalam bentuk manusia dan hewan adalah bentuk pekerjaan yang cukup penting saat ini untuk mendapatkan penghasilan; apakah itu pada saat ada festival budaya asmat ataupun dapat di jual pada artshop di agast. Kalau pada waktu lalu orang Asmat memahat patung sebagai perangkat dalam ritual-ritual religius dalam kehidupan di kampung, kini telah beralih menjadi nilai untuk mendapatkan penghasilan. Dalam konteks sensitif gender kegiatan ekonomi sehari-hari banyak dijalankan oleh perempuan terutama untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga. Perempuan dalam aktivitasnya bekerja memangkur sagu, menangkap ikan, udang, dan kepiting, mengumpulkan kayu bakar di hutan, serta menganyam atap rumah, mengasuh anak, dan mengolah makanan, mereka juga menganyam tikar (tapin). Laki-laki mengerjakan pekerjaan tertentu seperti, berburu, menebang dan membelah batang pohon sagu dalam aktivitas meramu sagu, membuat perahu baru, membangun rumah, dan memahat patung.

2.2.3.2. Sistem Religi dan Mitologi

Penduduk asli di Kabupaten Asmat terdiri dari kelompok etnik yang dinamakan Asmat. Penamaan ini diberikan oleh orang Asmat untuk menamakan diri mereka sendiri berdasarkan kepercayaannya yang diwariskan melalui mytologi penciptaannya bahwa mereka diciptakan oleh dewa pencipta bernama *Fumeripits* dari pohon. Juga penamaan ini dikaitkan dengan hubungan orang Asmat yang sangat erat dengan pohon. Orang Asmat memiliki keyakinan kepada roh-roh leluhur yang merupakan pendiri suku, klen, ataupun kampung yang telah meninggal yang merupakan pelindung orang Asmat dan pemberi kekuatan dalam peristiwa-peristiwa penyerangan terhadap kampung dan suku lain. Mite manusia pertama orang asmat sebagai berikut:

1. Orang Asmat yakin bahwa mereka adalah keturunan dewa yang turun dari dunia gaib yang berada di seberang laut dibelakang ufuk, tempat matahari terbenam tiap hari. Dalam keyakinan orang Asmat, dewa nenek moyang itu dulu mendarat di bumi disuatu tempat yang jauh di pegunungan. Dalam perjalanannya turun ke hilir sampai ia tiba di tempat yang kini didiami orang Asmat hilir. Dalam perjalannya ia mengalami banyak petualangan.
2. Dalam mitologi orang Asmat yang berdiam di daerah Teluk Flaminggo misalnya dewa itu namanya Fumeriptsy. Ketika ia berlayar dari hulu sungai ke arah laut, ia diserang oleh seekor buaya raksasa. Perahu lesung yang ditumpanginya tenggelam. Dalam perkelahian sengit yang terjadi, ia dapat membunuh si buaya, tetapi ia sendiri luka parah. Ia hanyut terbawah arus yang mendamparkannya di tepi sungai Asewtsy, kampung Syuru sekarang. Untung ada seekor burung Flaminggo yang merawatnya sampai ia sembuhkembali, kemudian ia membangun sebuah rumah yew dan mengukir dua patung yang sangat indah serta membuat sebuah genderang, em, yang sangat nyaring bunyinya. Setelah selesai, ia mulai menabu genderang sambil menari terus menerus tanpa henti, dan kekuatan sakti yang keluar dari gerakannya itu memberi hidup pada kedua patung yang diukirnya, dan mereka kemudian menjadi pasangan manusia yang pertama, yaitu nenek moyang orang Asmat (Zegwaard, 1955).
3. Sesudah itu datang lagi seekor buaya raksasa yang juga mencoba menyerang kedua manusia pertama tadi, tetapi Fumeripitsy dapat membunuhnya juga. Kepala buaya itu dipenggalnya dan badannya dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil dan dilemparkannya kesemua arah penjuru mata angin. Potongan-potongan buaya tadi itulah menjadi nenek moyang suku-suku bangsa lain yang tinggal di sekeliling tempat tinggal orang Asamat dan menjadi musuh mereka, Dengan demikian mite ini menggambarkan tindakan pengayauan pertama dan penciptaan manusia musuh Asmat oleh Fumeripitsy. Mite ini juga melambangkan proses daur ulang hidup dan mati (Smith 1970; Schneeboom, 1985).

Hubungan antara manusia yang hidup dengan alam roh leluhur biasanya dipelihara dan dihormati dalam upacara-upacara ritual dan dikaryakan dalam bentuk pahatan patung leluhur yang telah meninggal. Penghormatan kepada leluhur ini sering dilakukan dalam pesta-pesta, seperti pesta patung, pesta topeng setan, dan pesta-pesta saat inisiasi. Seluruh aktifitas berupa perayaan upacara ritual, pemujaan roh leluhur, rencana penyerangan dan pengayauan, upacara-upacara dalam inisiasi, proses belajar kebudayaan

semuanya berpusat di dalam rumah bujang / laki-laki yang disebut "Jew"¹. Orang Asmat memiliki keyakinan akan dewa tertinggi atau Tuhan yang disebut "Mbiwiripitsy".

Dalam pandangan hidup mereka meyakini akan suatu tempat kehidupan bahagia atau surga yang juga akan ditempati seseorang setelah meninggal dunia, yaitu "Safan". Safan menurut orang Asmat adalah dunia seberang atau surga yang merupakan tempat kediaman dari arwah-arwah orang-orang tua dan leluhur orang Asmat yang telah meninggal dunia. Kehidupan di Safan adalah kehidupan yang bahagia dibandingkan dengan kehidupan di bumi atau dunia nyata, yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, malapetaka, penyakit, dan situasi tidak bahagia. Selain kehidupan di dunia atau dunia nyata yang disebut "Onpu ow Capinmi", konsep dunia lain yang diyakini adalah apa yang disebut sebagai dunia persinggahan bagi orang-orang meninggal sebelum sampai ke Safan atau "Dampu ow Capinmi". Dalam hubungan saling bergantung dan membutuhkan orang Asmat memenuhinya dengan menyelenggarakan sejumlah upacara-upacara sakral untuk menghormati leluhur yang hidup di Safan. Tidak sekedar upacara, orang Asmat juga menghormati leluhurnya dengan membuat ukiran-ukiran manusia, dan melakukan pengayauan-pengayauan. Upacara, membuat patung Mbis, pengayauan, dan persembahan diberikan kepada leluhur dengan harapan selama kehidupan di dunia nyata selalu mendapat perlindungan dan kedamaian. Harapan yang lebih nyata adalah bahwa ketika meninggal dunia dapat mencapai Safan dengan sempurna. Mereka sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara saja, sebab pada akhirnya manusia akan mati dan roh atau arwahnya akan menghadap nenek moyang. Kalau dalam hidupnya di dunia ini orang tidak menghormati arwah nenek moyang melalui sajian, arwah nenek moyang itu akan mempersulit kehidupannya di Safan pada saat dia meninggal". Orang Asmat yakin bahwa dilingkungan tempat tinggal manusia juga diam berbagai macam roh yang dibagi dalam tiga golongan yakni, : Yi-ow, roh nenek moyang yang pada dasarnya bersifat baik, terutama bagi keturunannya. Osbopan, yaitu roh jahat yang membawa penyakit dan bencana. Dambin-ow, roh jahat dari orang yang mati konyol. Orang Asmat mengenal beberapa upacara besar yang menyangkut aktivitas sosial budaya dan kultural yang berkaitan dengan penghormatan kepada roh-roh nenek moyang yaitu: `

¹ Filosofi Budaya Rumah/Bangunan Dalam sebuah rumah adat yang disebut Jew/Yew pada bagian tengah rumah yang biasanya ditempati oleh kepala suku terdapat sebuah tiang berukir menyerupai sebuah patung manusia (Patung Mbis). Melalui mitologi patung ini merupakan manifestasi dari roh nenek moyang/ leluhur suku Asmat (pria dan wanita) yang hidup rukun dan saling mengasihi. Rumah Jew/Yew ini melambangkan bahwa alam semesta dan makhluk yang hidup di dalamnya (manusia, roh) hidup rukun dan saling mengasihi.

- Mbisumbu atau pembuatan patung Mbis, atau upacara pembuatan patung nenek moyang suku Asmat.
- Yentpokumbu upacara pembuatan dan pengukuhan rumah Jew.
- Tsyimbu upacara pembuatan dan pengukuhan perahu.
- Yamasy pokumbu upacara pembuatan perisai/tameng.
- Mbipokumbu upacara pembuatan topeng.
- Salah satu upacara yang penting dalam adat orang Asmat adalah upacara pengukuhan dan pembuatan rumah Jew.

Pandangan orang Asmat tentang Keseimbangan dalam Kehidupan Orang Asmat percaya bahwa dunia dalam pandangan mereka terbagi atau terdiri dari tiga (3) bagian yaitu;

1. "Asamat Ow Capinmi" adalah "Dunia Tempat Manusia / Orang Asmat Hidup".
2. "Damir Ow Capinmi" adalah "Tempat Persinggahan Orang Yang Sudah Meninggal dan Belum Masuk Dalam Tempat Istirahat Kekal di Surga.
3. "Safan" adalah Tempat peristirahatan terakhir yang kekal / surga.

Semua orang Asmat ingin masuk ke Safan ketika mereka meninggal karena Safan adalah tempat tinggal roh leluhur / nenek moyang mereka yang penuh dengan kebahagiaan tanpa ada penderitaan. Untuk dapat masuk ke Safan semasa hidupnya seorang Asmat harus banyak melakukan kebaikan, menghormati roh nenek moyangnya dan mentaati / mengikuti semua aturan adat mereka. Menurut orang Asmat seorang pahlawan, panglima perang, tua-tua adat, dukun, ketika mereka meninggal rohnya dapat langsung masuk ke Safan, namun apabila seseorang meninggal karena dibunuh musuh, sakit penyakit, sihir hitam, dendam, maka rohnya tidak dapat menuju Safan melainkan akan tinggal di "Damir Ow Capinmi"/ Tempat persinggahan orang yang sudah meninggal. Roh-roh yang belum sampai ke Safan inilah yang dapat menyebabkan penyakit, penderitaan, gempa bumi dan peperangan bagi orang Asmat yang masih hidup. Sehingga bagi orang yang masih hidup harus menebus roh-roh ini dengan membuat pestapesta dan ukiran-ukiran. Dengan memberi nama mereka pada ukiran/ patung patung tersebut agar roh-roh tersebut dapat masuk ke Safan.

Berdasarkan pandangan hidup inilah dalam kehidupannya orang Asmat sangat menjunjung tinggi keseimbangan, yaitu suatu pandangan atau pemikiran yang menjadi dasar hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya dan manusia dengan dunia spiritual (arwah leluhur atau arwah orang mati). Hubungan tersebut

terjadi dalam situasi suatu kerjasama, persaingan, ataupun konflik. Demikian bahwa keseimbangan yang dipahami terbentuk, terjaga dan terjadi secara mekanis adalah saling membutuhkan, membuat manusia hidup, membuat orang Asmat mendapatkan perlindungan, membuat orang Asmat dengan sempurna dapat mencapai Safan, membuat orang Asmat memperoleh kemenangan-kemenangan dalam pengayauan, norma dan aturan dalam masyarakat tertata baik dan lain sebagainya. Keseimbangan inilah yang diyakini membuat orang Asmat tetap ada dan hidup. Keseimbangan hubungan antara manusia Asmat dengan alam maupun dengan dunia spiritual tercermin dalam perilaku dan tindakan orang Asmat sehari-hari. Mereka percaya bahwa untuk mendapatkan perlindungan di dunia nyata, dunia mereka hidup saat ini maupun untuk dapat mencapai hidup di Safan, maka mereka harus melakukan ritual-ritual magis dan penyembahan kepada leluhur.

Penghormatan kepada leluhur juga dilakukan dalam bentuk pahatan-pahatan dalam rupa manusia pada media kayu, melakukan perjalanan-perjalanan pengayauan terhadap kelompok lain, melakukan tindakan-tindakan balas dendam, melakukan nyanyian-nyanyian dan tarian dan sebagainya. Tidak mengherankan dan harus dipahami oleh orang luar bahwa dunia orang Asmat dipenuhi dengan ritualritual. Orang Asmat juga memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dengan seadanya tanpa melakukan eksplorasi secara besar-besaran. Hampir sama dengan kelompok masyarakat pemburuperamu dengan orientasi hidup masa kini. Sumber daya alam yang berlimpah, di antaranya sagu, ikan di laut dan sungai, udang, kepiting, dan hewan hutan dimanfaatkan secukupnya. Mereka mengambil sumber ekonomi tersebut untuk dimanfaatkan hari ini selanjutnya besok akan diambil lagi. Mereka memanfaatkan sumber daya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan saat ini, sedangkan Untuk kebutuhan hari esok dan hari-hari selanjutnya akan dicari lagi.

Orang Asmat juga banyak menyamakan atau melambangkan diri mereka dengan hewan, tumbuhan, dan lain-lain dalam arti simbolisme (simbolik). Kekayaan lambang juga tercermin dalam dalam guratan pahat pada kayu dalam bentuk manusia dan hewan. Bentuk rupa manusia pada patung Mbis adalah cerminan leluhur yang telah meninggal dunia. Mereka menyamakan diri mereka dengan pohon sagu, pohon kelapa, buah kelapa, burung dan simbolisme lainnya. Sebagaimana ungkapkan di atas bahwa pohon sagu dilambangkan sebagai ibu, demikian juga pohon kelapa. Burung-burung sebagai mahluk yang suka memakan buah-buahan diibaratkan tindakan mereka yang suka melakukan perjalananperjalanan jauh untuk melakukan pengayauan. Tindakan memakan buah bagi mereka memiliki makna yang cukup luas dan tidak terbatas pada peristiwa pengayauan

saja. Jan Boelars mengatakan, "demikian pula cerita-cerita dan nyanyian-nyanyian mereka mengandung kekayaan lambang dan pikiran". Tabel berikut ini menunjukkan beberapa bentuk kearifan adat yang diturunkan baik dalam pandangan maupun ritual dan bentuk simboliasasi.

Tabel 2. 55. Beberapa Bentuk Nilai Kearifan lokal Suku Asmat

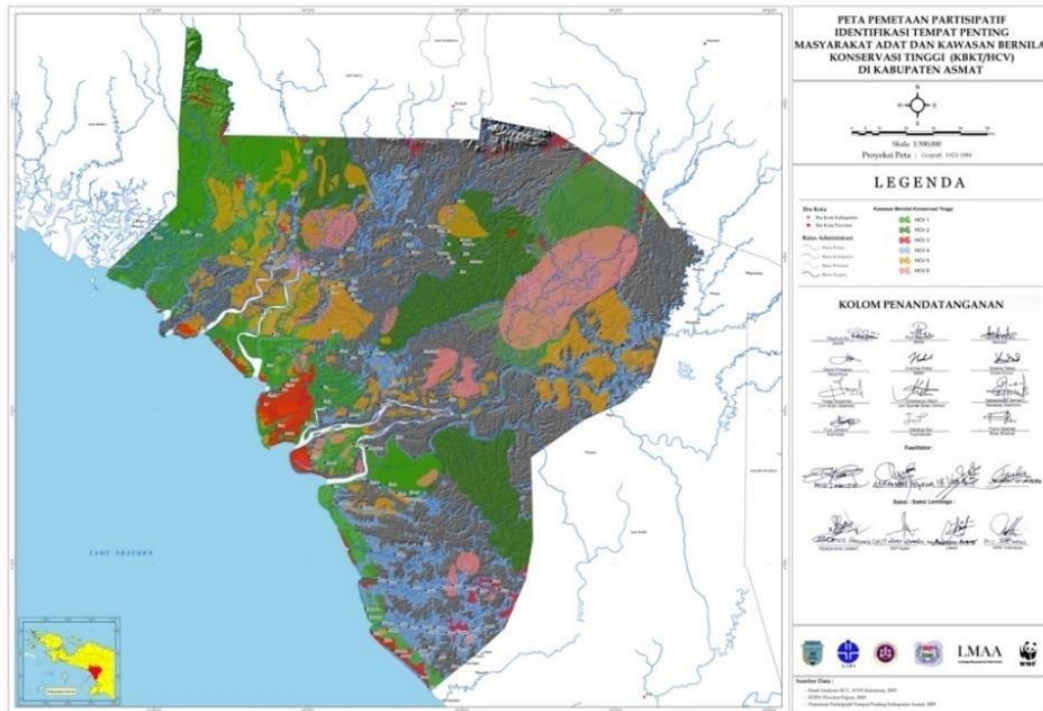
No	Bentuk Nilai Kearifan	Keterangan	Wilayah adat
1.	Odakemminisme	Mitosnya suku sawi Atap-hapkon melalui dogma 'Odakemminisme' tentang kultus. Perjalanan mite dari kegelapan kepada dunia baru yang secara religi dipercaya hadir dengan inkulturasi kekristenan yang hadir kemudian.	Safan Distrik Pantai Kasuari, Auwyu
2.	Ritual Pesta Ulat Sagu (Tow Pok Mbu)	Makna Ritual merupakan pandangan tersendiri tentang pohon sagu sebagai simbol seorang ibu yang memberi yang terbaik bagi anggota keluarga. Biasanya dilakukan tiga hal penting yaitu menyanyi, menari (pujian <i>Em so</i>) dan makan bersama	Semua Rumpun
3.	Tradisi Perjodohan	Pandangan orang Asmat melamar mengandung maksud perjodohan dan sebaliknya.	Semua Rumpun
4.	Tradisi Pembayaran Maskawin	Benda-benda pembayaran mas kawin umumnya berasal dari alam dan beberapa peralatan yang biasa digunakan sebagai alat perang dan alat mencari nafkah. Busur, panah, dan tombak mengasosiasikan budaya perang suku di satu sisi, dan alat berburu dan keamanan di sisi lain. Kapak batu adalah salah satu contoh benda berharga yang menentukan wibawa mempelai laki-laki.	Semua Rumpun
5.	Tradisi Melahirkan Suku Asmat	Teweraut merupakan lambang tradisi bersalin di bawah pohon lebat dan tinggi. <i>Teweraut</i> nama yang dipakai untuk menyebutkan tokoh utama roman ini merupakan salah satu tanaman lokal bernama anggrek Teweraut. Anggrek ini berkelopak merah jingga dan termasuk tanaman langka. Tanaman ini	Semua Rumpun

		hidup sebagai epifit di pohon-pohon besar, seperti habitat anggrek pada umumnya.	
6.	Kearifan Seni ukir Asmat	Pada awalnya merupakan manifestasi dari mite dan kepercayaan orang asmat melalui membuat simbol ukiran	semua Rumpun, dengan patung Mbis
No	Bentuk Nilai Kearifan	Keterangan	Wilayah adat
		patung di kayu mereka menjaga hubungan baik manusia dengan Tuhan dan Leluhur serta orang yang sudah meninggal. Biasanya dibuat dalam bentuk patung Mbis, ukiran di berbagai peralatan hidup, rumah dan bahkan perahu lesung.	dalam beberapa Versi : Atsy, Mbismam
7.	Filosofi Sungai, Sampan, Sagu	Masyarakat Asmat percaya bahwa secara sosial melalui aspek mata pencaharian sepanjang hidup mereka selalu berhubungan dengan Sungai sebagai jalur transportasi, sumber air, sumber makanan hewani, Sampan merupakan alat yang digunakan sejak awal untuk berperang, moda utama yang digunakan untuk mencapai wilayah lain, dan tertentu, Sagu adalah ibu yang memberi makan dan kehidupan.	Semua Rumpun dan Suku

Sumber: diolah dari berbagai sumber artikel dan jurnal

Sistem kepercayaan, pandangan dan mite orang Asmat kemudian melahirkan kawasan atau area tempat penting masyarakat adat Asmat yang mereka peruntukan untuk berbagai kepentingan adat dan tradisional baik area dalam kerangka ritual, tempat upacara maupun tempat yang dianggap sakral akibat satu kejadian tertentu yang terjadi pada waktu lalu.

Gambar 2. 32. Peta Tempat penting suku Asmat



Sumber : Pemerintah Kabupaten Asmat

Dari hasil pemetaan tempat penting orang asmat yang diselenggarakan pemerintah kabupaten Asmat kerjasama dengan WWF Indonesia dan Keuskupan Agung Agats telah menghasilkan area konservasi tinggi yang memuat bentang alam penting, jasa ekosistem penting, mata pencaharian tradisional dan tempat penting sebagai kawasan simbolisasi identitas orang Asmat, adapun tempat penting suku asmat berupa kuburan leluhur, dusun sagu, sumber air, jalur perjalanan leluhur, tempat sakral, tempat persinggahan leluhur, tempat sejarah dna hutan lindung adat, dst. Sedangkan yang berkorelasi dengan mata pencaharian masyarakat seperti dusun sagu, tempat berburu, rawa, dan kampung lama (biasanya masih ada dusun kelapa dan kebun). Gambar 229 memperlihatkan hasil pemetaan partisipatif yang menjadi kesepakatan masyarakat Hukum Adat Asmat yang disaksikan pemerintah daerah.

2.2.3.3. Sistem Kekerabatan dan Kepemimpinan

A. Struktur Sosial

Orang Asmat yang tersebar di seluruh wilayah Asmat terbagi-bagi ke dalam kesatuan-kesatuan sosial yang disebut *ye*. Suatu kesatuan social yang disebut *ye* adalah sama dengan pengertian kampung dalam struktur pemerintahan masa sakarang. Tiap

kampung memiliki suatu teritorium kekuasaan tertentu dan di dalam wilayah kekuasaan itulah terdapat dusun-dusun sagu, areal hutan untuk berburu dan perairan untuk menangkap ikan. Kampung-kampung orang Asmat biasanya dibangun di tepi sungai dalam bentuk memanjang mengikuti arah sungai.

Kesatuan sosial yang lebih kecil dari kesatuan sosial kampung adalah klan atau marga. Tiap kampung dibentuk oleh sejumlah klan atau marga. Keanggotaan dalam suatu marga adalah berdasarkan keturunan dari seorang moyang yang sama dan bersifat patrilineal. Tiap klan menggunakan nama tertentu untuk menyatakan identitas keanggotaan klan yang bersangkutan dan sekaligus untuk membedakan mereka dari anggota klan lain. Para anggota dari klan yang sama tidak boleh saling kawin, dengan demikian maka klan bersifat exogami, artinya kawin di luar klan sendiri. Perkawinan boleh terjadi antara anggota yang berasal dari klan yang berbeda. Biasanya para anggota tiap klan menempati bagian tertentu dalam suatu kampung.

Di bawah kesatuan klan terdapat kesatuan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum berumah tangga sendiri. Keluarga inti merupakan kesatuan sosial yang paling kecil tetapi paling penting dalam kehidupan orang Asmat sebab selain keluarga inti berfungsi sebagai tempat untuk, meneruskan keturunan, juga berfungsi sebagai kesatuan kerja yang menghasilkan berbagai kebutuhan hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga. Pada masa sekarang setiap keluarga inti menempati sebuah rumah sendiri.

B. Kekerabatan

Sistem istilah kekerabatan suku bangsa Asmat termasuk tipe Hawaian atau yang disebut juga tipe generasi sesuai dengan klasifikasi terminologi kekerabatan yang dibuat oleh L.H. Morgan. Tipe Hawaian adalah suatu sistem pengelompokan yang menggunakan istilah yang sama untuk menyebut saudara-saudara sekandung dan semua saudara sepupu silang dan paralel. Pada angkatan satu generasi di atas Ego (aku), yaitu ayah dan ibu juga semua saudara kandung laki-laki; baik dari pihak ayah maupun ibu disebut "ayah". Sementara semua saudara kandung perempuan dari pihak ayah maupun pihak ibu disebut "ibu". Pada angkatan aku (ego) semua saudara sepupu seajajar dan saudara sepupu silang disebut dengan istilah yang sama, yaitu "saudara". Untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan disebut berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Suku bangsa Asmat, dalam sistem kekerabatan mengenal 3 (tiga) bentuk keluarga, yaitu:

1. Keluarga Inti Monogamy dan Kandung Poligami
2. Keluarga Luas Uxorilokal: keluarga yang telah menikah berdiam di rumah keluarga dari pihak istri.
3. Keluarga Ovunkulokal: keluarga yang sudah menikah berdiam di rumah keluarga istri pihak ibu.

Orang Asmat tinggal bersama dalam rumah panggung seluas 3 x 4 x 4 meter yang disebut *Tsyem*. Ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan peralatan berburu, bercocok tanam, dan menangkap ikan. Berdasarkan garis keturunan melalui garis ayah (patrilineal), terdapat adat perkawinan adalah eksogami (kawin di luar kelompok fratri) dan adat menetap setelah kawin adalah patrilokal dan matrilineal (pasangan pengantin tinggal dan menetap di sekitar tempat tinggal suami, tetapi juga bisa ditempatkan tinggal pengantin perempuan). Anak-anak di orang Asmat tidak semuanya dapat mengikuti garis keturunan ayah atau menggunakan nama keluarga ayah. Anak-anak dalam keluarga kadang-kadang menggunakan nama keluarga ibu (matrilineal).

Namun demikian tidak serta-merta semua anak-anak dalam keluarga harus dibagi untuk mengikuti garis keturunan ayah atau ibu. Situasi demikian dapat terjadi bukan karena telah ditentukan oleh aturan adat, tetapi adalah merupakan kebiasaan ketika seorang anak menjadi lebih dekat dan akrab kepada anggota kerabat ibunya, maka si anak akan menggunakan nama keluarga ibu. Seorang anak yang lebih dekat hubungan dengan kaum kerabat pihak ibu akan diperlakukan dengan baik; perkembangan pertumbuhan dan pengawasan selalu diikuti. Maka dengan demikian oleh pihak keluarga ayah akan mengakui kepada pihak MB untuk mengasuh, sekaligus memakai nama keluarga dari pihak ibu.

Jozh R, Mansoben mengatakan "Situasi yang terjadi menyebabkan sejumlah kajian Antropologi menyebutkan bahwa penelusuran garis keturunan pada orang Asmat adalah patrilineal dan matrilineal". Adat menetap yang tidak taat asas dan garis keturunan yang dapat berubah-ubah (patrilineal atau matrilineal), kesimpulannya orang Asmat menganut sistem *ambilineal descent* dengan pola menetap dan organisasi sosial yang dualistik yang saling tumpang tindih (Koentjaraningrat; 1993 :344).

Dalam adat perkawinan orang Asmat telah diatur bahwa anak-anak dalam keluarga ketika hendak mencari pasangan hidup untuk kawin di luar kelompok *fratri*, yaitu *aipmu* dan *aipem*. Klen-klen.marga yang ada di dalam *aipmu* dan *aipem* tidak dibenarkan untuk saling kawin. Adapun seseorang bila hendak kawin, misalnya dari fratri *aipmu*, maka dia harus mencari pasangan untuk kawin dari kelompok *aipem*. Demikian pula sebaliknya laki-

laki dari kelompok fratri *aipmu* hanya boleh mencari perempuan sebagai pasangan untuk kawin dari kelompok fratri *aipem*. Dengan demikian bahwa perkawinan yang terjadi diantara laki-laki dan perempuan di dalam kelompok adalah perkawinan yang dilarang oleh adat. Pelanggaran terhadap adat perkawinan dengan kawin di dalam kelompok merupakan tabu dengan sanksi yang cukup tegas.

Mengenai tempat tinggal setelah kawin, pasangan suami isteri biasanya tinggal di tempat kediaman dari pihak laki-laki. b) Kelompok kekerabatan dan Jalinan Pertalian Kerabat Basis yang paling dasar dalam kelompok kekerabatan adalah keluarga inti (batih) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum kawin. Keluarga inti terbentuk berdasarkan suatu ikatan perkawinan yang diakui sah oleh adat. Dewasa ini ikatan keluarga juga diakui keberadaannya oleh gereja khatolik maupun protestan. Ikatan pertalian kerabat antara orang tua dan anak tetap diakui secara sah, biarpun sejak anak telah digiring untuk tinggal terpisah dari orang tua. Anak-anak pada usia 5 tahun pada umumnya ditempatkan di rumah bujang atau Jew agar anak dapat belajar tentang masyarakat, kebudayaan, adat-istiadat dan lingkungan alamnya. Dalam perkembangan ketika aturan adat mulai longgar banyak anak-anak yang tidak tinggal di Jew dapat tinggal di rumah orang tuanya dan kadang-kadang juga tinggal di Jew. Sebuah pasangan keluarga yang baru menikah biasanya akan tinggal bersama-sama di rumah orang tuanya dan setelah dapat membangun rumah sendiri akan tinggal terpisah dari rumah orang tuanya.

Orang Asmat sangat memperhatikan jalinan hubungan dengan saudara sekandung. Jalinan pertalian hubungan dengan kerabat sebagai anggota keluarga luas ini sangat akrab, mesra serta saling tolong-menolong, demikian juga jalinan hubungan dengan anggota keluarga dari pihak ibu. Seorang anak lakilaki ketika pertama kali hidup bersama-sama dengan pasangan hidupnya akan tinggal bersama-sama di rumah ibu bapaknya. Bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi untuk kelangsungan keluarga tersebut, seperti pergi bersama-sama meramu sagu, berburu atau mencari ikan. Ikatan pertalian hubungan sebagai anggota keluarga luas di kalangan mereka tetap terpelihara antara keluarga ayah dan keluarga anak, biarpun anak telah memiliki rumah sendiri, yang terpisah dari rumah orang tuanya dan tungku tersendiri. Secara ekonomis isterinya yang akan menyiapkan makanan dan bukan lagi didapat dari dapur orang tuanya. Bentuk kelompok kerabat yang lain lagi adalah fratri atau moety.

Dalam kehidupan kekerabatan masyarakat Asmat pada umumnya terbagi atas dua kelompok besar, yaitu *aipmu* dan *aipem*. Di dalam kedua kelompok besar ini terdiri dari klen-klen. Sejumlah aturan menata kedua kelompok ini dalam kehidupannya, termasuk

didalamnya adalah aturan untuk tidak kawin di antara sesama klen yang tergolong dalam aipmu atau aipem. Sesama anggota fratri biasanya saling mengenal dengan baik, saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam aktivitas-aktivitas menyangkut perayaan adat, aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Jalinan pertalian sebagai kerabat di antara orang Asmat tidak hanya terjadi karena dijalin atas dasar hubungan perkawinan dan hubungan darah. Pertalian sebagai kerabat dapat juga terjadi dari suatu hubungan pertemanan yang terjalin sejak masih kanak-kanak ketika bersama-sama hidup di Jew hingga sehingga kedua orang menjadi dewasa. Hubungan pertemanan dalam hal ini adalah saling membantu dalam kesulitan, membagi rokok, membagi makanan, dan lain-lain. Jalinan pertemanan kemudian berlanjut menjadi jalinan kerabat ketika salah satu orang meninggal dunia.

Kaum kerabat dari individu yang meninggal selanjutnya akan mengangkat sahabatnya yang masih hidup sebagai pengganti saudara mereka yang telah meninggal. Individu yang masih hidup juga akan dipanggil namanya sesuai dengan nama saudara mereka yang telah meninggal. Kaum kerabat dari orang yang meninggal juga memberikan barang-barang dan bahan makanan, seperti sagu, siput, pakaian, gula, beras kepada individu yang masih hidup. Setelah itu individu yang bersangkutan bersama-sama dengan anggota keluarganya yang akan melakukan pelayanan di rumah duka selama lebih dari 3 hari. Kewajiban dari individu yang masih hidup dalam kehidupannya adalah ikut memperhatikan kelangsungan hidup dari anggota keluarga sahabatnya yang telah meninggal dunia dalam hal bantuan dalam pembayaran mas kawin, dend-denda, terlibat dan ikut memihak apabila ada konflik dan lain sebagainya. Hubungan pertemanan yang akrab, mesra dan bersahabat juga berperan ketika terjadi penyerangan-penyerangan terhadap kelompok lain. Kedua sahabat baik akan saling melindungi agar dapat berhasil dan pulang dengan selamat. Pada waktu lalu untuk lebih mengikat hubungan pertemanan kedua sahabat lebih mengakrabkan dengan saling menukar isteri. Pada upacara *mbis pokmbu*. "Tarian-tarian yang dilakukan sangat erotik dan dinamis, pada saat-saat yang demikian, terjadilah tindakan *papisj*, diantara mereka yang mempunyai hubungan *papisj* – yaitu dua orang sahabat saling menukar isteri untuk malam-malam yang telah ditentukan. Maksud tindakan *papisj* ialah untuk tetap mempererat hubungan persahabatan di antara kedua sahabat tersebut yang sangat diperlukan dalam saat-saat tertentu, umpama dalam peperangan" yang baik dan akrab sering ditindaklanjuti dalam tindakan-tindakan *papisj* dalam pesta-pesta adat dengan saling menukar isteri pada malam-malam tertentu. (Patti, Semuel: 1976:62).

C. Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional di masyarakat Asmat pada waktu lalu adalah kepemimpinan yang diperoleh seseorang karena kemampuan lebih yang dimiliki dan telah dicapai dalam kehidupan di masyarakat. Seseorang selanjutnya dihargai dan memperoleh pengakuan sebagai pemimpin karena hebat, kuat dan pintar dalam menyusun strategi dalam penyerangan-penyerangan pada kaum yang sukses terhadap kelompok dan kampung lain.

Pemimpin juga adalah orang yang pandai berdiplomasi, menjadi penengah dalam menangani konflik di masyarakat, mampu melindungi kampung dari serangan musuh, berwibawa, dan memiliki banyak ide. Kedudukan menjadi seorang pemimpin diperoleh karena penghargaan dan pengakuan masyarakat adalah upaya yang dilakukan seorang diri karena kemampuan dan kelebihan dalam hidup dan kehidupannya di masyarakat. Kedudukan sebagai pemimpin pada masyarakat ini tidak didapat karena keturunan. Pencapaian kedudukan dengan model seperti ini dalam tipe kepemimpinan tradisional, termasuk tipe *achieves status* atau pencapaian kedudukan diperoleh karena upaya sendiri. Sistem kepemimpinan model demikian dalam kajian Antropologi dikenal dengan sebutan *Big man* atau pria berwibawa.

Johz Mansoben (2003) mengatakan kebudayaan Asmat memiliki orientasi nilai budaya yang menghargai usaha orang. Upaya seseorang untuk menampilkan dan mengukuhkan diri sebagai seorang pemimpin perang sangat dihargai dan dinilai tinggi sebab perang merupakan sarana untuk memperlancar berbagai aktivitas kehidupan manusia, baik yang bersifat kegiatan ekonomi maupun upacara-upacara ritus. Penghargaan terhadap orang-orang yang berhasil menjadikan dirinya pemimpin perang adalah pengakuan masyarakat terhadap mereka bukan saja sebagai pemimpin perang tetapi juga pemimpin masyarakat. Kepemimpinan tradisional kampung-kampung di Asmat secara keseluruhan saat ini telah mengalami peningkatan dalam organisasi. Kepemimpinan tradisional telah memiliki wadah, yang didapat karena keturunan.

Saat ini peran kepala perang dan pahlawan yang adalah laki-laki sudah tidak lagi dilakukan seperti dulu terutama dalam mengorganisir perang, tetapi lebih kepada memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan hal-hal yang bersifat politis seperti memperjuangkan pembangunan masyarakat di wilayah kabupaten Asmat. Perangkat organisasi yang berada di bawah naungan Lembaga Masyarakat Adat memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten, distrik dan kampung-kampung.

Prinsip kelembagaan dan kepemimpinan suku Asmat patut menjadi tolak ukur dan mewarnai nilai pelaksanaan pada sistem kepemimpinan daerah di kabupaten Asmat sehingga arah pembangunan manusia Asmat sejalan dengan nilai budaya yang dianut secara turun temurun bahkan terlindungi dan dilestarikan

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Asmat mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk menyelenggarakan urusan yang berskala kabupaten meliputi urusan wajib dan urusan lainnya bersifat pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Asmat meliputi 18 urusan wajib. Di samping urusan wajib tersebut, terdapat urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Asmat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat asmat yang maju sejahtera dan bermartabat.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa/daerah banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai

petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100 persen dan APS SMP sebesar 100 persen atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Realisasi Angka Melek Huruf pada tahun 2022 adalah sebesar 77.75% dan di tahun 2023 mencapai 84.37% dari yang ditargetkan sebesar 53.70%. Realisasi mencapai target dengan kategori baik dengan persentase capaian sebesar 157.11%.

Rata-rata lama sekolah realisasi di tahun 2023 mencapai umur 5.5 tahun, dengan target di tahun 2023 adalah 7.10 tahun. Terjadi penurunan realisasi dari tahun 2022 sehingga capaian kinerja tahun 2023 mencapai 77.46% dengan kategori cukup.

Target angka partisipasi murni (APM) Pada Sekolah Dasar (SD) sebesar 84.12%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 41.50% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 22.60%. Realisasi angka partisipasi murni (APM) tahun 2023 Pada Sekolah Dasar (SD) sebesar 82.76%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 67.44% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 92.46%. sehingga capaian kinerja pada Sekolah Dasar (SD) sebesar 98.38%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 162.51% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 409.12%. Peningkatan nilai APS khususnya pada kelompok usia 13-15 tahun menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Asmat sesuai dengan target program wajib belajar (wajib) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian capaian APS Kabupaten Asmat masih belum memenuhi target wajib 9 tahun, sehingga ke depannya program pendidikan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Asmat telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

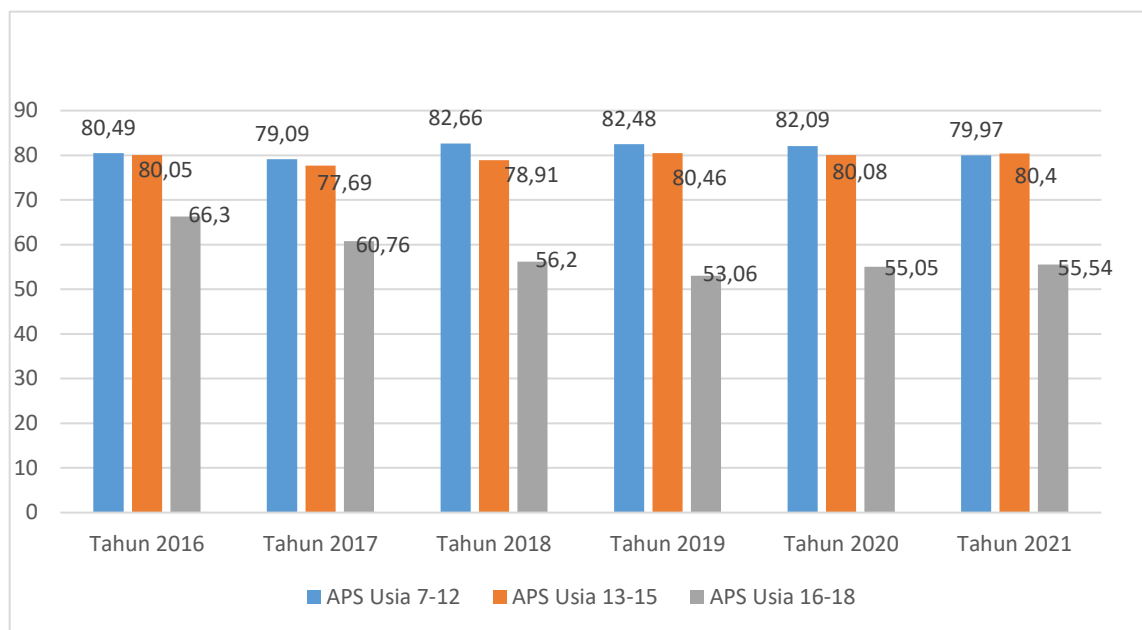
Tabel 2. 56. Angka Partisipasi Sekolah (Aps)

TAHUN	APS Usia 7 – 12	APS Usia 13 - 15	APS Usia 16 – 18
2016	80.49	80.05	66.30
2017	79.09	77.69	60.76

2018	82,66	78,91	56,20
2019	82,48	80,46	53,06
2020	82,09	80,08	55,05
2021	79,97	80,40	55,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Asmat, 2022 (diolah)

Gambar 2. 33. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Asmat, 2016-2021



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Asmat, 2021 (diolah)

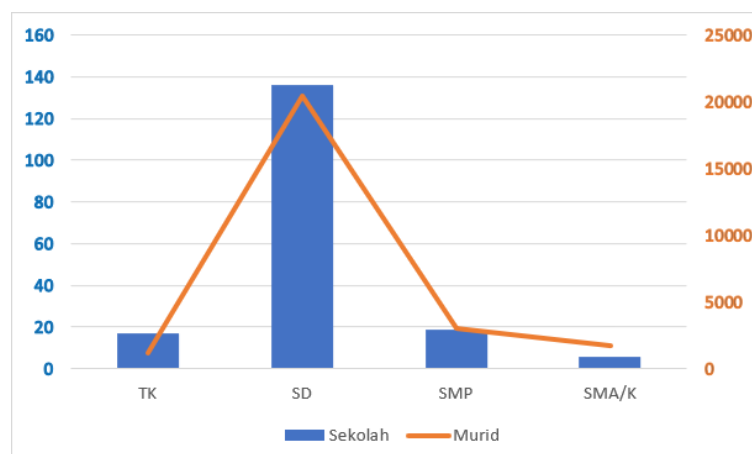
B. Fasilitas dan Tenaga Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberddaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asmat.

Kabupaten Asmat masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana fisik sekolah disamping juga menghadapi kendala dalam penyediaan tenaga pengajar dan ketidakmerataan tenaga pengajar pada beberapa distrik. Terbatasnya tenaga pengajar tidak hanya persoalan sedikitnya jumlah guru tetapi juga komitmen guru yang masih rendah. Banyak tenaga pengajar yang masih sering meninggalkan tugasnya karena tidak

bersedia menetap di lokasi tugasnya serta sering pergi ke kota dalam waktu yang relatif cukup lama. Kondisi ini mengakibatkan ada sebagian guru yang menanggung beban tugas melebihi porsi yang sebenarnya seperti harus mengajar lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan sehingga para siswa kurang mendapat perhatian dalam pembelajaran.

Gambar 2. 34. Jumlah Sekolah dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Asmat, 2020 (diolah)

Pada tahun 2020, fasilitas pendidikan di Kabupaten Asmat meliputi berbagai tingkat pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA/SMK. Jumlah TK di Kabupaten Asmat adalah sebanyak 17 unit terdiri atas 10 unit TK negeri dan 7 unit TK swasta, sementara itu jumlah SD adalah sebanyak 136 unit terdiri atas 111 unit SD negeri dan 25 unit SD swasta. Untuk fasilitas pendidikan menengah, jumlah SMP pada tahun 2014 adalah sebanyak 19 unit terdiri atas 15 unit SMP negeri dan 4 unit SMP swasta, sedangkan jumlah SMA/SMK pada tahun 2014 adalah 6 unit terdiri atas 4 unit SMA dan 2 unit SMK. Selain fasilitas pendidikan yang sudah ada, ketersediaan tenaga pengajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Pada tahun 2020, jumlah tenaga pengajar pada pendidikan TK adalah sebanyak 94 guru dengan murid berjumlah 1136 siswa, sedangkan jumlah tenaga pengajar SD adalah sebanyak 644 guru dengan murid berjumlah 20.431 siswa. Jumlah tenaga pengajar SMP adalah sebanyak 259 guru dan SMA sebanyak 124 guru dengan jumlah murid masing-masing sebanyak 3019 dan 1.545 siswa.

Pada jenjang pendidikan TK, rasio antara sekolah dan murid pada tahun 2020 adalah sebesar 1:67 yang berarti bahwa dalam 1 unit TK terdapat 67 murid, sedangkan rasio antara guru dan murid adalah sebesar 1:12,08 yang berarti bahwa 1 orang guru TK mengampu 12,08 murid. Rasio antara sekolah dan murid pada jenjang pendidikan SD adalah

sebesar 1:150, sedangkan rasio antara guru dan murid sebesar 1:30,76. Pada jenjang pendidikan SMP, rasio antara sekolah dan murid adalah sebesar 1:159,38, sedangkan rasio antara guru dan murid sebesar 1:11,65. Di tingkat pendidikan SMA/SMK, rasio antara sekolah dan murid sebesar 1:283, sedangkan rasio antara guru dan murid sebesar 1:13,69.

Jika dirinci menurut fasilitas pendidikan dan distrik, terlihat bahwa persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Asmat belum merata dan cenderung terpusat di Distrik Agats. Sebagai contoh, fasilitas pendidikan SMA hanya berada di 2 distrik yang berada di agats dan atsjy.

Tabel 2. 57. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Distrik, 2024

NO	DISTRIK	PAUD/KB	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kec. Agats	18	6	12	6	3	1
2	Kec. Sawa Erma	3	3	16	2	0	0
3	Kec. Pantai Kasuari	0	1	13	1	0	0
4	Kec. Atsj	2	2	8	1	1	0
5	Kec. Suator	2	1	10	1	0	0
6	Kec. Safan	1	2	7	2	0	0
7	Kec. Sirets	0	1	8	1	0	0
8	Kec. Akat	1	1	7	1	0	0
9	Kec. Fayit	0	1	6	1	0	0
10	Kec. Betchamu	2	0	5	0	0	0
11	Kec. Kolf Braza	0	0	5	1	0	0
12	Kec. Joerat	1	1	2	1	0	0
13	Kec. Awyu	1	0	2	2	0	0
14	Kec. Jetsy	0	1	4	0	0	0
15	Kec. Joutu	0	0	4	0	0	0
16	Kec. Kopay	0	0	4	1	0	0
17	Kec. Sor Ep	2	0	3	0	0	0
18	Kec. Pulau Tiga	0	0	4	1	0	0
19	Kec. Der Koumur	0	0	3	1	0	0
20	Kec. Aswi	0	0	4	0	0	0
21	Kec. Tomor Birip	0	0	3	0	0	0
22	Kec. Unir Sirau	1	0	2	0	0	0
23	Kec. Suru-suru	0	0	2	0	0	0
24	Kec. Ayib	0	0	2	0	0	0
25	Kec. Koroway Buluanop	0	0	1	0	0	0
JUMLAH		34	20	136	22	4	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2024

Tabel 2. 58. Jumlah Sekolah Berdasarkan Status Negeri / Swasta Menurut Tingkat Pendidikan Dan Distrik, 2024

No	Wilayah	Total			TK			KB			SD			SMP			SMA			SMK		
		Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S
1	Agats	55	30	25	6	3	3	18	15	3	12	6	6	6	3	3	3	1	2	1	1	0
2	Sawa Erma	25	20	5	3	2	1	3	2	1	16	14	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pantai Kasuari	16	12	4	1	0	1	0	0	0	13	11	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Atsj	15	11	4	2	1	1	2	2	0	8	6	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0
5	Suator	15	14	1	1	1	0	2	2	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Safan	13	7	6	2	1	1	1	0	1	7	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
7	Sirets	12	9	3	1	1	0	0	0	0	8	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Akat	11	7	4	1	1	0	1	0	1	7	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	Fayit	9	8	1	1	1	0	0	0	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

10	Betcbamu	7	6	1	0	0	0	2	2	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kolf Braza	7	6	1	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Joerat	6	4	2	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Awyu	6	4	2	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jetsy	5	3	2	1	1	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Joutu	5	4	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kopay	5	3	2	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sor Ep	5	5	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pulau Tiga	5	3	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Der Koumur	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Aswi	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tomor Birip	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Unir Sirau	3	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Suru-suru	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ayib	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Koroway Buluanop	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		241	171	70	20	13	7	34	27	7	137	108	29	23	18	5	4	2	2	1	1	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2024

Tabel 2. 59. Jumlah Murid Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2020

No	Wilayah	TK			KB			SD			SMP			SMA			SMK			Total Jumlah
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	
1	Agats	205	101	104	638	319	319	1,882	1,003	879	899	514	385	1,034	653	381	248	184	64	4,906
2	Sawa Erma	28	10	18	33	16	17	1,326	762	564	237	166	71	-	-	-	-	-	-	1,624
3	Suator	-	-	-	84	38	46	1,011	530	481	293	201	92	-	-	-	-	-	-	1,388
4	Fayit	-	-	-	-	-	-	1,247	671	576	149	105	44	-	-	-	-	-	-	1,396
5	Safan	21	14	7	30	14	16	1,049	515	534	157	112	45	-	-	-	-	-	-	1,257
6	Pantai Kasuari	56	33	23	-	-	-	774	405	369	214	139	75	-	-	-	-	-	-	1,044
7	Sirets	-	-	-	-	-	-	523	290	233	169	114	55	-	-	-	-	-	-	692
8	Akat	24	9	15	75	36	39	739	403	336	110	50	60	-	-	-	-	-	-	948
9	Atsj	-	-	-	85	43	42	272	131	141	466	277	189	-	-	-	-	-	-	823
10	Awyu	-	-	-	72	39	33	276	136	140	229	120	109	-	-	-	-	-	-	577
11	Betcbamu	-	-	-	58	28	30	574	311	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
12	Kolf Braza	-	-	-	-	-	-	376	221	155	26	13	13	-	-	-	-	-	-	402
13	Ayib	-	-	-	-	-	-	390	226	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390
14	Sor Ep	-	-	-	116	65	51	204	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320
15	Suru-suru	-	-	-	-	-	-	314	184	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
16	Joutu	-	-	-	-	-	-	270	163	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
17	Tomor Birip	-	-	-	-	-	-	190	115	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
18	Unir Sirau	-	-	-	35	15	20	154	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
19	Kopay	-	-	-	-	-	-	161	97	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
20	Aswi	-	-	-	-	-	-	157	78	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
21	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-	89	51	38	37	31	6	-	-	-	-	-	-	126
22	Jetsy	37	18	19	-	-	-	81	41	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
23	Der Koumur	-	-	-	-	-	-	98	56	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
24	Joerat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	41	31	-	-	-	-	-	-	72
25	Koroway Buluanop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		371	185	186	1,226	613	613	12,157	6,568	5,589	3,058	1,883	1,175	1,034	653	381	248	184	64	18,094

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2020

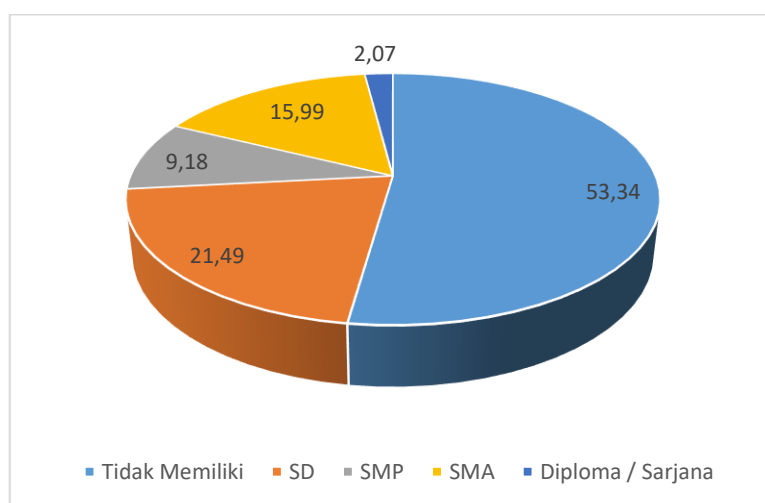
Berdasarkan tingkat pendidikannya, masyarakat di Kabupaten Asmat dapat dikatakan memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal tersebut didasarkan fakta bahwa penduduk Kabupaten Asmat yang mengenyam pendidikan tinggi hanya sebesar 2,07 persen pada tahun 2020, sedangkan penduduk yang tidak memiliki ijazah mencapai 53,34 persen. penduduk yang memiliki ijazah SD/MI sebesar 21,49 persen, SMP/MTS sebesar 9,18 persen, dan SMA/SMK sebesar 15,99 persen. Dengan masih minimnya tingkat pendidikan di Kabupaten Asmat, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang ada sekarang dirasakan belum memadai mengingat Kabupaten Asmat memiliki

sumberdaya hayati yang tinggi. Ke depan, penduduk yang memiliki pendidikan yang tinggi diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi pembangunan Kabupaten Asmat.

Tabel 2. 60. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Asmat, 2020 (persen)

Ijazah Tertinggi yang Dimilik	2020
Tidak Memiliki	53,34
SD	21,49
SMP	9,18
SMA	15,99
Diploma / Sarjana	2,07

Gambar 2. 35. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Asmat, 2020 (persen)



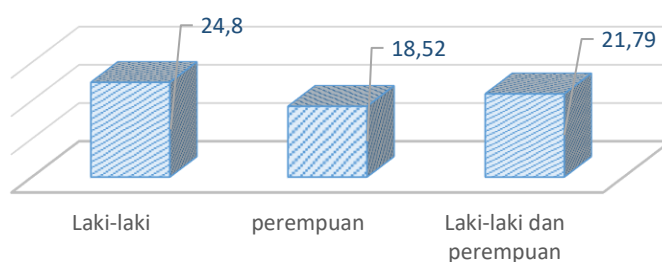
Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2020 (diolah)

C. Pendidikan Keaksaraan dan Berkelanjutan

Pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan dalam rangka memberantas penduduk buta aksara supaya menjadi melek aksara (huruf). Seseorang dikatakan melek huruf jika orang tersebut mampu membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Pendidikan keaksaraan berkaitan dengan kinerja pendidikan dasar bagi kelompok usia sekolah. Kegiatan dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kelompok buta aksara baru baik sebagai akibat adanya anak usia 7-12 tahun yang tidak terlayani pendidikan dasar,

maupun anak putus sekolah pendidikan dasar. Selain pada pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan juga diperuntukkan bagi orang dewasa (*adult education*) untuk penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Indikator-indikator yang biasa dijadikan ukuran keberhasilan program pendidikan keaksaraan diantaranya angka melek huruf, dan pendidikan yang ditamatkan penduduk.

Gambar 2. 36. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat ,2023

Program pemberantasan buta aksara di Kabupaten Asmat selama dua tahun terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf selama dua tahun terakhir mengalami perubahan meskipun tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 79,70 persen pada tahun 2019 menurun menjadi 79,60 persen pada tahun 2020. Dengan kata lain masih terdapat 20,20 persen penduduk Kabupaten Asmat yang masih buta aksara. Lambatnya laju kenaikan angka melek huruf diduga karena didominasi oleh kelompok tersulit (*hardrock*) dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Pendidikan keaksaraan yang umumnya diberikan dalam kelompok belajar sulit untuk menjangkau penduduk buta aksara di Kabupaten Asmat yang sebagian besar wilayahnya sulit dijangkau dengan tempat tinggalnya secara umum menyebar. Kelompok tersulit lain adalah masyarakat yang belum memahami manfaat kemampuan keaksaraan sebagai kemampuan dasar untuk memperoleh nilai tambah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dalam meningkatkan produktivitas mereka. Data pendidikan terakhir yang

ditamatkan penduduk semakin menegaskan bahwa tingkat buta aksara di Kabupaten Asmat cukup tinggi.

Berdasarkan data Susenas 2020 yang dikumpulkan setiap tahunnya oleh BPS, tercatat lebih dari 57 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Asmat tidak/belum mempunyai ijazah. Hanya sebagian kecil saja (15,99 persen) masyarakat Asmat yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai dengan sekolah menengah ke atas. Sebagian kecil masyarakat tersebut, adalah masyarakat yang bermukim di ibu kota distrik. Menghadapi tantangan dan masalah yang terkait dengan karakteristik sasaran yang termasuk kelompok sulit, Pemerintah Kabupaten Asmat harus melakukan terobosan dalam rangka percepatan penuntasan buta aksara. Pembangunan fasilitas sekolah dan rekrutmen tenaga pendidik harus menjadi prioritas dengan memperhatikan azas pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Model pendidikan SD-SMP satu atap dan berasrama yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Papua perlu didukung sepenuhnya agar pendidikan bagi anak-anak Papua yang hidup di wilayah terpencil terpenuhi haknya. Dalam model pendidikan ini, pendidikan dasar dibagi menjadi 2 bagian yaitu SD kecil 3 tahun (sampai kelas 3) dan sekolah sambungan 6 tahun satu atap dan berpola asrama (SD dan SMP satu manajemen). SD kecil bertanggung jawab atas pendidikan dari kelas satu sampai dengan kelas tiga, diselenggarakan di daerah yang terpencil, terisolir serta belum mendapat layanan pendidikan, sedangkan sekolah sambungannya selama 6 tahun adalah sekolah kelas 4-6 SD dilanjutkan ke kelas 1-3 SMP yang berada di tingkat distrik dan dilengkapi asrama bagi siswa dan siswi.

D. Kesenjangan Gender

Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan baik di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi merupakan salah satu tujuan pembangunan milenium (MDGs) yang harus dicapai oleh semua negara. Sehingga isu ketimpangan gender dalam bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dicermati untuk melihat sejauh mana pembangunan di bidang pendidikan telah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Pada pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), secara umum tidak terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Asmat. Hal tersebut terlihat dari rasio APS penduduk usia 7-12 tahun antara perempuan dan laki sebesar (82,09 persen). Ukuran batas rasio APS dikatakan kesetaraan gender jika Rasio APS antara perempuan dan laki-laki berkisar antara 95 persen sampai dengan 105 persen. Nilai rasio APS 7-12 tahun di Kabupaten Asmat yang berkisar antara 100 mengindikasikan

bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Fasilitas pendidikan yang ada dapat diakses oleh anak laki-laki dan perempuan kesenjangan gender dalam hal pendidikan terjadi pada jenjang pendidikan menengah utamanya terlihat pada angka melek huruf pemuda (usia 15-24 tahun) dengan gap cukup lebar. Disparitas antara laki-laki dan perempuan pada indikator AMH yang paling lebar adalah daerah yang nilai rasio AMHnya menjauh dari nilai seratus, yaitu berturut-turut Kabupaten Asmat (55,05 persen). Dilihat dari kepemilikan ijazah, kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan jelas terlihat. Persentase perempuan usia 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan dasar (SMP ke atas) lebih sedikit dibanding laki-laki. Persentase perempuan yang telah menamatkan pendidikan SMP ke atas hanya sekitar 10,27 persen, sedangkan persentase laki-laki yang berhasil menamatkan pendidikan SMP ke atas sekitar 16 persen. Hal ini menegaskan bahwa di sektor pendidikan, masih terjadi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan.

2.3.1.2. Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai Namun sebaliknya pula, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik pula. Ada beberapa indikator yang dapat menjadi acuan dalam menilai perkembangan kualitas kesehatan di suatu daerah.

A. Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan pula menambah tenaga medis dan meningkatkan

profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai kiranya derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2. 61. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan Menurut Distrik, 2022

No	Distrik	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit	Puskesmas
1	Pantai Kasuari	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	Fayit	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3	Atsy	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1
4	Suator	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5	Akat	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
6	Agats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Sawa Erma	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2
8	Suru-suru	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
9	Kolf Braza	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	Unir Sirau	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	Kopay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Der Koumur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Safan	0	2	0	2	0	3	0	2	0	2
14	Sirets	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
15	Ayip	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
16	Bectbamu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	Jetsy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Joerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pulau Tiga	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
20	Joutu	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
21	Aswi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Koroway Buluanop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Awyu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1	17	1	17	1	19	1	17	1	21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat 2023

Jenis fasilitas yang kesehatan yang ada di Kabupaten Asmat adalah rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan balai pengobatan. Selain fasilitas di atas, Pemerintah Kabupaten Asmat juga menyediakan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling berupa perahu (*speed boat* dan *long boat*). Jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 adalah sebanyak 1 unit dan jumlah balai pengobatan berjumlah 1 unit yang berada di Distrik Safan. Untuk puskesmas, jumlahnya pada tahun 2020 adalah sebanyak 19 unit yang tersebar di 15 distrik yaitu Distrik Pantai Kasuari, Fayit, Suator, Akat, Agats, Kolf Braza, Unir Sirau, Safan, Siret, Ayip, sawa erma, Pulau Tiga, dan Awyu (masing-masing 1 unit), Sawa Erma, Suru-suru, dan Atsy (masing-masing 2 unit).

Puskesmas pembantu (pustu) telah tersebar merata di Kabupaten Asmat kecuali distrik aswi dan fayit, jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 79 unit. Distrik yang paling banyak memiliki pustu adalah Distrik Kolf Braza yaitu: sebanyak 7 unit, sedangkan distrik dengan pustu paling sedikit adalah Distrik awyu, korowai, ayip, dan suru-suru yang masing-masing memiliki 1 unit. Fasilitas Polindes di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 berjumlah 36 unit dan tersebar di 19 distrik dengan distrik yang tidak memiliki fasilitas Polindes adalah Distrik Kopay.

Sementara itu, puskesmas keliling dengan menggunakan *speed boat* berjumlah 18 unit dan berada di Distrik Pantai Kasuari, Fayit, Atsy, Suator, Akat, Agats, Sawa Erma, Suru-suru, Kolf Braza, Unir Sirau, dan Bayun. Fasilitas puskesmas keliling dengan menggunakan *long boat* berjumlah 2 unit yang berada di Distrik Unir Sirau dan Safan. Selain fasilitas kesehatan yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga menggalakkan posyandu dimana jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 135 unit. Selama periode 2016-2020, jumlah rata-rata penduduk yang dilayani setiap puskesmas di Kabupaten Asmat dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rata-rata jumlah penduduk yang dilayani setiap puskesmas adalah sebanyak 6.783 orang dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 7.148 orang. Jika melihat rasio antara jumlah puskesmas per 10.000 penduduk, angkanya cenderung fluktuatif. Rasio antara jumlah puskesmas per 10.000 penduduk pada tahun 2016 adalah sebesar 7.82 kemudian Menurun menjadi sebesar 6.75 pada tahun 2017, namun pada tahun 2017 rasionya mengalami penurunan menjadi sebesar 6.75 Sementara itu, rasio antara jumlah puskesmas pembantu per 10.000 penduduk pada periode tersebut justru mengalami penurunan dari hanya sebesar 7.82 pada tahun 2016 menjadi sebesar 6.75 pada tahun 2017.

Tabel 2. 62. Perkembangan Indikator Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Asmat, 2016-2023

No.	Capaian Pembangunan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio puskesmas per 10.000 penduduk	Rasio	1,02	1,22	1,11	7,20	1,14	1,25	1,34	1,37
2.	Rasio pustu per 10.000 penduduk	Rasio	5,43	3,81	6,45	7,20	3,90	4,13	4,22	4,24

3.	Jumlah penduduk yang dilayani tiap puskesmas (rata-rata)	Orang	4.701	4.665	6.922	6.520	6.477	5.940	5.509	5.390
----	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, 2024 (diolah).

Melihat perkembangan fasilitas kesehatan selama periode 2016-2020, untuk fasilitas seperti rumah sakit dan balai kesehatan jumlahnya masih tetap yaitu sebanyak 1 unit. Untuk puskesmas, jumlahnya mengalami peningkatan dari 10 unit pada tahun 2016 menjadi sebanyak 13 unit pada tahun 2020, Polindes bertambah dari 29 unit menjadi sebanyak 38 unit pada tahun 2020, dan fasilitas posyandu bertambah dari 104 unit pada tahun 2016 menjadi 135 unit pada tahun 2020. Sebenarnya cukup sulit untuk menilai apakah sarana yang tersedia seperti tersebut di atas sudah sesuai dengan kebutuhan untuk Kabupaten Asmat. Karena keberadaan antar sarana itu sendiri cukup beragam, seperti kapasitas dan kelengkapan sarana tersebut jelas tidak sama.

Namun demikian, untuk gambaran secara kasar, dapat diinformasikan bahwa untuk sarana kesehatan seperti rumah sakit masih dirasakan belum cukup. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Namun demikian dari data yang ada menunjukkan bahwa keberadaan sarana kesehatan ini (terutama puskesmas) menyebar di seluruh distrik dan berada di ibukota kecamatan sehingga untuk daerah terpencil aksesnya masih kurang. Sejalan dengan keadaan tersebut maka fungsi dari puskesmas pembantu dan posyandu di kampung-kampung sangatlah dominan.

B. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan di Kabupaten Asmat diantaranya adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga medis lainnya, dan apoteker. Jumlah tenaga dokter di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 adalah sebanyak 685 orang terdiri atas 8 orang, 38 dokter umum, dan 2 dokter gigi. Dari 38 tenaga dokter tersebut, sebagian besar berada di Distrik Agats yaitu sebanyak 39 orang, sedangkan distrik lainnya yang memiliki tenaga dokter adalah Distrik Pantai Kaswari, Safan, Fayit, suru - suru, Unir Sirau. Selain tenaga kesehatan dokter, tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Asmat adalah tenaga paramedis (perawat, bidan, dan tenaga paramedis lainnya) dan apoteker (termasuk asisten apoteker). Jumlah tenaga paramedis di Kabupaten Asmat adalah sebanyak 322 orang yang terdiri atas perawat

sebanyak 279 orang, bidan sebanyak 147 orang, dan tenaga paramedis lainnya sebanyak 56 orang. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Asmat sebagian besar berada di Distrik Agats dan memiliki tenaga kesehatan yang lengkap dari dokter spesialis hingga apoteker yang mencapai 266 orang. Hal tersebut disebabkan karena posisi Distrik Agats sebagai ibukota kabupaten dan tentunya didukung juga oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang cukup memadai diantaranya rumah sakit dan balai kesehatan.

Tabel 2. 63. Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Distrik, 2020

No.	Distrik	2020					
		Dokter Gigi	Paramedis Perawat	Bidan	Lainnya	Apoteker	Total
1.	Pantai Kasuari	0	9	8	2	0	20
2.	Fayit	0	6	6	4	0	17
3.	Atsy	0	18	16	6	0	40
4.	Suator	0	13	14	5	0	32
5.	Akat	0	16	14	1	0	31
6.	Agats	2	147	76	56	12	322
7.	Sawa Erma	0	27	16	7	0	50
8.	Suru-suru	0	17	11	2	0	31
9.	Kolf Braza	0	11	4	1	0	17
10.	Unir Sirau	0	4	6	1	0	12
11.	Kopay	0	2	0	0	0	2
12.	Der Koumur	0	0	0	0	0	0
13.	Safan	0	12	12	5	0	29
14.	Sirets	0	14	9	5	0	29
15.	Ayip	0	11	7	4	0	22
16.	Bectbamu	0	2	2	0	0	4
17.	Jetsy	0	2	2	0	0	4
18.	Joerat	0	0	0	0	0	0
19.	Pulau Tiga	0	14	5	2	0	21
20.	Joutu	0	0	0	0	0	0
21.	Aswi	0	0	0	0	0	0
22.	Koroway Buluanop	0	0	0	0	0	0
23.	Awyu	0	0	2	0	0	2
	Total	2	325	210	101	12	685

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat 2020

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering dialami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah dialami dengan terjadinya *bottleneck* di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

Pembangunan jalan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan membuka aksesibilitas antar wilayah dalam Kabupaten Asmat. Jalan merupakan salah satu urat nadi yang mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Asmat. Selama periode 2016-2020, panjang jaringan jalan di Kabupaten Asmat mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016, panjang jaringan jalan di Kabupaten Asmat adalah sepanjang 886,5 km, meningkat menjadi sepanjang 887,479 km pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi sepanjang 888,479 km, pada tahun 2019 menjadi 889,479 km, dan pada tahun 2020 menjadi 890,479 km. Pemerintah daerah terus melakukan pembangunan menungjang fasilitas daerah.

Gambar 2. 37. Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Asmat, 2016-2023

NO	TAHUN	PANJANG JALAN (Km)	Kondisi				Kinerja	
			Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Kemantapan	Tidak Mantap
							Baik & Sedang	Rusak Ringan & Rusak Berat
1	2016	886,479	308,495		577,984		34,80	65,20
2	2017	887,479	251,753	57,088	283,743	293,895	34,84	65,16
3	2018	888,479	253,560	60,706	278,885	293,328	35,45	64,55
4	2019	889,479	26,662	6,012	748,305	105,500	3,69	96,31
5	2020	890,479	14,124	140,135	653,985	78,235	17,4	82,6
6	2021	886,479	18,921	259,051	122,835	485,672	31,35	68,65
7	2022	886,479	20,597	259,051	121,159	485,672	31,35	68,46
8	2023	886,479	32,729	256,276	113,421	484,053	32,601	67,399

Sumber: Dinas PUPR Kab. Asmat, 2024 (diolah)

Dengan kondisi wilayah Kabupaten Asmat yang memiliki banyak rawa dan tergenang air, maka sebagian besar permukaan jalan di Kabupaten Asmat adalah berupa jalan jembatan kayu. Pada Tahun 2020, panjang jalan jembatan kayu di Kabupaten Asmat sepanjang 452 km, jalan tanah sepanjang 353,25 km, jembatan beton 55,12 km, dan jembatan dengan baja komposit sepanjang 30 km. Persentase Jenis jalan tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah.

Gambar 2. 38 Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan, 2024

PROGRAM/ KEG	Realisasi Per Tahun								Jumlah Total (m)
	2016 (m)	2017 (m)	2018 (m)	2019 (m)	2020 (m)	2021 (m)	2022 (m)	2023 (m)	
Pembangunan Jalan Komposit	766.00	116.00	42.00	-	942.00	-	-	-	1,866.00
Pembangunan Jalan beton	3,401.00	5,620.91	2,143.50	2,575.62	3,401.00		2,203.98	2,763.40	22,109.41
Pembangunan Jalan Jembatan	2,816.00	771.00	507.00	2,049.00	2,856.00	2,500.00	616.00	680.00	12,795.00
Pembangunan Jalan Kayu Atap	-	-	-	-	-	-	3,396.43	2,906.00	6,302.43

Sumber: Dinas PUPR Kab. Asmat, 2024 (diolah)

Seluruh jaringan jalan di Kabupaten Asmat merupakan jaringan jalan kabupaten sehingga kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten Asmat. Kelas jalan di Kabupaten Asmat

secara keseluruhan termasuk dalam kelas III C. Pada tahun 2020, jaringan jalan di Kabupaten Asmat yang berada dalam kondisi baik adalah sepanjang 14,124 km. Bila dibandingkan dengan kondisi jalan baik pada tahun 2018 yang mencapai 253,560 km, maka dapat dikatakan terjadi penurunan signifikan pada kualitas jalan di Kabupaten Asmat. Panjang jalan dengan kondisi sedang pada tahun 2020 adalah sepanjang 140,135 km, sementara jalan dalam kondisi rusak sepanjang 653,985 km, dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 78,235 km.

Gambar 2. 39. Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan, 2024

2023					
TOTAL PANJANG	886.479 km				
KONDISI	KM	%	TIPE PERKERASAN/PERMUKAAN	KM	%
KONDISI BAIK	32,729	3,69	ASPAL (AC, HRS, ATB)	0,000	0,00
KONDISI SEDANG	256,276	28,91	PERKERASAN BETON	26,476	2,80
KONDISI RUSAK RINGAN	113,421	12,79	LAPIS PENETRASI/LATASIR/MACADAM	1,913	0,22
KONDISI RUSAK BERAT	484,053	54,60	TELFORD/KERIKIL/URPIL	254,886	28,75
			TANAH/BELUM TEMBUS	603,204	68,23

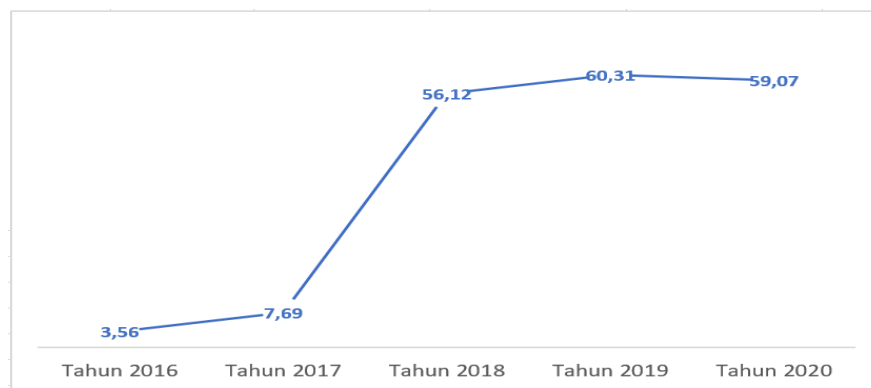
Sumber: Dinas PUPR Kab. Asmat, 2024 (diolah)

2.3.1.4. Akses Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan

Upaya pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat hidup dengan umur panjang dan sehat jasmani rohani sebagai modal dasar pembangunan. Untuk melihat masyarakat yang mempunyai kesehatan yang cukup, ada beberapa faktor penentu diantaranya adalah akses air bersih, sanitasi, dan perumahan. Fasilitas air minum bersih adalah faktor yang sangatmenentukan, karena air minum selalu dikonsumsi oleh masyarakat tiap harinya. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Artinya jika satu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu, dan 2 orang anak) maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan sedikitnya 6 liter air untuk keperluan minum. Jika kondisi air yang diminum tersebut tidak mempunyai syarat cukup air bersih, maka akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi peminumnya. Dalam publikasi Statistik Kesra BPS disebutkan yang dimaksud air bersih adalah air minum yang bersumber dari air kemasan, air ledeng, air bor/pompa, air sumur terlindung, dan mata air terlindung yangjaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan limbah terdekat.

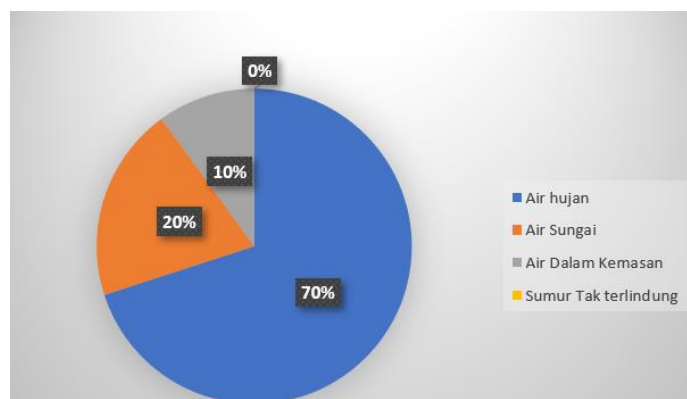
Penyediaan air minum bersih di Kabupaten Asmat sangat sedikit. Untuk keperluan minum dan memasak, rumah tangga di Kabupaten Asmat kebanyakan berasal dari air hujan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh derajat kesehatan masyarakat, karena air hujan masih mengandung bahan-bahan berbahaya seperti zat kapur dan sebagainya. Hanya persen penduduk yang memanfaatkan air minum kemasan sebagai sumber air minum utamanya. Pada tahun 2016 rumah tangga di Kabupaten Asmat berakses air minum, yaitu sebanyak 3,56 persen, pada periode terakhir ditahun 2020 persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kabupaten Asmat meningkat menjadi 59,07 persen.

Gambar 2. 40. Persentase Penduduk berakses air minum di Kabupaten Asmat, 2020



Sumber: Dinas PUPR Kab. Asmat 2024 (diolah)

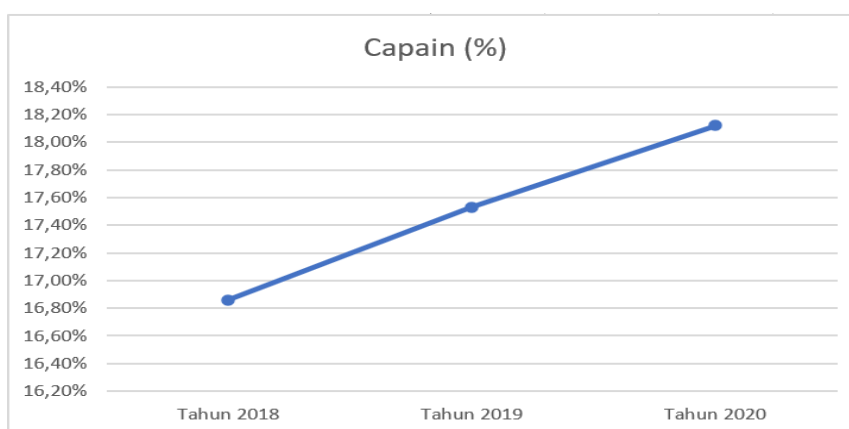
Gambar 2. 41. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air minum yang Digunakan di Kabupaten Asmat, 2020



Sumber: Dinas PUPR Kab. Asmat, 2020 (diolah)

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih serta tersedianya jamban dan tangki septik. Berdasarkan data dinas PUPR 2020, sebesar 78,30 persen rumah tangga di Kabupaten Asmat masih menggunakan pelita/sentir/obor sebagai sumber penerangan rumahnya. Hal ini berarti pelayanan listrik masih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Asmat. Keadaan ini juga diperjelas dengan sedikitnya penggunaan listrik sebagai sumber penerangannya yang hanya terdapat 21,70 persen rumah di Kabupaten Asmat.

Gambar 2. 42. Persentase Penduduk dengan Perumahan yang Layak, 2018-2020

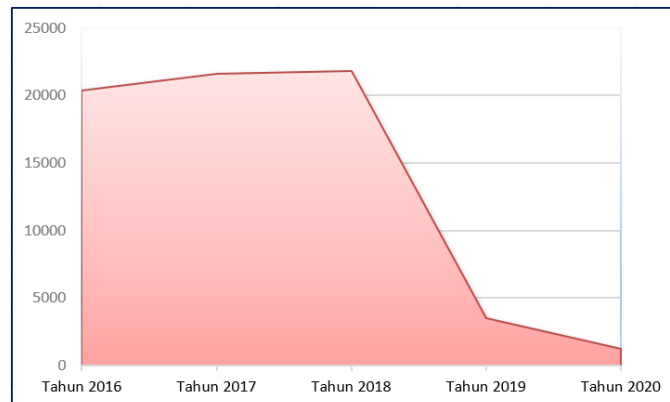


Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat, 2020 (diolah)

2.3.1.5. Transportasi dan Telekomunikasi

Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain. Kondisi geografis Kabupaten Asmat yang berawa dan memiliki banyak sungai besar berimplikasi pada kebutuhan masyarakat dalam menggunakan akses transportasi tidak hanya pada transportasi darat, namun juga bertumpu pada transportasi sungai. Masyarakat memerlukan alat transportasi sungai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas antar kampung, ke ibukota distrik, ataupun ke ibukota kabupaten. Untuk mobilitas antar distrik, penduduk di Kabupaten Asmat menggunakan transportasi darat jika wilayah yang akan dituju telah terhubung dengan jaringan jalan. Untuk transportasi yang digunakan dari ibukota kabupaten ke distrik-distrik.

Gambar 2. 43. Jumlah Penumpang Transportasi Sungai di Kabupaten Asmat, 2017-2020



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat, 2020 (diolah)

A. Bidang Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari tabel 2.64 sebagai berikut:

Tabel 2. 64. Gambaran Umum Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	STRATEGI	KEBIJAKAN	Satuan	Target	Keterangan
1	Meningkatnya jaringan komunikasi, sumberdaya aparatur, Pengembangan Aplikasi serta Penyebaran Informasi yang lebih memadai	Meningkatkan Ketersediaan dan cakupan pelayanan Informasi dan Telekomunikasi	Peningkatan pembangunan Tower Seluler sampai ke Kampung-kampung	BTS	15	Bantuan Pembangunan BTS dari Pusat (BAKTI) sebanyak 12 BTS dan Telkomsel sebanyak 3 BTS
			Peningkatan penyebaran Informasi kegiatan pemerintah daerah asmat pada Media-media lokal dan regional	Kampung	2	Kampung sawa-Er dan kampung Yepem
			Peningkatan Jaringan Intranet Wide Area Network	OPD	25	

			(WAN) Fiber Optic di Setiap OPD Kab. Asmat			
			Peningkatan Jaringan Vsat dan Bandwict di Kab. Asmat yang digunakan untuk OPD di Kabupaten Asmat.	Mega Bait (MB)	20	Rasio 1 banding 2 untuk tahun 2017 20 MB dan Tahun 2018 penambahn 10 MB untuk empat bulan saja.

B. Bidang Statistik dan Persandian

Gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan urusan pendataan statistik dan persandian daerah dapat dilihat di Tabel 2.65 sebagai berikut:

Tabel 2. 65. Gambaran Umum Pendataan Statistik dan Persandian

No	Sasaran	STRATEGI	KEBIJAKAN	Satuan	Target	Ket
1	Meningkatnya Data Informasi Statistik Daerah	Meningkatkan Kajian dan Pengukuran Perekonomian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Peningkatan Ketersediaan Data yang Valid dan diakui secara Nasional Guna Menunjang Data Penyusunan Program Pembangunan Lebih baik.	BUKU	30	
		Meningkatkan Kajian dan pengukuran tingkat pengembangan manusia di Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Profil penduduk miskin.		BUKU	30	
		Meningkatkan Kajian dan pengukuran yang sifatnya berpengaruh (Regresi)		BUKU	30	

		terhadap penduduk dan perekonomian daerah melalui kajian data strategis daerah				
		Meningkatkan pengukuran kualitas layanan jaringan komunikasi baik pemerintah daerah maupun pengguna jasa secara terbuka dan transparan	Peningkatan Pendataan kualitas jaringan komunikasi dan penggunaanya	Kampung	30	
2	Meningkatkan Pemanfaatan komunikasi dalam daerah	Meningkatkan Penggunaan perangkat Radio SSB dan RIG	Peningkatan ketersediaan perangkat radio SSB dan RIG di semua Ibukota Distrik	Distrik	9	

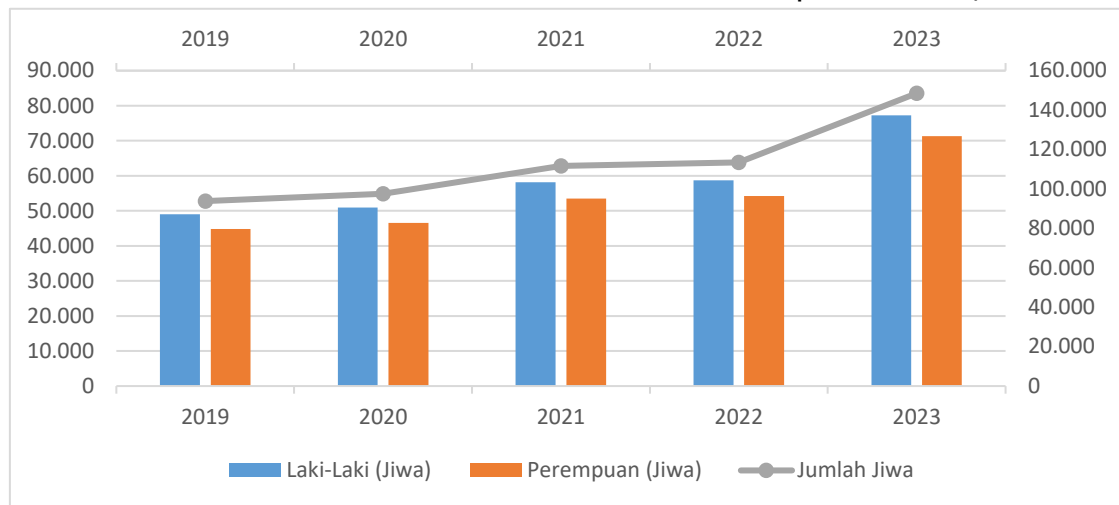
2.3.1.6. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Pertumbuhan Penduduk

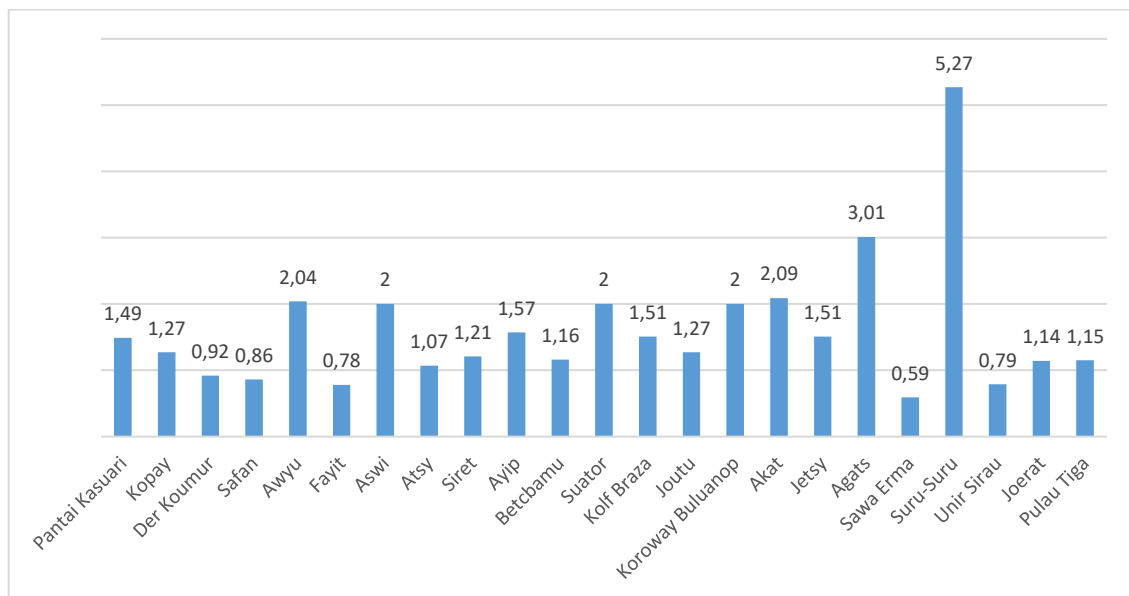
Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Migrasi pada umumnya terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran serta daya tarik suatu daerah karena dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Gambar 2. 44. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Asmat, 2019-2023



Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Asmat, 2023 (diolah)

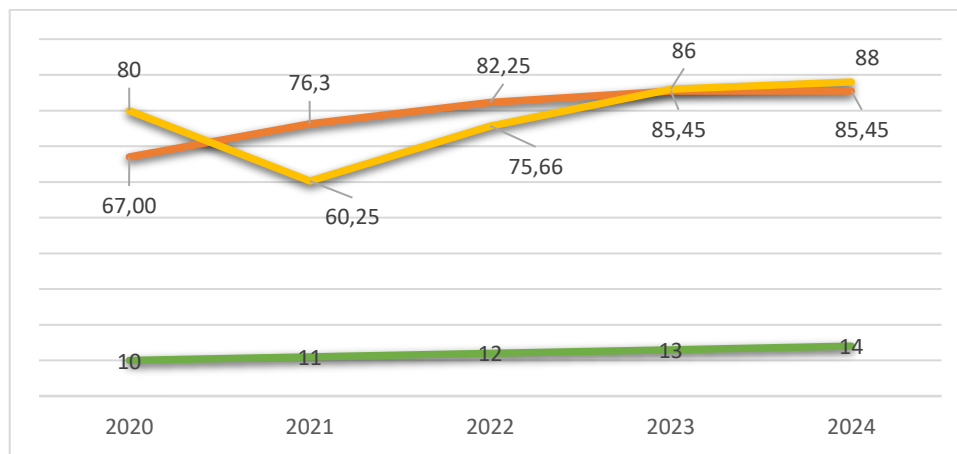
Gambar 2. 45. Laju Pertumbuhan Penduduk, 2023



Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Asmat, 2024 (diolah)

Selama periode 2020-2023, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Asmat adalah sebesar 1,81 persen per tahun. Pada tahun 2018, penduduk Kabupaten Asmat mengalami penurunan sebesar 0,90 persen, kemudian menurun kembali sebesar 0,78 persen pada tahun 2019, lalu bertahan tahun 2020.

Gambar 2. 46. Perkembangan Persentase Penduduk yang telah Memiliki Dokumen Kependudukan Secara Lengkap, 2020-2024



Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Asmat, 2024 (diolah)

Mempelajari masalah dan kendala yang terjadi di lapangan tahun tersebut, Dukcapil Kabupaten Asmat mempunyai strategi khusus untuk mencapai target nasional yaitu ketika sedang ada event pemerintah dimana masyarakat berkumpul maka petugas perekaman akan membawa alat perekaman dan melakukan perekaman e-KTP atau Dukcapil menempatkan petugas di rumah sakit.

2.3.1.7. Keluarga Berencana

A. Klinik KB

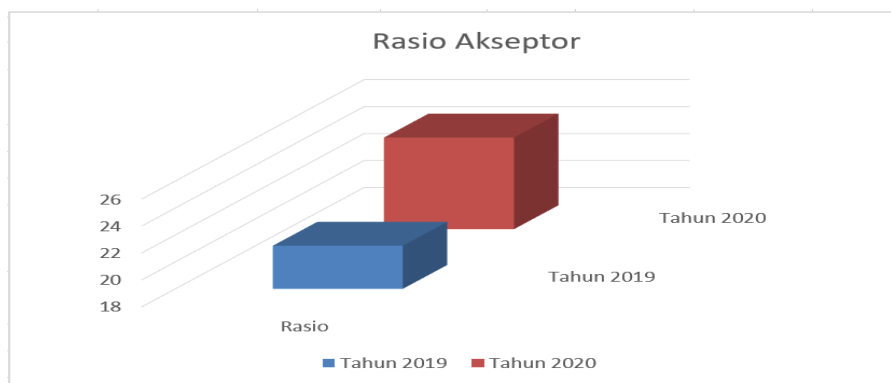
Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membatasi angka pertumbuhan penduduk. Jumlah klinik KB di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 hanya sebanyak 4 unit. 2 klinik KB lainnya masing-masing dikelola oleh instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta.

Tabel 2. 66. Jumlah Klinik KB di Kabupaten Asmat, 2024

Klinik KB	Jumlah	Jumlah Pengguna KB
Dinas Kesehatan	0	0
Instansi Pemerintah	2	352
Swasta	2	675
Total	4	1027

Sumber: Dinas PPKB Kab. Asmat, 2024

Gambar 2. 47. Rasio Akseptor KB



Sumber: Dinas PPKB Kab. Asmat, 2020 (diolah)

B. Akseptor Aktif dan Baru

Jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor aktif di Kabupaten Asmat adalah IUD, pil, suntikan, kondom, dan susuk. Pada Tahun 2019-2020, jumlah akseptor aktif di Kabupaten Asmat mengalami peningkatan yang signifikan dari hanya sebanyak 5.327 akseptor aktif pada tahun 2019 menjadi sebanyak 6.261 akseptor aktif pada tahun 2020. Peningkatan jumlah akseptor tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat telah cukup berhasil mengedukasi masyarakat akan pentingnya keluarga berencana.

Gambar 2. 48. Perkembangan Jumlah Akseptor Aktif di Kabupaten Asmat, 2023

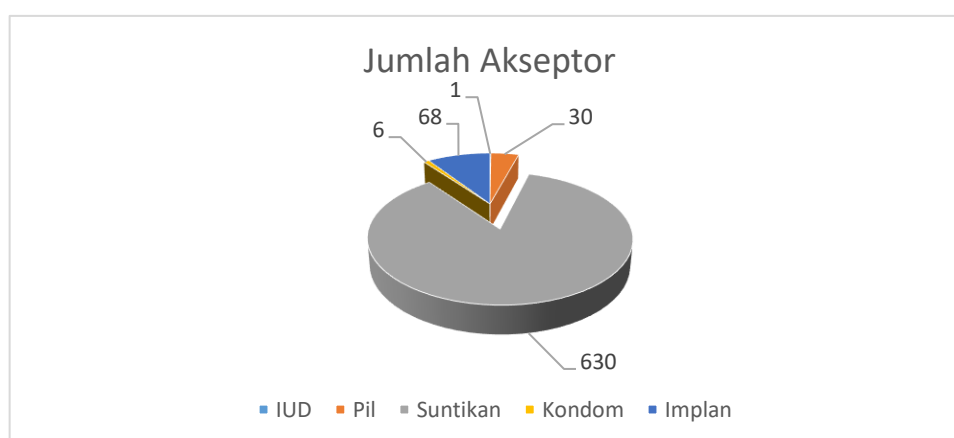
No	Distrik(Puskesmas)	Pemakaian Alat					Total
		IUD	Pil	Suntikan	Kondom	Implan	
1	Agats	1	1	98	0	18	118
2	Akat	0	0	68	1	11	80
3	Atsj	0	3	53	3	22	81
4	Ayip	0	0	26	0	0	26
5	Betsbamu	0	0	3	0	0	3
6	fayit	0	0	47	0	0	47
7	Jetsi	0	0	33	0	0	33
8	Joerat	0	0	60	0	0	60
9	Der Komour	0	0	16	0	7	23
10	Kolofbraza	0	6	6	0	0	12
11	Kopay	0	0	3	0	0	3
12	Pantai kasuari	0	2	18	0	5	25
13	Pulau Tiga	0	4	25	0	0	29
14	Safan/Primapun	0	0	37	0	0	37
15	Safan/Bayun	0	0	12	0	0	12
16	Sawaerma	0	4	31	0	0	35
17	Siret/Yousakor	0	0	21	0	0	21
18	Suator	0	9	33	0	2	44
19	Suru/Tomor	0	1	25	0	3	29
20	Unir Sirau	0	0	12	2	0	24
21	Awyu	0	0	0	0	0	0

22	Aswi	0	0	0	0	0	0
23	Joutu	0	0	3	0	0	3
24	Koroway Buluanop	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1	30	630	6	68	745

Sumber: Dinas PPKB Kab. Asmat, 2024 (Diolah)

Pada Tahun 2023 jumlah akseptor baru di kabupaten asmat adalah 1.480 akseptor aktif. Jumlah akseptor tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat telah cukup berhasil mengedukasi masyarakat akan pentingnya keluarga berencana. Pada tahun 2020, jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor aktif adalah suntik dengan jumlah sebanyak 4.854 akseptor, alat kontrasepsi selanjutnya yang paling banyak digunakan adalah pil yaitu sebanyak 991 akseptor. Jumlah akseptor yang menggunakan kontrasepsi Implant sebanyak 129 akseptor, dan IUD sebanyak 23 akseptor, dan Kondom sebanyak 257 Akseptor. Akseptor aktif di Kabupaten Asmat hanya tersebar di 11 distrik dengan distrik yang memiliki jumlah akseptor aktif terbanyak adalah Distrik Agats yaitu sebanyak 1.872 akseptor dan Distrik Atsy sebanyak 263 akseptor. Alat kontrasepsi IUD digunakan oleh akseptor aktif di Distrik Agats, Atsy, dan Suru-suru yaitu 23 akseptor. Kondom digunakan di 10 distrik yaitu Distrik Agats (190 akseptor), Akat (11 akseptor), Atsy (4 akseptor), fayit (7 akseptor), Pantai Kasuari (14 akseptor), Safan (7 akseptor), Sawa Erma (5 akseptor), Suator (8 akseptor), suru-suru (8 akseptor), Unir Sirauw (3 akseptor).

Gambar 2. 49. Persentase Akseptor Aktif Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi, 2023



Sumber: Dinas PPKB Kab. Asmat 2024 (diolah)

Walaupun telah terjadi peningkatan akseptor aktif, Pemerintah Kabupaten Asmat terus menggalakkan pemakaian alat kontrasepsi kepada penduduk untuk menekan pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Pada tahun 2020, tercatat jumlah akseptor bertambah sebanyak 934 akseptor.

Tabel 2. 67. Jumlah Akseptor Baru Menurut Distrik dan Alat Kontrasepsi, 2023

No.	Distrik	Pemakaian Alat					
		IUD	Pil	Suntikan	Kondom	Implant	Total
1	Agats	21	272	2.102	190	108	2.693
2	Akat	0	28	395	11	9	443
3	Atsy	1	81	429	4	7	522
4	Ayip	0	1	29	0	0	30
5	Bectbamu	0	0	0	0	0	-
6	Der Koumur	0	0	0	0	0	-
7	Fayit	0	48	207	7	0	262
8	Jetsy	0	0	0	0	0	-
9	Joerat	0	0	0	0	0	-
10	Kolf Braza	0	9	81	0	1	91
11	Kopay	0	2	67	0	0	69
12	Pantai Kasuari/Kamur	0	127	227	14	4	372
13	Pulau Tiga/Nakai	0	1	104	0	0	105
14	Safan/Primapun	0	45	339	7	0	391
15	Sawa Erma	0	207	313	5	0	525
16	Siret/Yaosakor	0	4	57	0	0	61
17	Suator/Binam	0	91	280	8	0	379
18	Suru-suru/Tomor	1	40	153	8	0	202
19	Unir Sirau	0	35	71	3	0	109
20	Awyu	0	0	0	0	0	-
21	Aswi	0	0	0	0	0	-

22	Koroway Buluanop	0	0	0	0	0	-
23	Joutu	0	0	0	0	0	-
Total		23	991	4.854	257	129	6.254

Sumber: KIA-KB DPPKBKabupaten Asmat, 2023

C. Pasangan Usia Subur

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 adalah sebanyak 25.257 pasangan. Jika dirinci menurut distrik, distrik yang memiliki PUS tertinggi (di atas 6.468 PUS) adalah Distrik Agats yaitu sebanyak 6.468 pasangan, diikuti Distrik Fayit sebanyak 1.969 pasangan, Distrik Atsy sebanyak 1.859 pasangan, Distrik Safan sebanyak 1.797 pasangan, Distrik Sawa Erma sebanyak 1.644 pasangan, Distrik Suator sebanyak 1.169 pasangan, Distrik Der Koumur sebanyak 1.148 pasangan, Distrik Akat sebanyak 1.139 pasangan, Distrik Pantai Kasuari sebanyak 985 pasangan, Distrik Siret sebanyak 933 pasangan, Distrik Unir Sirau sebanyak 808 pasangan, Distrik Pulai Tiga sebanyak 725 pasangan, Distrik Bechamu sebanyak 712 pasangan, Distrik kopay sebanyak 705 pasangan, Distrik Ayip sebanyak 613 pasangan, Distrik Suru-suru sebanyak 612 pasangan, Distrik Joerat sebanyak 590 pasangan, Distrik Kolf Braza sebanyak 508 pasangan, dan Distrik Jetsy sebanyak 421 pasangan.

Jika jumlah akseptor dibandingkan dengan per 100 PUS, rasio tertinggi berada Distrik Agats 6.486 (26%), diikuti Distrik Fayit 1.969 (8 %), Distrik Atsy 1.859 (7%) dan diikuti oleh Distrik lainnya seperti tertera pada tabel diatas.

Tabel 2. 68. Jumlah PUS dan Akseptor Aktif Menurut Distrik, 2020

No.	Distrik	PUS	Akseptor Aktif	Jumlah Akseptor per 100 PUS
1	Agats	6.468	2.711	42
2	Akat	1.139	443	39
3	Atsy	1.859	526	28
4	Ayip	613	15	2
5	Bectbamu	712	0	-
6	Der Koumur	1.148	0	-
7	Fayit	1.969	262	13
8	Jetsy	421	0	-
9	Joerat	590	0	-
10	Kolf Braza	508	91	18

11	Kopay	705	69	10
12	Pantai Kasuari/Kamur	985	372	38
13	Pulau Tiga/Nakai	725	105	14
14	Safan/Primapun	1.797	391	22
15	Sawa Erma	1.646	525	32
16	Siret/Yaosakor	933	61	7
17	Suator/Binam	1.619	379	23
18	Suru-suru/Tomor	612	202	33
19	Unir Sirau	808	109	13
20	Awyu	-	0	-
21	Aswi	-	0	-
22	Koroway Buluanop	-	0	-
23	Joutu	-	0	-
Total		25.257	6.261	25

Sumber: Dinas PPKB Kab. Asmat 2020

Tabel 2. 69. Jumlah PUS yang tidak ber-KB

Kabupaten / Kota	2019	2020
ASMAT	19.826	18.996

Sumber: Dinas PPKB Kab. Asmat 2020

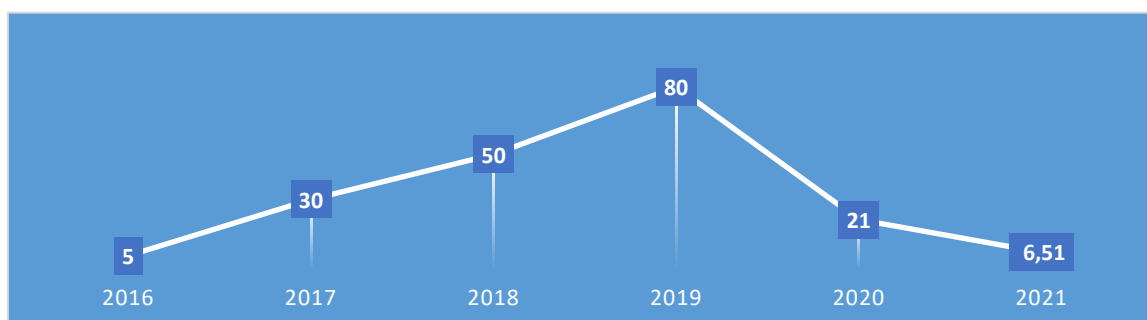
2.3.1.8. Sosial

Pembangunan bidang sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumberdaya manusia di bidang sosial yang sebaik-baiknya serta menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, pada gerak langkahnya senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks. Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka perkembangannya penyandang masalah kesejahteraan sosial turut berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer. Perlindungan dan tingkat kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam, dan bencana sosial. Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong

terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi.

Selama Tahun 2016-2020, persentase cakupan KAT dan PMKS yang telah terlayani di Kabupaten Asmat mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya sebesar 50 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 80 persen pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020, persentase cakupan pelayanan mengalami penurunan hingga hanya menjadi 21 persen. dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial, Pemerintah Kabupaten Asmat juga mendorong partisipasi masyarakat dimana persentase partisipasi masyarakat terus meningkat dari hanya sebesar 40 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2018. Selain itu, hal yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberdayakan lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Asmat untuk menanggulangi PMKS dengan cakupan lembaga yang diberdayakan mengalami peningkatan dari 38 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2019.

Gambar 2. 50. Persentase Cakupan KAT dan PMKS yang telah Terlayani, 2016-2021



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2020 (diolah)

Tabel 2. 70. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penderita Cacat 2023

No	Distrik	Cacat Netra	Cacat Rungu	Cacat Tubuh	Cacat Mental	Cacat Ganda	Jumlah
1	Pantai Kasuari	4	4	40	25	9	82
2	Kopay	5	3	7	1	2	18
3	Der Koumur	-	-	-	-	-	0
4	Safan	23	3	20	1	4	51
5	Awyu	-	-	-	-	-	0
6	Fayit	11	6	15	2	-	34
7	Aswi	2	7	6	-	1	16
8	Atsy	4	7	7	1	1	20
9	Sirets	15	5	13	1	1	35
10	Ayip	-	1	-	-	-	1

11	Bectbamu	1	-	3	-	-	4
12	Suator	-	-	-	-	-	0
13	Kolf Braza	9	-	21	1	1	32
14	Joutu	6	4	11	2	1	24
15	Koroway Buluanop	-	-	-	-	-	0
16	Akat	6	2	6	1	3	18
17	Jetsy	-	5	5	-	6	16
18	Agats	9	18	18	1	3	49
19	Sawa Erma	2	5	14	4	3	28
20	Suru-suru	1	4	13	2	-	20
21	Unir Sirau	10	1	10	1	2	24
22	Joerat	3	2	12	-	1	18
23	Pulau Tiga	5	9	9	2	1	26
Jumlah		117	116	86	230	45	39

Sumber Data BPS Kabupaten Asmat 2024

Tabel 2. 71. Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Distrik

No	Distrik	Perumahan	Masyarakat Terasing (KK)	Korban Bencana Alam	Fakir Miskin / Keluarga Miskin
1	Pantai Kasuari	-	-	-	421
2	Kopay	-	-	-	431
3	Der Koumur	-	-	-	354
4	Safan	-	-	-	893
5	Awyu	-	-	-	82
6	Fayit	-	-	-	0
7	Aswi	-	-	-	125
8	Atsy	-	-	-	481
9	Sirets	-	-	-	466
10	Ayip	-	-	-	206
11	Bectbamu	-	-	-	265
12	Suator	-	-	-	320
13	Kolf Braza	-	-	-	203
14	Joutu	-	-	-	172
15	Koroway Buluanop	-	-	-	27
16	Akat	-	-	-	295
17	Jetsy	-	-	-	229
18	Agats	-	-	16	985
19	Sawa Erma	-	-	-	565
20	Suru-suru	-	-	-	331
21	Unir Sirau	-	-	-	204
22	Joerat	-	-	-	281
23	Pulau Tiga	-	-	-	464
JUMLAH		-	-	16	7,800

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2020

Tabel 2. 72. Data Komunitas Adat Terpencil (KAT) Berdasarkan Dari Dinas Sosial
Kabupaten Asmat Tahun 2023

No.	Distrik	Luas (KM²)	Jumlah		Pemberdayaan		Ket
			Lokasi KAT	Jumlah KK	Belum	Sudah	
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-	-	-
2	Kopay	-	-	-	-	-	-
3	Der Koumur	-	-	-	-	-	-
4	Safan	-	-	-	-	-	-
5	Awyu	-	-	-	-	-	-
6	Fayit	-	-	-	-	-	-
7	Aswi	-	-	-	-	-	-
8	Atsy	-	-	-	-	-	-
9	Sirets	-	-	-	-	-	-
10	Ayip	-	-	-	-	-	-
11	Bectbamu	-	-	-	-	-	-
12	Suator	-	-	-	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	-	-	-	-
14	Joutu	-	-	-	-	-	-
15	Koroway Buluanop	-	1	40	Belum	-	-
16	Akat	-	-	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-	-	-
18	Agats	-	-	-	-	-	-
19	Sawa Erma	-	-	-	-	-	-
20	Suru-suru	-	-	-	-	-	-
21	Unir Sirau	-	-	-	-	-	-
22	Joerat	-	-	-	-	-	-
23	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	1	40	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Tabel 2. 73. Banyaknya Panti Asuhan/Asrama, Kapasitas Asuh Menurut Distrik

NO	Distrik	Panti Asuhan/Asrama		Kapasitas	Jumlah Anak Asuh
		Pemerintah	Swasta		
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-
2	Kopay	-	-	-	-
3	Der Koumur	-	-	-	-
4	Safan	-	-	-	-
5	Awyu	-	-	-	-
6	Fayit	-	-	-	-
7	Aswi	-	-	-	-
8	Atsy	-	-	-	-
9	Sirets	-	-	-	-
10	Ayip	-	-	-	-
11	Bectbamu	-	-	-	-
12	Suator	-	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	-	-
14	Joutu	-	-	-	-
15	Koroway Buluanop	-	-	-	-
16	Akat	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-

18	Agats	-	PA. Yan Smith	-	46
		-	PA. Martinus Depores	-	26
19	Sawa Erma	-	-	-	-
20	Suru-suru	-	-	-	-
21	Unir Sirau	-	-	-	-
22	Joerat	-	-	-	-
23	Pulau Tiga	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	72

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2020

Tabel 2. 74. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut Usia (LANSIA) Menurut Distrik

No	Distrik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pantai Kasuari	67	49	117
2	Kopay	-	-	75
3	Der Koumur	-	-	-
4	Safan	-	-	22
5	Awyu	-	-	-
6	Fayit	-	-	27
7	Aswi	-	-	40
8	Atsy	-	-	39
9	Sirets	-	-	98
10	Ayip	-	-	6
11	Bectbamu	-	-	14
12	Suator	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	26
14	Joutu	-	-	38
15	Koroway Buluanop	-	-	-
16	Akat	-	-	24
17	Jetsy	-	-	16
18	Agats	-	-	29
19	Sawa Erma	-	-	12
20	Suru-suru	-	-	21
21	Unir Sirau	-	-	35
22	Joerat	-	-	43
23	Pulau Tiga	-	-	41
JUMLAH		-	-	-

Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Asmat 2024

Tabel 2. 75. Jumlah Wanita Tuna Susila atau PSK

No	Distrik	Jumlah
1	Pantai Kasuari	-
2	Kopay	-
3	Der Koumur	-
4	Safan	-
5	Awyu	-
6	Fayit	-
7	Aswi	-
8	Atsy	-
9	Sirets	-
10	Ayip	-

11	Bectbamu	-
12	Suator	-
13	Kolf Braza	-
14	Joutu	-
15	Koroway Buluanop	-
16	Akat	-
17	Jetsy	-
18	Agats	-
19	Sawa Erma	-
20	Suru-suru	-
21	Unir Sirau	-
22	Joerat	-
23	Pulau Tiga	-
Jumlah		-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Tabel 2. 76. Korban Penyalahgunaan Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

No	Distrik	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Keterangan
1	Pantai Kasuari	-	-
2	Kopay	-	-
3	Der Koumur	-	-
4	Safan	-	-
5	Awyu	-	-
6	Fayit	-	-
7	Aswi	-	-
8	Atsy	-	-
9	Sirets	-	-
10	Ayip	-	-
11	Bectbamu	-	-
12	Suator	-	-
13	Kolf Braza	-	-
14	Joutu	-	-
15	Koroway Buluanop	-	-
16	Akat	-	-
17	Jetsy	-	-
18	Agats	84	-
19	Sawa Erma	-	-
20	Suru-suru	-	-
21	Unir Sirau	-	-
22	Joerat	-	-
23	Pulau Tiga	-	-
Jumlah		84	-

Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Tabel 2. 77. Bantuan Perumahan Untuk Masyarakat KAT yang Sudah Terlayani

NO	Distrik	Bantuan Rumah Untuk Masyarakat KAT (Komunitas Adat Terpencil)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-	-	-
2	Kopay	-	-	-	-	-	-
3	Der Koumur	-	45 Unit	-	-	-	-
4	Safan	-	40 Unit	-	-	-	-
5	Awyu	-	-	-	-	-	-
6	Fayit	-	-	-	-	-	-
7	Aswi	-	-	-	-	-	-
8	Atsy	-	-	-	-	-	-
9	Sirets	-	-	-	-	-	-
10	Ayip	-	-	-	-	-	-
11	Bectbamu	-	-	-	-	-	-
12	Suator	37 unit	-	-	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	-	-	-	-
14	Joutu	-	-	-	-	-	-
15	Koroway Buluanop	-	-	35 Unit	-	-	-
16	Akat	-	-	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-	-	-
18	Agats	-	-	-	-	-	-
19	Sawa Erma	-	-	-	-	-	-
20	Suru-suru	-	-	-	-	-	-
21	Unir Sirau	-	-	-	-	-	-
22	Joerat	-	-	-	-	-	-
23	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
Jumlah		37 unit	85 Unit	35 Unit	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Tabel 2. 78. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

No	Distrik	Jumlah	Keterangan
1	Pantai Kasuari	-	-
2	Kopay	-	-
3	Der Koumur	-	-
4	Safan	-	-
5	Awyu	-	-
6	Fayit	-	-
7	Aswi	-	-
8	Atsy	-	-
9	Sirets	-	-
10	Ayip	-	-
11	Bectbamu	-	-
12	Suator	-	-
13	Kolf Braza	-	-
14	Joutu	-	-
15	Koroway Buluanop	-	-
16	Akat	-	-
17	Jetsy	-	-

18	Agats	-	-
19	Sawa Erma	-	-
20	Suru-suru	-	-
21	Unir Sirau	-	-
22	Joerat	-	-
23	Pulau Tiga	-	-
Jumlah		-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat 2024

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah petensi sumber yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan kesejahteraan social di Kabupaten Asmat, seperti TKSK (Tenaga Sosial Kecamatan, Pendamping Program Keluarga Harapan dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) serta kelompok Karang Taruna.

Tabel 2. 79. Tenaga Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Distrik	Jumlah	
		Tenaga Sosial Kecamatan	Pendamping Program Keluarga Harapan
1	Pantai Kasuari	1	1
2	Kopay	1	1
3	Der Koumur	1	1
4	Safan	1	1
5	Awyu	1	1
6	Fayit	1	1
7	Aswi	1	1
8	Atsy	1	2
9	Sirets	1	1
10	Ayip	1	2
11	Bectbamu	1	2
12	Suator	1	1
13	Kolf Braza	1	
14	Joutu	1	1
15	Koroway Buluanop	1	-
16	Tomor Birip	1	
17	Sor Ep	1	
18	Akat	1	1
19	Jetsy	1	1
20	Agats	1	4
21	Sawa Erma	1	2
22	Suru-suru	1	-
23	Unir Sirau	1	-
24	Joerat	1	1
25	Pulau Tiga	1	1
Jumlah		25	26

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Tabel 2. 80. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Tagana dan Kampung Siaga Bencana)

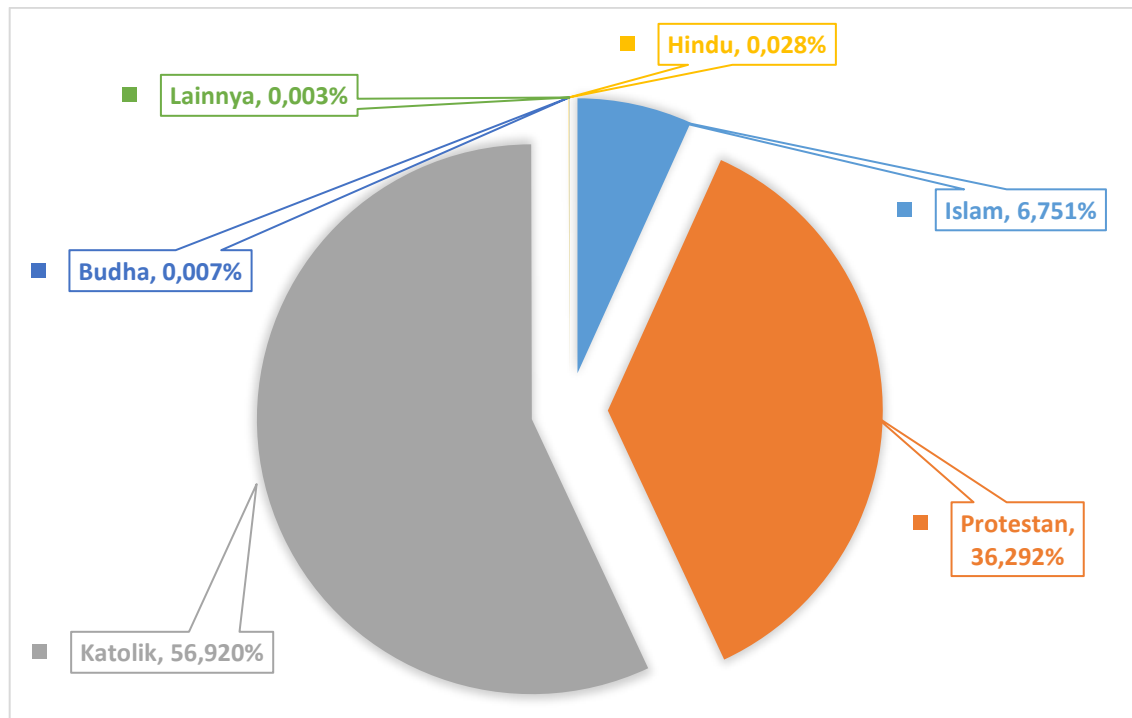
No	Distrik	Jumlah		
		Karang Taruna	Tagana	Kampung Siaga Bencana
1	Pantai Kasuari	-	-	-
2	Kopay	-	-	-
3	Der Koumur	-	-	-
4	Safan	-	-	1
5	Awyu	-	-	-
6	Fayit	-	-	-
7	Aswi	-	-	-
8	Atsy	-	-	-
9	Sirets	-	-	-
10	Ayip	-	-	-
11	Bectbamu	-	-	-
12	Suator	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	-
14	Joutu	-	-	-
15	Koroway Buluanop	-	-	-
16	Akat	1	-	1
17	Jetsy	1	-	-
18	Agats	2	30	-
19	Sawa Erma	-	-	-
20	Suru-suru	-	-	-
21	Unir Sirau	-	-	-
22	Sor Ep	1		
23	Tomor Birip			
24	Joerat	-	-	-
25	Pulau Tiga	-	-	-
Jumlah		5	30	2

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

2.3.1.9. Agama dan Kepercayaan

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Gambar 2. 51. Persentase Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2024 (diolah)

Penduduk di Kabupaten Asmat memeluk berbagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Mayoritas penduduk di Kabupaten Asmat merupakan pemeluk Katolik yang jumlahnya pada tahun 2023 mencapai 60.730 orang (56,92 persen), diikuti oleh pemeluk Kristen sebanyak 38.721 orang (36,292 persen), Islam sebanyak 7.732 orang (6.751 persen), Hindu sebanyak 30 orang (0,028 persen), dan Budha sebanyak 7 orang (0,007 persen) dari total jumlah penduduk 116.993 orang. Fasilitas tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Asmat baik yang dibantu oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat adalah masjid, gereja protestan, gereja katolik, dan kapel.

Tabel 2. 81. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Distrik, 2023

No.	Distrik	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik
1.	Agats	3	27	7
2.	Atsj	3	9	4
3.	Sawa Erma	1	6	5

No.	Distrik	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik
4.	Akat	1	5	2
5.	Fayit	-	4	4
6.	Pantai Kasuari	1	12	3
7.	Suator	3	20	1
8.	Suru-suru	-	17	-
9.	Kolf Brasa	-	6	-
10.	Unir Sirau	-	1	4
11.	Joerat	-	-	4
12.	Pulau Tiga	-	2	4
13.	Jetsi	-	3	4
14.	Der Koumur	-	8	3
15.	Kopay	-	5	4
16.	Safan	-	6	8
17.	Sirets	2	5	4
18.	Ayip	1	3	-
19.	Betcbamu	-	3	4
20.	Koroway Buluanop	-	2	
21.	Joutu	-	5	-
22.	Awyu	-	6	-
23.	Aswi	-	-	3
Total		15	155	68

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, diolah 2024

2.3.1.10. Ketenagakerjaan

Pembahasan mengenai aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu ulasan utama bagi pengambilan kebijakan-kebijakan ekonomi, karena aspek ketenagakerjaan merupakan aspek pokok dalam pembahasan kesejahteraan penduduk. Data ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, dan tentu saja sangat erat kaitannya dengan tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan

dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak berbasis investasi mengakibatkan tidak adanya penyerapan tenaga kerja baru.

Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan tenaga kerja dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Pertama, apakah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Asmat melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, apakah profil penduduk di Kabupaten Asmat merupakan penduduk muda. Jika suatu daerah memiliki struktur penduduk yang didominasi usia muda, maka akan semakin banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja dan perlunya kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, struktur ekonomi yang cenderung bukan *labour intensive* dan tingkat ketrampilan penduduk yang belum memadai membuat usaha penciptaan lapangan kerja baru semakin sulit dan kompleks.

A. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi diantara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Terkait dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, yaitu hanya sektor pertanian, hal ini menggambarkan bahwa lebih banyak perempuan yang bersedia bekerja di sektor pertanian, satu-satunya sektor yang ada, sedangkan laki-laki memerlukan sektor usaha lainnya. Inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Asmat kedepannya.

Tabel 2. 82. Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Asmat, 2016-2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2016	923	550	1.473
2017	418	355	733
2018	292	211	1.558
2019	136	178	314
2020	10	1	11

Sumber: Dinas Perindagkop Kab. Asmat, 2021

Menurut data dari dinas perindagkop Kabupaten Asmat, terdapat 1.473 orang pencari kerja pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi sebanyak 733 orang pada tahun 2017. Pada tahun 2018, pencari kerja di Kabupaten Asmat mengalami peningkatan hingga menjadi sebanyak 1.558 orang, namun angka tersebut mengalami penurunan hingga menjadi sebanyak 314 orang pada tahun 2019 dan menurun lagi menjadi 11 orang pada tahun 2020. Jumlah pencari kerja laki-laki pada tahun 2020 adalah sebanyak 10 orang, sedangkan pencari kerja perempuan adalah sebanyak 1 orang.

B. Tingkat Kesempatan Kerja

Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja. Mengingat data kesempatan kerja sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa kesempatan kerja didefinisikan dengan banyaknya lapangan kerja yang terisi, yang tercermin dari persentase penduduk yang bekerja dari total seluruh angkatan kerja yang tersedia.

Dalam hal ini seseorang dikategorikan bekerja apabila dia melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu porsi penduduk yang termasuk angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja. TKK di Kabupaten Asmat, menunjukkan bahwa TKK laki-laki dengan TKK

perempuan sama besar, yaitu masing-masing sebesar 100 persen. Hal ini menegaskan bahwa dalam hal ketenagakerjaan partisipasi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Asmat dapat dikatakan seimbang. Secara umum, seluruh penduduk angkatan kerja (100 persen) di Kabupaten Asmat telah terserap dalam berbagai lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang utama penduduk adalah di sektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman bahan makanan.

2.3.1.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Jumlah Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya jumlah pengangguran. Selama 2019-2020, jumlah koperasi di Kabupaten Asmat tidak mengalami peningkatan hanya sebanyak 65 unit pada tahun 2019 dan 2020. Walaupun jumlah koperasi tidak mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan dari hanya sebanyak 2.297 anggota pada tahun 2019 menjadi sebanyak 2.654 anggota pada tahun 2020.

Tabel 2. 83. Perkembangan Jumlah dan Anggota Koperasi, 2019-2020

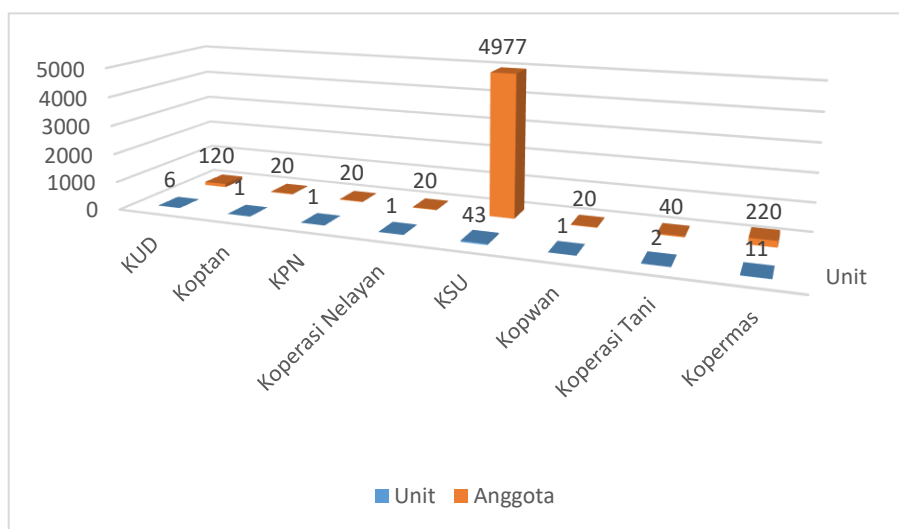
Tahun	KUD		Non KUD	
	Jumlah	Anggota	Jumlah	Anggota
2019	65	2297	1	20
2020	65	2654	1	20

Sumber: Dinas Perindagkop Kab. Asmat, 2020

Dilihat dari jenis koperasi pada tahun 2020, jumlah KUD adalah sebanyak 6 unit, koptan sebanyak 1 unit, KPN sebanyak 1 unit, koperasi nelayan sebanyak 1 unit, koperasi serba usaha sebanyak 43 unit, kopwan sebanyak 1 unit, koperasi tani sebanyak 2 unit, dan kopermas sebanyak 11 unit. Jumlah anggota koperasi terbanyak adalah untuk jenis KSU yaitu sebanyak 4977 anggota, diikuti kopermas sebanyak 220 anggota, KUD sebanyak 120

anggota, koperasi tani sebanyak 40 anggota, kopktan, kopwan, KPN dan koperasi nelayan dengan masing-masing sebanyak 20 anggota.

Gambar 2. 52. Jumlah dan Anggota Koperasi Menurut Jenis, 2020



Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Asmat, 2020 (diolah)

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Produktivitas Total Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi Kabupaten Asmat terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari produktivitas total daerah yang menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tiga sektor ekonomi yang dominan di Kabupaten Asmat adalah sektor konstruksi, diikuti oleh sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan (terutama sub-sektor perikanan) dan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per sektor/lapangan usaha (PDRB AHB) di Kabupaten Asmat selama periode tahun 2019-2023.

Tabel 2. 84. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Asmat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	406.536,47	412.162,47	423.702,87	466.082,00	516.954,00
B	Pertambangan dan Penggalian	124,88	135,17	138,02	145,15	144,70
C	Industri Pengolahan	36.214,63	35.746,36	37.237,80	37.873,30	39.162,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	214,00	218,35	223,01	227,79	232,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.082,20	1.063,43	1.092,50	1.122,40	1.147,30
F	Konstruksi	794.977,70	835.196,79	898.328,34	979.317,33	1.061.361,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	171.711,77	171.310,49	178.611,13	196.368,62	223.703,40
H	Transportasi dan Pergudangan	57.874,08	50.375,32	52.457,50	70.755,50	87.896,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.034,69	6.149,86	6.390,85	6.930,70	7.824,10
J	Informasi dan Komunikasi	13.505,91	14.831,16	17.133,32	19.906,57	23.392,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.835,84	5.517,99	5.601,55	6.011,43	6.555,60
L	Real Estate	56.011,29	57.371,33	62.734,39	68.157,68	71.956,70
M,N	Jasa Perusahaan	9.358,27	9.708,28	9.995,21	10.467,08	11.026,20

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	559.712,68	589.070,52	609.354,08	604.815,69	638.914,70
P	Jasa Pendidikan	201.573,83	209.368,63	211.887,53	222.992,19	241.735,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.439,72	139.286,23	146.019,30	153.380,90	173.877,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	29.626,17	31.497,49	33.886,90	36.027,23	39.414,50
	PDRB	2.470.834,23	2.569.009,87	2.694.794,30	2.880.581,56	3.145.299,70

Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2024

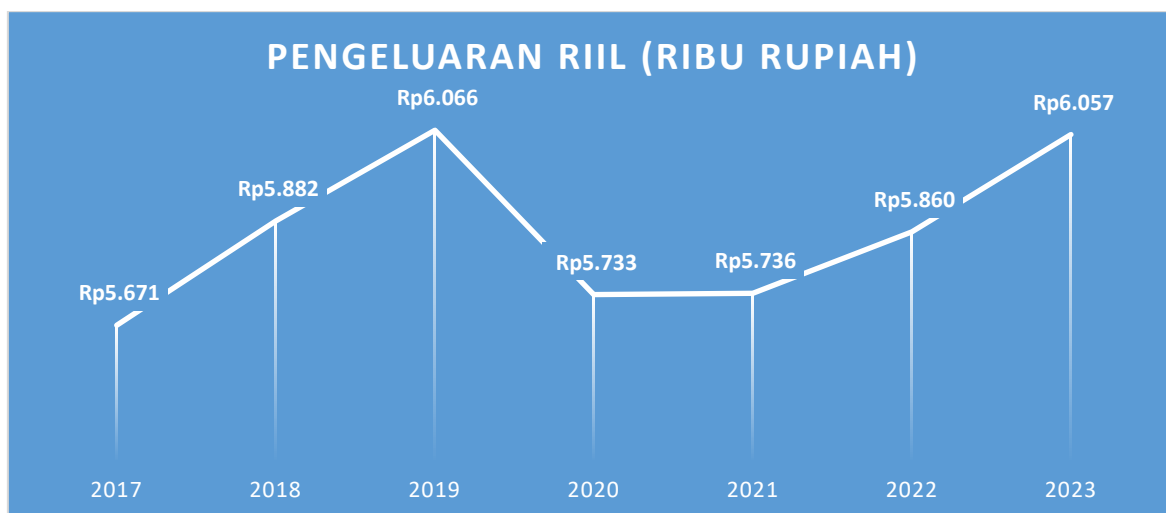
2.4.1.2. Pola Pengeluaran Rumah Tangga

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi, dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi. Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (*Engel's Law*). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Di negara-negara yang lebih maju, persentase konsumsi makanan biasanya di bawah 50 persen. Disamping itu, di negara-negara berkembang dari segi pemerataan pendapatan masih sulit diwujudkan. Dalam usaha pemerataan pendapatan ini pemerintah berusaha memberantas kemiskinan dengan jalan pemerataan pembangunan, pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih relatif besar (mendekati 50 persen) dari total pengeluaran per kapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran per kapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan,

rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah merupakan bagian terbesar dari pengeluaran per kapita.

Gambar 2. 53. Grafik Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Asmat Tahun 2017-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua 2024

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Sarana Transportasi

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan. Pada tahun 2014 sepanjang 204,77 km, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sepanjang 257,33 km.

Angkutan laut dan sungai adalah salah satu sarana transportasi utama yang digunakan di Kabupaten Asmat. Jumlah pengguna jasa transportasi sungai di Kabupaten Asmat dapat dikatakan fluktuatif. Pada tahun 2019 sebanyak 3.532 orang, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebanyak 1256 orang. Angkutan udara menjadi salah satu alternatif mobilitas barang dan penduduk di Kabupaten Asmat mengingat kondisi geografis Kabupaten Asmat yang berupa perairan dan masih memiliki hutan yang luas. Untuk mobilisasi penduduk di tingkat Provinsi Papua, penduduk di Kabupaten Asmat menggunakan transportasi udara melalui Bandara Ewer.

Tabel 2. 85. Sarana Transportasi, panjang jaringan jalan, jmlah penggunaan jasa transportasi laut Pengguna jasa transpotrasi udara Tahun 2018-2020

NO.	TAHUN	Jumlah Pengguna Jasa transportasi laut	Jumlah Pengguna Jasa transportasi Udara
1	2018	23.642	3.511
2	2019	18.572	16.347
3	2020	3.253	12.550

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Asmat, 2021

2.4.2.2. Fasilitas Jasa Perbankan

Ketersediaan fasilitas bank dan nonbank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Selain memberikan kemudahan fasilitas bertransaksi dan sebagai tempat penyedia dana bagi yang membutuhkan kredit, perbankan juga menjadi sarana yang aman untuk bertransaksi. Perkembangan kelembagaan keuangan masih didominasi oleh lembaga keuangan pemerintah dan swasta, sedangkan lembaga keuangan masyarakat masih sangat terbatas. Kabupaten Asmat hanya memiliki dua bank yakni Bank Papua Cabang Agats dan Bank Rakyat Indonesia Unit Agats. Kondisi ini sangat memprihatinkan sirkulasi peredaran uang di wilayah distrik dan kampung. Selain fasilitas kantor, kedua bank tersebut juga menyediakan jasa anjungan tunai mandiri kepada pelanggannya. Distrik yang memiliki lembaga keuangan bank adalah Distrik Agats, Pantai Kasuari, Sawa Erma, Atsy, Suator dan Fayit.

2.4.2.3. Ketersediaan Hotel dan Penginapan

Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Asmat, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan merupakan prasyarat utama untuk mendukung hal tersebut. Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 62 kamar. Dari 6 hotel tersebut, 5 diantaranya terdapat di Distrik Agats dan 1 hotel berada di Distrik Atsy. Sedangkan jumlah

penginapan pada Tahun 2020 sebanyak 5 Penginapan dengan jumlah kamar sebanyak 52 kamar.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Sektor yang strategis di Kabupaten Asmat yang dapat menjadi primadona investasi adalah sektor perikanan dan kehutanan mengingat Kabupaten Asmat memiliki potensi yang tinggi kedua sumberdaya tersebut.

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Asmat relatif bisa ditangani oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Asmat tetap harus diwaspadai dan menjadi catatan tersendiri bagi kenyamanan penduduk Kabupaten Asmat. Jumlah perkara pidana di Kabupaten Asmat selama tahun 2020 tercatat 53 perkara pencurian dan 31 perkara penganiayaan. Pada tahun 2020, jumlah perkara pidana tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 11 perkara pencurian dan 6 perkara penganiayaan, sedangkan perkara pidana terendah terjadi pada bulan Maret dan Juli yang hanya tercatat 3 perkara.

Tabel 2. 86. Angka Kriminalitas dan Jumlah Parkara Pidana di Kabupaten Asmat
Tahun 2020

No	Bulan	Penganiayaan	Pencurian
1	Januari	3	4
2	Februari	1	5
3	Maret	1	2
4	April	3	6
5	Mei	1	5
6	Juni	2	2
7	Juli		3
8	Agustus	3	6
9	September	3	2
10	Oktober	6	11
11	November	4	1

No	Bulan	Penganiayaan	Pencurian
12	Desember	4	6
	Jumlah	31	53

Sumber: Satpol PP Kabupaten Asmat, 2020

Tabel 2. 87. Jumlah Operasi Miras Diselesaikan Menurut Bulan, 2020

No	Bulan	Jumlah operasi yang diselesaikan
1	Januari	
2	Februari	1
3	Maret	1
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	1
10	Oktober	1
11	November	1
12	Desember	1
	Jumlah	9

Sumber : Dinas SATPOL-PP 2020

Tabel 2. 88. Jumlah Operasi Prostitusi Diselesaikan Menurut Bulan, 2020

No	Bulan	Jumlah operasi yang diselesaikan
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	1
4	April	-
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	-
8	Agustus	1
9	September	1
10	Oktober	1
11	November	-
12	Desember	1
	Total	7

Sumber : Dinas SATPOL-PP 2020

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam

pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kondisi aspek daya saing daerah Kabupaten Asmat terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja baik di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2. 89. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Asmat, 2023

Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak punya ijazah SD	27.092	26.948	26.517	38.373	40.701	24.481
SD	13.035	14.192	11.126			
SLTP	5.348	2.500	3.186	4.050	3.462	4.018
SLTA	2.109	3.784	4.804	5.551	6.088	4.749
Dip/Universitas	494	2.851	5.532	5.540	4.368	2.922
Jumlah	48.078	50.275	51.165	53.514	54.619	36.531

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Prov. Papua 2023, data diolah

Berdasarkan data 2023, sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Asmat memiliki pendidikan yang rendah. Jumlah penduduk yang bekerja dengan lulusan SD dan tidak lulus SD pada tahun 2020 adalah sebanyak 37.643 orang atau sebesar 73,57 persen dari penduduk yang bekerja, sementara itu penduduk yang bekerja dengan status pendidikan diploma/sarjana pada tahun 2020 adalah sebanyak 5.532 orang (10,81 persen).

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia non produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Menurut perhitungan berdasarkan rumus beban ketergantungan penduduk, tahun 2023 tingkat ketergantungan/dependency ratio Kabupaten Asmat sebesar 98,89. Dengan angka 98,89 menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 99 orang penduduk non produktif. Angka tingkat ketergantungan Kabupaten Asmat tahun 2023 lebih tinggi dari tingkat Provinsi Papua sebesar 43,52.

Berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduk Asmat memiliki jumlah yang semakin mengecil seiring dengan bertambahnya kelompok usia, dan terlihat penduduknya didominasi oleh kelompok usia muda yaitu 0-14 tahun. Bentuk piramida penduduk mengerucut ke atas. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Asmat sebesar 107,1 yang

menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Komposisinya adalah 51,7 persen laki-laki dan 48,3 persen perempuan. Terkait dengan IPM, penurunan angka ketergantungan akan memberi keleluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap naiknya angka IPM, jika mereka dapat memperoleh akses untuk pengembangan dirinya. Seperti akses kependidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, dan akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menjadi malapetaka. Sebuah bencana bagi suatu daerah karena, banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya bisa jadi sering terjadi tindakan kriminalitas.

2.4.4.3. Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tugas aparatur pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas dimaksud maka setiap aparatur harus memiliki manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat memperbandingkan (*merit system*) antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pejabat pada saat rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Kebijakan pembangunan kepegawaian daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumberdaya aparatur berdasarkan standar kompetensi.

Tabel 2. 90. Jumlah PNS Otonom di Kabupaten Asmat Menurut Golongan
Kepangkatan

Tahun	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Tahun 2018	180	919	1050	224	2373

Tahun 2019	172	852	1082	214	2320
Tahun 2020	167	748	1114	204	2233

Tabel 2. 91. Jumlah PNS Otonom di Kabupaten Asmat Menurut Jenis Kelamin 2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	1557	816	2373
2019	1512	808	2320
2020	1442	791	2233

Tabel 2. 92. Jumlah PNS Otonom Tenaga Kesehatan di Kabupaten Asmat

Tahun	Tempat Tugas		Jumah
	RSUD	Puskesmas Distrik	
2018	101	211	312
2019	102	206	308
2020	96	201	297

Tabel 2. 93. Jumlah PNS di Kabupaten Asmat Berdasarkan Suku

Tahun	OAP	NON OAP	Jumlah
2018	1.221	1.152	2.373
2019	1.125	1.195	2.320
2020	1.069	1.164	2.233

Tabel 2. 94. Jumlah Pembangunan Kantor Kampung Wilayah Kabupaten Asmat

NO	DISTRIK	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kampung	Jumlah	Kampung	Jumlah	Kampung	Jumlah
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-	-	-
2	Fayit	-	-	-	-	-	-
3	Atsy	-	-	-	-	-	-
4	Suator	-	-	-	-	-	-
5	Akat	-	-	-	-	-	-
6	Agats	-	-	-	-	-	-
7	Sawa Erma	-	-	-	-	-	-
8	Suru-suru	Tomor	1	-	-	-	-
9	Kolf Braza	-	-	-	-	-	-
10	Unir Sirau	-	-	-	-	-	-
11	Kopay	Ero Sapem	1	-	-	-	-
12	Der Koumur	Amkai, Ero Saman	2	Yamkap	1	-	-

NO	DISTRIK	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kampung	Jumlah	Kampung	Jumlah	Kampung	Jumlah
13	Safan	Jitarsok, Yaptambur	2	-	-	-	-
14	Sirets	-	-	-	-	-	-
15	Ayip	-	-	-	-	-	-
16	Bectbamu	-	-	Atambut	1	-	-
17	Jetsy	Warse	1	Dawer	1	-	-
18	Joerat	-	-	-	-	-	-
19	Pulau Tiga	Kapi	1	-	-	-	-
20	Joutu	-	-	-	-	-	-
21	Korowai buluanop	-	-	-	-	-	-
22	Aswi	-	-	Akantapak	1	-	-
23	Awyu	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	8	-	4	-	-

Keterangan: Tidak dianggarkan Pembangunan Kantor Kampung pada tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat, 2020

Tabel 2. 95. Jumlah Rumah Jabatan Kepala Kampung Kampung Wilayah
Kabupaten Asmat

No.	Distrik	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kampung	Jumlah	Kampung	Jumlah	Kampung	Jumlah
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-	-	-
2	Fayit	-	-	-	-	-	-
3	Atsy	-	-	-	-	-	-
4	Suator	-	-	-	-	-	-
5	Akat	-	-	-	-	-	-
6	Agats	-	-	-	-	-	-
7	Sawa Erma	-	-	-	-	-	-
8	Suru-suru	Tomor	1	-	-	-	-
9	Kolf Braza	Waijens	1	-	-	-	-
10	Unir Sirau	Paar, Abamu	2	-	-	-	-
11	Kopay	-	-	-	-	-	-
12	Der Koumur	Amatu, Yamkap, Amkum	3	-	-	-	-
13	Safan	Kairin	1	-	-	-	-
14	Sirets	-	-	-	-	-	-
15	Ayip	-	-	-	-	-	-
16	Bectbamu	-	-	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-	-	-

18	Joerat	-	-	-	-	-	-
19	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
20	Joutu	-	-	-	-	-	-
21	Korowai buluanop	-	-	-	-	-	-
22	Aswi	-	-	-	-	-	-
23	Awyu	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	8	-	-	-	-

Keterangan: Pada Tahun 2019 dan 2020 Tidak dianggarkan Pembangunan Rumah Jabatan Kepala Kampung

Sumber: Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat, 2020

Tabel 2. 96. Jumlah Pasar Tradisional Mama-Mama Kampung Wilayah Kabupaten Asmat

No.	Distrik	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kampung	Jumlah	Kampung	Jumlah	Kampung	Jumlah
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-	-	-
2	Fayit	-	-	-	-	-	-
3	Atsy	-	1	-	-	-	-
4	Suator	-	-	-	-	-	-
5	Akat	-	-	-	-	-	-
6	Agats	-	-	-	-	-	-
7	Sawa Erma	-	-	-	-	-	-
8	Suru-suru	-	-	-	-	-	-
9	Kolf Braza	-	-	-	-	-	-
10	Unir Sirau	-	-	-	-	-	-
11	Kopay	-	-	-	-	-	-
12	Der Koumur	-	-	-	-	-	-
13	Safan	-	1	-	-	-	-
14	Sirets	-	-	-	-	-	-
15	Ayip	-	-	-	-	-	-
16	Bectbamu	-	-	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-	-	-
18	Joerat	-	-	-	-	-	-
19	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
20	Joutu	-	-	-	-	-	-
21	Korowai buluanop	-	-	-	-	-	-
22	Aswi	-	-	-	-	-	-
23	Awyu	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	2	-	-	-	-

Keterangan: Tidak Ada Pembangunan Pasar Tradisional mama-mama kampung pada tahun 2019 dan 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat, 2020

Tabel 2. 97. Jumlah Pemilihan Kepala kampung Secara Demokrasi Wilayah
Kabupaten Asmat

No.	Distrik	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Pemilihan Kepala Kampung		Pemilihan Kepala Kampung		Pemilihan Kepala Kampung	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-	-	-
2	Fayit	-	-	-	-	-	-
3	Atsy	-	-	-	-	-	-
4	Suator	-	-	-	-	-	-
5	Akat	-	-	-	-	-	-
6	Agats	-	-	-	-	-	-
7	Sawa Erma	-	-	-	-	-	-
8	Suru-suru	-	-	-	-	-	-
9	Kolf Braza	-	-	-	-	-	-
10	Unir Sirau	-	-	-	-	-	-
11	Kopay	-	-	-	-	-	-
12	Der Koumur	-	-	-	-	-	-
13	Safan	-	-	-	-	-	-
14	Sirets	-	-	-	-	-	-
15	Ayip	-	-	-	-	-	-
16	Bectbamu	-	-	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-	-	-
18	Joerat	-	-	-	-	-	-
19	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
20	Joutu	-	-	-	-	-	-
21	Korowai buluanop	-	-	-	-	-	-
22	Aswi	-	-	-	-	-	-
23	Awyu	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Keterangan: Pada Tahun 2018-2020 tidak dianggarkan kegiatan Pemilihan Kepala Kampung secara Demokratis

Sumber: Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat, 2018

Tabel 2. 98. Jumlah Pemelihan Kepala kampung Secara Aklamasi Wilayah
Kabupaten Asmat

No.	Distrik	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Pemilihan Kepala Kampung		Pemilihan Kepala Kampung		Pemilihan Kepala Kampung	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-	-	-
2	Fayit	-	-	-	-	-	-
3	Atsy	-	-	-	-	-	-
4	Suator	-	-	-	-	-	-
5	Akat	-	-	-	-	-	-
6	Agats	-	-	-	-	-	-
7	Sawa Erma	-	-	-	-	-	-
8	Suru-suru	-	-	-	-	-	-
9	Kolf Braza	-	-	-	-	-	-
10	Unir Sirau	-	-	-	-	-	-
11	Kopay	-	-	-	-	-	-
12	Der Koumur	-	-	-	-	-	-
13	Safan	-	-	-	-	-	-
14	Sirets	-	-	-	-	-	-
15	Ayip	-	-	-	-	-	-
16	Bectbamu	-	-	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-	-	-
18	Joerat	-	-	-	-	-	-
19	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
20	Joutu	-	-	-	-	-	-
21	Korowai buluanop	-	-	-	-	-	-
22	Aswi	-	-	-	-	-	-
23	Awyu	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Keterangan: Pada Tahun 2018-2020 tidak dianggarkan kegiatan Pemilihan Kepala Kampung secara Aklamasi

Sumber: Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat, 2020

Tabel 2. 99 Jumlah Perencanaan Partispasi Kampung Wilayah Kabupaten Asmat

No.	Distrik	Tahun		
		2018	2019	2020
		Nama Kampung	Nama Kampung	Nama kampung
1	Pantai Kasuari	-	-	-
2	Fayit	-	-	-
3	Atsy	-	-	-
4	Suator	-	-	-
5	Akat	-	-	-
6	Agats	-	-	-
7	Sawa Erma	-	-	-
8	Suru-suru	-	-	-
9	Kolf Braza	-	-	-
10	Unir Sirau	-	-	-
11	Kopay	-	-	-
12	Der Koumur	-	-	-
13	Safan	-	-	-
14	Sirets	-	-	-
15	Ayip	-	-	-
16	Bectbamu	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-
18	Joerat	-	-	-
19	Pulau Tiga	-	-	-
20	Joutu	-	-	-
21	Korowai buluanop	-	-	-
22	Aswi	-	-	-
23	Awyu	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Keterangan: Pada Tahun 2018-2020 tidak ada kegiatan Perencanaan Partispasi Kampung Wilayah Kabupaten Asmat

Sumber: Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat, 2020

2.5. PENELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Selanjutnya penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya.

2.5.1. Telaah Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat–pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur yang dikembangkan akan mengoptimalkan masing–masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Rencana struktur ruang memberikan gambaran tentang susunan, sistem pusat kegiatan, hirarki pelayanan, dan pembagian fungsi kota serta kawasan perkotaan dalam memberikan layanan bagi kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten, serta perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat–pusat kegiatan/perkotaan yang ada. Untuk kepentingan pembangunan ruang dalam wilayah kabupaten dapat dibangun sistem struktur internal kabupaten yang terdiri dari sistem perkotaan/pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten dan sistem prasarana skala kabupaten.

2.5.1.1. Kawasan Perkotaan dan Pedesaan

Pada intinya penentuan sistem perkotaan dan pedesaan ini guna mendukung aksesibilitas global wilayah Kabupaten Asmat ke jaringan perkotaan poros perekonomian regional, nasional bahkan dunia dalam rangka menyongsong era pasar bebas. Oleh karena itu untuk 20 tahun ke depan sistem perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Asmat direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2. 100. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032

No.	Nama Kota	Sistem Perkotaan	Fungsi Utama
1.	Agats di Distrik Agats	PKL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan kabupaten ➤ Perdagangan dan jasa ➤ Perikanan
2.	Tomor di Distrik Suru-Suru	PKL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan distrik ➤ Perkebunan ➤ Pertanian ➤ Wisata
3.	Kamur di Distrik Pantai Kasuari	PKL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan kabupaten ➤ Perdagangan dan jasa ➤ Perikanan
4.	Atsy di Distrik Atsy	PKL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan distrik ➤ Perikanan ➤ Wisata
5.	Sauti di Distrik Sawaerma	PPK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan distrik ➤ Perikanan ➤ Perkebunan ➤ Pertanian
6.	Komor di Distrik Unir Sirauw	PPK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan distrik ➤ Perikanan ➤ Pertanian
7.	Binam di Distrik Suator	PPK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan distrik ➤ Perikanan ➤ Pertanian
8.	Ayam di Distrik Akat	PPL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan
9.	Basim di Distrik Fayit	PPL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian
10.	Hahare di Distrik Kopay	PPL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian

No.	Nama Kota	Sistem Perkotaan	Fungsi Utama
11.	Comoro di Distrik Ayip	PPL	➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian
12.	Yankap di Distrik Der Koumur	PPL	➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian
13.	Yausakor di Distrik Sirets	PPL	➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian
14.	You di Distrik Betsbamu	PPL	➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian
15.	Yamas di Distrik Joerat	PPL	➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian
16.	Nakai di Distrik Pulau Tiga	PPL	➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian
17.	Warse di Distrik Jetsy	PPL	➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian
18.	Binamsain di Distrik Kolf Braza	PPL	➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian
19.	Bayun di Distrik Safan	PPL	➤ Pusat pemerintahan kampung ➤ Perikanan ➤ Pertanian

Sumber: RTRW Kabupaten Asmat

Keterangan:

PKL = Pusat Kegiatan Lokal

PPK = Pusat Pelayanan Kawasan

PPL = Pusat Pelayanan Lokal

2.5.1.2. Sistem Prasarana Wilayah

Sistem prasarana wilayah dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Struktur ruang wilayah Kabupaten Asmat diarahkan untuk mendukung pemerataan perkembangan dan pertumbuhan yang menjangkau setiap wilayah yang berada dalam lingkup administrasi Kabupaten Asmat. Oleh karena itu diperlukan dukungan upaya pengembangan berbagai sistem prasarana utama secara memadai. Pengembangan sistem prasarana utama dilakukan secara berhierarki sesuai dengan interaksi dan kebutuhan penanganan permasalahan pada tiap wilayah serta potensi yang perlu dipacu pengembangannya. Sistem prasarana utama juga perlu diupayakan dalam rangka untuk mendorong pengembangan aktivitas perekonomian serta keterkaitan antar wilayah terutama antara pusat kegiatan dan aktivitas perekonomian yang akan dikembangkan pada masing-masing sub satuan wilayah pengembangan maupun pusat pertumbuhannya. Sistem prasarana utama diperlukan juga untuk meningkatkan hubungan atau interaksi antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan serta wilayah potensial diantara keduanya sehingga diharapkan dapat mendorong interaksi kegiatan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya atau bahkan antar satuan wilayah pengembangan.

Sistem prasarana utama yang mendukung pemantapan struktur ruang dalam jangka panjang direncanakan dengan 2 (dua) langkah, yang pertama adalah peningkatan prasarana utama untuk melayani kebutuhan perkembangan saat ini dan yang kedua adalah pengembangan sistem prasarana utama untuk mendukung pemerataan pembangunan pada tiap wilayah di Kabupaten Asmat serta untuk meningkatkan keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pendukungnya.

➤ Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat di Kabupaten Asmat meliputi rencana jaringan jalan, pengembangan terminal, penyebrangan dan sungai. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat di Kabupaten Asmat meliputi rencana jaringan jalan, pengembangan terminal, penyebrangan dan sungai. Untuk mengantisipasi permasalahan prasarana transportasi pada masa yang akan datang serta dalam upaya

untuk mendukung pengembangan wilayah secara optimal maka rencana pengembangan jaringan jalan yang perlu dilakukan di wilayah Kabupaten Asmat antara lain:

- a. Jaringan jalan arteri primer (K1) dengan status sebagai jaringan Jalan Nasional, yaitu Jalan Arteri Primer Ruas Jalan Agats – Tomor – Sagapu – Pasir Putih Kenyam.
- b. Rencana Jaringan Jalan Kolektor Primer (K2) dengan status jalan Provinsi yaitu Jalan terdiri atas:
 - 1) Ruas Jalan Sagapu– Suru-Suru - Dekai Kabupaten Yahukimo.
 - 2) Ruas Jalan Wowi - Binam – Binamsain - Logpon Kabupaten Yahukimo.
 - 3) Jaringan jalan kolektor sekunder (k3), status jalan kabupaten terdiri dari:
 - i. Ruas Jalan Binam - Mabul - Kabupaten Boven Digoel.
 - ii. Ruas Jalan Sogoni- Asgon Kabupaten Mappi.
 - iii. Ruas Jalan Suagai- Sahomani- Mur Kabupaten Mappi.
 - iv. Ruas jalan Ayam – Yaosakor – Atsy.
 - v. Ruas jalan Atsy – You.
 - vi. Ruas Jalan Atsy – Comoro.
 - vii. Ruas Jalan Comoro – Basim.
 - viii. Ruas Jalan Comoro – Kamur.
 - ix. Ruas Jalan Lingkar Luar Bayun – Pirimapun.
 - x. Ruas Jalan Yamas - Sawa Erma – Ayam – Komor.
 - xi. Ruas Jalan Lingkar Agats.
 - xii. Ruas Jalan Kamur – Yamkap.

Dengan memperhatikan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan, rencana pengembangan sistem jaringan jalan maka akan dikembangkan terminal angkutan penumpang untuk Kabupaten Asmat adalah pengembangan terminal Tipe C di Agats Distrik Agats, Tomor Distrik Suru-Suru, Wagano Distrik Atsy dan Binam Distrik Suator yang berfungsi sebagai terminal angkutan antar kota dalam kabupaten. Adapun arahan lokasi terminal tipe C adalah:

- a) Terletak di dalam wilayah Kabupaten dan dalam jaringan trayek pedesaan,
- b) Terletak di jalan kolektor atau lokal,
- c) Tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan,
- d) Mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar.

➤ **Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai dan Penyeberangan**

Berdasarkan pola permukiman penduduk di Kabupaten Asmat terbagi atas 2 macam yaitu pola permukiman penduduk linier mengikuti pola jaringan jalan dan pola permukiman penduduk yang mengikuti pola jaringan sungai. Berdasarkan kondisi ini disamping pengembangan transportasi darat untuk melayani distribusi manusia, barang dan jasa maka salah satu pengembangan transportasi di Kabupaten Asmat adalah transportasi sungai. Simpul utama dari pada transportasi sungai adalah pelabuhan laut. Adapun rencana pengembangan transportasi sungai mencakup:

a. Pelabuhan sungai, terdiri atas

- 1) Pelabuhan Sungai Pirimapun di Distrik Safan;
- 2) Pelabuhan Sungai Sipanap Distrik Kolf Braza;
- 3) Pelabuhan Sungai Fos Distrik Sirets;
- 4) Pelabuhan Sungai Kamur Distrik Pantai Kasuari;
- 5) Pelabuhan Sungai Hahare Distrik Kopay;
- 6) Pelabuhan Sungai Pirimapun Yankap Distrik Der Koumor;
- 7) Pelabuhan Basim Distrik Fayit;
- 8) Pelabuhan Yaosakor Distrik Sirets;
- 9) Pelabuhan Sungai Ewer di Distrik Agats;
- 10) Pelabuhan Sungai Warse di Distrik Jetsy;
- 11) Pelabuhan Sungai Binamzain di Distrik Kolf Braza; dan
- 12) Pelabuhan Sungai Pulau Tiga di Distrik Pulau Tiga

➤ **Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai dan Penyeberangan**

Salah satu moda transportasi massal yang mampu menjangkau wilayah-wilayah di Provinsi Papua adalah transportasi laut. Berdasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan, pengembangan sistem perhubungan laut meliputi upaya untuk sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi investasi pengembangan pelabuhan laut dengan memanfaatkan jalur pelayaran internasional;
- b. Meningkatkan kelancaran proses koleksi, distribusi dan mobilitas orang dan barang dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
- c. Meningkatkan aksesibilitas dari kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan pemasaran, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya;

- d. Meningkatkan volume perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor melalui pelabuhan-pelabuhan nasional dan internasional;
- e. Mengembangkan sistem jaringan transportasi laut antar provinsi, antar pulau, dan antar negara.

Rencana pengembangan transportasi laut di Kabupaten Asmat sebagai berikut:

1) Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Agats di Distrik Agats;

2) Pelabuhan pengumpan, terdiri atas:

- i. Pelabuhan Sogoni di Distrik Atsy;
- ii. Pelabuhan Bayun di Distrik Safan;
- iii. Pelabuhan Jinak di Distrik Suator;
- iv. Pelabuhan Yamas di Distrik Joerat;
- v. Pelabuhan Sawa Erma di Distrik Sawa Erma ;
- vi. Pelabuhan Akat di Distrik Akat;
- vii. Pelabuhan Atsy di Distrik Atsy;
- viii. Pelabuhan Binam di Distrik Suator;
- ix. Pelabuhan Wowi di Distrik Suator;
- x. Pelabuhan Mumugu di Distrik Sawa Erma;
- xi. Pelabuhan Komor di Distrik Unir Sirauw; dan
- xii. Pelabuhan Tomor di Distrik Suru-Suru

3) Alur pelayaran melalui jalur dari:

- i. Luar Papua Mimika – Agats - Merauke;
- ii. Agats – Logpon Kabupaten Yahukimo;
- iii. Agats – Pasir Putih Kabupaten Nduga

2.5.2. Telaah Rencana Pola Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; pengertian dari rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Hutan Lindung luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Asmat 2.384.660,32 Km² atau 86,5 % dari total luas wilayah dari Kabupaten Asmat yang tersebar seluruh distrik di Kabupaten Asmat. Hanya di bagian utara dari Kabupaten Asmat yang tidak terdapat Kawasan Hutan Lindung yaitu tepatnya di Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Atsj, Distrik Ayip, Distrik Betsbamu, Distrik Fayit, Distrik Jetsy, Distrik Joerat, Distrik Kopay, Distrik Pulau Tiga, Distrik Safan, Distrik Sawa Erma, Distrik Sirets, Distrik Suator, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Unir Sirauw.
2. Kawasan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi;
 - a. Kawasan Gambut. Pada Kabupaten Asmat ketebalan gambut ada yang mencapai 51 – 75 cm dan 200 – 300 cm. Kawasan Gambut tersebut terletak di Distrik Akat, Distrik Atsj, Distrik Ayip, Distrik Der Koumur, Distrik Fayit, Distrik Kolf Braza, Distrik Kopay, Distrik Pantai Kasuari, Distrik Pulau Tiga, Distrik Sawa Erma, Distrik Sirets, Distrik Suator, Distrik Suru-Suru, Distrik Unir Sirauw.
 - b. Rawa ada Kabupaten Asmat Kawan Rawa di Kabupaten Asmat dengan luas 443.871,60 Ha atau 16,10 % tersebar Distrik Agats, Distrik Atsj, Distrik Sawa Erma, Distrik Akat, Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, Distrik Suator, Distrik Unir Sirauw, Distrik Joerat, Distrik Pulau Tiga, Distrik Der Koumur, Distrik Safan, Distrik Sirets, Distrik Ayip, Distrik Betsbamu, dan Distrik Jetsy.
3. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi;
 - a. Sempadan sungai, kawasan sempadan sungai di Kabupaten Asmat tersebar di setiap distrik dengan luas kawasan sebesar 119.179,34 Ha atau 4,23 % dari luas total wilayah Kabupaten Asmat.
 - b. Sempadan Pantai, Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa peruntukan kawasan sempadan pantai di Kabupaten Asmat tersebar di Distrik Distrik Safan, Distrik Agats, dan Distrik Joerat.
 - c. Sempadan Mata Air, Penentuan kawasan perlindungan sekitar mata air ditetapkan disesuaikan dengan lokasi, volume dan fungsi utama. Perlindungan di sekitar mata air ini dimaksudkan melindungi secara langsung dari gangguan khususnya aktifitas manusia yang berakibat menurunnya kualitas mata air. Perlindungan setempat ini difokuskan kepada badan air dari mata air, perlindungan daerah tangkapan mata air atau *recharge area* ditekankan dalam perlindungan kawasan resapan air yang terletak di seluruh distrik. Untuk perlindungan setempat kawasan sekitar mata air ditetapkan mengelilingi mata air minimal radius 200 meter dari pusat mata air.

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, meliputi; Kawasan Pelestarian Alam di Kabupten Asmat sesuai dengan ketentuan PP No.26 Tahun 2008 dan persetujuan substansi kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2012 adalah Taman Nasional Lorentz, dengan luas 332.601,19 ha atau 12,06 persen Taman Nasional Lorentz tersebar di Distrik Pulau Tiga, Distrik Joerat, dan Distrik Sawa Ermayang tidak termasuk dalam Taman Nasional Lorent
5. Kawasan Rawan bencana alam, meliputi;
 - a. Wilayah Utara Kabupaten Asmat merupakan wilayah pesisir pantai yang berpotensi menjadi bahaya banjir, gelombang pasang, abrasi pantai Longsor dan perubahan iklim.
 - b. Kabupaten Asmat wilayah memiliki potensi rawan longsor tinggi meliputi Distrik Suru-suru, Distrik Akat, dan Distrik Suator
 - c. Wilayah Kabupaten Asmat yang memiliki potensi gelombang pasang berada di wilayah Pesisir pantai yaitu Distrik Pulau Tiga, Distrik Joerat, Distrik Agats, Distrik Betsbamu, Distrik Fayit, Distrik Safan dan Distrik Kopay.
 - d. Kawasan rawanabrasi dan sedimentasi tersebar di Distrik Kopay, Distrik Safan, Distrik Fayit, Distrik Bectbamu, Distrik Jetsy, Distrik Agats, Distrik Joerat, dan Distrik Pulau Tiga.
 - e. Kawasan rawan dampak perubahan iklim meliputi kawasan sepanjang pantai di Distrik Kopay, Distrik Safan, Distrik Fayit, Distrik Bectbamu, Distrik Jetsy, Distrik Agats, Distrik Joerat, dan Distrik Pulau Tiga.
6. Kawasan Hutan Produksi, meliputi;
 - a. Hutan produksi tetap, luas hutan produksi di Kabupaten Asmat adalah 30.931,11 ha atau 1,2 persen dari luas total kabupaten Asmat tersebar di Distrik Kolf Braza, Distrik Sawa Erma dan Distrik Suru-Suru.
 - b. Kawasan hutan produksi terbatas, luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Asmat adalah 279.466,77 ha atau 10,14%. Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Asmat hanya terdapat di Distrik Akat, Distrik Ayip, Distrik Der Koumur, Distrik Joerat, Distrik Kolf Braza, Distrik Kopay, Distrik Pulau Tiga, Distrik Sawa Erma, Distrik Sirets, Distrik Suator, dan Distrik Suru-Suru.
 - c. Kawasan hutan produksi konversi, luas kawasan hutan produksi konversi adalah 66,65 Km² atau 0,89 persen dari total luas wilayah Kabupaten Asmat.
7. Kawasan pertanian, meliputi kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Asmat direncanakan dikembangkan melalui pemanfaatan air sungai dengan pembangunan

jaringan irigasi. Jaringan irigasi di Kabupaten Asmat diarahkan pada irigasi setengah teknis dan sederhana. Kawasan pertanian lahan basah di Distrik Suru-Suru.

8. Kawasan peternakan, meliputi kawasan peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Asmat adalah kawasan budidaya ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing, domba, babi, kelinci), dan sentra peternakan unggas. Pengembangan kawasan peternakan dilakukan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian, yaitu di Distrik Sawa Erma, Distrik Suator, Distrik Atsy, Distrik Fayit, dan Pantai Kasuari.
9. Kawasan perikanan, meliputi;
 - a. Kawasan perikanan tangkap meliputi kawasan pesisir pantai yang merupakan kawasan perairan tangkap tradisional dan modern sampai batas 4 mil laut dari titik surut terendah.
 - b. Kawasan budidaya perikanan terdiri atas:
 - ❖ Perikanan air payau berupa penggemukan kepiting, meliputi: Kawasan Ewer, Yepem, Per dan Beritem di Distrik Agats; dan Kampung Omor di Distrik Joerat.
 - ❖ Perikanan air tawar, meliputi: Kampung Kamur, Amagais, di Distrik Pantai Kasuari; Kampung Kaimo, Fos, dan Yaosakor di Distrik Sirets; Kampung Agani di Distrik Sawa Erma; Kampung Atat dan As di Distrik Pulau Tiga Kampung Tomor di Distrik Suru-Suru; dan Kampung Binam di Distrik Suator.
 - c. Kawasan pengolahan hasil perikanan yaitu kawasan terpadu perikanan Omor di Distrik Joerat.
 - d. Kawasan pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Omor di Distrik Joerat.
10. Kawasan pertambangan, meliputi;
 - a. Pertambangan batuan berupa batu gamping di Distrik Suru-Suru, Distrik Sawa Erma, dan Distrik Suator.
 - b. Pertambangan batubara di Distrik Suru-Suru, Distrik Kolf Braza, dan Distrik Sawa Erma.
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Laut Arafuru dan Distrik Sirets.
11. Kawasan pariwisata, meliputi;
 - a. Kawasan potensi budaya di setiap distrik.
 - b. Kawasan museum kebudayaan Asmat di Distrik Agats.
 - c. Kawasan sekolah budi pekerti khas Asmat di Distrik Sawa Erma.
 - d. Kawasan agrowisata dan wisata pantai Pulau Tiga di Distrik Pulau Tiga.

- e. Kawasan Rawa Baki di Distrik Akat dan Distrik Suru-Suru.
 - f. Wisata khusus Taman Nasional Lorentz.
12. Kawasan pemukiman meliputi;
- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dapat diidentikkan dengan ibu kota distrik. Tingkat perkembangan masing-masing ibu kota distrik ini berada sesuai dengan fungsi dan potensi lokasinya. Perkotaan yang dalam perkembangannya terlihat cenderung akan lebih padat lagi adalah perkotaan Agat di Distrik Agats, Suru-Suru di Distrik Suru-Suru, dan Wowi di Distrik Suator.
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan, rencana kawasan permukiman perkampungan di Kabupaten Asmat direncanakan di seluruh kampung yang ada di dalam distrik.

2.6. RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN DAN PEDESAAN AGATS KABUPATEN ASMAT

Rencana Detail Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Asmat merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang disusun guna menjaga integritas, keseimbangan dan keserasian perkembangan perkotaan dan pedesaan dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Asmat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Pedesaan Agats, maka ditetapkan bahwa Wilayah Perencanaan WP Kawasan Perkotaan Agats ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas sebesar 1.253,15 H, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, dengan batas-batas delineasi WP I meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Mbait;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Bis Agats dan Kampung Kaye;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kaye dan Kampung Suwru; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Asuwetsy.

Adapun Delineasi WP I meliputi:

- a. sebagian Kampung Mbait;
- b. sebagian Kampung Bis Agats;
- c. sebagian Kampung Suwru;

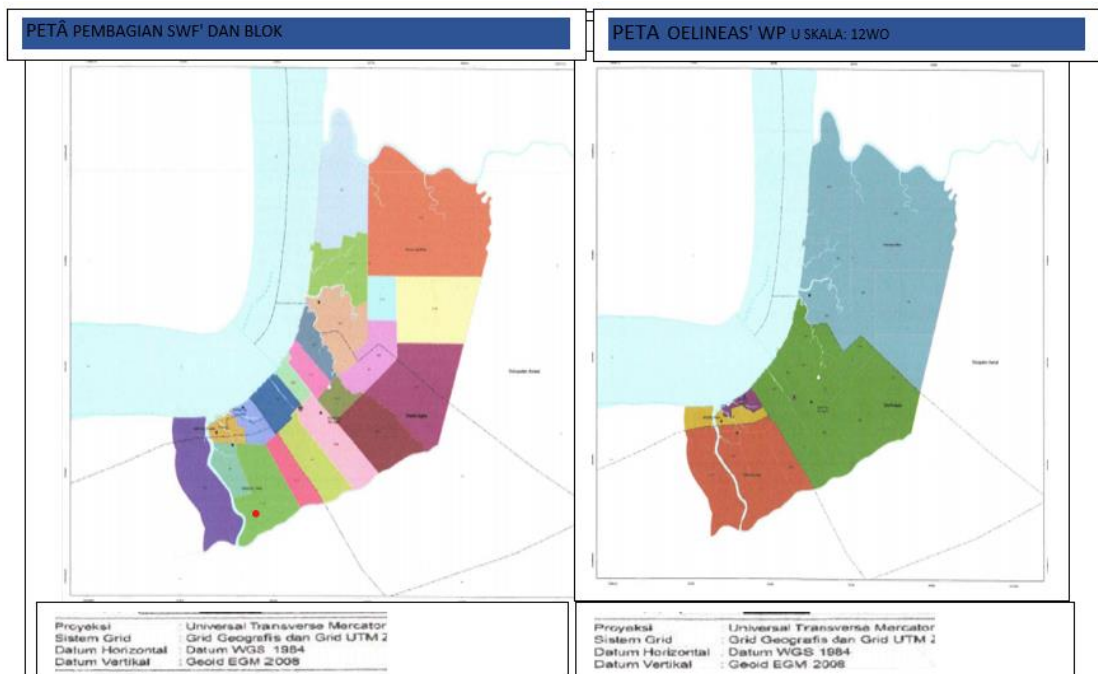
- d. sebagian Kampung Kaye; dan
- e. Kampung Asuwetsy.

Sub Wilayah Perencanaan pada Delineasi WP I masing-masing terdiri dari:

- a. SWP I.A, mencakup sebagian Kampung Mbait dan sebagian Kampung Bis Agats hektare, terdiri atas Blok I.A. 1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
- b. SWP LB, mencakup sebagian Kampung Bis Agats, sebagian Kampung Asuwetsy, dan Sebagian Kampung Kaye terdiri atas Blok LB. 1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
- c. SWP I.C, mencakup sebagian Kampung Asuwetsy, sebagian Kampung Suwru dan sebagian Kampung Kaye terdiri atas Blok I.C. 1, Blok I.C.2, Blok 1.C.3, Blok 1.C.4, Blok 1.C.5, dan Blok 1.C.6.

Secara detail Delineasi WP I digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, seperti pada peta dibawah ini:

Gambar 2. 54. Peta Wilayah Perencanaan dan Pembagian WF Kawasan Perkotaan/Pedesaan Agats kabupaten Asmat



Sumber: RDTR Kabupaten Asmat 2023

Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Asmat di akhir masa perodesasi Tahun 2021-2025 perlu memperhatikan RDTR dalam kesinambungan pembangunan guna membangun konsep pembangunan wilayah perkotaan/pedesaan yang terintegritas, seimbangan dan serasi sesuai perkembangan perkotaan dan pedesaan. Adapun Rencana Detail Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Asmat secara terperinci dalam pelaksanaannya untuk Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 dapat dipedomani sebagaimana pada Lampiran Tabel dibawah ini:

Tabel 2. 101. INDIKASI PROGRAM PEMANFATAN RUANG PRIORITAS

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER	INSTANSI
			PJM-I (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.	PERWUJUDAN RENCANA SRUKTUR RUANG													
1.1	RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN													
1.1. A	PUSAT PELAYANAN KOTA													
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	SWP I.A pada Blok I.A.4											APBN,APB D Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PU Kabupaten
2	Pembuatan RTBL PPK												APBD Kabupaten dan/atau	Dinas PU Kabupaten BP4K Kabupaten
1.1. B	SUB PUSAT PELAYANAN KOTA													

1	Pengembangan sub pusat pelayanan kota SPPK	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B.pada Blok I.B.3 SWP I.c pada Blok I.C.4											APBD Kabupaten dan/atau	Dinas PU Kabupaten
2	Pembuatan RTBL SPPK												APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten
1.1. C	PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN													
1	Pengembangan PL kecamatan	SWP I.B pada Blok 1.B.7											APBD Kabupaten san/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah	Dinas PU Kabupaten, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung dan/atau Swasta.

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
2	Pengembangan PL kelurahan	SWP I.A pada Blok I.A.1 SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2												APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah	Dinas PU Kabupaten, Pemerintah Kampung dan/atau Swasta.
I.2	RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI														
I.2.A	JALAN UMUM														
I.2.A.1	JALAN LOKAL PRIMER														
1	Pembangunan jaringan jalan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C												APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
2	Pemeliharaan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C												APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
I.2.A.2	JALAN LOKAL SEKUNDER														

1 Pembangunan jaringan jalan baru/3

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pembangunan jaringan jalan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
2	Pemeliharaan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
I.2.A.3	JALAN LINGKUNGAN PRIMER													
1	Pembangunan jaringan jalan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
2	Pemeliharaan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
I.2.A.4	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER													

1 Pembangunan jaringan jalan baru/4

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pembangunan jaringan jalan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
2	Pemeliharaan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta.
I.2.B	TERMINAL PENUMPANG													
1	Pembangunan terminal type C	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta
I.2.C	JEMBATAN													
1	Pembangunan dan pemeliharaan jembatan	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Dinas PU Kab. Asmat dan/atau Swasta.

1.2.D ALUR PELAYARAN SUNGAI DAN ALUR PELAYARAN DANAU/5

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
I.2.D	ALUR-PELAYARAN SUNGAI DAN ALUR-PELAYARAN DANAU													
1	Pengembangan dan Pemeliharaan alur-pelayaran kelas I	Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau kelas I											APBN, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, dan/atau Swasta.
2	Pengembangan dan Pemeliharaan alur-pelayaran kelas III	Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau kelas III											APBN, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, dan/atau Swasta.
I.2.E	LINTAS PENYEBERANGAN													
1	Pemeliharaan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi	Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi											APBN, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, dan/atau Swasta.
1	Pemeliharaan lintas penyeberangan dalam kabupaten	Lintas penyeberangan dalam kabupaten											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, dan/atau Swasta.
I.2.F	PELABUHAN PENYEBERANGAN													

1 Pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas I/6

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas I	SWP I.B pada Blok I.B.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.
I.2.G	PELABUHAN PENGUMPUL													
1	Pengembangan/Pemeliharaan pelabuhan pengumpul	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.
I.2.H	PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU PENGUMPAN													
1	Pembangunan/Pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.
I.3	RENCANA JARINGAN PRASARANA													
I.3.A	RENCANA JARINGAN ENERGI													

I.3.4.1 INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN LISTRIK DAN SARANA PENDUKUNG/7

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
I.3.A.1	INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN LISTRIK DAN SARANA PENDUKUNG													
1	Pemeliharaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
I.3.A.2	JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK													
1	Pemeliharaan dan pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
2	Pemeliharaan dan pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
I.3.A.3	JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK													
1	Pemeliharaan gardu hubung	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pemeliharaan dan pengembangan gardu distribusi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6 SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7 SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
I.3.B	RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI													
I.3.B.1	JARINGAN BERGERAK SELULER													
1	Pemeliharaan dan pengembangan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6 SWP I.B pada Blok I.B.2 Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 SWP I.C pada Blok I.C.5											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informasi, PT. Telkom Indonesia, Pemda dan/atau Swasta

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
I.3.C	RENCANA JARINGAN AIR MINUM													
I.3.C.1	JARINGAN PERPIPAAN													
I.3.C.1.a	Unit Distribusi													
1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.C.1.b	Unit Pelayanan													
1	Pemeliharaan hidran umum	SWP I.A pada Blok I.A.3. SWP I.C pada Blok I.C.3.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta

Pengembangan hidran kebakaran/10

NO.	PROGRAM PEMANFAAT AN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER	INSTANSI
			PJM-I (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pengembang an hidran kebakaran	SWP 1.A pada Blok LA. 1, Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, Blok 1.A.4, Blok 1.A.5, Blok 1.A.6, Blok 1.A.7, Blok 1.A.8 SWP 1.B pada Blok 1.B.2 Blok 1.B.3, Blok 1.B.4, Blok 1.B.5, Blok											APBD Kabupaten san/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah	Dinas PU Kabupaten, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung dan/atau Swasta.

		I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8 SWP 1.C pada Blok I.c.1, Blok I.c.2, Blok I.c.3, Blok I.c.5, Blok I.c.6.												
1.3.c.2	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN													
1	Pemeliharaan n Sumur Pompa	SWP LA pada Blok I.A.3. SWP I.C pada Blok I.C.3.											APBD Kabupaten san/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah	Dinas PU Kabupaten, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung dan/atau Swasta.

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pemeliharaan bak penampungan air hujan	SWP I.C pada Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.D	RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)													
1	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa tinja	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa IPAL Kota	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten dan/atau Swasta

I.3.E RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN/12

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I (20232024		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030- 2034)	PJM-4 (2035- 2039)	PJM-5 (2040- 2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.3.E	RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN													
	Pengembangan kapasitas tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)	SWP I.B pada Blok I.B.8											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan / atau sumber Pembiayaan lain an sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta

2	Pengembangan tempat penampungan sementara (TPS)	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.7; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6; dan SWP I.c pada Blok I.c.2.										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/ atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/ atau Swasta
3	Penambahan alat angkut sampah	SWP LA, SWP I.B dan SWP I.c										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/ atau sumber Pembiayaan lain an sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/ atau Swasta
1.3.F	RENCANA JARINGAN DRAINASE												

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pemeliharaan jaringan drainase primer	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
3	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G	RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA													
I.3.G.1	JALUR EVAKUASI BENCANA													
	Pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G.2	TEMPAT EVAKUASI BENCANA													

} Pengembangan tempat evakuasi sementara/14

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pengembangan tempat evakuasi sementara	SWP I.A pada Blok I.A.7 SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C pada Blok I.C.1.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan tempat evakuasi akhir	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G.3	JALUR SEPEDA													
1	Pengembangan jalur sepeda	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G.4	JARINGAN PEJALAN KAKI													
1	Pengembangan jaringan pejalan kaki	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
I.3.G.5	TANGGUL PENAHAN LONGSOR													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER	INSTANSI
			PJM-I (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pengembangan / Penambahan tanggul penahan longsor	SWP LA, SWP I.B,dan SWP I.C											APBD Kabupaten san/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah	Dinas PU Kabupaten, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung dan/atau Swasta.
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG													
II.1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG													
II.1.A	ZONA HUTAN LINDUNG HL													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pelepasan kawasan hulan lindung	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8 SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8 SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
II.1.B	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)													
1	Pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai dan sempadan pantai	SWP I.A pada Blok I.A.2 SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
II.1.B.1	PERWUJUDAN ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I (20232024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP 1.A pada Blok LA. 1, Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, Blok 1.A.4, dan Blok 1.A.7 SWP 1.B pada Blok 1.B.5, Blok 1.B.6, dan Blok 1.B.8 swp 1.c pada Blok 1.c.3, Blok 1.c.4, Blok 1.05, dan Blok 1.c.6											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/ atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, BP4D Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/ atau Swasta
II.1.C	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU RTH													

	Pengembangan RTH Rimba Kota (RTH- 1)	SWP i.A pada Blok i.A.7 SWP i.B pada Blok i.B.5, Blok i.B.6, dan Blok i.B.8 SWP i.c pada Blok i,c.3, Blok i.c.4 Blok 1.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan / atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan atau Swasta
2	Pengembangan RTH Taman Kota (RTH-2)	SWP i.B pada Blok IB.2, Blok i.B.4, dan Blok i.B.6. SWP i.c pada Blok i.c,5.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan / atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan atau Swasta

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I (20232024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030- 2034)	PJM-4 (2035- 2039)	PJM-5 (2040- 2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
3	Pengembangan dan pemeliharaan RTH Pemakaman (RTH-7)	SWP I.A pada Blok LA. 1. SWP 1.B pada Blok 1.B. 1. SWP 1.c pada Blok 1.c. 1											APBD Kabupaten, dan/ atau sumber pembiayaan lain an sah	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan atau Swasta
4	Pengembangan dan pemeliharaan RTH Jalur Hijau (RTH-8)	SWP 1.B pada Blok 1.B.6. SWP 1.C pada Blok 1.C.2.											APBD Kabupaten, dan/ atau sumber pembiayaan lain an sah	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan atau Swasta
11. 1.c.1	PERWUJUDAN ZONA RUANG TERBUKA HIJAU PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													

I	Perwujudan RTH Rimba Kota (RTH- 1) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP 1A pada Blok LA. 1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/ atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, BP4D Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/ atau Swasta
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Perwujudan RTH Taman Kota (RTH-2) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, BP4D Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA													
II.2.A	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)													
1	Pengembangan zona Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP I.A pada Blok I.A.3.											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
II.2.A.1	PERWUJUDAN ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													
1	Perwujudan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.3.											APBN, APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	PLN, Pemda dan/atau Swasta
II.2.B	ZONA PARIWISATA													

1 Pengembangan/Pemeliharaan Museum Asmat/20

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pengembangan/Pemeliharaan Museum Asmat	SWP I.B pada Blok I.B.5 SWP I.C pada Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.C	ZONA PERUMAHAN													
II.2.C.1	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)													
1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.6. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan perumahan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta

3 Pengembangan RTH privat/21

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
3	Pengembangan RTH privat	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.C.3	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)													
1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7 SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.7, Blok I.B.8 SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
2	Pengembangan perumahan baru	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta

3. Pengembangan RTH privat/22

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)			PJM-5 (2040-2043)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
3	Pengembangan RTH privat	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.C.4	PERWUJUDAN SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													
1	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8. SWP I.B pada Blok I.B.8. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6.											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja, Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.D	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)													
II.2.D.1	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)													

I Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kota /23

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
II.2.D.4	PERWUJUDAN SUB-ZONA SPU KECAMATAN (SPU-2) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													
1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.D.5	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)													
1	Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C pada Blok I.C.2.											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.E	ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU													
1	Pembangunan/pengembangan plaza (anjungan)	SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.											APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.F	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA													
II.2.F.1	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030- 2034)	PJM-4 (2035- 2039)	PJM-5 (2040- 2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pemeliharaan/pengembangan Pasar Umum (Induk)	SWP I.B pada Blok I.B.1											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/ atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKNI dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten dan atau Swasta
11.2.F.2	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA VIP K-2													

1	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan/jasa skala WP	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7 SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, dan Blok I.C SWP I.c pada Blok I.C. I.											APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan / atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten dan/ atau Swasta
11.2.F.3	PERWUJUDAN SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	2039	2043		
	Perwujudan sub-zona perdagangan dan jasa skala 1NP (K-2) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP LA pada Blok 1.A.2, Blok 1.A.4, Blok 1.A.5, Blok 1.A.6, Blok 1.A.7, dan Blok 1.A.8											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan / atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/ atau Swasta
11.2.F.4	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP K-3													
I	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan/jasa skala SWP	SWP 1.A pada Blok 1.A.1 SWP 1.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok											APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/ atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKNI dan Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Perindustrian,

		1.B.3, Blok 1.B.4j Blok 1.B.7 SWP 1.c pada Blok 1.c. 1, Blok 1.c.2.												Perdagangan dan Koperasi Kabupaten dan/ atau Swasta
11.2.G	ZONA PERKANTORAN													
1	Pemeliharaan / pengembangan kantor Distrik dan Balai/ Kantor Kampung dan kantor pemerintah lainnya.	SWP 1.A pada Blok 1.A.2 SWP 1.B pada Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, Blok 1.B.4, Blok 1.B.5, Blok 1.B.7 SWP 1.c pada Blok 1.C. 1, Blok 1.C.3 Blok 1.c.5.											APBD Kabupaten, dan/ atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I (2023-2024		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Pengembangan perkantoran non pernerintah	SWP I.A pada Blok 1.A.2 SWP I.B pada Blok LB.2, Blok LB.3, Blok I.B.4, Blok 1.B.5, Blok 1.B.7 SWP I.c pada Blok I.c.I, Blok I.C.3 Blok I.C.5.											APBN, APBD Kabupaten, dan / atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta
11.2.G.1	PERWUJUDAN ZONA PERKANTORAN PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													
1	Perwujudan zona perkantoran pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok 1.A.3, Blok 1.A.4											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/ atau sumber	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten clan/ atau

												pembiayaan lain an sah	Swasta
11-2.H	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
1	Pengembangan sarana dan prasarana TPS3R	SWP I.B pada Blok 1.B.8										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain an sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, dan/atau Swasta
11.2.1	ZONA TRANSPORTASI												
11.2.1.1	TERMINAL PENUMPANG												

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pembangunan terminal penumpang type C	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.1.2	PELABUHAN PENYEBERANGAN													
1	Pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas I	SWP I.B pada Blok I.B.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.
II.2.1.3	PELABUHAN PENGUMPUL													
1	Pengembangan/pemeliharaan Pelabuhan pengumpul	SWP I.A pada Blok I.A.2											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR., Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Dinas PU Kab. Asmat, dan/atau Swasta.

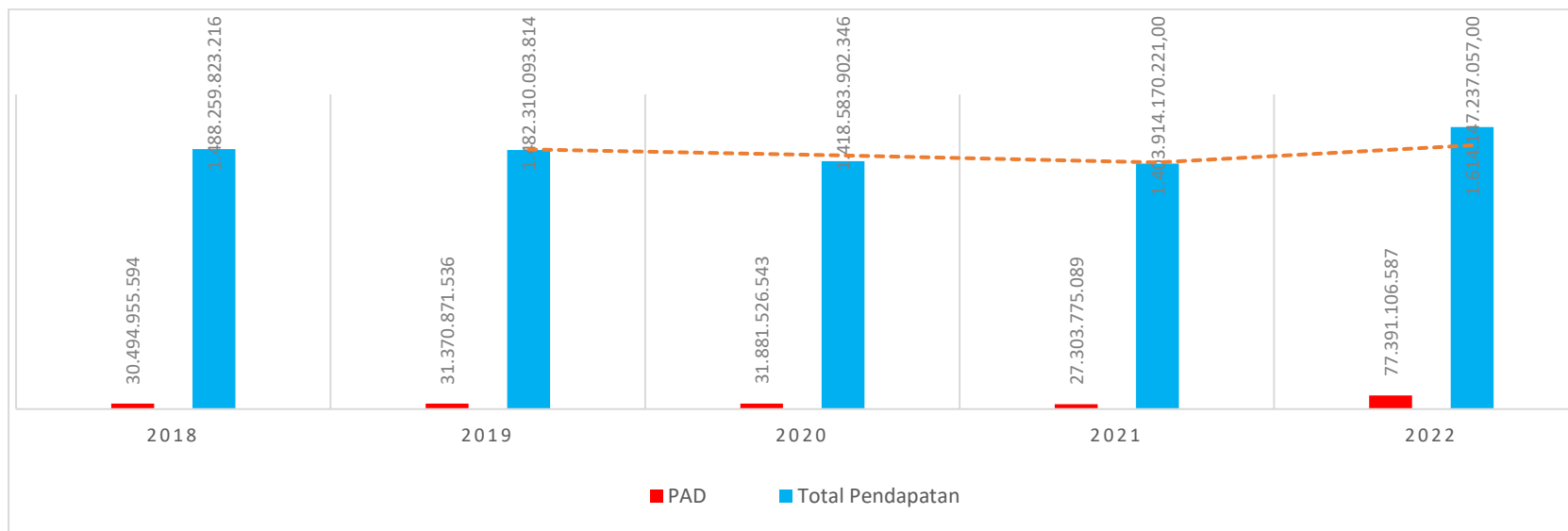
NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
II.2.I.4	PERWUJUDAN ZONA TRANSPORTASI PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													
1	Perwujudan zona transportasi pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.3 SWP I.B pada Blok I.B.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.J	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANANAN													
1	Pemeliharaan/pengembangan kawasan militer	SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4											APBN, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pertahanan, TNI.
II.2.K	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA													
II.2.K.1	SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)													
1	Pemeliharaan/pengembangan IPAM	SWP I.C pada Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
II.2.K.2	PERWUJUDAN SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													
1	Perwujudan sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWPI.C pada Blok I.C.5											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.K.3	PERWUJUDAN SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													
1	Perwujudan sub sub-zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWPI.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta
II.2.K.4	SUB-ZONA PERGUDANGAN													

1 Pengembangan sarana dan prasarana pergudangan/31

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)		PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pengembangan sarana dan prasarana pergudangan	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber Pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan/atau Swasta
II.2.K.5	PERWUJUDAN SUB-ZONA PERGUDANGAN PADA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN													
1	Perwujudan sub-zona pergudangan pada perubahan fungsi kawasan hutan	SWP I.A pada Blok I.A.3											APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KLHK, Dinas LHK Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BP4D Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Swasta

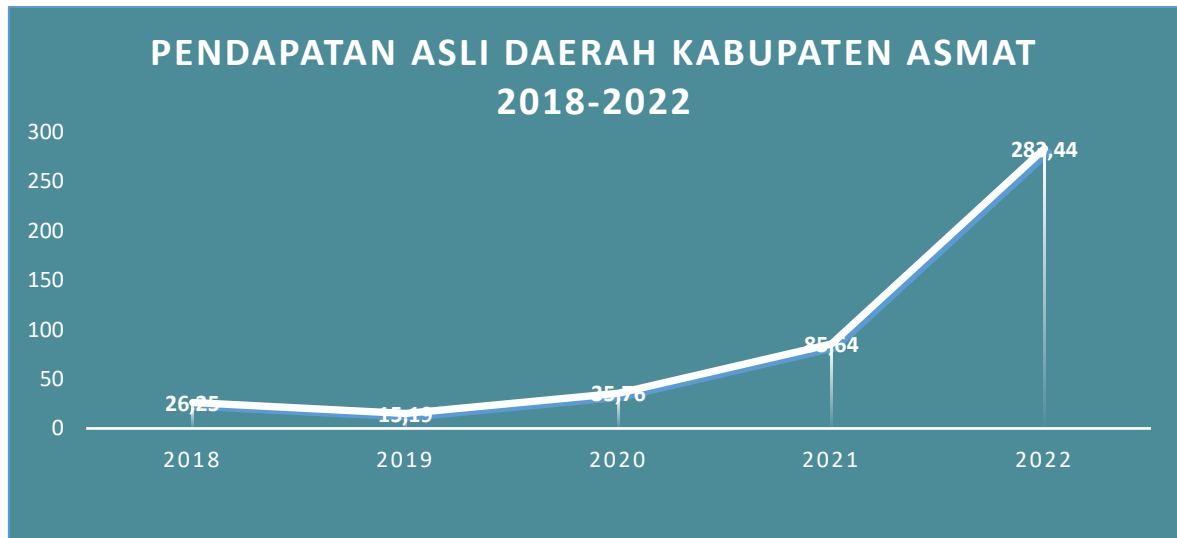
Gambar 2. 55. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2018-2022



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Asmat 2022, diolah

Progress Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asmat

Gambar 2. 56. Grafik PAD Kabupaten Asmat Tahun 2018-2022



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Asmat 2022, diolah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS DAERAH

Pembangunan Daerah Jangka Panjang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Asmat perodesasi Tahun 2025-2045, merupakan lanjutan pembangunan jangka panjang decade sebelumnya yaitu Tahun 2005-2025, dimana dari hasil-hasil dana tau progress pembangunan tahun 2005-2025 yang telah di capai sampai dengan Tahun 2022 pada Tahapan akhir RPJPD Tahun 2005-2025. Dimana hasil capaian pembangunan kurun waktu 20 tahun yang telah di laksanakan merupakan awal kondisi yang di jadikan Pemerintah Kabupaten Asmat dalam membenahi kondisi pembangunan daerah Jangka Panjang Tahun 2025-2045 kurun waktu 20 tahun ke depan, dimana proses penentuan permasalahan dan issue strategis yang dirumuskan Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, dilakukan melalui berbagai Proses pelaksanaan forum perencanaan pembangunan, baik antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Asmat lingkup pemerintah Kabupaten Asmat maupun antar Kabupaten yang bergabung dalam Provinsi Papua Selatan serta pelaksanaan musrenbang pembangunan Asmat.

Adapun permasalahan Pembangunan sesuai kondisi diatas dilakukan secara berproses dan simultan dengan Provinsi Papua Selatan, dimana pada RPJPD Tahun 2025-2045 Pemerintah Kabupaten Asmat masih bergabung dengan Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk, sehingga terdapat beberapa kondisi penyesuain yang dilakukan. Adapun permasalahan dan isu-isue strategis yang dirumuskan pemerintah Kabupaten Asmat dalam RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat Tahun 2005-2025, hingga saat ini, terdapat "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang

dicapai dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dengan kondisi riil saat perencanaan dirumuskan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya permasalahan pembangunan yang memberikan dampak signifikan dari pada hasil realisasi pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, untuk memperkecil gap atau bahkan menghilangkan gap tersebut, berbagai permasalahan pembangunan harus segera diselesaikan.

Permasalahan pembangunan jangka panjang daerah Asmat hasil merupakan rumusan masalah yang memiliki dampak tertinggi bagi masyarakat dan daerah, baik itu berupa hambatan maupun tantangan yang harus diselesaikan dengan tetap memerhatikan sumberdaya dan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Asmat. Perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Asmat dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Kabupaten Asmat di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya bersama dengan pengembangan seluruh potensi yang dimiliki. Adapun permasalahan pokok sesuai hasil evaluasi RPJPD Tahun sebelumnya, yang telah diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut:

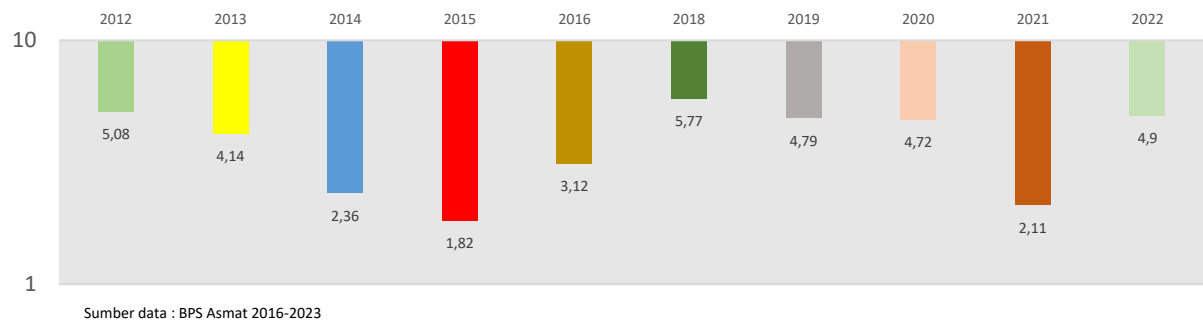
- a. Rendahnya kualitas perekonomian dan Pendapatan Masyarakat;
- b. Rendahnya kualitas dan minimnya pemerataan layanan sarana dan prasarana infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang
- c. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan
- d. Rendahnya Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Adapun penjabaran secara detail permasalahan pokok menjadi masalah dan akar masalah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Asmat, sebagai berikut :

1. Rendahnya Kualitas perekonomian dan Pendapatan Masyarakat

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Kabupaten Asmat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi meskipun tidak

signifikan. Jika dilihat perbandingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat sejak tahun 2016 sd 2022 berfluktuasi, dimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,09 persen.



Belum optimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor andalan utama. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal, akibat masih sedikitnya realisasi nilai investasi di Kabupaten Asmat. Pada sisi lain, produktivitas tenaga kerja juga menjadi determinan yang perlu diperhatikan, karena semakin besar produktivitas tenaga kerja berdampak positif pada semakin besarnya nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek kekuatan dan keadilan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dinilai dari tingkat inflasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang adil dinilai dengan indeks gini. Jika dilihat dari PDRB/kapita (ADHB/tanpa tambang) pada tahun 2022 sebesar Rp. 25. 419. 569,13, lebih rendah dari rata-rata Papua dan nasional, dimana untuk mendukung visi RPJPN 2025-2045 yakni pendapatan setara dengan negara maju maka PDRB/kapita pada 2045 ditargetkan sekitar US\$ 11.906/tahun atau sekitar Rp. 180 juta/tahun). Kondisi disebabkan rendahnya pendapatan masyarakat akibat dari rendahnya produktivitas masyarakat.

Adapun rincian akar masalah penyebab rendahnya kualitas perekonomian dan Pendapatan Masyarakat, sebagai berikut:

1. Pengembangan produksi serta pemasaran komoditas pertanian masih banyak kendala akibat kurangnya sarana prasarana pertanian, sumber daya manusia masih rendah dan tenaga penyuluh kurang.
2. Pengelolaan rantai nilai komoditas unggulan belum optimal (yang diakibatkan oleh pembiayaan operasional yang tinggi, transportasi dan aksesibilitas yang kurang memadai, pemasaran yang kurang, permodalan yang kurang, regulasi yang belum mendukung dan lembaga masyarakat yang belum diberdayakan).
3. Promosi dan penjualan karya seni masyarakat menurun terkendala harga jual yang tergolong tinggi dan pemasaran keluar yang kurang optimal.
4. Pemanfaatan lahan dan pengelolaan Komoditas Pertanian berbasis kearifan lokal belum banyak diadopsi.
5. Pendanaan untuk pengembangan ekonomi masyarakat masih kurang akibat belum optimalnya dana Alokasi Dana Desa.
6. Regulasi terkait pengelolaan retribusi dan iuran bagi pelaku ekonomi masih kurang.
7. Konektivitas antar wilayah yang terbatas akibat faktor geografis dan infrastruktur perhubungan yang kurang memadai.

2. Rendahnya Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Rendahnya kualitas SDM telah menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah. Dimana hal ini merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini tidak hanya berkaitan dengan Pendidikan, seperti : a). Adanya kesenjangan pendidikan, sistem pendidikan yang tidak merata menyebabkan perbedaan mutu pendidikan antar distrik/wilayah, menciptakan kesenjangan dalam kualitas SDM. adanya perbedaan akses dan mutu pendidikan menciptakan ketidaksetaraan kualitas SDM antar distrik/wilayah. B). Adanya ketidaksesuaian keterampilan; dimana data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sejumlah besar lulusan mengalami kesulitan menemukan pekerjaan sesuai dengan bidang studi

mereka. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja baik di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan berbagai jenjang pendidikan.

Jika dilihat dari perbandingan kualitas sumber daya manusia yang tergambarkan dalam perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar kabupaten/kota se-Provinsi Papua Selatan, maka terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Asmat berada di posisi paling bawah dengan kategori rendah, dimana sampai dengan tahun 2022 IPM Kabupaten Asmat sebesar 52,22 persen diantara 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, dimana posisi tertinggi berada di kabupaten Merauke sebesar 71,24 persen. IPM Kabupaten Asmat pada tahun 2005 sebesar 47,20 dan meningkat sebesar 5,02 persen selama kurun waktu perodesasi 2005-2010, dengan hanya bertambah rata-rata pertumbuhan sebesar 9,03 persen setiap tahun.

Disisi lain, berdasarkan data BPS 2021, sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Asmat memiliki pendidikan yang rendah. Jumlah penduduk yang bekerja dengan lulusan SD dan tidak lulus SD pada tahun 2020 adalah sebanyak 37.643 orang atau sebesar 73,57 persen dari penduduk yang bekerja, sementara itu penduduk yang bekerja dengan status pendidikan diploma/sarjana pada tahun 2020 adalah sebanyak 5.532 orang (10,81 persen). c). Kurangnya investasi dalam Pengembangan SDM: Kondisi ini Data keuangan pemerintah Kabupaten Asmat menunjukkan bahwa investasi dalam sektor pendidikan masih belum memadai. Hal ini tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asmat, alokasi anggaran untuk pendidikan belum mencapai target yang diinginkan untuk meningkatkan kualitas SDM secara signifikan, kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya dana untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan sehingga menciptakan hambatan dalam pengembangan kualitas dan

skill SDM di Kabupaten Asmat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kondisi aspek daya saing daerah Kabupaten Asmat terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

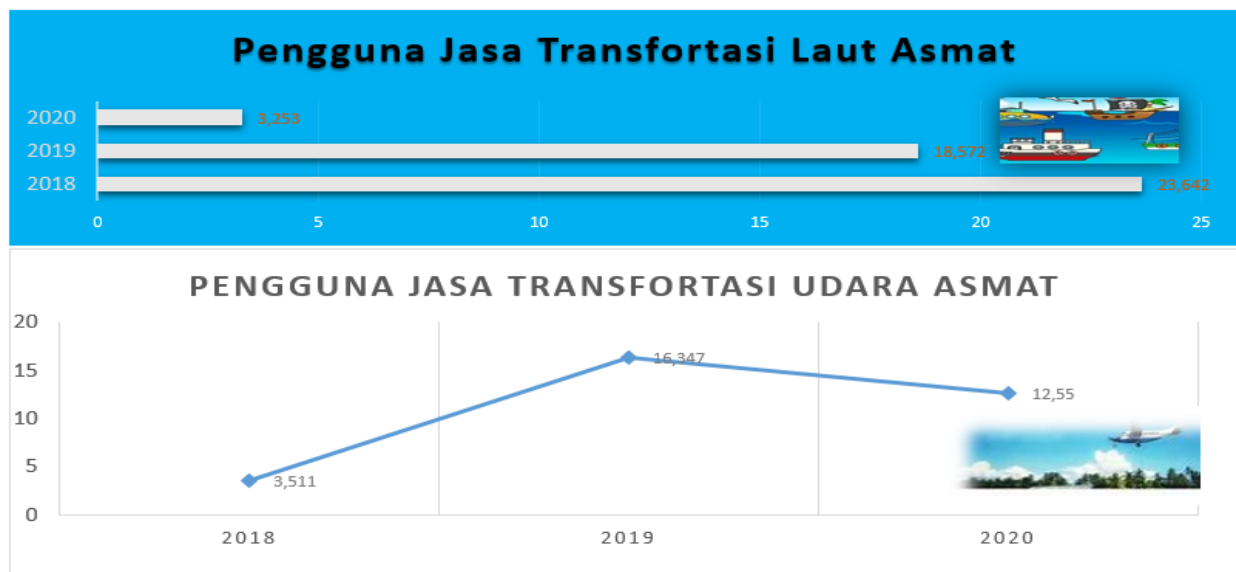
3. Rendahnya kualitas dan minimnya pemerataan layanan sarana dan prasarana infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Asmat untuk berdaya saing tinggi menjadi kunci dalam menempatkan Asmat sebagai kabupaten yang maju di Indonesia Timur khususnya di Provinsi Papua Selatan. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Kabupaten Asmat siap menghadapi berbagai tantangan daerah, nasional maupun globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, dimana untuk memperkuat daya saing daerah, maka pembangunan daerah kabupaten Asmat dalam jangka panjang salah satunya diarahkan untuk membangun infrastruktur yang mendorong konektivitas antar distrik, wilayah maupun antar daerah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan.

Ketersediaan sarana prasarana infrastruktur merupakan fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Pada tahun 2014 sepanjang 204,77 km, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sepanjang 257,33 km. Angkutan laut dan sungai adalah salah satu sarana transportasi utama yang digunakan di Kabupaten Asmat. Jumlah pengguna jasa transportasi sungai di Kabupaten Asmat dapat dikatakan fluktuatif. Pada tahun 2019 sebanyak 3.532

orang, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebanyak 1256 orang. Angkutan udara menjadi salah satu alternatif mobilitas barang dan penduduk di Kabupaten Asmat mengingat kondisi geografis Kabupaten Asmat yang berupa perairan dan masih memiliki hutan yang luas. Untuk mobilisasi penduduk di tingkat Provinsi Papua, penduduk di Kabupaten Asmat menggunakan transportasi udara melalui Bandara Ewer.

Gambar 3. 1. Sarana Transportasi, panjang jaringan jalan, jmlah penggunaan jasa transportasi laut Pengguna jasa transportasi udara Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Asmat, 2020

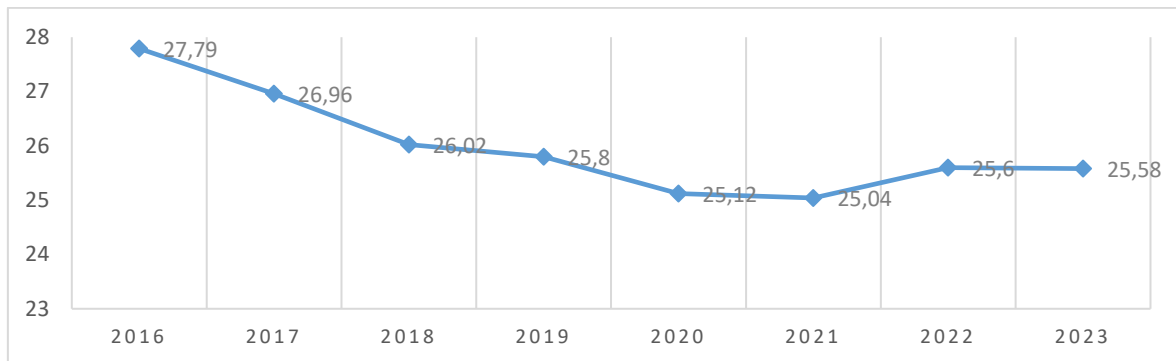
Pengembangan akses jalur penerbangan pada pembangunan Bandara Udara Ewer di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan menjadi salah satu opsi mengakses kota ini, sehingga bandara ini mampu menjembatani penerbangan kargo melalui jembatan udara, melayani kebutuhan transportasi masyarakat setempat, serta mengoptimalkan potensi wisata lokal. Hal ini diharapkan mampu mengembangkan Konektivitas yang dapat mempercepat mobilitas masyarakat dan barang serta dapat membuka membuka isolasi wilayah. Namun kondisi sarana prasarana belum memadai di Kabupaten Asmat dengan masih banyaknya akses untuk darat, laut dan udara yang belum di kelola sehingga daya saing daerah masih rendah.

4. Tingginya Angka kemiskinan dan ketimpangan

Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar bagi masyarakat Papua. Dalam publikasi angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik, dimana Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Jika dibandingkan pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat sebesar 9,57 persen atau bertambah sebanyak 0,20 juta orang. Kontribusi kondisi wilayah Provinsi Papua Selatan dengan jumlah angka kemiskinan Tahun 2022 sebesar 25,6 persen.

Pada tahun 2016-2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Asmat termasuk tinggi. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Asmat adalah sebesar 27,79 persen dan pada tahun 2020 persentasenya mengalami penurunan menjadi sebesar 26,96 persen dan pada tahun 2022 sebesar 24,87 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Asmat selama periode tersebut terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 39,77 persen, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2017 yang hanya sebesar 25,49 persen. Penurunan persentase dalam pengukuran terakhir yang dilakukan oleh BPS mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat cukup berhasil mengentaskan penduduknya dari kemiskinan, bahkan pada pengukuran terakhir telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Selatan yang sebesar 26,64 persen. Di tingkat Provinsi Papua pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Asmat berada pada posisi 11 dari 29 kabupaten/kota dimana kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Deiyai yang mencapai 41,76 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Merauke yaitu hanya 10,10 persen pada Tahun 2022.

Gambar 3. 2. Penduduk Miskin Asmat Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Asmat, 2024 (diolah)

Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangannya yang berarti bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi masyarakat miskin semakin berat. Kondisi indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Asmat mengalami fluktuasi, dimana tahun 2020 sebesar 1,44 persen. tahun 2021 sebesar 0,75 persen dan tahun 2022 sebesar 0,91 persen.

5. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kinerja pengelolaan keuangan sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini akan memaparkan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat. Deskripsi tersebut juga akan disertai dengan telaah dokumen RPJMD Provinsi Papua, RPJPD Kabupaten Asmat, RTRW Kabupaten Asmat dan juga RPJMD daerah sekitar, serta isu nasional dan internasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dokumen-dokumen perencanaan di atas, isu-isu strategis daerah akan dirumuskan dan disajikan pada bagian akhir bab ini.

Adapun identifikasi terhadap permasalahan Pembangunan pada urusan wajib dan urusan pilihan di Kabupaten Asmat. Sebagai berikut:

3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar meliputi enam urusan yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pemetaan permasalahan tiap urusan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

3.1.1.1. Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Asmat hingga tahun 2022 masih dihadapkan dua masalah pokok, yaitu: rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya akses pendidikan. Secara lebih rinci, permasalahan pembangunan urusan pendidikan telah dikategorikan berdasarkan level permasalahan berikut ini:

Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Terbatasnya moda transportasi menuju sekolah
		Minimnya sarana penunjang kegiatan pengajaran (buku, alat peraga, alat lab dll)
		Rendahnya ketersediaan ruang kelas yang tidak memadai
	Komitmen guru untuk berada di tempat tugas rendah	Kurangnya kesadaran guru untuk mengajar di distrik terpencil
		Distribusi guru yang tidak merata di setiap distrik
		Rendahnya tingkat kesejahteraan guru seperti

		kurangnya perumahan guru yang memadai.
	Belum optimalnya motivasi siswa untuk bersekolah	Rendahnya dorongan orang tua tentang pentingnya pendidikan
		Lemahnya upaya dalam menarik minat siswa terutama yang rumahnya jauh dari sekolah
	Belum meratanya kualitas tenaga pendidik	Banyaknya guru yang tidak berasal dari latar belakang pendidikan keguruan
		Minimnya guru berpendidikan Sarjana
		Banyaknya guru yang belum tersertifikasi
	Belum optimalnya tata kelola pendidikan	Lemahnya kapasitas dan komitmen kepala sekolah dalam manajemen sekolah
		Belum maksimalnya pengelolaan Dana BOS

3.1.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan Kabupaten Asmat masih dihadapkan masalah pokok yaitu tingginya tingkat kesakitan masyarakat, juga Masih tingginya angka prevalensi stunting serta masih rendahnya kepatuhan masyarakat Masalah pokok tersebut disebabkan beberapa hal seperti di dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Belum meratanya ketersediaan tenaga medis	Minimnya ketersediaan dokter spesialis
		Minimnya ketersediaan petugas teknis radiografer, teknik elektromedis, rekam medik, analis, dan ahli farmasi
		Mininya tenaga tetap medis
		Minimnya pelatihan khusus bagi tenaga medis
		Ketersediaan tenaga medis di distrik-distrik tidak proporsional
	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Fasilitas kesehatan di beberapa distrik masih belum maksimal
		Minimnya peralatan kesehatan di Puskesmas distrik
		Minimnya jumlah ambulan atau alat transportasi kesehatan (ambulan air)
		Seringnya keterlambatan stok obat-obatan, baik di RSUD maupun Puskesmas akibat sulitnya akses distribusi
		Terbatasnya fasilitas kesehatan (puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dll)
	Rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat	Rendahnya kualitas sanitasi di lingkungan keluarga
		Tidak adanya pengolahan limbah rumah tangga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	(PHBS) masyarakat	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pola konsumsi masyarakat.
		Rendahnya pengetahuan penggunaan dosis obat
	Rendahnya kualitas pelayanan terhadap Ibu, Bayi, dan Anak	Lemahnya pemantauan terhadap perkembangan ibu saat mengandung
		Belum optimalnya sistem penanganan proses persalinan
		Belum optimalnya pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti proses persalinan melalui tenaga kesehatan modern

3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur dasar daerah merupakan unsur penting yang menunjang aktivitas perekonomian, sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu identifikasi permasalahan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Asmat.

Tabel 3. 3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya ketersediaan jalan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya konektivitas antarwilayah	Masih adanya kampung yang belum terhubung jalur darat	Rendahnya ketersediaan jembatan
	Rendahnya kualitas infrastruktur jalur darat yang terbangun	Masih rendahnya kualitas jalan dan jembatan
Belum optimalnya akses air bersih	Belum optimalnya pemanfaatan air baku	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air baku
		Kurangnya pemeliharaan infrastruktur air baku
Belum optimalnya kualitas tata ruang dan bangunan	Belum optimalnya kualitas bangunan	Belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan
	Belum optimalnya kualitas penataan tata ruang	Masih adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang
		Belum optimalnya perencanaan tata ruang

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari akses masyarakat terhadap pemukiman yang layak huni. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman menjadi bagian penting dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Kabupaten Asmat:

Tabel 3. 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
---------------	---------	--------------

Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	Belum optimalnya akses rumah layak huni	Upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni belum optimal
	Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur sanitasi individual maupun komunal yang layak	Belum tersedianya infrastruktur sanitasi individual maupun komunal yang layak
	Belum optimalnya penataan kawasan kumuh	Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kawasan pemukiman yang bersih dan sehat Belum adanya perencanaan penanganan pemukiman kumuh

3.1.1.4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berkaitan dengan dengan tingginya risiko gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Secara lebih rinci, hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain:

Tabel 3. 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya risiko gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya upaya pencegahan gangguan	Belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum

	ketenteraman dan ketertiban umum akibat kegiatan politik	Belum optimalnya pelibatan masyarakat adat dan agama dalam pendidikan politik masyarakat
	Belum optimalnya penanganan pelanggaran K3	Masih terbatasnya cakupan patroli dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Terbatasnya sarana-prasarana polisi pamong praja

3.1.1.5 Sosial

Masalah pokok urusan sosial di Kabupaten Asmat yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dan tingginya resiko bencana alam. Tingginya persoalan PMKS yang belum sepenuhnya bisa tertangani serta belum optimanya pemberdayaan masyarakat Asmat menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Secara lebih rinci, permasalahan pembangunan daerah urusan sosial bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat	Tingginya persoalan PMKS yang belum tertangani	Minimnya pendataan masyarakat kelompok rentan
		Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan sosial (panti asuhan, pantijompo, panti sosial, dll)
		Minimnya jumlah pekerja sosial
		Tingginya anak-anak dan remaja yang mengkonsumsi NAPZA (Lem Aibon)

		Minimnya program penanganan PMKS dari daerah (masih bergantung dengan program pemerintah pusat)
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat kelompok rentan	Kurangnya perhatian untuk memberdayakan masyarakat asli Asmat terutama di distrik-distrik
		Tidak adanya bantuan-bantuan untuk pengembangan usaha masyarakat rentan terutama mama-mama
Tingginya resiko bencana alam	Belum optimalnya pencegahan bencana	Belum adanya peta rawan bencana
		Kurang akuratnya peringatan bencana
		Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana
		Lemahnya SOP penanganan kebencanaan

3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-dasar meliputi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, kearsipan, kebudayaan dan perpustakaan. Berikut adalah rincian permasalahan pembangunan di bidang urusan wajib non-pelayanan dasar:

3.1.2.1. Tenaga Kerja

Masalah pokok yang dihadapi oleh urusan wajib non-pelayanan dasar tenaga kerja adalah belum optimalnya penurunan pengangguran terbuka. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 3. 7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penurunan pengangguran terbuka	Kurangnya kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah di luar pemerintahan	Rendahnya kualitas SDM pencari kerja
		Kurangnya link and match antara sekolah dengan kebutuhan lapangan pekerjaan
		Sektor swasta belum terlalu diminati oleh masyarakat

3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Tradisi masyarakat Papua pada umumnya dan Asmat pada khususnya, tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal masih rendah. Salah satu penyebabnya yaitu masih kuatnya peran adat yang menyebabkan minimnya ruang partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan. Tingginya tingkat eksploitasi anak dalam berbagai pekerjaan juga menjadi isu krusial di Kabupaten Asmat. Secara lebih rinci, permasalahan pada urusan perempuan dan anak bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
---------------	---------	--------------

Rendahnya keberdayaan dan perlindungan perempuan	Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal	Masih kuatnya peran adat dalam pembagian pekerjaan yang didominasi peran laki-laki
		Minimnya ruang lingkup pekerjaan perempuan
		Minimnya ruang partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan
		Rendahnya kompetensi perempuan dalam pekerjaan formal
		Minimnya pembinaan bagi perempuan
	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan	Rendahnya pemahaman laki-laki tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki
		Tidak adanya tempat konsultasi kasus KDRT
		Lemahnya upaya pendampingan penyelesaian KDRT
Tingginya tingkat eksploitasi anak	Tingginya kecenderungan menjadikan anak sebagai pekerja	Rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak
		Belum optimalnya peran lembaga perlindungan anak
		Lemahnya upaya dalam hal pembatasan dalam mempekerjakan anak di bawah umur

3.1.2.3. Ketahanan Pangan

Masalah pokok yang dihadapi oleh urusan wajib non-pelayanan dasar ketahanan pangan adalah rendahnya ketahanan pangan. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 3. 9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya ketahanan pangan	Rendahnya ketersediaan pangan utama	Rendahnya stok cadangan pangan daerah
	Rendahnya akses pangan	Panjangnya rantai distribusi pangan ke berbagai distrik terpencil (Distrik Joutu, Pulau Tiga, Fayit, Aswi dan Kopay)
	Rendahnya kualitas konsumsi pangan	Kurangnya diversifikasi pangan

3.1.2.4. Lingkungan Hidup

Masalah pokok yang dihadapi oleh urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 3. 10. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya kualitas air	Tingginya pencemaran limbah domestik, industri dan BBM long boat
	Menurunnya kualitas udara	Tingginya penggunaan diesel berbahan bakar BBM
	Menurunnya kualitasutupan lahan	Semakin tingginya pembukaan lahan untuk pemukiman
		Semakin tingginya penebangan pohon untuk bahan bangunan

	Meningkatnya pencemaran sampah	Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu
		Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pencemaran sampah

3.1.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemetaan permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama berkaitan dengan belum optimalnya cakupan layanan administrasi kependudukan. Hal itu berkaitan dengan belum komprehensifnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Asmat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya cakupan layanan administrasi kependudukan	Lemahnya manajemen data kependudukan	Masih banyaknya data penduduk ganda
		Data kependudukan yang tidak valid
		Belum adanya sistem data yang terintegrasi
	Belum optimalnya dukungan SDM dan sarana-prasarana pelayanan administrasi kependudukan	Kurangnya tenaga operator
		Kurangnya tenaga administrator database
		Ruang pelayanan yang kurang representatif
		Kurangnya alat transportasi untuk menunjang pelayanan di distrik-distrik dan kampung

3.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pemberdayaan masyarakat kampung di Kabupaten Asmat masih dihadapkan masalah rendahnya kapasitas aparatur kampung dan belum optimalnya tata kelola kampung. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat kampung di Kabupaten Asmat menjadi isu penting untuk percepatan pembangunan. Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat kampung dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3. 12. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya keberdayaan masyarakat kampung	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola Kampung	Belum optimalnya penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran Kampung
		Belum adanya kejelasan pembagian kewenangan berskala Kampung
		Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan Kampung
		Minimnya pelatihan dan pendampingan aparat Kampung
	Lemahnya pemberdayaan Masyarakat kampung	Kurangnya tenaga pendamping untuk pemberdayaan masyarakat kampung

3.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemetaan permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkisar pada masalah pokok rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Tabel 3. 13. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya partisipasi pasangan usia subur (PUS) dalam program KB	Belum optimalnya penyelenggaraan program KB	Rendahnya ketersediaan alat kontrasepsi
		Rendahnya kapasitas tenaga penyuluh KB yang sesuai dengan kearifan lokal
		Rendahnya insentif penyuluh KB yang melaksanakan tugas ke distrik-distrik terpencil
	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB	Kurangnya sosialisasi terkait pentingnya penggunaan KB

3.1.2.8. Perhubungan

Masalah pokok pada urusan perhubungan adalah belum optimalnya kualitas perhubungan. Persoalan tersebut ditandai dengan masih adanya distrik di Kabupaten Asmat yang belum dapat dijangkau moda transportasi. Detail permasalahan pembangunan pada urusan perhubungan dapat dipetakan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perhubungan	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan belum memadai	Ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan belum memadai
		Belum optimalnya ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai

	Belum optimalnya manajemen angkutan umum	Masih terbatasnya ketersediaan trayek angkutan
		Terbatasnya moda transportasi umum

3.1.2.9. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika yang dihadapi Kabupaten Asmat berkaitan dengan masih terbatasnya akses komunikasi dan informasi. Permasalahan tersebut disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet. Berikut ini merupakan detail permasalahan yang dihadapi pada bidang komunikasi dan informatika:

Tabel 3. 15. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses komunikasi dan informasi	Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet belum memadai	Belum tersedianya BTS di beberapa distrik
		Rendahnya ketersediaan jaringan internet
		Belum optimalnya pemanfaatan fiber optik
		Belum optimalnya kapasitas BTS
Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya diseminasi informasi	Rendahnya kapasitas jaringan internet
		Belum optimalnya kerjasama dengan media
		Belum optimalnya integrasi e-government

3.1.2.10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Masalah pokok yang dihadapi oleh urusan wajib non-pelayanan dasar koperasi dan UKM adalah rendahnya peningkatan SHU koperasi dan rendahnya kontribusi sektor UKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 3. 16. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya peningkatan SHU koperasi	Rendahnya koperasi aktif	Rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi
		Jiwa enterpreneurship anggota koperasi belum terlalu terbangun
		Kurangnya pemantauan dan pelatihan manajerial koperasi
		Kurangnya akses bantuan permodalan dan investasi
		Rendahnya kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi
		Kurangnya pengembangan sarana dan prasarana pemasaran koperasi
Rendahnya kontribusi sektor UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Rendahnya omzet usaha mikro dan kecil	Rendahnya kapasitas SDM pelaku UKM
		Kurangnya pemantauan dan pelatihan manajerial UKM
		Kurangnya akses bantuan permodalan dan investasi
		Belum adanya produk unggulan UKM

3.1.2.11. Penanaman Modal

Masalah pokok yang dihadapi oleh urusan wajib non-pelayanan dasar penanaman modal adalah rendahnya realisasi nilai investasi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 3. 17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya realisasi nilai investasi	Rendahnya minat investor untuk berinvestasi	Rendahnya kondusifitas iklim investasi
		Belum optimalnya identifikasi potensi investasi
		Belum optimalnya promosi potensi investasi
		Belum optimalnya kinerja sistem perizinan satu pintu

3.1.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

Rendahnya kapasitas SDM pemuda masih menjadi masalah serius bagi pemerintah Kabupaten Asmat. Banyak pemuda yang terkena masalah sosial seperti mabuk, judi, dan lem aibon. Sedangkan dalam hal olahraga, Kabupaten Asmat dihadapkan pada masalah pokok belum optimalnya prestasi olahraga. Salah satu penyebabnya yaitu belum maksimalnya pembinaan atlet dan minimnya sarana prasana olahraga. Secara lebih rinci, berikut identifikasi permasalahan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga:

Tabel 3. 18. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya peran pemuda dalam berbagai aspek pembangunan	Belum maksimalnya peran lembaga kepemudaan	Banyaknya pemuda terkena masalah sosial (mabuk, judi, lem aibon, NAPSA)
		Rendahnya kapasitas SDM pemuda

		Rendahnya inisiatif pemuda untuk turut aktif dalam proses pembangunan
		Minimnya pendampingan di kalangan pemuda
Belum optimalnya prestasi olahraga	Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga	Minimnya prasarana olahraga yang memadai seperti GOR, lapangan outdoor, dll
	Minimnya pengembangan dan pengelolaan olahraga	Belum maksimalnya perekrutan dan regenerasi atlet
		Minimnya jumlah pelatih olahraga
		Minimnya event-event olahraga tingkat daerah
		Tingginya konflik yang disebabkan kompetisi olahraga

3.1.2.13. Statistik

Urusan statistik memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini karena ketersediaan data statistik terkait capaian pembangunan daerah merupakan salah satu dasar utama dalam perumusan rencana pembangunan daerah pada periode selanjutnya. Pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Asmat masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain:

Tabel 3. 19. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketersediaan data statistik daerah	Masih terbatasnya kemampuan dalam penyusunan data statistik	Belum optimalnya pendokumentasian capaian pembangunan daerah
		Koordinasi antar instansi dalam penyusunan data statistik belum optimal
		Belum optimalnya peran Sistem Informasi Pembangunan Daerah

3.1.2.14. Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan merupakan upaya untuk menunjang tertib administrasi. Persoalan urusan ini berkaitan dengan masih rendahnya perangkat daerah yang menjalankan kearsipan secara baku, persoalan tersebut disebabkan oleh hal berikut:

Tabel 3. 20. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya tatakelola kearsipan	Lemahnya pengelolaan arsip oleh OPD	Belum adanya standar pengelolaan kearsipan
		Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana kearsipan

		Kurangnya SDM pengelola kearsipan
		Kurangnya sosialisasi pengelolaan arsip

3.1.2.15. Perpustakaan

Masalah pokok berkaitan dengan urusan Perpustakaan berkisar pada belum optimalnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

Tabel 3. 21. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya minat baca masyarakat	Minimnya sarana prasarana perpustakaan	Belum optimalnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas perpustakaan terutama di distrik-distrik
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membaca	Lemahnya peran sekolah dalam mendorong minat baca masyarakat
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan untuk membaca

3.1.2.16. Kebudayaan

Kabupaten Asmat memiliki keragaman budaya lokal yang luar biasa. Salah satu yang terkenal yaitu budaya seni ukir Asmat. Namun demikian, kekayaan budaya lokal tersebut belum dikelola dengan maksimal. Secara lebih rinci, permasalahan pembangunan daerah urusan kebudayaan bisa dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3. 22. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelestarian kebudayaan lokal	Belum maksimalnya pengelolaan kebudayaan lokal	Rendahnya kesadaran masyarakat lokal berkaitan dengan tingginya potensi budaya
		Belum adanya perlindungan hak cipta sebuah karya
		Minimnya sarana dan prasarana pelestarian budaya lokal
		Rendahnya pemasaran produk kesenian lokal
		Belum maksimalnya penyelenggaraan event-event kebudayaan

3.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pilihan pada umumnya berhubungan dengan berbagai sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral. Berikut adalah beberapa permasalahan pembangunan Kabupaten Asmat di bidang urusan pilihan:

3.1.3.1. Perikanan

Masalah pokok yang dihadapi oleh urusan pilihan perikanan adalah belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 3. 23. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	Rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan
		Rendahnya kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan (jaring, long boat)
		Kualitas pakan untuk jenis perikanan budidaya masih rendah

3.1.3.2. Pariwisata

Masalah pokok yang dihadapi Kabupaten Asmat dalam urusan pariwisata yaitu masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan belum maksimalnya pengelolaan pariwisata dan minimnya pengembangan wisata. Secara lebih rinci, akar masalah urusan pariwisata bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	Belum maksimalnya pengelolaan dan pemasaran pariwisata	Minimnya kerjasama antara pelaku bisnis wisata dengan pemerintah daerah
		Minimnya kelompok pengelola wisata di tingkat masyarakat
		Belum maksimalnya penyelenggaraan event-event pariwisata

		Belum maksimalnya pemasaran wisata ke luar daerah
	Minimnya pengembangan destinasi wisata	Minimnya infrastruktur transportasi menuju lokasi wisata
		Minimnya pendataan potensi destinasi wisata
		Lemahnya upaya pelestarian budaya di kalangan pemuda lokal

3.1.3.3. Pertanian

Masalah pokok yang dihadapi oleh urusan pilihan pertanian adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 3. 25. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Rendahnya produksi pertanian	Rendahnya kualitas SDM petani
		Kurangnya ketersediaan penyuluh pertanian
		Rendahnya kualitas sarana dan prasana produksi
		Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna
		Lahan potensial kurang dikelola secara optimal
	Rendahnya kualitas produk pertanian	Belum adanya standarisasi yang ketat terhadap produk pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Rendahnya produksi hasil peternakan	Rendahnya kualitas SDM peternak
		Rendahnya kualitas sarana dan prasana peternakan
		Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna

3.1.3.4. Perdagangan

Masalah pokok yang dihadapi oleh urusan pilihan perdagangan adalah belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 3. 26. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Kurangnya kelancaran distribusi barang perdagangan pokok dan penting	Belum terintegrasinya jaringan perdagangan dari luar ke dalam daerah dan dari dalam daerah ke masing-masing distrik
		Rendahnya kualitas SDM pedagang kecil dan menengah di bidang pemasaran
	Kurangnya revitalisasi pasar tradisional OAP	Rendahnya sarana prasarana pasar tradisional
		Rendahnya kualitas manajemen usaha perdagangan
		Kurangnya akses bantuan permodalan

3.1.3.5. Perindustrian

Masalah pokok yang dihadapi oleh urusan pilihan perindustrian adalah belum optimalnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 3. 27. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi	Rendahnya nilai produksi IKM (olahan perikanan, meubel, patung dan long boat)	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
		Rendahnya akses terhadap bantuan permodalan
		Rendahnya kapasitas SDM pelaku industri
	Rendahnya kualitas produk IKM	Barang yang diproduksi belum berorientasi pasar

3.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Selain urusan wajib dan pilihan, terdapat beberapa urusan yang sifatnya penunjang. Urusan tersebut berkaitan dengan tatakelola pemerintahan mencakup urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengawasan, dan kesekretariatan.

3.1.4.1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Masalah pokok urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berkaitan dengan belum optimalnya kualitas perencanaan dan belum optimalnya hasil-hasil penelitian untuk bahan perumusan kebijakan. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah pokok tersebut antara lain:

Tabel 3. 28. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya keterpaduan antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya sinergi perencanaan berbasis aplikasi
		Belum meratanya kapasitas aparatur perencanaan di tiap OPD
		Lemahnya upaya sinkronisasi antar dokumen
	Rendahnya kualitas indikator-indikator pembangunan daerah	Masih banyak indikator kinerja yang tidak terukur
		Belum optimalnya perumusan indikator yang hirarkis
	Belum optimalnya pengembangan perencanaan yang partisipatif di distrik dan kampung	Perencanaan pembangunan distrik dan kampung yang masih seremonial Masih kurangnya upaya memastikan aspirasi masyarakat untuk dapat terserap dalam perencanaan pembangunan
Rendahnya pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan	Belum optimalnya kualitas penelitian	Banyaknya penelitian yang tidak didasarkan pada kebutuhan daerah
		Penelitian tidak dilakukan dengan komprehensif dan melibatkan instansi terkait
		Minimnya sumber daya aparatur kelitbangan yang berkualitas

	Tidak adanya sistem yang menghubungkan hasil penelitian dengan perumusan kebijakan	Lemahnya kesadaran OPD dalam memanfaatkan hasil penelitian
		Kurangnya diseminasi hasil penelitian

3.1.4.2. Keuangan

Masalah pokok urusan Keuangan terletak pada belum optimalnya pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah pokok tersebut antara lain:

Tabel 3. 29. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya pendapatan daerah	Objek PAD masih belum teridentifikasi secara komprehensif
		Database objek pendapatan masih belum lengkap
		Transparansi pajak belum dilaksanakan karena masih menggunakan sistem manual (misal: kasir masih menggunakan mesin manual)
	Rendahnya pengelolaan asset	Data aset masih belum jelas
		Identifikasi aset belum optimal
		Lemahnya upaya dalam pemindahtanganan aset
	Belum optimalnya	Lemahnya kapasitas SDM yang bertugas menyusun laporan keuangan

	pelaporan keuangan daerah	Kurangnya pendampingan bagi OPD dalam pelaporan keuangan
--	---------------------------	--

3.1.4.3. Kepegawaian

Belum optimalnya profesionalitas ASN menjadi masalah pokok pada urusan Kepegawaian. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengembangan kapasitas dan integritas ASN. Berikut ini merupakan detail pemetaan masalah kepegawaian:

Tabel 3. 30. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya profesionalitas ASN	Kurangnya pengembangan kapasitas ASN	Belum adanya identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan
		Belum adanya evaluasi terhadap efektivitas hasil diklat
		Adanya pelaksanaan Diklat yang tidak sesuai kebutuhan
	Penempatan jabatan yang belum berdasarkan sistem merit	Belum optimalnya kepatuhan terhadap pemenuhan syarat jabatan
		Belum optimalnya kualitas sistem informasi kepegawaian
		Penempatan pejabat yang tidak berdasarkan uji kompetensi
	Lemahnya integritas ASN	Belum adanya mekanisme pengawasan disiplin aparatur
		Belum meratanya kesadaran terhadap tupoksi sebagai ASN

3.1.4.4. Pengawasan

Pelaksanaan urusan Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan pada level daerah. Di Kabupaten Asmat, masalah pokok yang berhasil diidentifikasi adalah belum optimalnya TLHP sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah. Beberapa masalah dan akar masalahnya antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 31. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Belum optimalnya pemeriksaan keuangan OPD	Kurangnya SDM auditor
		Tidak adanya sistem pendukung pelaksanaan pemeriksaan
	Lemahnya kesadaran dan komitmen OPD dalam melaksanakan TLHP	Tidak adanya insentif dan disinsentif untuk melakukan TLHP
		Kurangnya sosialisasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat
	Masih rendahnya kemampuan pelaksanaan SPIP	Belum adanya perangkat daerah yang menjalankan SPIP
		Belum adanya standar operasional prosedur pelaksanaan SPIP

3.1.4.5. Kesekretariatan

Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dijalankan oleh perangkat daerah sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Fungsi ini berperan menopang pelaksanaan kebijakan-kebijakan kepala daerah dan memfasilitasi kinerja DPRD. Masalah pokok yang berhasil diidentifikasi berkaitan dengan belum optimalnya

kemampuan dalam pengendalian kebijakan daerah serta belum optimalnya pelayanan administrasi dan fasilitasi kinerja kepada anggota dewan.

Tabel 3. 32. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Kesekretariatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kemampuan pengendalian kebijakan daerah	Belum optimalnya koordinasi dalam perumusan dan pengendalian kebijakan daerah	Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan OPD teknis
		Belum adanya penerapan manajemen kinerja dan tata laksana pelayanan publik
		Lemahnya pelaksanaan koordinasi dalam perumusan kebijakan daerah
		Belum optimalnya fasilitasi tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyerapan aspirasi masyarakat
		Tidak adanya payung hukum mengenai batas-batas wilayah yang belum terselesaikan
		Status distrik belum berupa OPD
Belum optimalnya pelayanan dan fasilitasi kinerja DPRD	Rendahnya kapasitas SDM dalam menopang kinerja DPRD	Belum optimalnya fasilitasi bahan-bahan penyusunan raperda
		Lemahnya fasilitasi dalam mengakomodir aspirasi masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum ada SOP perjalanan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan
		Lemahnya fasilitasi sidang- sidang

3.2. ISU STRATEGIS

3.2.1. Isu Staegis Global

Berbagai permasalahan Pembangunan baik internasional, nasional maupun daerah sebagai akibat dari adanya perkembangan zaman dan dinamika sosial politik. Hal ini mempengaruhi munculnya berbagai isu pembangunan baik internasional, nasional dan daerah yang terjadi seiring munculnya kemajuan teknologi maupun kerja sama internasional, seperti munculnya Isu global terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berorientasi untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan guna peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, diantaranya : keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. Dimana isu ini telah direspon oleh pemerintah Indonesia di tingkat nasional melalui Perpres No. 59 Tahun 2017. *SDGs* sebagai upaya pembangunan global memiliki 17 tujuan yang meliputi beberapa aspek pembangunan dan terdiri atas 4 pilar, yaitu: 1) Pembangunan Sosial; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Lingkungan; dan 4) Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Pada 17 tujuan pembangunan terdapat target-target yang menggambarkan sasaran tertentu, dimana Target-target tersebut merupakan kesepakatan global yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, hingga level kabupaten/kota. Adapun 17 tujuan dari *SDGs* yang perlu dijadikan pijakan dalam melihat isu-isu strategis di level global adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;

2. Mengakhiri kelaparan , mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan untuk semua, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
8. kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi

semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3.2.2. Megatrend Dunia 2045

Isu megatrend merupakan isu global yang mempengaruhi terhadap perubahan di berbagai bidang, dimana terdapat 10 (sepuluh) yang akan di hadapi dunia. menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan- perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disrupsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (space economy).



1) Pertumbuhan Kelas Menengah (*middle class*)

- Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia
- Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*)

2) Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang

3) Perkembangan Teknologi (*digital disruption*)

- Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat
- Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.
- Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor.
- Teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur
- Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan
- Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi.
- Perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi
- Perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah
- Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi

4) Perubahan Iklim

- Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati (tiga krisis global – *the Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari
- Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global
- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

5) Pemanfaatan Luar Angkasa (*space economy*)

- Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir
- Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang

6) Tata Kelola Keuangan Global

- Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi
- Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara
- Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan

7) Konstelasi Perdagangan Global

- Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asiap-Afrika
- Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi
- Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang
- Kerja sama kawasan menciptakan *hub* perdagangan strategis

8) Geopolitik dan Geoekonomi

- Dinamika geopolitik ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia
- Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan
- Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo- Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas
- Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedapankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan
- Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan
- Nilai *output* dunia negara berkembang semakin dominan
- Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang
- Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang
- Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju
- Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015

9) Peningkatan Urbanisasi Dunia

- Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota
- Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari

10) Perkembangan Demografi Global

- Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia.
- Jumlah Penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat
- Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga
- Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global.

3.2.3. Isu Nasional

Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 Penyelarasan Visi Misi, arah kebijakan dan sasaran Pembangunan melalui :

- Transformasi Indonesia Emas : mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan wilayah.
 1. Transformasi Sosial
 2. Transformasi Ekonomi
 3. Transformasi Tata Kelola
 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 6. Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan.
 7. Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

8. Kestinambungan Pembangunan

- Pemindahan Ibu Kota Negara mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.
- Bonus demografi Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mendorong pengentasan kabupaten tertinggal

Isu penyelarasan Penjabaran Sasaran RPJPN:

1. Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju
2. Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
5. Intensitas Emisi dan Rumah Kaca (GRK) Menurun Menuju Net Zero Emission



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

5 (lima) Sasaran pokok RPJPN 2025-2045 yaitu:

- 1) Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju.

- 2) Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan Berkurang.
- 3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
- 4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
- 5) Intensitas Emisi dan Rumah Kaca (GRK) Menurun.

Adapun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045 isu dan tantangan pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global semakin meningkat, hal tersebut ditandai dengan:
2. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat
3. Sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang, hal tersebut ditandai dengan:
4. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah
5. Tata Kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.
6. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik, hal tersebut ditandai dengan:

7. Stabilitas makro yang mencakup aspek fiskal dan moneter masih menghadapi beberapa tantangan, utamanya ketidakpastian ekonomi global dan keberlanjutan fiskal, hal tersebut ditandai dengan:
8. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya

3.4. Isu Strategis Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dokumen RIPPP menjadi pembawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Visi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Selain Visi, adapun 3 Misi besar yang terumuskan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yaitu, (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan Sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk. (2) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, dan (3) Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan Sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Gambar 3. 3. Visi Misi dan Sasaran RIPPP OTSUS Papua Tahun 2022-2041

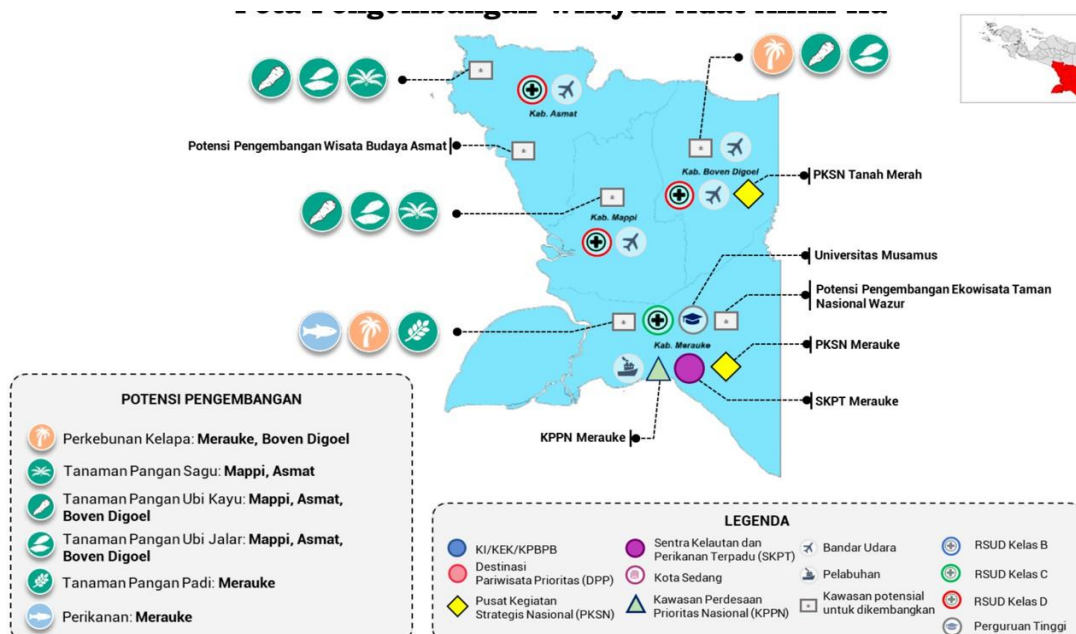


Sumber: Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, Tentang RIPPP Tahun 2022-2041.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam proses implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 ialah (1) Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk; (2) Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk; serta (3) Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk. arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Anim Ha diantaranya ialah Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Yang Terstandar, Serta Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha Sebagai Sentra Tanaman Pangan, Perkebunan, Kelautan Dan Perikanan, Serta Ekowisata Berkelanjutan Dan Berorientasi Global. Adapun arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center);

- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung; Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda; Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan hasil pertanian tanaman pangan;
- (7) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- (8) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan: a) Mengembangkan sentra tanaman pangan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha; b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan serta kelautan dan perikanan; c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan d) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara



Sumber: RIPPP 2022-2041 (2023)

Selanjutnya, kabupaten Mappi dalam pengembangan wilayah adat Anim Ha merupakan salah satu kawasan strategis nasional sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN). Selain itu, kebijakan pengembangan wilayah adat Anim Ha terutama kabupaten Mappi difokuskan pada pengembangan komoditas perkebunan kelapa, tanaman pangan ubi kayu, dan tanaman pangan ubi jalar.

Selanjutnya, perumusan isu dan tantangan dalam RIPPP terbagi atas beberapa bidang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Isu dan Tantangan Bidang Kesehatan

- Belum meratanya akses ke pelayanan kesehatan akibat kondisi geografis yang beragam
- Masih terdapat kecamatan yang belum memiliki puskesmas
- Rendahnya persentase rumah sakit (RS) dan puskesmas terakreditasi
- Masih terdapat puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
- Terdapat rumah sakit kabupaten/kota kelas C tidak memiliki dokter spesialis dasar dan dokter spesialis lainnya
- Terdapat puskesmas yang belum memiliki dokter.

- Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang masalah kesehatan, menyebabkan tingginya penyakit menular endemis seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, dan kusta, serta tingginya faktor risiko penyakit tidak menular seperti konsumsi rokok, alkohol, NAIZA, dan obesitas.
- Kesadaran ibu hamil yang masih minim untuk rutin memeriksakan kehamilannya, menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi sfunting
- Minimnya pembudayaan olahraga ditunjukkan dengan persentase penduduk yang rutin berolahraga dalam seminggu terakhir yang masih di bawah rata-rata nasional
- Belum optimalnya keberlangsungan kegiatan pelayanan kesehatan, salah satunya telemedicine akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang belum merata
- Masih tingginya masalah kesehatan di Papua akibat belum optimalnya penyediaan akses layanan infrastruktur dasar, meliputi hunian layak dan terjangkau, air minum layak dan aman, sanitasi layak dan aman, serta promosi kebersihan
- Masih rendahnya cakupan nomor induk kependudukan (NIK) di Papua yang dapat menghambat masyarakat mendapatkan layanan kesehatan
- Belum optimalnya tata kelola manajemen mutu dan risiko pada puskesmas
- Belum optimalnya regulasi antarsektor yang terintegrasi, serta kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam rangka otonomi khusus yang bersinergi.

b) Isu dan Tantangaa Bidang Pendidikan

- Masih rendahnya rata-rata lama sekolah
- Masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) jenjangSMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggr (PT)
- Belum optimalnya tingkat aksesibilitas layanan pendidikan akibat faktor geografis serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik, namun di sisi lain telah terdapat upaya mengatasi kekurangan guru melalui kolese

pendidikan guru (KPG) untuk menghasilkan guru profesional yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal, meskipun kualifikasi dan kompetensinya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar

- Masyarakat Papua memiliki karakteristik yang terbuka terhadap keberagaman agama, suku, dan adat istiadat yang ditunjukkan oleh capaian indeks kerukunan umat beragama
- Masih rendahnya AMH penduduk usia 15-59 tahun
- Kurangnya aksesibilitas siswa dan tenaga pendidik menuju fasilitas pendidikan akibat kondisi geografis yang beragam sehingga menjadi kendala dalam pembangunan jalan antarkota dan antarkampung, tetapi di sisi lain upaya pembangunan Jalur Trans-Papua diharapkan dapat meningkatkan dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan pendidikan;
- Masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun
- Keterbatasan tenaga pendidik dan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar akibat cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang belum merata
- Masih terdapat blankspot yang menjadi salah satu kendala akses telekomunikasi
- Belum optimalnya integrasi konektivitas, sehingga siswa dan tenaga pendidik mengalami keterbatasan dalam mengakses fasilitas Pendidikan
- Masih terdapat ketimpangan gender di Papua dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan capaian indeks pembangunan gender (IPG).

c) Isu dan Tantangan Bidang Ekonomi

- Belum optimalnya nilai realisasi investasi
- Rendahnya penciptaan nilai tambah yang disebabkan belum optimalnya pengembangan sektor/komoditas unggulan dari hulu ke hilir.

- Tingginya proporsi tenaga kerja informal yang sebagian besar terdiri dari pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, serta masih rendahnya proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
- Masih tingginya ketimpangan pendapatan
- Belum optimalnya pemberdayaan UMKM
- Belum optimalnya penguatan terhadap pelaku UMKM yang ditunjukkan oleh penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM
- Adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kredit UMKM tumbuh signifikan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi
- Rendahnya rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk
- Indeks kemahalan konstruksi di Papua yang masih relatif tinggi, akibat kondisi geogralis yang beragam, kendala pembebasan lahan, dan faktor keamanan
- Belum terintegrasinya infrastruktur konektivitas jalan, darat, laut, dan udara, menyebabkan akses menuju pusat- pusat ekonomi terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah belum optimal
- Belum meratanya cakupan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang menjadi kebutuhan dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang ditandai dengan masih terdapat banyaknya daerah blankspof
- Rendahnya persentase mmah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN
- Rendahnya konsumsi listrik per kapita yang bersumber dari listrik PLN
- Masih terdapat ketimpangan gender
- Belum optimalnya penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) di Papua yang dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemulihan kawasan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis; pengelolaan keanekaragaman hayati; dan kepastian hukum pertanahan di kawasan hutan dan reforma agrarian.

d) Isu dan Tantangan Bidang Lingkuagan Hidup

- Indeks risiko bencana termasuk kelas risiko tinggi yang diakibatkan (a) masih lemahnya pengawasan dan mitigasi terhadap kawasan rawan bencana; (b) masih lemahnya kesadaran dan wawasan masyarakat dalam mengelola sampah dan tanggap bencana; dan (c) lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan (land use) pada zona rentan bencana
- Indeks kualitas air sudah berada di atas nasional. Selain itu indeks kualitas udara juga berada di atas angka nasional. Hal ini perlu dipertahankan untuk mengantisipasi penurunan kualitas air dan udara akibat pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan
- Terdapat dampak perubahan iklim pada sektor kesehatan
- Terdapat 18 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor malaria dan 2 kabupaten/kota prioritas ketahanan iklim subsektor demam berdarah yang berpotensi meningkatkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) dengan adanya perubahan iklim apabila tidak dilakukan intervensi (business as usual)
- Isu pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai backbone ekonomi hdau belum terimplementasikan dengan baik di Papua. Konversi hutan mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca
- Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi hutan di Papua untuk menyejahterakan masyarakat setempat
- Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan berbasis masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui skema perhutanan sosial.

e) Isu dan Tantangan Bidang Tata Kelola

- Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban umum menyebabkan cakupan pelayanan dan tenaga kesehatan dan pendidikan belum optimal yang ditunjukkan dengan persentase rumah tangga menurut kekhawatiran berjalan sendirian di siang hari khususnya di daerah perkotaan

- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus yang ditunjukkan dengan rendahnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan;
- Masih rendahnya penerapan tata kelola pemerintahan digital yang selaras dengan kerangka regulasi sistem pemerintahan berbasis (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) akibat belum meratanya infrastruktur TIK yang ditunjukkan dengan masih banyaknya daerah blankspot
- Masih rendahnya cakupan akta kelahiran anak usia 0-17.

f) Isu dan Tantangan Bidang Sosial Budaya

- Belum optimalnya upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan
- Nilai Budaya Literasi masih berada di bawah rata-rata nasional
- Indeks kerukunan umat beragama berada di atas angka nasional yang perlu diperkuat sebagai modal sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan

3.5. Isu Provinsi

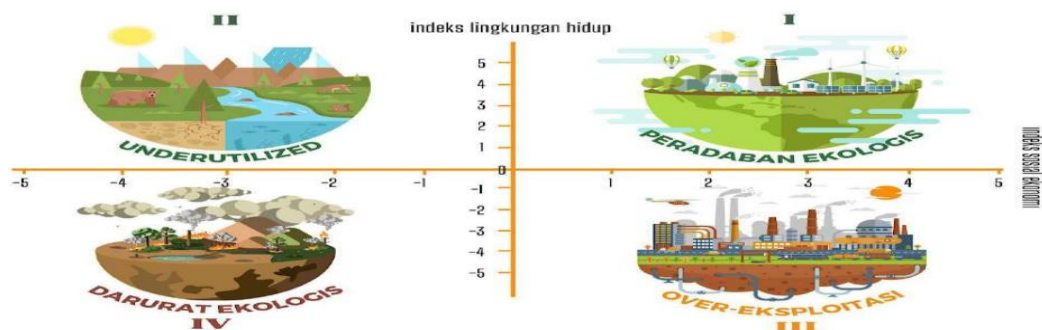
Penelaahan RPJPD Provinsi Papua Selatan 2025-2045:

- Sumber daya alam (SDA) Papua yang bernilai ekonomis dan strategis berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
- Kebijakan pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek *span of control* pelayanan publik.
- Kondisi sosial budaya di Papua yang unik menjadi modal dasar pembangunan Papua

3.6. Isu Strategis Kabupaten Asmat

Kabupaten Asmat saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan ekonomi daerah, dimana hampir 55,85% wilayah kabupaten Asmat adalah kawasan lindung dan kawasan konservasi, dan ibukota kabupaten Asmat yaitu Kota Agats berlokasi dalam kawasan hutan lindung. Kondisi ini sudah tentu sangat membatasi berbagai aktivitas masyarakat dalam

pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah dalam upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan peningkatan kesejahteraan. Dengan memperhatikan interaksi antara aspek keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan kuadran berkelanjutan yang merupakan skenario lingkungan hidup Indonesia tahun 2045, Kabupaten Asmat masih termasuk dalam wilayah kuadran dimana kondisi kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah dan tingkat kesenjangan sosial di kabupaten Asmat masih sangat tinggi, namun kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang masih melimpah.



Isu-isu strategis di Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut:

a. Isu makro Pembangunan Kabupaten Asmat:

Rendahnya Kualitas SDM, Pertumbuhan Ekonomi, Konektivitas, Saprass dan Tata Kelola pemerintahan dipengaruhi kondisi :

1. Layanan dan kualitas pendidikan dasar dan menengah masih rendah akibat kurangnya sarana prasarana, jumlah dan kemampuan serta disiplin guru masih rendah termasuk minat belajar peserta didik.
2. Lapangan pekerjaan bagi orang asli Asmat sangat kurang dan harus berkompetisi dengan tenaga kerja dari luar Asmat.
3. Rumah yang layak dan sumber pangan bagi orang asli Asmat masih terbatas terkhusus pemenuhan gizi bagi ibu dan anak.
4. Kualitas kesehatan bagi masyarakat masih rendah dan layanan kesehatan belum merata dan menjangkau kampung-kampung dipelosok akibat kesulitan transportasi dan faktor geografis.

5. Masih tingginya kemiskinan dan hampir merata disemua distrik akibat penghasilan per kapita yang rendah.
6. Perlindungan dan pelestarian kearifan lokal sebagai pengakuan akan eksistensi nilai budaya Asmat belum efektif diterapkan.
7. Konektivitas antar wilayah yang terbatas akibat faktor geografis dan infrastruktur perhubungan yang kurang memadai.
8. Pengembangan produksi serta pemasaran komoditas pertanian masih banyak kendala akibat kurangnya sarana prasarana pertanian, sumber daya manusia masih rendah dan tenaga penyuluh kurang.
9. Regulasi terkait pengelolaan retribusi dan iuran bagi pelaku ekonomi masih kurang.
10. Pencemaran air permukaan semakin meningkat karena limbah cair dan sampah domestik, Tempat pengolahan akhir sampah dan limbah belum ada dan belum dikelola secara baik dan aman. (A10)
11. Air bersih dan sanitasi yang layak belum tersedia merata sehingga menimbulkan banyak penyakit kulit dan pencernaan.
12. Pembangunan infrastruktur meningkat, bahan bangunan banyak yang harus diperoleh dari hutan sehingga memerlukan lahan yang luas dengan membuka areal hutan.
13. Kinerja dan disiplin anggota legislatif dan aparat pemerintah daerah masih rendah dalam menjalankan tugas (akibat pendidikan dan pelatihan yang kurang, sarana dan prasarana kerja kurang, sistem kerja belum terintegrasi secara elektronik atau digital, serta kurangnya pengawasan dari instansi terkait).
14. Perangkat Kelembagaan peradilan di kabupaten belum memadai dan belum didukung oleh kelembagaan yang kuat di masyarakat.
15. Masih belum kuatnya sistem peradilan berbasis hukum adat dalam menangani perkara terkait pelanggaran atas hak adat.

b. Isu Strategis berdasarkan aspek wilayah, diantaranya:

1. Luas kawasan konservasi dan hutan lindung mencapai 56,25% dari total luas Kabupaten. Keterbatasan luas kawasan permukiman pada wilayah ibukota kabupaten (Kota Agats). Luas APL sebesar 1,12% dari total luas Distrik Agats.

2. Karakteristik bentang alam dan tipe vegetasi yang kurang mampu menyediakan air bersih layak minum dan mendukung pembangunan infrastruktur penunjang pelayanan dasar
3. Potensi bahaya cuaca ekstrem hampir merata di semua wilayahnya distriknya, kecuali di sebagian wilayah utara distrik pulau tiga dan distrik korowai buluanup
4. Pemanfaatan kayu sebagai bahan utama pembangunan infrastruktur dapat mengakibatkan semakin tingginya deforestasi hutan.

c. Isu Strategis berdasarkan Kerangka Kebijakan, diantaranya :

1. Pembangunan wilayah Papua masih terkendala
2. Pengembangan ekonomi belum inklusif, pengembangan pada potensi unggulan wilayah dan UMKM ditunjukan oleh capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang masih rendah
3. Kondisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah ditunjukan oleh masih tingginya persentase penduduk miskin yang dan ketertinggalan daerah
4. Akses dan konektivitas intra dan antarwilayah masih rendah
5. Potensi energi hidro, energi surya dan energi angin belum dikembangkan dalam menopang transisi energi
6. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digitas masih rendah dan belum merata
7. Pembangunan infrastruktur dasar belum optimal dan mempengaruhi peningkatan sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi
8. Desentralisasi dan otonomi daerah
9. Stabilitas pertahanan dan keamanan
10. Sosial budaya
11. Ekologi

BAB IV

VISI DAN MISI

Visi dan misi RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 merupakan gambaran mengenai apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Asmat pada akhir tahun 2045. Visi dan misi mencerminkan cita-cita atas apa yang diinginkan dan dengan kebijakan apa keinginan masyarakat tersebut akan diwujudkan dalam pembangunan. Pernyataan visi dan misi mengarahkan perumusan kebijakan pembangunan lebih fokus dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, agar visi dan misi menjadi panduan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dituangkan secara bertahap dalam dokumen RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Papua Selatan dan RPJPN tahun 2025-2045 dan dokumen RIPP Tahun 2022-2041. Adapun rincian Visi –Misi yang termuat dalam RPJPN tahun 2025-2045 dan dokumen RIPP Tahun 2022-2041 di jabarkan sebagai berikut :

4.1. VISI INDONESIA EMAS 2045

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Secara umum, Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar

pada tradisi, dan terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Aspek kualitas manusia juga meningkat pesat. Manusia Indonesia pada 2045 bukan hanya terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya, tetapi juga telah memperoleh kualitas hidup terbaik dengan layanan kesehatan prima dan inklusif, serta pendidikan yang membentuk karakter manusia unggul dan berdaya saing global.

Pada aspek politik, Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial. Sistem politik berjalan dengan lembaga perwakilan, sistem pemilu, dan partai politik yang mampu memperkuat sistem presidensial. Budaya politik yang inklusif terwujud melalui kesantunan politik, toleransi, kejujuran, dan keterbukaan yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Dua hal di atas menjadi modal penciptaan ekonomi Indonesia yang maju, berketahanan dan berdaya saing tinggi. Ekonomi Indonesia telah bertransformasi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi secara inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, Indonesia telah menjadi aktor penting dalam perekonomian global dan motor pertumbuhan ekonomi di kawasan, serta mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri.

Kemajuan tersebut ditunjang dengan riset dan pengembangan serta inovasi yang unggul. Indonesia tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi yang disegani dan penghasil kemajuan ilmu pengetahuan.

Akhirnya, kemajuan dan stabilitas nasional Indonesia akan ditularkan ke tingkat global. Indonesia menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan global. Berbekal politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menjelma menjadi agen perdamaian dan stabilitas dunia yang sangat berpengaruh.

Sasaran Utama: Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu:

1. pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000 - 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia.
2. peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-

0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,377-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

3. kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.
4. meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045.
5. mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010, dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Misi:

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi,
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi,
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Arah Kebijakan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan Berkualitas yang merata
3. Perlindungan Sosial Yang adaptif
4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Transformasi Digital
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi
9. REgulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
10. Hukum berkeadilan, Keamanan Nasional
11. Stabilitas Ekonomi Makro
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan Maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
15. Lingkungan Hidup Berkaulitas
16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

1. Tahap pertama (2025-2029) penguatan fondasi transformasi

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6

– 6,1 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

a. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara; pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS); pengembangan PLT ET (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT Biomassa); penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon; implementasi *carbon credit* secara luas; pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan *smart grid*.

b. Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

c. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai,

sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

d. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

e. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (*smart grid*). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan

pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok.

- f. Pembiayaan pembangunan** dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

2. Tahap kedua (2030-2034)

Terwujudnya fondasi yang kuat, Indonesia melakukan akselerasi transformasi. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi semakin dipercepat pada kisaran rata-rata 6,9 – 7,8 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas. Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di luar Jawa termasuk melanjutkan pembangunan IKN dan daerah mitranya, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi. Transisi energi difokuskan pada implementasi *retirement* PLTU batu bara; peningkatan *co-firing*, penggunaan biomassa di industri; penerapan CCS/CCUS untuk sektor yang sulit didekarbonisasi; penyiapan infrastruktur pendukung hidrogen dan amonia rendah karbon; eksplorasi energi laut (arus, gelombang, pasang surut dan perbedaan suhu lapisan laut); *commissioning* dan operasi PLTN komersil pertama; peningkatan kapasitas PLT ET; perluasan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan *smart grid*; dan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik secara masif. Transformasi digital semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital, serta pengembangan kemampuan sebagai produsen digital.

- a. Transformasi tata kelola** difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipatif.

- b. **Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** difokuskan pada digitalisasi sistem penegakan hukum yang modern serta peningkatan kualitas SDM penegakan hukum yang berintegritas dan paradigma aparat penegak hukum pada keadilan restoratif yang mengakomodir korban, masyarakat dan kepentingan bangsa, penguatan kapasitas kelembagaan keamanan nasional, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila, adaptifnya pengelolaan fiskal dan moneter terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan, menguatnya diplomasi proaktif, pengembangan diplomasi yang tangguh, konsolidasi kebijakan sinergis serta infrastruktur dan kelembagaan diplomasi telah bekerja secara efektif, serta pengembangan postur pertahanan yang bersifat lintas medan dengan mengadopsi teknologi *game changer* dan didukung oleh industri pertahanan yang menjadi bagian dari rantai pasok global.
- c. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.
- d. **Pembangunan wilayah** difokuskan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangan superhub ekonomi IKN yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan, tahap transisi energi berikutnya adalah pembangunan island grid di Bali Nusra, Kalimantan, dan Sulawesi serta national grid antara Sumatera-Jawa-Bali Nusra- Kalimantan-Sulawesi. Pembangunan kota besar dan metropolitan dengan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh wilayah khususnya di daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal, dan

perbatasan).

- e. **pembiayaan pembangunan** terjadi optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan telah berkembang sumber pendanaan nonpemerintah.

3. Tahap Ketiga (2035-2039)

Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pada kisaran 6,4 – 7,6 persen per tahun. Transformasi sosial yang dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi difokuskan pada penguatan transformasi yang menghasilkan *economic power house* melalui peningkatan daya saing yang tinggi secara internasional dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran dalam *Global Value Chain*, penguasaan teknologi menengah dan tinggi, dan menjadi hub maritim Asia. Transisi energi difokuskan pada melanjutkan *retirement* PLTU batu bara; peningkatan kapasitas PLT ET, termasuk PLTB *offshore*; implementasi hidrogen dan amonia rendah karbon untuk industri dan transportasi; ekspansi operasi PLTN komersil; pengembangan pilot PLT energi laut peningkatan pangsa dan efisiensi listrik di sektor industri; dan perluasan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan *smart grid*.

a. Transformasi tata kelola ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, partai politik yang modern dan berintegritas, pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang mandiri.

b. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia pada tahap ini difokuskan pada pemantapan Indonesia sebagai kekuatan di kawasan dan pemantapan citra keamanan nasional sebagai daya tarik global, sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan asset dan pengembalian Keuangan negara, serta perbaikan tata Kelola melalui pendekatan *Corruption Impact Assessment*, serta aktor negara dan non-negara yang paham hukum, memiliki paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam

kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi, peningkatan jumlah penerimaan negara dan efektivitas belanja negara, peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan, penguatan diplomasi yang sinergis didukung oleh infrastruktur dan kelembagaan diplomasi yang andal telah mengantarkan Indonesia menjadi *global player*, serta pemantapan postur pertahanan dan tingkat kesiapan operasi menuju pertahanan berdaya gentar kawasan yang didukung oleh industri pertahanan yang berdaya saing global dalam 50 (lima puluh) besar dunia.

- c. Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi; serta pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan.
- d. Pembangunan wilayah** pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Tahap transisi energi berikutnya adalah pembangunan *island grid* di Maluku dan Papua serta *national grid* antara Sumatera-Jawa-Bali Nusa-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua. Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah.
- e. Pembiayaan pembangunan** pada tahap ini difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah.

4. Tahap Keempat (2040-2045)

Indonesia berhasil mewujudkan Indonesia Emas 2045

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi meskipun menurun tetap terjaga cukup tinggi pada kisaran rata-rata 5,4 – 6,7 persen per tahun.

- a. Transformasi sosial** ditekankan pada perwujudan manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing.
- b. Transformasi ekonomi** difokuskan pada perwujudan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi dan poros maritim dunia melalui semakin besarnya SDM dan inovasi Indonesia yang berdaya saing global. Transisi energi difokuskan pada perluasan *retirement* PLTU batu bara; peningkatan kapasitas PLT ET; ekspansi hidrogen dan amonia rendah karbon untuk industri transportasi alat berat; ekspansi operasi PLTN komersil serta kemandirian teknologi PLTN; pengembangan PLT energi laut komersial; dan perluasan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan *smart grid*.
- c. Transformasi tata kelola** difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- d. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** difokuskan untuk penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan dan berkeadaban; Indonesia menuju *zero corruption* dan terselamatkannya aset dan Keuangan negara; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia, menguatnya kepemimpinan Indonesia di Asia-Pasifik serta Indonesia yang aman dan nyaman, terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat, menguatnya pengelolaan fiskal, moneter dan sektor keuangan untuk menghadapi berbagai ancaman VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta berlanjutnya penguatan diplomasi Indonesia yang tangguh telah memantapkan peran dan pengaruh Indonesia sebagai *global player*, serta pertahanan berdaya gentar kawasan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif; Indonesia menjadi negara

percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih diseluruh sektor pembangunan, produk pangan termasuk produk olahan Indonesia mendunia, sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber pangan dan farmakologi, dan penurunan emisi GRK menuju pencapaian *net zero emission*.

e. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.

f. Pembiayaan pembangunan pada tahap ini sinergi pendanaan pemerintah dan nonpemerintah semakin meningkat.

Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis.
5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi

Transformasi Ekonomi

1. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri.
2. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
3. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

4. *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
6. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Transformasi Tata Kelola

1. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
2. Penguatan integritas partai politik.

Tujuh (7) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Landasan Transformasi

Landasan Transformasi

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

1. Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat generaal*.
2. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
3. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
4. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

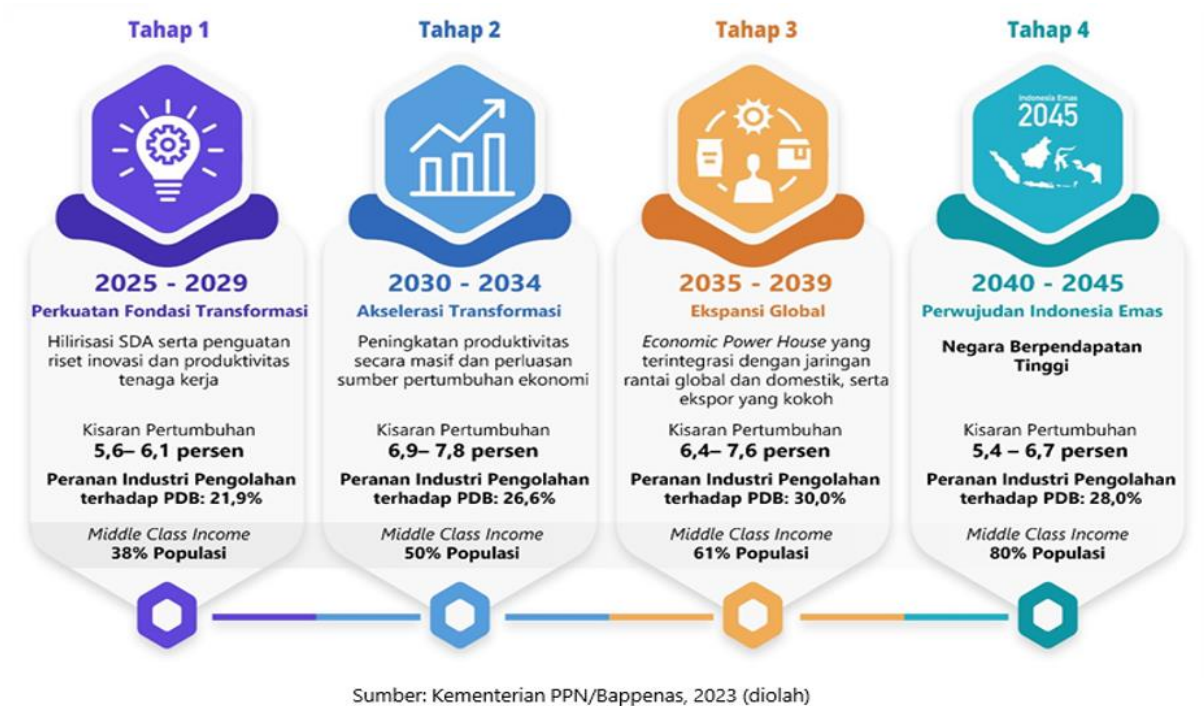
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

1. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Reformasi pengelolaan sampah
3. terintegrasi dari hulu ke hilir.
4. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu *FEW nexus (food, energy, water)*.

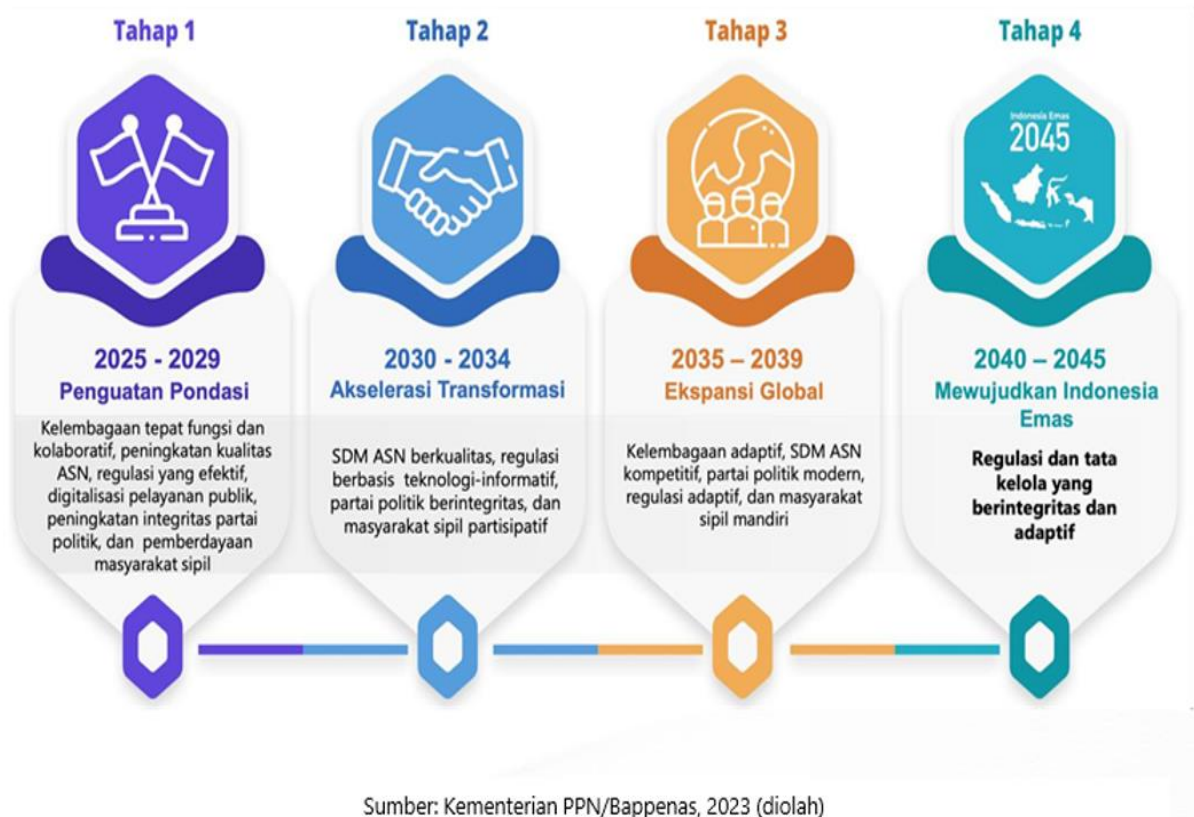
Gambar 4. 1. Tahapan Transformasi Sosial



Gambar 4. 2. Tahapan Transformasi Ekonomi



Gambar 4. 3. Tahapan Transformasi Tata Kelola



Gambar 4. 4. Tahapan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia



Gambar 4. 5. Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

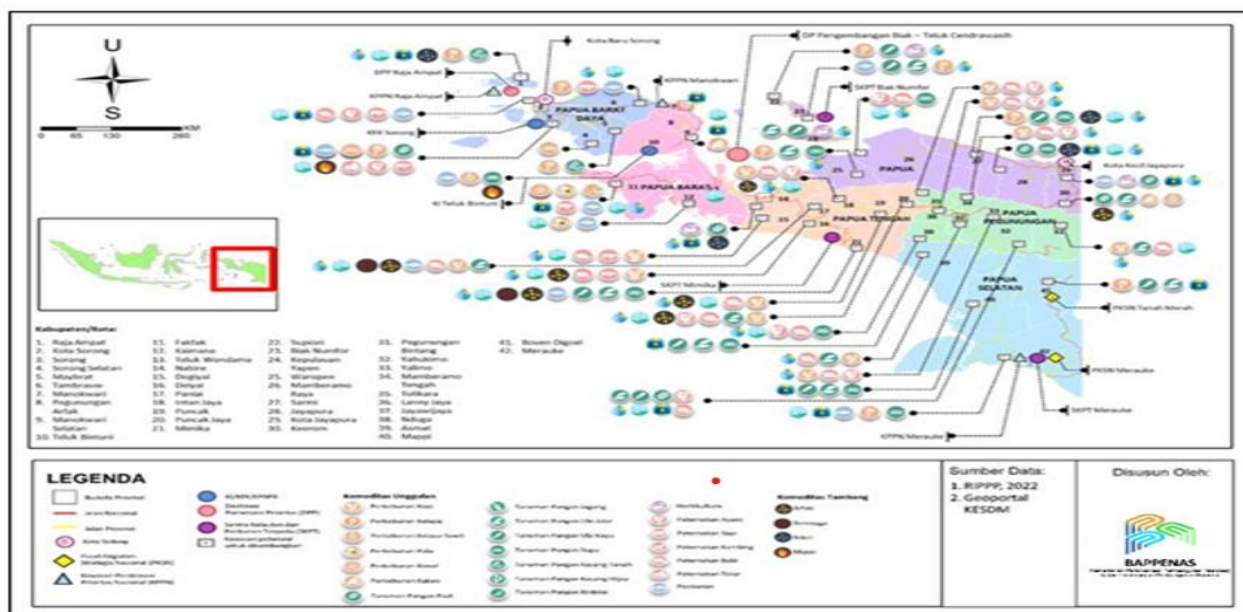
Gambar 4. 6. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas



4.2. Isu dan Potensi Wilayah

Wilayah Papua memiliki beragam komoditas unggulan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang meliputi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan angka produksi dan produktivitas yang tinggi serta memiliki potensi dalam mendukung hilirisasi komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Potensi komoditas yang bernilai tambah tinggi yang dapat dikembangkan di masa depan melalui pengembangan rantai nilainya adalah komoditas kopi, pala, kakao, kelapa, dan perikanan. Pengembangan komoditas pada sektor tanaman pangan dan perkebunan juga didukung dengan adanya KPPN dan Kawasan *Food Estate*, sementara pengembangankomoditas sektor perikanan didukung oleh adanya SKPT **Di samping itu, Wilayah Papua juga memiliki potensi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi wisata bahari, wisata alam, wisata minat khusus, dan wisata budaya.** Untuk mendukung pengembangan pariwisata tersebut, terdapat DPP, KSPN, KPPN, serta destinasi pariwisata pengembangan yang tersebar di Wilayah Papua. Wilayah Papua juga memiliki potensi pengembangan ekonomi kreatif, yaitu seni ukir kayu Asmat, pala Tomandin Fakfak, dan kopi Arabika Baliem Wamena. Pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif ini diharapkan mampu meningkatkan daya ungkit perekonomian dalam mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian wilayah serta meningkatkankeberdayaan masyarakat di sekitar lokasi wisata.

Gambar 4. 7. Peta Potensi Wilayah Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Selanjutnya, Wilayah Papua memiliki potensi di bidang pertambangan dan penggalian mineral logam (emas, tembaga, dan nikel) serta minyak bumi dan gas alam. Pengembangan potensi mineral logam serta minyak bumi dan gas alam tersebut didukung oleh adanya industri pertambangan dan penggalian di Provinsi Papua Tengah serta industri pengolahan pengilangan migas di Provinsi Papua Barat. Potensi pertambangan mineral logam dan migas perlu diarahkan pada hilirisasi produk serta penerapan pertambangan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mengintegrasikan aspek konservasi dan keselamatan pertambangan.

Wilayah Papua juga memiliki potensi energi terbarukan berupa energi surya, air, angin, arus laut, biomassa/biofuel, panas bumi, dan biogas. Potensi energi surya, air, angin, arus laut, biomassa/biofuel, panas bumi, dan biogas di Wilayah Papua masing-masing sebesar 318,09 GW, 35,93 GW, 23,11 GW, 0,49 GW, 0,39 GW, 0,08 GW, dan 0,01 GW. Potensi energi terbarukan ini dapat dikembangkan untuk memenuhi energi kebutuhan energi di Wilayah Papua sekaligus sebagai modal dasar dalam transisi energi di masa depan. Wilayah Papua juga memiliki potensi tenaga air yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri berbasis energi terbarukan seperti *smelter*. Dalam upaya pengembangan potensi komoditas unggulan dan pariwisata, Wilayah Papua masih menghadapi isu strategis yang dijabarkan pada potret pembangunan Wilayah Papua dan analisis *growth diagnostics*. Berdasarkan potret pembangunan Wilayah Papua, masih terdapat isu laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan ekonomi inklusif, indeks pembangunan manusia, rasio gini, prevalensi *stunting*, jumlah kabupaten/kota belum tereliminasi malaria, dan angka partisipasi murni. Di samping itu, isu lain yang dihadapi adalah sarana dan prasarana pelayanan dasar, indeks integritas, indeks risiko bencana, dan indeks ketahanan pangan.

Tabel 4. 1. Pembangunan Wilayah Papua

NO	INDIKATOR	NASIONAL	PAPUA BARAT	PAPUA
Bidang Ekonomi				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,31	2,01	8,97
2	Persentase Penduduk Miskin (persen)	9,57	21,43	26,8
3	Rasio Gini (persen)	0,381	0,384	0,393
4	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,00	5,19	4,14
Bidang Sosial				
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,91	65,89	61,39
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,86	5,37	2,83
Kondisi Kesehatan				
7	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	71,85	66,46	66,23
8	Prevalensi <i>Stunting</i> (persen)	21,6	30	34,6
9	Jumlah Kab/Kota Belum Tereliminasi Malaria (Kab/Kota)	196	13	29
Kondisi Pendidikan				
10	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,69	7,84	7,02
11	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,1	13,21	11,14
12	Angka Partisipasi Murni (APM)			

	- SD (persen)	97,88	94,31	81,66
	- SMP/ sederajat (persen)	80,89	71,38	59,14
	- SMA/ sederajat (persen)	61,97	63,66	47,63
	Jaminan Sosial			
13	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (persen)	86,9	123,0	124,0
	Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos Naker)			
14	- Pekerja Formal (persen)	56,19	167,25	197,56
	- Pekerja Informal (persen)	13,06	104,60	5,86
Bidang Sarana dan Prasarana				
15	Tampungan per Kapita (m3/kap)	57,53	0	0
16	Air Minum Jaringan Perpipaan (persen)	19,47	9,15	6,50
17	Sanitasi Aman (persen)	10,16	4,46	6,47
18	Penanganan Persampahan*** (persen)	33,27	28,62	18,06
19	Rumah Layak Huni (persen)	60,66	53,81	27,28
20	Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh)	1.122	287,57	514,26
21	Porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan (persen)	15,47	5,71	6,10
22	Jangkauan 4G di kawasan pemukiman (persen)	96,97	97,43	50,96
	Kemantapan Jalan*			
	- Nasional (persen)	92,55	75,55	78,74
	- Provinsi (persen)	74,46	63,68	58,04

23	-Kabupaten (persen)	62,26	51,59	57,33
	-Kota (persen)	81,20	98,99	84,82
Bidang Tata Kelola				
24	Indeks Pelayanan Publik		Baik	Baik (Dengan Catatan)
25	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74,43	65,87	63,63
26	Indeks Integritas	71,94	56,42	66,76
Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan				
27	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	135,56	146,77	122,15
28	Indeks Ketahanan Pangan	60,20	45,92	37,80
29	Prevalensi Ketidacukupan Pangan (persen)	10,21	29,38	36,18

Secara umum, berdasarkan analisis *growth diagnostics*, factor penghambat pembangunan ekonomi di Wilayah Papua yang utama adalah SDM pendidikan, infrastruktur, makro dan fiskal, serta regulasi dan institusi. Untuk Provinsi Papua faktor penghambat lainnya adalah SDM kesehatan.

Ekonomi

Pada bidang ekonomi, isu di Wilayah Papua berkaitan dengan pengembangan ekonomi yang belum inklusif di antaranya pengembangan potensi unggulan wilayah dan UMKM. Pengembangan ekonomi yang belum inklusif ditunjukkan dengan nilai IPEI yang masih rendah. Terdapat beberapa indikator dengan capaian rendah, yaitu pertumbuhan per kapita, persentase tenaga kerja yang bekerja penuh, persentase pekerja berpendidikan, rasio rumah tangga dengan akses listrik PLN, penduduk dengan ponsel, tingkat kemiskinan, dan rata-rata konsumsi protein per kapita. Selain itu, hal ini juga ditunjukkan oleh rendahnya peningkatan nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan wilayah (tanaman pangan, perkebunan peternakan, perikanan,

pertambangan, dan pariwisata) yang terintegrasi hulu-hilir. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, belum baiknya akses ke pusat produksi dan pasar, serta rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Di sisi lain, pemberdayaan pelaku UMKM yang belum optimal ditunjukkan salah satunya oleh menurunnya jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM.

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan berbasis industri dan pariwisata, serta pengembangan sentra komoditas unggulan di Wilayah Papua masih belum dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti KI, KEK, dan DPP serta kawasan pengembangan komoditas unggulan seperti SKPT belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kawasan yang dikembangkan. Faktor penyebab belum optimalnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di antaranya adalah belum terintegrasinya konektivitas dari dan menuju pusat pertumbuhan, rendahnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha, serta lokasi yang jauh dari pasar atau sentra produksi.

Sosial

Isu bidang sosial yang dihadapi di Wilayah Papua erat kaitannya dengan kondisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah ditunjukkan oleh tingginya persentase penduduk miskin dan ketertinggalan daerah. Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan ini adalah sebagian besar masyarakat Papua menjadi pekerja informal di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang rendah terutama di Provinsi Papua. Sementara itu, kualitas dan daya saing sumber daya manusia Wilayah Papua masih rendah yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai IPM, HLS, RLS, dan angka melek huruf. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya akses pendidikan dasar dan menengah terutama di Kabupaten Asmat dan Provinsi Papua Selatan. Di samping itu, terbatasnya akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan menyebabkan masih

rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di Wilayah Papua yang ditunjukkan oleh rendahnya umur harapan hidup, tingginya prevalensi *stunting*, dan tingginya penyakit menular seperti malaria dan kusta, dan frambusia. Kondisi tersebut juga memengaruhi status ketertinggalan daerah. Sebagian besar Wilayah Papua mengalami ketertinggalan yang ditunjukkan oleh banyaknya daerah tertinggal, yaitu 30 dari 42 kabupaten/kota dengan penyebab ketertinggalan utama pada keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sarana dan Prasarana

Aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah Papua yang masih rendah juga menjadi tantangan pembangunan di Wilayah Papua.

Sejumlah pelabuhan utama di Kawasan Timur Indonesia, termasuk di Papua, belum berperan sebagai pelabuhan simpul *transshipment* sehingga belum menyumbang pada peningkatan muatan balik. Di samping itu, keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia, termasuk di Papua, menyebabkan kapal-kapal kontainer (*Lift-On/Lift-Off* atau LoLo) belum beroperasi secara optimal. Sementara, kapal RoRo angkutan barang yang memiliki keunggulan untuk angkutan logistik dengan keterbatasan kedalaman perairan dan fasilitas bongkar muat, belum dikembangkan. Belum dikembangkannya *airstrip*, angkutan udara logistik & penumpang serta bandara perairan dan *seaplane* secara optimal, mengakibatkan masih terbatasnya aksesibilitas di daerah terpencil dan perbatasan di Papua. Belum tuntasnya pembangunan Jalan Trans Papua serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibilitas menuju lokasi penggerak ekonomi dan pelayanan dasar. Selain itu, indeks kemahalan konstruksi yang tinggi khususnya di wilayah pegunungan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur dan biaya logistic. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh keragaman kondisi geografis Wilayah Papua, yaitu pegunungan, pesisir dan kepulauan; kemudahan pembebasan lahan khususnya tanah adat/ulayat; serta kondisi keamanan. Pendekatan konektivitas multimoda antarmoda belum secara optimal dilaksanakan di Papua. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum, belum secara optimal dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi di

kota-kota di Papua.

Potensi energi hidro, energi surya, dan energi angin di Wilayah Papua belum dikembangkan dengan optimal dalam menopang transisi energi. Hal ini ditunjukkan oleh pengembangan kapasitas terpasang EBT di Wilayah Papua yang masih minim. Minimnya kapasitas EBT terpasang menghambat akselerasi pengembangan ekonomi hijau dan biru di Wilayah Papua. Selain itu, penyediaan tenaga listrik masih terbatas dan didominasi oleh konsumen rumah tangga dengan tingkat permintaan listrik masih relatif rendah. Sistem ketenagalistrikan Wilayah Papua masih belum terintegrasi dan terdiri dari subsistem kecil terisolasi (*isolated grid*) yang tersebar. Pasokan listrik masih didominasi oleh pembangkit energi fosil. Potensi energi baru dan terbarukan yang besar memiliki keuntungan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan wilayah dan nasional.

Sistem tenaga listrik di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan memiliki 9 sistem dengan beban di atas 2 MW (Sistem Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, Nabire, Serui, Biak, Sarmi, dan Arso) serta 57 unit pusat pembangkit skala lebih kecil di lokasi yang tersebar. Sementara itu, sistem tenaga listrik di Provinsi Papua Barat dan **Papua Barat Daya** memiliki 7 sistem dengan beban di atas 2 MW (Sistem Sorong, Fakfak, Manokwari, Kaimana, Teminabuan, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat) serta 56 unit pusat pembangkit skala lebih kecil di lokasi yang tersebar.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital di Wilayah Papua masih rendah **dan belum merata**. Jangkauan jaringan seluler 4G baru mencapai sekitar 60,49 persen dari total area wilayah pemukiman. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis ekstrem berupa pegunungan, pemukiman yang terisolir dan sangat tersebar, serta rentan terjadinya gangguan keamanan. Pemanfaatan digital di Wilayah Papua juga sangat terbatas dan hanya dilakukan di beberapa daerah perkotaan. Pemanfaatan masih sebatas sebagai media telekomunikasi dan belum menjangkau pemanfaatan di sektor produktif. Kondisi geografis ekstrem Wilayah Papua sangat membutuhkan ketersediaan layanan digital untuk dapat memberikan pelayanan publik secara memadai sampai dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman.

Pembangunan bidang infrastruktur dasar di Wilayah Papua juga belum optimal sehingga memengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Potensi sumber daya air di Wilayah Papua tinggi, tetapi aksesibilitas terhadap sumber air terbatas. Meskipun Wilayah Papua memiliki potensi air terbesar di Indonesia dengan *share* ketersediaan air sebesar 30 persen, populasinya hanya 1,6 persen dari total nasional. Kondisi geografis Wilayah Papua yang sulit menghambat akses air bagi masyarakat di daerah pedalaman. Pola curah hujan tidak menentu sebagai akibat adanya perubahan iklim juga berdampak pada terjadinya banjir ekstrem di wilayah perkotaan, seperti Kota Sorong dan Jayapura. Selanjutnya, permasalahan yang juga masih dihadapi adalah masih rendahnya akses terhadap hunian layak dan terjangkau, sumber air minum layak, dan layanan sanitasi layak. Akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau di Wilayah Papua jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional karena masih kurangnya akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Selain itu, permasalahan dalam memenuhi standar kelayakan fisik bangunan juga perlu diselesaikan. Tingginya harga bahan bangunan serta jasa konstruksi menyebabkan perlu adanya penyesuaian penyediaan hunian layak dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik Wilayah Papua. Rendahnya akses terhadap sumber air minum layak dan layanan sanitasi layak menjadi permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Isu bidang desentralisasi dan otonomi daerah di Wilayah Papua sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi khusus dan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonomi baru. Wilayah Papua dihadapkan pada belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh sangat rendahnya pemanfaatan dana otonomi khusus (Provinsi Papua: pendidikan 33 persen, kesehatan 13,93 persen; Provinsi Papua Barat: pendidikan 19,74 persen, kesehatan 10,25 persen) yang belum sesuai dengan amanat undang-undang otonomi khusus. Faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah kapasitas SDM pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memadai

sehingga berdampak pada pengelolaan dana otonomi khusus yang belum optimal, serta ketidakselarasan perencanaan dan alokasi dana otonomi khusus. Meskipun telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, capaian pembangunan di Wilayah Papua masih lebih rendah dari provinsi lain.

Dalam mempercepat penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, Wilayah Papua telah dimekarkan menjadi empat DOB, yaitu, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Namun demikian, DOB Wilayah Papua masih dihadapkan pada permasalahan ketersediaan SDM pemerintah daerah yang berkualitas, penataan kawasan pusat pemerintahan, serta penataan aset pemerintah DOB.

Selain itu, Wilayah Papua menghadapi permasalahan belum optimalnya tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan dasar, serta keterbukaan informasi publik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai survei kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan public provinsi di Wilayah Papua yang termasuk dalam zona merah (Ombudsman, 2022). Indeks keterbukaan informasi publik dan indeks integritas masih rendah serta tingginya risiko korupsi pemerintah daerah di Wilayah Papua dengan kategori sangat rentan berimplikasi pada belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar di Wilayah Papua. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital masih rendah, yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi SPBE Provinsi Papua dan Papua Barat yang berada pada kategori cukup (Kementerian PANRB, 2021). Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur TIK di Wilayah Papua. Di samping itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Wilayah Papua masih belum optimal, yang ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi khususnya di Provinsi Papua termasuk dalam kategori cukup (CC) (Kementerian PANRB, 2022). Selain itu, penerapan sistem merit pada pemerintah provinsi di Wilayah Papua menunjukkan hasil yang kurang baik, di mana predikat Indeks Sistem Merit berada pada kategori buruk (KASN, 2022).

Penerapan regulasi dan manajemen kelembagaan untuk menangani hambatan ekonomi masih belum optimal yang disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi serta belum optimalnya mekanisme koordinasi antara pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kampung/kelurahan di Wilayah Papua akibat tantangan kondisi geografis dan kapasitas SDM aparatur yang masih rendah.

Rendahnya kemandirian fiskal menjadi isu krusial yang menghambat pertumbuhan. Ketergantungan pada TKD masih sangat tinggi, dengan proporsi TKD di Provinsi Papua Barat mencapai lebih dari 90 persen, sementara di Provinsi Papua mencapai lebih dari 80 persen. Kondisi TKD relatif lebih baik di beberapa kabupaten/kota yang menjadi pusat aktivitas tambang seperti Kab. Teluk Bintuni, walaupun tetap menunjukkan ketergantungan TKD cukup tinggi (di atas 70 persen). Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya sumber sumber pendapatan dari provinsi-provinsi di Wilayah Papua. Selain itu, kapasitas fiskal daerah di Wilayah Papua cenderung rendah. Di sisi lain, kualitas belanja daerah di Wilayah Papua masih rendah. Berdasarkan data APBD 2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 25,32 persen, sedangkan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan aset sebesar 20,99 persen terhadap total belanja daerah tahun 2022, sehingga menyebabkan belum optimalnya pemenuhan SPM dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Isu bidang stabilitas pertahanan dan keamanan Wilayah Papua berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan cakupan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan belum optimal. Wilayah pegunungan Papua masih dihadapkan pada gangguan keamanan dan ketertiban umum, yang ditunjukkan dengan tingginya persentase rumah tangga yang khawatir berjalan sendirian di siang hari. Di samping itu, pada kawasan perbatasan Wilayah Papua dengan Papua Nugini masih ditemukan adanya kegiatan ilegal dan maraknya praktik *IUU Fishing* di perairan Wilayah Papua, terutama di wilayah perbatasan laut dengan negara Filipina, Palau, dan Australia (WPP 717 dan 718) yang menghambat pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.

Sosial Budaya dan Ekologi

Dari sisi ketahanan sosial budaya, Wilayah Papua menghadapi isu rendahnya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum

adat yang berdampak pada belum optimalnya penataan tanah adat/ulayat. Perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat merupakan langkah awal untuk penataan tanah adat/ulayat serta rendahnya kualitas keluarga dan tingginya ketimpangan gender yang akan memengaruhi pembangunan infrastruktur, akan tetapi baru sebagian kecil kabupaten/kota yang telah menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat di Wilayah Papua. Sebagai wilayah yang multikultural, Wilayah Papua memiliki ratusan suku dengan bahasa dan budaya yang beragam dengan norma adat yang kuat. Namun, Wilayah Papua dihadapkan pada belum optimalnya upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai indeks pemajuan kebudayaan, terutama pada dimensi ekonomi budaya, pendidikan, warisan budaya, budaya literasi, dan gender. Dalam hal kualitas keluarga, peran dan fungsi keluarga dalam mendukung pembentukan sumber daya manusia berkualitas, khususnya pada masyarakat adat masih belum optimal. Selain itu, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tingginya perkawinan anak menunjukkan tingginya ketimpangan gender di Wilayah Papua.

Terkait dengan ketahanan ekologi, Wilayah Papua dihadapkan pada kondisi risiko bencana tinggi, rendahnya kemandirian pangan, serta belum optimalnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya risiko bencana terutama ancaman bencana banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Frekuensi kejadian bencana di Wilayah Papua didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor (BNPB, 2022). Selain bencana hidrometeorologi, Wilayah Papua memiliki potensi bahaya geologi yang terdiri dari gempa tektonik di sepanjang jalur patahan Ransiki, Sorong, dan Tarera Aiduna dan tersebar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Zona *megathrust* di sepanjang sisi utara Wilayah Papua berpotensi menimbulkan bahaya tsunami yang mengancam kawasan pariwisata, salah satunya Raja Ampat dan kawasan strategis lainnya. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan risiko bahaya yang terdapat di masing-masing wilayah dan terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana, khususnya di daerah tertinggal di Wilayah Papua, mengakibatkan belum optimalnya penanganan kebencanaan.

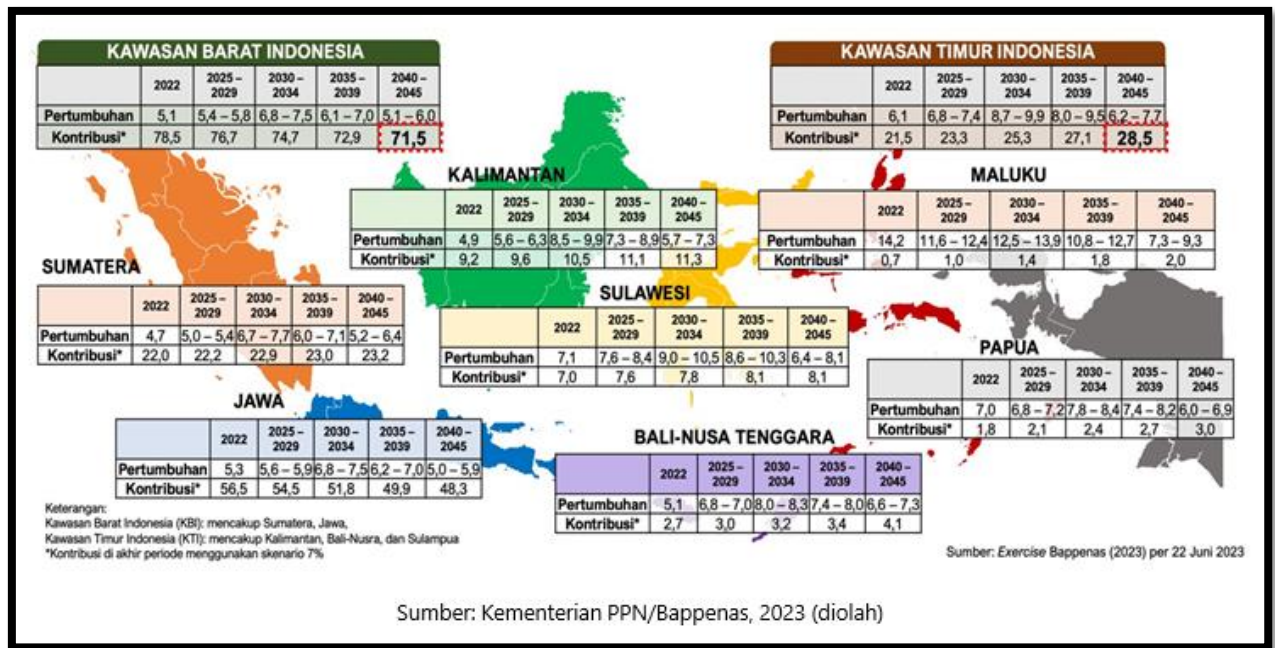
Selanjutnya, belum optimalnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, salah satunya dikarenakan oleh belum baiknya pengelolaan hutan yang ditunjukkan oleh tingginya angka deforestasi baik pada kawasan hutan maupun pada areal penggunaan lain (APL)/bukan kawasan hutan. Selain itu, tekanan terhadap hutan yang meningkat disebabkan oleh adanya tuntutan pembangunan untuk pemekaran daerah. Isu lainnya adalah masih sering terjadinya kerusakan lingkungan pada lahan pasca tambang serta belum optimalnya pengelolaan lahan bekas tambang yang memberikan nilai tambah ekonomi wilayah. Di sisi lain, tingginya kerawanan pangan di Wilayah Papua, yang ditunjukkan oleh prevalensi ketidakcukupan pangan yang tinggi, akan berdampak pada belum optimalnya pembangunan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua.

4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok pendapatan, serta kelompok rentan, terdapat 3 indikator yang ditetapkan Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok pendapatan, serta kelompok rentan, terdapat 3 indikator yang ditetapkan

Tabel 4. 2. Indikator Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Indikator	Baseline 2022	Target 2045
Indeks Williamson	0,778	0,750
Kontribusi KTI terhadap PDB (persen)*	21,5	28,5
Stok Infrastruktur terhadap PDB(persen)	46,0	62,0



4.3.1. Arah Kebijakan Wilayah Papua

Wilayah Papua berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 1,8 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Papua berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 3,0 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 6,9-7,6persen per tahun. Pembangunan Wilayah Papua selama 20 tahun mendatang diarahkan pada **Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif** untuk mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh penguatan tatakelola dan pembiayaan pembangunan wilayah. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Dalam mendukung pembangunan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi prioritas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar secara merata, penguatan pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta peningkatan inovasi dan tata kelola layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pembangunan juga perlu

memperhatikan aspek sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).

Kedua, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan untuk dapat meningkatkan keterkaitan pembangunan desa (kampung)-kota, optimalisasi kawasan pertumbuhan eksisting dengan fokus pada peningkatan investasi melalui PMA dan PMDN dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta pembangunan ekosistem kepariwisataan yang meliputi kawasan pariwisata dengan kelas premium dan *mass tourism*. Di sisi lain, perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP.

Ketiga, peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, perumahan, telekomunikasi, dan energi listrik) serta konektivitas intra dan antarwilayah dari dan menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi yang menjangkau seluruh Wilayah Papua. Dalam hal ini, pembangunan Wilayah Papua perlu berbasis distrik dan kampung terutama di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.

Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif. didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kebijakan berbasis data dan informasi. Diperkuat dengan pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara serta peningkatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, diperlukan penguatan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan stabilitas wilayah melalui penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menciptakan Wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai. Hal-hal di atas juga perlu ditunjang dengan penguatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah; pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi; serta penguatan kerja sama antarwilayah dan peranan distrik dalam peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di sisi lain, perlu dilakukan penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia

usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kelima, peningkatan ketahanan sosioekologi dalam mewujudkan Wilayah Papua yang berbudaya, tangguh bencana, serta adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan menjadi hal mendasar untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Wilayah Papua di masa mendatang. Hal ini didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat serta pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang menjadi kebijakan terobosan pembangunan Wilayah Papua adalah sebagai berikut:

4.3.2. Arah Kebijakan Transformasi

a. Transformasi Sosial

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk menuju Papua Sehat; serta meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama untuk menuju Papua Cerdas, akan dilakukan berbagai upaya transformasi sosial khususnya dalam pengembangan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan yang difokuskan pada kebijakan sebagai berikut:

Percepatan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan melalui:

- (i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- (ii) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP serta *telemedicine*, dan *mobile health services* (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan

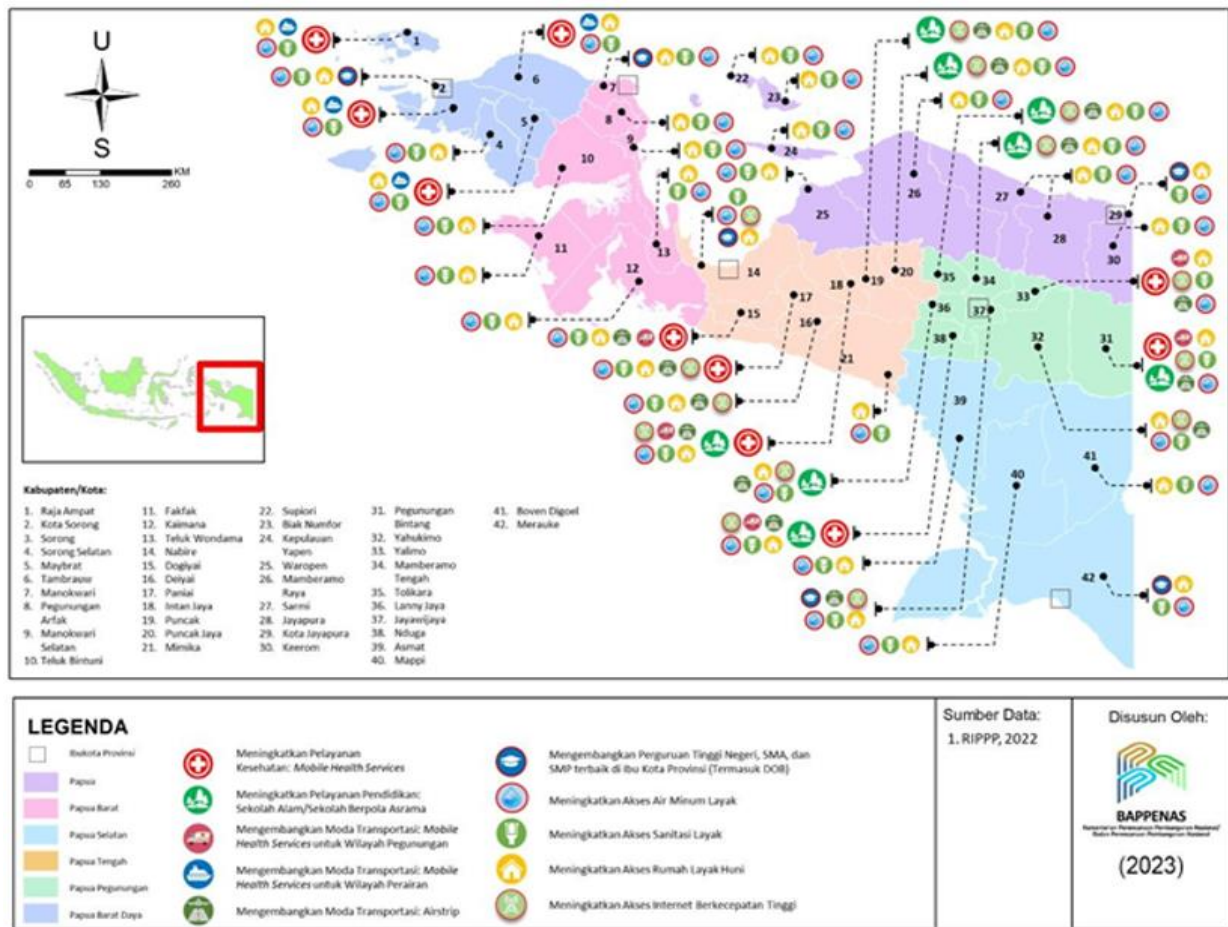
moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau

- (iii) Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama di Papua dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses;
- (iv) Percepatan penurunan stunting terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal;
- (v) Percepatan eliminasi malaria;
- (vi) Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan dan pendayagunaan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses dan perbatasan;
- (vii) Pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; serta
- (viii) Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata di semua wilayah, termasuk jaringan internet, listrik dan sarana prasarana penanganan limbah medis.

Percepatan pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, yang dilakukan melalui:

- (i) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui sekolah alam dan sekolah berpola asrama;
- (ii) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya berbasis gugus pulau;
- (iii) Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (*STEAM*) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah

Gambar 4. 8. Transformasi Sosial Menuju Papua Sehat dan Cerdas Wilayah Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

- (iv) Papua dalam bidang pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;
- (v) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa danguru, dan penguatan sekolah terbuka;
- (vi) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP;
- (vii) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi Wilayah Papua di bidang industri, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI;
- (viii) Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (life skills)

yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya);

- (ix) Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif; serta
- (x) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

b. Transformasi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing untuk menuju Papua Produktif, dibutuhkan upaya transformasi ekonomi di Wilayah Papua dengan koridor **“Industri Kimia Dasar dan Agro”** selama dua dekade ke depan yang difokuskan pada pengembangan potensi komoditas unggulan, pengembangan industri berbasis komoditas unggulan, dan pengembangan potensi pariwisata melalui kebijakan.

Pengembangan komoditas unggulan bernilai tambah tinggi dan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan, yang dilakukan melalui:

- (i) Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis migas, mineral, dan kimia dasar melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis industri, pariwisata, dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (*science technopark*);
- (ii) Penguatan sentra industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal dan memperhatikan daya dukung lingkungan serta risiko bencana;
- (iii) Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan

- pemasaran komoditas unggulan;
- (iv) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/food estate sagu dan padi dengan modernisasi teknologi pertanian;
 - (v) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik dan Australia;
 - (vi) Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM tenaga kerja lokal utamanya terkait pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata; serta
 - (vii) Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dengan melibatkan masyarakat lokal;

Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif, yang dilakukan melalui:

- (i) Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital
- (ii) Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis bahari dan minat khusus dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus;
- (iii) Pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat; serta
- (iv) Pengembangan ekonomi kreatif, yaitu seni ukir kayu Asmat, pala Tomandin Fakfak, dan kopi Arabika Baliem Wamena.

Pembangunan ketenagalistrikan di Wilayah Papua diarahkan untuk:

- (i) Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia;
- (ii) Penguatan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang bersumber dari layanan yang lebih berkualitas;
- (iii) Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dalam mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;

serta

- (iv) Pengembangan sistem interkoneksi dalam meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan di wilayah Wilayah Papua dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi:

- (i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok;
- (ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya di sektor-sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial); serta
- (iii) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta meningkatkan kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital) terutama bagi OAP.

c. Transformasi Tata Kelola

Dalam rangka mewujudkan Wilayah Papua yang sehat, cerdas, dan produktif, dibutuhkan upaya transformasi tata kelola melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sinergi kerja sama antar pemangku kepentingan dan masyarakat, serta dukungan penyelenggaraan otonomi khusus dengan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisien, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, melalui:

- (i) Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses pra regulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan;
- (ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- (iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;

- (iv) Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
- (v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- (vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
- (vii) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung;
- (viii) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi; serta
- (ix) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

4.3.3. Arah Kebijakan Landasan Transformasi

a. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Keamanan Nasional harus diwujudkan untuk meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan pengelolaan perekonomian dalam menunjang terwujudnya Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif 2045. Hal ini menjadi faktor penting dalam rangka melaksanakan kebijakan transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola.

Arah kebijakan untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas ekonomi di Wilayah Papua adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan, khususnya di Kabupaten Asmat, melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat;
- (ii) Peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan

- ekonomi didukung oleh peningkatan konektivitas dan mobilitas pada kawasan perbatasan;
- (iii) Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara di Provinsi Papua, Kabupaten Asmat dan Provinsi Papua Selatan;
 - (iv) Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia) dan WPP 717 (berbatasan dengan perairan Palau);
 - (v) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial;
 - (vi) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; serta
 - (vii) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dalam rangka transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi perlu diperhatikan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat yang lebih adaptif terhadap kondisi perubahan sosial dan lingkungan.

Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Wilayah Papua adalah sebagai berikut:

- (i) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
- (ii) Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama di Wilayah Papua;
- (iii) Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas

masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan;

- (iv) Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;
- (v) Pengembangan sentra produksi pangan/food estate seperti sagu dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif;
- (vi) Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam;
- (vii) Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
- (viii) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi;
- (ix) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana;
- (x) Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- (xi) Penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan;
- (xii) Peningkatan kapasitas pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat;
- (xiii) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan

- resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama di Wilayah Papua;
- (xiv) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; serta
 - (xv) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Papua.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu di Wilayah Papua yaitu:

- (i) Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat;
- (ii) Pembangunan bendungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan dan kesiapan pemanfaatan;
- (iii) Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan;
- (iv) Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai; serta
- (v) Pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.

4.3.4. Kerangka Implementasi Transformasi

a. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana diarahkan melalui:

- (i) Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan daerah terutama Daerah Otonom Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik;
- (ii) Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan;

- (iii) Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan di Wilayah Papua;
- (iv) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Papua;
- (v) Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
- (vi) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
- (vii) Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan- pelabuhan simpul utama di Wilayah Papua sebagai transshipment hub domestik melalui pengembangan Pelabuhan Amamapare (Papua Tengah) dan Pelabuhan Sorong (Papua Barat Daya), serta konektivitas dan hub ekspor ke kawasan Pasifik melalui pengembangan Pelabuhan Depapre (Papua), ke kawasan Asia Timur melalui pengembangan Pelabuhan Biak (Papua), dan ke kawasan Australia melalui pengembangan Pelabuhan Merauke (Papua Selatan);
- (viii) Pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;
- (ix) Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Papua;
- (x) Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Mopah di Merauke) pembangunan dan standardisasi *airstrip*, pengembangan bandara perairan (*waterbase*) dan *seaplane* sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Papua
- (xi) Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Papua;
- (xii) Pembangunan waduk multiguna untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, dan energi listrik;
- (xiii) Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan

berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung; serta

- (xiv) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang di kota-kota besar dan sedang seperti Jayapura dan Sorong, serta kota lainnya.

Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar, yaitu:

- (i) Pemenuhan akses terhadap hunian layak dan terjangkau yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah pesisir dan pegunungan;
- (ii) Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
- (iii) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
- (iv) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air;
- (v) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pengelola layanan air minum;
- (vi) Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan dari hulu sampai hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada ekonomi sirkuler dan karakteristik wilayah; serta
- (vii) Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.

b. Kestinambungan Pembangunan

Arah kebijakan kesinambungan pembangunan meliputi:

- (i) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan

- daerah;
- (ii) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
 - (iii) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
 - (iv) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
 - (v) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; serta
 - (vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*

4.3.5. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

Visi Misi Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, maka dilakukan penyesuaian dengan dokumen RIPP Tahun 2022-2041, yang memuat perumusan langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Papua untuk 20 tahun mendatang. Langkah-langkah strategis tersebut termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) 2022-2041. RIPP merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk tahun 2022-2041, secara detail diatur di dalam amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang berimplikasi pada Percepatan pembangunan Papua Selatan termasuk kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Papua Selatan, dimana hal ini menitik beratkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mendukung hal tersebut, terdapat visi percepatan pembangunan Papua 2022-2041 yaitu "Terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera". Adapun Misi dan sasaran serta indikator yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **Misi 1**, Yaitu Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, **menuju Papua Sehat**, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh

penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.

2. **Misi-2, yaitu :** Pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, **menuju Papua Cerdas**, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
3. **Misi-3,**Yaitu meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, **menuju Papua Produktif**, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.





4.4. Visi dan Misi Provinsi Papua Selatan

4.4.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, dimana Provinsi Visi yang dirumuskan mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Papua Selatan sampai dengan Tahun 2045. Adapun Visi Papua Selatan Tahun 2025-2045:

**“Papua Selatan yang Sejahtera, Adil, Maju dan Makmur
Berkelanjutan Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim”**

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi Masyarakat provinsi Papua Selatan OAP dan non OAP mampu mendapatkan kesejahteraan jiwa raga, sejahtera lahir bathin, sejahtera ekonomi, sejahtera sosial budaya. Dengan kata lain terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil) serta kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata.

Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada pelayanan dasar, sehingga mampu meningkatkan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.

Adil

Mengandung arti di mana segenap komponen masyarakat Papua selatan mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Disamping itu, keadilan tercermin dari adanya kesempatan yang sama dari semua kelompok masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, adanya perlindungan dan kesamaan di depan hukum, di dalamnya tidak ada kesenjangan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, antar gender, dan antar kelompok masyarakat

Makmur berkelanjutan

Setelah mendapatkan kesejahteraan dan keadilan maka masyarakat Papua Selatan diharapkan dapat mencapai hidup Sentosa, Aman, Damai, Nyaman, Sejahtera, Selamat, Tenang, Tenteram, Senang, Bahagia, Bangga, Gembira, Puas, Riang, Sukacita, Sukaria, Berkecukupan, Bugar, Segar, Sehat, Mampu, Bisa, Cakap, Kapabel, Kuasa, Kuat, Pandai, Pintar, Sanggup, Terdaya, Kreatif, Produktif, Berakal, Berilmu, Berpendidikan, Berpengetahuan, Bestari, Terpelajar, Berakhlaq/beretika Baik.

Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim

Pilihan pendekatan pembangunan yang berfokus atau berdasarkan pada karakter, nilai dan potensi lokal wilayah budaya Ha-anim yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di selatan Papua dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ha-anim adalah tipe wilayah budaya dengan karakter kepemimpinan manusia berwibawa/big man yang terdiri dari suku suku yang menyebar di bagian selatan Papua antaral lain suku besar malind anim di kabuapten Merauke, suku korawai kombai sampai myyu mandobo di kabuapten Bpven digoel, Auyu, yaghai di kabuapten Mappi dan 12 FAR suku serta 8 suku pedalaman di Asmat seperti sawi, wiyagar dst. Kebudayaan sebagai respon dari pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia Ha-anim, kemudian membentuk berbagai pranata budaya seperti pranata ekonomi, pendidikan, perkawianan, kekerabatan, religi dan lainnya. Masing-masing pranata budaya terdiri atas 3 gejala budaya yaitu, sistem budaya (idea), sistem sosial (activity) dan kebudayaan materi (artifact). Papua Selatan dengan pendekatan pembangunan berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim berarti bertumpu pada enam nilai dasar orang papua yaitu:

- 1). Nilai tentang Kepemilikan Modal atau Kekayaan
- 2). Nilai tentang Pekerjaan
- 3). Nilai tentang Waktu
- 4). Nilai tentang Hubungan Sosial
- 5). Nilai tentang Tanah, Hutan dan Air Nilai dan
- 6) Nilai tentang Jaminan Sosial.

Masyarakat secara turun-temurun dalam adaptasi ekologi dengan bentang alam di selatan yang datar, berawa, bakau dan memiliki sungai sungai besar membentuk karakter kearifan nilai yang sangat beragam tetapi disatu sisi memiliki kesamaan, Masyarakat adat Papua selatan/Ha-anim memiliki pengetahuan pengelolaan tanah dan kekayaan alam bersumber dari pengetahuan kearifan lokal/adat dan pengalaman sosial turun temurun yang diwariskan, dikonstruksikan dari sistem nilai dan norma adat, inovasi pengetahuan, dan juga memuat pengaturan pemanfaatan, tata cara produksi dan distribusi manfaat, hingga pengawasan dan pemberian sanksi. Secara bioetik masyarakat Ha-anim terbingkai dalam aliran Totemisme yang menempatkan alam sebagai leluhur (amai) yang pemurah. Pelestarian alam dan komponen-komponen biologis merupakan kewajiban setiap orang dan hal ini tercermin dalam langgam lagu tradisional yang sering dikumandangkan dalam berbagai upacara adat. Perempuan adat mempunyai hak dan peran penting dalam perencanaan, penataan dan pengelolaan ruang, mereka berada digaris depan pewaris pengetahuan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, mulai dari urusan domestic, melayani, menyediakan dan menyajikan makanan dan kehidupan keluarga, hingga merawat mengamankan ruang sumber kehidupan. Peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dipotret dalam seni tradisi Eb dalam masyarakat adat suku Yaqhai (Yahrai), Kabupaten Mappi. Meskipun, hak dan peran perempuan adat sering diabaikan dan mengalami diskriminasi. Ini harus menjadi modality dalam upaya membangun orang asli Papua. Hadirnya kebijakan otonomi khusus di Papua Selatan memberikan peluang utama untuk membangun rumah sendiri sesuai karakteristik budaya Ha-anim yang kuat dan dapat terintegrasi dengan nilai baru dalam prespektif percepatan pembangunan di semua aspek kehidupan manusia dan lingkungan Ha-anim.

4.4.2. MISI

Misi merupakan upaya yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Provinsi Papua guna menjamin tercapainya visi pembangunan jangka panjang daerah, dalam mewujudkan visi pembangunan

Provinsi Papua, ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal, pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan
3. Memperkuat dan meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Papua Selatan
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Papua Selatan
5. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, serta konektivitas antar daerah, wilayah dan daerah tertinggal, terluar, terdepan
6. Mempercepat pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Papua Selatan, keadilan untuk semua serta mengentaskan kemiskinan.

4.5. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Asmat

4.5.1. Visi Kabupaten Asmat

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asmat RPJPD Tahun 2024-2045, dilakukan dengan memperhatikan hasil capaian Visi Misi perodesasi sebelumnya, analisis dan perumusan isu-isu strategis dan memperhatikan Visi Misi Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 serta Visi Misi Indonesia Emas Tahun 2045 serta arahan RIPP Tahun 2025-2045. Berdasarkan kondisi obyektif dan permasalahan spesifik daerah dan kondisi tersebut diatas, maka visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Asmat untuk periode Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

**"Asmat Sebagai "Center Of Excellence (CoE) Peradaban Pelestarian Budaya
Indonesia Timur" CoE P2BIT**



Hasil Forum, Kick off & Forum Konsultasi Publik, Grand desain konsep "Asmat pusat Peradaban pelestarian Budaya

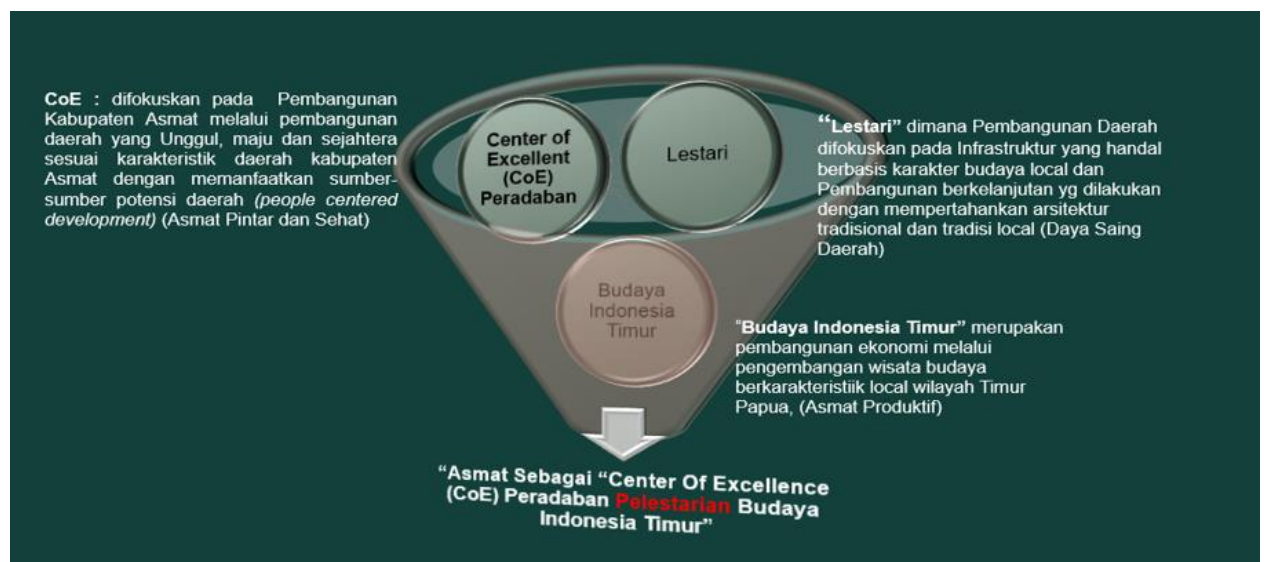
Center of Excellent Peradaban merupakan Konsep yang menggambarkan tentang Tujuan Pembangunan Kabupaten Asmat melalui pembangunan daerah yang Unggul, maju dan sejahtera sesuai karakteristik daerah kabupaten Asmat dengan memanfaatkan sumber-sumber potensi daerah. Dalam hal ini Konsep CoE P2BIT diintegrasikan Konsep Papua Sehat, Cerdas, dimana terdapat 3 unsur yang menjadi pelaku pembangunan di Kabupaten Asmat yaitu Manusia (OAP) sebagai subjek pembangunan (*people centered development*) yang mencerminkan asset daerah dimana terdapat 3 unsur yang terlibat yaitu: Manusia, adalah sebuah unsur pertama, sedangkan pusat utamanya adalah **akal, berpikir dan intuisi**. Ketiga unsur ini akan diintegrasikan guna pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dimana Masyarakat Asmat yang unggul dan Maju menjadi kata kunci dalam hal ini. **"Lestari"** dimana Pembangunan Daerah difokuskan pada Infrastruktur yang handal berbasis karakter budaya local dan Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan **mempertahankan arsitektur tradisional dan tradisi local** untuk menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat dalam pengaruh pembangunan, daya saing daerah menjadi kata kunci dalam hal ini. Sedangkan **"Budaya Indonesia Timur"** merupakan pembangunan ekonomi melalui pengembangan

wisata budaya berkarakteristik local wilayah Timur Papua, **Asmat Produktif** menjadi kata kunci dalam hal ini.



Forum Konsultasi Publik, Grand desain konsep "Asmat pusat Peradaban pelestarian Budaya Indonesia"

Dimensi pembangunan jangka panjang dari ketiga konsep tersebut dijelaskan pada diagram sebagai berikut :



4.5.2. Misi Kabupaten Asmat

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Asmat diimplementasikan melalui misi pembangunan daerah. Misi pembangunan Kabupaten Asmat merupakan komitmen penentu keberhasilan visi pembangunan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dirumuskan selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Selanjutnya, misi akan menjadi panduan umum dalam merumuskan arah kebijakan guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. Adapun rumusan Visi Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045:

"Asmat Sebagai "Center Of Excellence (CoE) Peradaban Pelestarian Budaya *Indonesia Timur*"

Konsep rumusan Visi ini dibangun sebagai usaha bersama pemerintah kabupaten dan masyarakatnya untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan, penilaian dan langkah pada pelaksanaan pembangunan. Pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Asmat yang Unggul, Maju, berdaya saing dan Sejahtera membutuhkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara sinergis.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Asmat, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Asmat, sebagai berikut:

1. Mewujudkan **Transformasi social** melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas
2. Mewujudkan **transformasi ekonomi** perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya
3. Mewujudkan **infrastruktur** yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas
4. Mewujudkan perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing dan berkelanjutan
5. Mewujudkan **transformasi tata Kelola** melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan professional dan keamanan Wilayah

6. Mewujudkan **ketahanan sosial budaya dan ekologi** berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP) Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan
7. Mewujudkan **kesinambungan Pembangunan dan Kerjasama** wilayah antar daerah, nasional dan internasional Kabupaten Asmat.

Penjelasan dari masing-masing misi di atas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi social melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas

Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menegaskan tentang pentingnya aspek Sumber Daya Manusia khususnya melalui *People center development* OAP warga Asli Papua sebagai subjek pembangunan untuk diprioritaskan sebagai asset jangka panjang dan berkesinambungan. Hal tersebut membutuhkan strategi dalam menyiapkan warga Asli Papua untuk memegang tanggung jawab dalam menggerakkan roda kehidupan ke arah yang lebih baik. Untuk itulah dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter positif dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang baik. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia unggul. Pembangunan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Asmat bertujuan menggerakkan segala aspek, baik aspek daya saing, sarana dan prasarana, sistem dan manajemen maupun aspek pendukung lainnya.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal.

Pembangunan Ekonomi di kabupaten Asmat dilakukan dengan mengembangkan produk ekonomi lokal dan daerah yang berbasis potensi unggulan daerah, dengan menggunakan pendekatan pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan kompetensi daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Peningkatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah diharapkan menjadi langkah yang tepat mengingat komoditas

unggulan daerah dapat ditingkatkan serta diharapkan mampu mengembangkan sumber daya alam melalui ekonomi kreatif dan kerakyatan berbasis karakteristik lokal.

3. Mewujudkan infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas

Aksesibilitas dibutuhkan untuk menghubungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Konektivitas antar wilayah yang terbatas akibat faktor geografis dan infrastruktur perhubungan yang kurang memadai mengakibatkan hambatan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Asmat sehingga kemudahan untuk mencapai suatu tempat (aksesibilitas) masih terbatas.

Salah satu dimensi aksesibilitas wilayah yang penting adalah hubungan yang terbentuk antara kabupaten Asmat dengan wilayah kabupaten lainnya sebagai wilayah konektivitas yang di jadikan pusat-pusat pertumbuhan. Perkembangan wilayah tidak bisa terlepas dari kemudahan untuk mencapai suatu tempat (aksesibilitas). Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya.

Peningkatan konektivitas melalui transportasi laut dan penyeberangan di Kabupaten Asmat menjadi pelabuhan penghubung dari trayek kapal Tol Laut dimana Pelabuhan Agats menjadi penghubung angkutan logistik antar daerah melalui kapal tol laut. Dengan kapal-kapal yang lebih kecil membawa logistik melalui sungai-sungai ke wilayah tengah Papua seperti Dekai, Yahukimo, Nduga, dan sekitarnya, sehingga barang-barang bisa sampai dipuncak pegunungan.

Dengan adanya pengiriman logistik melalui sungai, hal ini dapat menekan biaya pengiriman. Selain itu kapal-kapal tersebut juga dapat melayani warga masyarakat di sepanjang aliran sungai. Sehingga itu dibutuhkan upaya maksimal dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi di Papua, sejalan dengan implementasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemerataan pembangunan melalui konektivitas ini

diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, baik berhubungan dengan mobilitas fisik, misalnya mengakses jalan raya, puskesmas, sekolah, pusat kebudayaan, lokasi industri dan rekreasi maupun aktivitas non fisik seperti kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan, mengakses informasi, mendapat perlindungan dan jaminan hukum. Melihat kondisi Kabupaten Asmat maka perlu adanya titik-titik pusat pertumbuhan. Pembangunan dipusatkan di wilayah-wilayah tertentu yang diperkirakan dapat menjadi pusat pertumbuhan yang mampu menarik daerah-daerah sekitarnya. Kawasan sentral yang menjadi pusat pertumbuhan diharapkan dapat mengalirkan proses pembangunan ke wilayah-wilayah sekitarnya sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai. Adanya pusat-pusat pertumbuhan ini maka perlu adanya jalur penghubung sebagai koridor sirkulasi guna penentuan batas wilayah. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan wilayah dapat bersinergi dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan merata.

Memahami pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia, pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek dan dampak lingkungan hidup. Kemauan untuk saling menjaga kelestarian alam agar dapat melindungi lingkungan alam agar terwujud keseimbangan dalam kehidupan antara manusia dan lingkungan hidup.

4. Mewujudkan perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing dan berkelanjutan

Pembangunan Ekonomi di kabupaten Asmat dilakukan dengan mengembangkan produk ekonomi lokal dan daerah yang berbasis potensi unggulan daerah, dengan menggunakan pendekatan pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan kompetensi daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dan mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah diharapkan menjadi langkah yang tepat mengingat komoditas unggulan yang masih dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta kemampuan

sumber daya alam melalui ekonomi kreatif dan kerakyatan. Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan ekonomi lainnya adalah penciptaan wirausahawan. Karena wirausahawan inilah yang akan menciptakan ekonomi dan keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplotasi kemampuan SDM sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan upaya ini daerah mampu mengenali, menemukan dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing (*knowledge based economy*) sekaligus berbasis sumber daya daerah (*local resources based economy*). Dengan demikian, Kabupaten Asmat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Masyarakat

5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional

Misi ini ditujukan untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola Pemerintahan secara umum di Indonesia dan khususnya Pemerintah Daerah, guna pencapaian kondisi yang kondusif. Hal tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya di Kabupaten Asmat dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan teknis Pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabel, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, egaliter, visioner & strategis, partisipatif dan mengutamakan supremasi hukum. Perbaikan birokrasi dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Pelayanan kepada masyarakat khususnya di kampung dan pedalaman yang sebelumnya tidak tersentuh, merupakan perhatian utama dari misi pembangunan ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP) Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan.

Misi ini bertujuan menjelaskan Hubungan kondisi Tata kehidupan manusia, alam dan lingkungan di kabupaten Asmat melalui peran penting penduduk Asli Papua dalam menciptakan dan membangun wilayahnya sesuai dengan kearifan lokal dengan mempertimbangkan adanya relasi berbasis kerangka suku dan klan serta alam. Ini mempengaruhi berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi yang di pusatkan pada kreatifitas manusia Asmat dalam membangun wilayahnya dimasa yang akan datang.

7. Mewujudkan kesinambungan Pembangunan dan Kerjasama wilayah antar daerah, nasional dan internasional Kabupaten Asmat

Misi ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan atau kesinambungan pembangunan kabupaten Asmat pada seluruh sektor baik itu dalam dan luar negeri.

4.6. SASARAN VISI

Sasaran visi pada dasarnya merupakan upaya yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Adapun sasaran visi Kabupaten Asmat yang telah diselaraskan dengan RPJPN adalah sebagai berikut:

RPJPD PAPUA SELATAN 2025-2045				RPJPD KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025-2045			
Papua Selatan Sejahtera, Adil, Maju dan Makmur berkelanjutan Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim				""Asmat Sebagai "Center Of Excellence (CoE) Pelestarian Budaya Indonesia Timur" CoE P2BIT""			
Sasaran Visi	Indikator	2025	2045	Sasaran Visi	Indikator	2025	2045
Pendapatan PDRB Per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	63,15-63,57*	465,54 - 743,00 *	Pendapatan PDRB Per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	1.934	5.485

	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	35,31*	62,89*		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	n/a	n/a
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	5,45-5,63*	9,01-11,18*		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41.25	71.25
Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	16,50-17,00*	0.08-0,58*	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	25.54	5,02
	Rasio Gini (indeks)	0.372*	0,318-0,341*		Rasio Gini (indeks)	0,25	0,1
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4,91-5,33	5,76-8,33		Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	0,2	0,45
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.91-5.33	5.76-8.33		Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,50	11,25
Kepemimpinan dalam Megabiodiversitas dan Eco-culture	Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan	n.a	95.25	Kepemimpinan (CoE) P2BIT	Indeks Investasi daerah (ekonomi kreatif)	n.a	90.00
	Kinerja Eco-culture Papua Selatan	n.a	95,22		Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP)	n.a	95.55
Kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,43*	0,55*	Kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	n.a	85.20
Intensitas dan Penurunan Emisi GRK menuju Net	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59,00*	99,45*	Intensitas dan Penurunan Emisi GRK menuju Net	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	35,28	0.10

Zero Emission (NZE)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,63*	86,92*	Zero Emission (NZE)			
----------------------------	----------------------------------	--------	--------	---------------------	--	--	--

Adapun sasaran visi RPJPD Kabupaten Asmat yang telah diselaraskan dengan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut

No	RPJPD TAHUN 2025-2045				RPJPD KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025-2045			
	Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan				""Asmat Sebagai "Center Of Excellence (CoE) Peradaban Pelestarian Budaya Indonesia Timur " CoE P2BIT"			
	Sasaran Visi	Indikator	2025	2045	Sasaran Visi	Indikator	2025	2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI Per Kapita (US\$)	5,5	30,3	Pendapatan PDRB	PDRB per kapita (Rp Juta)	1.934	5.485
		Kontribusi PDB Maritim (%)	7.6	15	Per Kapita	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	n/a	n/a
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20.8	28		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41.25	71.25
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	25.54	5,02
		Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Rasio Gini (indeks)	0,25	0,10
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5-2022	28.5		Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	0,20	0,45
						Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,50	11.25
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index (peringkat)</i>	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan (CoE) P2BIT	Indeks Investasi daerah (ekonomi kreatif)	n.a	90.00
						Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP)	n.a	95.55
4	Daya saing sumber daya	Indeks Modal	0,54-2022	0.73	Kesejahteraan dan kualitas sumber daya	Indeks Modal Manusia (indeks)	n.a	85.20

	manusia meningkat	Manusia (indeks)			manusia Meningkat			
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38.6	93.5	Intensitas dan Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission (NZE)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	35,28	0.10

Sumber: Hasil olah RPJPD, 2023

Tabel 4. 3. Penyelarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

KELOMPK AGENDA MISI	RPJPN 2025-2045
	AGENDA/MISI
Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial
	Transformasi Ekonomi
	Transformasi Tata Kelola
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, Dan Kepemimpinan Indonesia
	Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi
Kerangka Implematasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan
	Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan
	Kesinambungan Pembangunan

Tabel 4. 4. Penyelarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat dan RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045

RPJPD PAPUA SELATAN 2025-2045				RPJPD KABUPATEN ASMAT 2025-2045	
No	Kelompok Agenda/Misi	Kelompok Agenda/Misi	No	Agenda/Misi	Agenda/Misi Kabupaten Asmat
1	Transformasi Papua Selatan	Mewujudkan Transformasi sosial, ekonomi serta tata kelola Papua Selatan melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan OAP dan Non OAP serta pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi	1	Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP.	Mewujudkan Transformasi social melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas
			2	Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.	Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing.
			3	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.	Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan professional dan keamanan wilayah

2	Landasan Transformasi Papua Selatan	Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, makmur berbasis kearifan budaya Ha-anim	4	Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan	Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing dan berkelanjutan
			5	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Ha-anim di Papua Selatan	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal People Center
3	Kerangka Implementasi Transformasi Papua Selatan	Kerangka Implementasi transformasi melalui peningkatan kapasitas pemerintahan dan mewujudkan pembangunan sarana prasarana pemerataan pembangunan, keadilan untuk masyarakat serta kesimbangan pembangunan	6	Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta mengentaskan kemiskinan di Papua Selatan khususnya kemiskinan OAP	Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan

			7	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, ketahanan energi, air, pangan serta konektivitas antar daerah, wilayah dan daerah tertinggal, terluar, terdepan yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Mewujudkan infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas
			8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan Papua Selatan.	Mewujudkan kesinambungan Pembangunan Kabupaten Asmat

4.5.3. Keterkaitan Visi Misi RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 dengan RIPPP

Visi-Misi RIPPP 2022-2041		Visi-Misi RPJPD Kab. Asmat 2025-2045	
"Terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera".		"Asmat Sebagai "Center Of Excellence (CoE) Peradaban Pelestarian Budaya Indonesia Timur" CoE P2BIT	
Misi 1	Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat , dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting	Misi 1	Mewujudkan Transformasi social melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas
		Misi 2	Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya
Misi 2	Pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas , dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh	Misi 1	Mewujudkan Transformasi social melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas
		Misi 3	Mewujudkan infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas

	penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).		
Misi 2	Pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas , dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).	Misi 1	Mewujudkan Transformasi social melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas
		Misi 2	Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya
Misi 3	meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif , dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi	Misi 6	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP) Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan
		Misi 3	Mewujudkan infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas
		Misi 4	Mewujudkan perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing dan berkelanjutan
		Misi 7	Mewujudkan kesinambungan Pembangunan dan Kerjasama wilayah antar daerah, nasional dan internasional Kabupaten Asmat
		Misi 5	Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan professional dan keamanan Wilayah

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Jangka Panjang Kabupaten Asmat mempedomani dan memperhatikan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Selatan, dimana Kabupaten Asmat merupakan bagian integral yang menjadi kontributor dalam pencapaian tujuan Sasaran dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Selatan dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Skenario perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok di petakan dari data dan informasi hasil penelahaan Visi Misi yang diperoleh dari data dan informasi hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Asmat, forum kick off, forum data dan Forum konsultasi publik, yang di bahas bersama pelaku pembangunan di Kabupaten Asmat, serta memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarna Menuju Indonesia Emas RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan melakukan telaah terhadap Arah Kebijakan nasional (RPJPN), memperhatikan Isu Strategis pembangunan, dimana terdapat 17 arah kebijakan yang di pedomaani sebagai tahapan Pembangunan Panjang Daerah Kabupaten Asmat, dimana dalam rangka mewujudkan 8 Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Asmat terdapat 17 Arah Kebijakan selaras dengan agenda arah kebijakan nasional, sebagai berikut:

No	RPJPN 2025-2045		No	RPJPD PAPUA SELATAN 2025-2045			KETERANGAN PENYESUAIAN
	Transformasi	Arah Pembangunan		Transformasi / Arah Kebijakan	SASARAN POKOK	Arah Pembangunan	
1	Transformasi Sosial	IE1 Kesehatan untuk Semua	1	Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP.	1.1 Terwujudnya Papua Selatan Sehat	IE1 Kesehatan untuk Semua	
		IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata			1.2 Terwujudnya Papua Selatan Cerdas	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	
		IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif			1.3 Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi OAP dan Non OAP.	IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	
2	Transformasi Ekonomi	IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	2	Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui	2.1 Terwujudnya Papua Selatan Produktif melalui Pertumbuhan	IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	

		IE5 Penerapan Ekonomi Hijau		peningkatan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.	Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal yang ditopang dengan penerapan IPTEK dan Inovasi	IE5 Penerapan Ekonomi Hijau	
		IE6 Transformasi Digital				IE6 Transformasi Digital	
		IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			2.2 Terwujudnya pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berimbang	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik	
		IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
3	Transformasi Tata Kelola	IE9 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	3	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.	3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan Papua Selatan	IE9 Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima	

3	Transformasi Tata Kelola	IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	3	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.	3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan Papua Selatan	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima	
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	4	Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas	4. Terwujudnya stabilitas ekonomi makro, kondusivitas wilayah, dan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan di Papua Selatan	IE10	Kondusivitas wilayah yang berbasis harmonisasi keragaman masyarakat	Disesuaikan pernyataan nya sesuai dengan nomenklatur kewenangan yang relevan di daerah

		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro		wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	
		IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				IE12	Keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan	
									Penyesuaian IE menjadi konteks keunggulan biodiversitas dan eco-culture yang menjadi kekhususan pembangunan di Papua Selatan

5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE1 3	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	5	Kerangka Implementasi transformasi melalui peningkatan kapasitas pemerintahan dan mewujudkan pembangunan sarana prasarana, konektivitas, pemerataan pembangunan, keadilan untuk masyarakat serta kesinambungan pembangunan	5. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya dan Ekologi dalam keluarga, komunitas dan masyarakat Papua Selatan berdasar kearifan budaya Ha-anim	IE1 3	Beragama Maslahat, Ketahanan Sosial dan Budaya berdasar kearifan budaya Ha-anim	
		IE1 4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				IE1 4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
		IE1 5	Lingkungan Hidup Berkualitas				IE1 5	Lingkungan Hidup Berkualitas	
		IE1 6	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			6.1 Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial, ekonomi dan pelayanan publik, konektivitas,	IE1 6	Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan	menambahkan infrastruktur konektivitas sebagaimana

						secara berkelanjutan yang sejalan dengan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola			kebutuhan daerah dan arahan RPPPP
		IE1 7	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			6.2 Terwujudnya pembangunan yang berketahanan iklim secara berkesinambungan	IE1 7	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Tabel 5. 1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Transformasi Sosial

AGENDA MISI/ TRANSFORMASI			ARAH KEBIJAKAN		TAHAPAN			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Misi 1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi social melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	V	V	V	V
			2	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP serta telemedicine, dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau.	V	V	V	V
			3	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.	V	V	V	V
			4	Percepatan penurunan stunting terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal	V	V	V	V
			5	Percepatan eliminasi malaria.	V	V	V	V

			6	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses dan perbatasan.	v	v	v	v
			7	Pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	v	v	v	v
			8	Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata di semua wilayah, termasuk jaringan internet, listrik dan sarana prasarana penanganan limbah medis.	v	v	v	v
			9	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui sekolah alam dan sekolah berpola asrama.	v	v	v	v
			10	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	v	v	v	v
			11	Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta Perguruan Tinggi (<i>STEAM</i> yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang pertanian dan perkebunan).	v	v	v	v
			12	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka	v	v	v	v

			13	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	v	v	v	v
			14	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, dan perkebunan, serta keterkaitan dengan DUDI.	v	v	v	v
			15	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	v	v	v	v
			16	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif.	v	v	v	v
			17	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	v	v	v	v
			18	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran	v	v	v	v

			19	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	v	v	v	v
			20	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	v	v	v	v
			21	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas	v	v	v	v
			22	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T	v	v	v	v

Tabel 5. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Transformasi Ekonomi

AGENDA MISI/ TRANSFORMASI			ARAH KEBIJAKAN		TAHAPAN			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis Budaya pelestarian wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya	1	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan), perkebunan dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan pedesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan pedesaan & perkotaan.	v	v	v	v
			2	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	v	v	v	v
			3	Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	v	v	v	v
			4	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.		v	v	v
			5	Pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara melalui peningkatan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda; yaitu : pada peningkatan industrialisasi koperasi melalui komoditas unggulan daerah, penguatan bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi.			v	v
Misi 4		Mewujudkan perekonomian yang unggul, berbasis Budaya pelestarian wisata sesuai Karakteristik Lokal,						

		berdaya saing dan berkelanjutan	6	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	v	v	v	v
			7	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik dan Australia.			v	v
			8	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan	v	v	v	v
			9	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital		v	v	v
			10	Pengembangan pariwisata lokal berbasis alam (ekowisata dan agrowisata) yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat			v	v
			11	Pengembangan ekonomi kreatif.	v	v	v	v
			12	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	v	v	v	v
			13	Peningkatan produktivitas BUMD.		v	v	v

			14	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil isolated mini/micro-grid untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	v	v	v	v
--	--	--	----	--	---	---	---	---

			15	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital		V	V	V
--	--	--	----	---	--	---	---	---

Tabel 5. 3. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Transformasi Tata Kelola

AGENDA MISI / TRANSFORMASI			ARAH KEBIJAKAN		TAHAPAN			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 5	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui	1	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses pra regulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya pertanian dan perkebunan.	V	V	V	V

		penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan professional dan keamanan Wilayah	2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	v	v	v	v
			3	Penguatan Integritas Partai Politik	v	v	v	v
			4	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat		v	v	v
			5	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamarawanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	v	v	v	v
			6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	v	v	v	v
			7	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	v	v	v	v
			8	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung		v	v	v
			9	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	v	v	v	v
			10	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran	v	v	v	v

Tabel 5. 4. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Kemanan daerah tangguh demokrasi

AGENDA MISI / TRANSFORMASI		ARAH KEBIJAKAN		TAHAPAN			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 5	Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional dan keamanan Wilayah	1	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama dan masyarakat	V	V	V	V
		2	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial	V	V	V	V

Tabel 5. 5. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

AGENDA MISI / TRANSFORMASI		ARAH KEBIJAKAN		TAHAPAN			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 7	Mewujudkan kesinambungan Pembangunan dan Kerjsama wilayah antar daerah, nasional dan internasional Kabupaten Asmat	1	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan,	V	V	V	V

			optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional				
		2	Penguatan pengendalian inflasi daerah	v	v	v	v

Tabel 5. 6. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

AGENDA MISI / TRANSFORMASI		ARAH KEBIJAKAN		TAHAPAN			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 6	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP) Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan	1	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	v	v	v	v
		2	Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	v	v	v	v
		3	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.	v	v	v	v
		4	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	v	v	v	v

		5	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif	v	v	v	v
		6	Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam	v	v	v	v
		7	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi	v	v	v	v
		8	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat.	v	v	v	v
		9	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama	v	v	v	v
		10	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	v	v	v	v

		11	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	v	v	v	v
		12	Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat	v	v	v	v
		13	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	v	v	v	v
		14	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.		v	v	v
		15	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.		v	v	v
		16	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.		v	v	v
		17	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir			v	v

Tabel 5. 7. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Implementasi Transformasi

AGENDA MISI / TRANSFORMASI		ARAH KEBIJAKAN		TAHAPAN			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 4	Mewujudkan perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal,	1	Penguatan kapasitas dan kelembagaan kepala daerah untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	v	v	v	v
		2	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	v	v	v	v

	berdaya saing dan berkelanjutan	3	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	v	v	v	v
		4	Penguatan kerja sama antar daerah, nasional dan internasional dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.	v	v	v	v
		5	Penuntasan RDTR kab/kota.	v	v	v	v
		6	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	v	v	v	v
Misi 5	Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional dan keamanan Wilayah	7	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	v	v	v	v
		8	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	v	v	v	v
		9	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi	v	v	v	v
		10	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional	v	v	v	v
		11	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	v	v	v	v
		12	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.	v	v	v	v

Tabel 5. 8. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat agenda Implementasi Transformasi

AGENDA MISI / TRANSFORMASI		ARAH KEBIJAKAN		TAHAPAN			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 3	Mewujudkan infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas	1	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah dikabupaten Asmat melalui pengembangan bandara, pembangunan dan standardisasi airstrip, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah		V	V	V
		2	Percepatan penyelesaian jalan antar distrik, jalan Trans nebuju Provinsi serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah	V	V	V	V
		3	Pengembangan kawasan kabupaten konsep perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	V	V	V	V
		4	Pengembangan transportasi termasuk sistem angkutan yang handal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.		V	V	V
		5	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat.		V	V	V
		6	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum	V	V	V	V
		7	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	V	V	V	V

		8	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.	v	v	v	v
		9	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah		v	v	v
		10	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal	v	v	v	v
		11	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	v	v	v	v
		12	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah afirmasi	v	v	v	v
		13	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.		v	v	v
		14	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.		v	v	v
		15	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	v	v	v	v

5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat

Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Asmat dirumuskan berdasarkan penyesuaian antara pemetaan arah kebijakan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan dan telaahan arah kebijakan pembangunan nasional dan indikator Utama Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator sasaran visi Pembangunan Daerah Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 9. Pemetaan arah kebijakan dan sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045			No IE	RPJPD KABUPATEN ASMAT 2025-2045							SASARAN POKOK		
	Arah Pembangunan / Indikator Utama	Target			No	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Target							
		2025	2045				2025	2030	2035	2040	2045			
TRANSFORMASI SOSIAL				Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas										
IE1	Kesehatan untuk Semua				IE1	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas (OAP dan Non OAP)						Terwujudnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas (OAP dan Non OAP)		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74.4	80	IE1.1	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	50,48	65,75	70,38	76,89	80,48			
2	Kesehatan Ibu dan Anak				2	Kesehatan Ibu dan Anak:								
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	IE1.2	a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	129	104	79	54	29			

b.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13.5	5	IE1.3	b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	46.5	36.5	26.5	17.5	12.5	
3	Insidensi Tuberkolis (per 100.000 penduduk)	274	76		3	Penanganan Tuberkulosis dan Malaria:						
				IE1.4	a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	93	97	100	100	100	
				IE1.5	b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	95	99	100	100	100	
				IE1.6	c.	Cakupan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	80.2 2	75.2 5	60.1 2	40.2 2	20.15	

4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99.5	IE1.7	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata				IE2	Pemenuhan Layanan dan jaminan Pendidikan yang berkualitas, merata untuk OAP dan Non OAP						Terwujudnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas
5	Hasil pembelajaran				5	Hasil Pembelajaran:						
a.	Rata-rata nilai PISA				a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	i) Membaca	396	485	IE2.1		i) Literasi Membaca (Kab/kota)	9,00-11,05	26,22-28,25	34,22-36,20	44,50-46,88	67.66-70,66	

	ii) Matematika	404	490	IE2.2		ii) Numerasi (kab/kota)	0,00-10.2 2	10,2 5- 12,6 5	20,5 5- 22,3 5	40,4 5- 42,2 5	61.40- 64.502	
	iii) Sains	416	487		b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
				IE2.3		i) Literasi Membaca (Provinsi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				IE2.4		ii) Numerasi (Provinsi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9.46	12	IE2.5	c.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	6.88	7.13	7.38	7.63	7.88	
c.	Harapan lama sekolah	13.37	14.81	IE2.6	d.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	6.88	7.13	7.38	7.63	7.88	

6	Angka partisipasi kasar (APK)	33.94	60	IE2.7	6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
	Pendidikan tinggi (%)					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan Tinggi (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61.87	75	IE2.8	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	58.47	55,2	62,45	64,36	76.10	
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif				IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif						Terwujudnya Perlindungan

8	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	IE3.1	8	Tingkat kemiskinan (%)	25,54	20,44	15,31	10,06	5,02	Sosial yang Adaptif
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial	44.1	99.5		9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	n/a	25.55	35.22	45.50	50.20	
10	ketenagakerjaan (%) Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	60	IE3.3	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	17	19	23	26	30	
				IE3.6		Indeks Modal Manusia	n. a	n. a	n. a	n. a	n. a	
	TRANSFORMASI EKONOMI			Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya								Terwujudnya perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11	Rasio PDB industry pengolahan (%)	20.8	28	IE4.1	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2.12	3.40	4.212	5.22	6.00	

12	Pengembangan Pariwisata				12	Pengembangan Pariwisata						sesuai Karakteristik Lokal, berdaya
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4.5	8	IE4.2	a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,95	0,98	1,20	1,45	1,61	
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	18	100	IE4.3	b.	Jumlah Wisatawan Berbintang) orang) *	10,12	17,35	20,45	23,70	45.20	
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7.9	110	IE4.4	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	n/a	56,6	73,6	87.6	95.67	
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	n/a	50,6	63,6	75.6	85.6	
a.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3	5	IE4.5	a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				IE4.8	b.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

						Pertanian Level Provinsi (%)						
b.	Rasio kewirausahaan (%)	2,9(Aug 2022)	8	IE4.9	c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	n/a	1.20	2,88	3.11	5,23	
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1-2021	10	IE4.10	d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	n/a	2205	3,25	5,33	7.12	
d.	<i>Return of Asset</i> (ROA) BUMN (%)	3.4	5.6	IE4.11	e.	<i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	n/a	0,70	1,56	2,30	3,22	
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5	4	IE4.12	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	n/a	8,41	5,79	2,96	0,78	
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	55.4	70	IE4.14	16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	77,6	77,10	75,10	80,22	82,5	
17	Tingkat penguasaan IPTEK				17	Tingkat penguasaan IPTEK						

a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28	2,2-2,3	IE4.15	a.	iptek dan inovasi (% PDRB Pertanian)	n.a	3	5	7	13	
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	75-2022	30 besar	IE4.16	b.	Indeks Investasi daerah (ekonomi kreatif)	n.a	55,25	60,25	80,23	90,00	
					c.	Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP)	n/a	55.44	62.22	85.12	95.55	
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			IE5	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau						Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau				18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70.8	90.65	IE5.1	a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	75-80	81-85	85-87,61	88-87	90,50	
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	IE5.2	b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	25,20	29.12	30.22	47.12	57,20	
IE6	Transformasi Digital			IE6	IE6	Transformasi Digital						Transformasi Digital

19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	IE6.	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	4	5	6	7	
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			IE7	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik						Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik
20	Biaya logistic (% PDB)	16,9-2019	9	IE7.1	21	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	n. a	n. a	n. a	n. a	n. a	
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29.8	27.2	IE7.2	22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	52,5	50,2	45,15	42,22	38,15	
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26	40	IE7.3	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	n. a	n. a	n. a	n. a	n. a	
				Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan								
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta

23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan				23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan						pengentasan kemiskinan
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44.58	48.92	IE8.1	a.	Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	IE8.2	b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
c.	Persentase Desa Mandiri (%)			IE8.3	c.	Persentase Desa Mandiri (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				IE8.4	d.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
TRANSFORMASI TATA KELOLA				Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan professional								

IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif				IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif						Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional
24	Indeks materi hukum	0.25	0.49	IE9.1	24	Indeks Reformasi Birokrasi	25,4	35,55	47,12	50,55	60,4	
25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2.34	5	IE9.2	25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	1,22	1,74	2,87	4,35	5.20	
26	Indeks pelayanan publik	3.87	5	IE9.8	26	Indeks pelayanan publik	n/a	3,85	4,25	4,77	5	
27	Anti Korupsi				27	Anti Korupsi						
a.	Indeks integritas nasional	71,94-2022	96.98	IE9.13	a.	Indeks integritas nasional	58,7	56,25	65,33	70,22	75,50	
b.	Indeks persepsi korupsi	34	60	IE9.14	b.	Indeks persepsi korupsi	52	67	77	87	90.25	
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional dan kemanan wilayah								

IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial				IE10	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat						Terwujudnya kemandirian wilayah
28	Indeks pembangunan hukum	0,6-2021	0.84	IE10.1	28	Tingkat Keamanan wilayah	55,2	60,25	66,77	70,75	75,70	
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8-2020	80	IE10.4	29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	n/a	67,80	75,55	80,15	85.20	
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	IE10.5	30	Indeks demokrasi Indonesia	sedang	sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro				IE11	Stabilitas Ekonomi Makro						

31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12	18,0-20,0	IE11.1	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	n/a	0,2	0,2	0,3	0,3	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	IE11.2	32	Tingkat Inflasi (%)	2.00	2.00	1.88	1.50	1.30	
33	Pendalaman/In termediasi sektor keuangan				33	Pendalaman/Interm ediasi Sektor Keuangan						
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66.9	200	IE11.3	a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	11,65	17,50	24,15	36,42	37,33	
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	7.6	60	IE11.4	b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,4	0,60	0,75	0,85	1,20	
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9.1	20		c.	Nilai Transaksi Saham Per rovinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	n/a	46,25	66,25	86,25	100	
e.	Total kredit/PDB (%)	37.8	80-90	IE11.5	d.	Total Kredit/PDRB (%)	n/a	16,2	19,25	25,22	30,5	
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	IE11.6	33	Inklusi Keuangan (%)	n/a	80,45	85,45	90,25	95,12	
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karekteristik Lokal, berdaya								

IE12	Ketangguhan Diplomas dan Berdaya Gantar Kawasan				IE12	Kepemimpinan, kearifan lokal (CoE) P2BIT						Terwujudnya perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karekteristik Lokal, berdaya
35	Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	60,4-2023	75,0-80,0	IE12.1	35 a.	Indeks Investasi daerah (ekonomi kreatif)	n.a	55,25	60,25	80,23	90,00	
					b.	Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP)	n/a	55.44	62.22	85.12	95.55	
36	Asia Power Index (Military Capability)	14,16-2023	45	IE12.2	36	Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP)	n/a	35.20	20.10	15.10	5.25	
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP)								
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						Terwujudnya budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal

37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68.15	IE13.1	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n/a	65.50	78.45	85.25	95.88	People Center Development (OAP)
38	Indeks Kerukunan Umat (IKUB)	75,19*	84.2	IE13.2	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	n/a	82,20	87,20	92,25	97,15	
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif						Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49-2022	80	IE14.1	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				IE14.3	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas				IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas						Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35-2020	0.7	IE15.1	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	n/a	0,50	0,6	0,67	0,70	
42	Kualitas Lingkungan Hidup				42	Kualitas Lingkungan Hidup						
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42-2022	76.12	IE15.2	a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	n/a	30%	30%	30%	30%	
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12.5	70	IE15.3	b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	n/a	25,00	30,00	35,00	40,00	
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	15	90		c.	Pengelolaan Sampah						
		(13% terdaur ulang)	(35% terdaur ulang)	IE15.4		i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	n/a	10,00	12,00	15,00	20,00	

						Pengolahan Sampah (%)						
				IE15.5		ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	47,5 2	50,0 0	55,0 0	60,0 0	70,00	
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				IE16	Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan						Terwujudnya infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas
43	Ketahanan energi, air, dan pangan				43	Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan						
a.	Ketahanan Energi				a.	Ketahanan Energi						
	i) Indeks ketahanan energi	6.61	8.24	IE16.1		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	29.1 0	31.2 5	33.7 5	35.4 5	37.62	

				IE16.2		ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	na	85	80	75	65	
b.	Prevalensi ketidak cukupan pangan (%)	6.2	2.1		b.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	na	29,20	22,40	15,7	12,4	
c.	Ketahanan air				c.	Ketahanan Air						
	i) Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	63.45	200	IE16.6		i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	na	0,75	0,8	1,0	1,2	
	ii) Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39	100	IE16.7		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	n.a	20,00	22,00	25,00	30,00	
					d.	Transportasi						
				IE16.9		i) Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	22,00	25,00	30,00	45,00	50,00	

				IE16.1 0		ii) Cakupan wilayah (kampung) yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	n/a	27,2 4	40,5 2	55,1 2	62,15	
				IE16.1 1		iii) Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantap	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				IE16.1 2		iv) Persentase Bandara dalam kondisi mantap	n/a	50.3 3	55.2 5	60.7 2	65.55	
					e.	Cakupan wilayah yang memiliki akses telekomunikasi						
				IE16.1 3		i) Cakupan wilayah (kampung) dengan akses jaringan telepon/ seluler (%)	47,2	50.2 2	57,3 6	620, 45	67,5,2	
				IE16.1 4		ii) Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet (%)	n.a	52,2	58,6 3	67,7 7	75,62	

IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						Terwujudnya infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0.14	0.11	IE17.1	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	125,15	113.30-110.55	109.35	100.20	88,55 - 85,25	
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
a.	Kumulatif	28.12	51.51	IE17.3	a.	Kumulatif	25,15	29,33	33,50	44,27	56,55	
b.	Tahunan	32.65	80.89	IE17.4	b.	Tahunan	40,01	55,22	63,15	82,66	98,34	

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Provinsi Papua Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025-2045.

6.1. Prinsip Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Asmat secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumberdaya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan pembagian peran secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025-2045 mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045, khususnya Rancangan teknokratik RPJMD Perodesasi Tahun 2025-2029
2. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.

3. Dalam rangka pengendalian Manajemen Resiko Pembangunan yang kontinyu dan partisipatif melalui pemanfaatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dilakukan dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko Pembangunan Nasional.

6.2 Pedoman Transisi

1. Menjadi acuan Penguatan Visi, Misi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025-2045 mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045, khususnya Rancangan teknokratik RPJMD Perodesasi Tahun 2025-2029
2. Menjadi acuan untuk menjaga kondisi kesinambungan pembangunan, dimana dalam hal terjadi masa berakhir RPJMD maka RPJPD ini dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun berkenaan, dengan memperhatikan pada sasaran pokok dan arah kebijakan dokumen perencanaan Provinsi Papua Selatan dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.